

PEMAHAMAN KONSEP LITERASI GENDER

Prof. Dr. Yoce Aliah Darma, M.Pd

Dr. Sri Astuti, M.Pd



Tasikmalaya:
Langgam Pustaka

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 2:

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarakan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud dalam Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perpustakaan Nasional RI

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Aliah Darma, Yoce & Sri Astuti/Pemahaman Konsep Literasi Gender

Tasikmalaya: Langgam Pustaka

PEMAHAMAN KONSEP LITERASI GENDER

Kajian Penelitian

© Prof. Dr. Yoce Aliah Darma, M.Pd & Dr. Sri Astuti, M.Pd

Editor: Budi Riswandi, M.Pd.

Tata Letak: Wildan Ramdani

Pemeriksa Ejaan: Indra Rahayu

Desain Sampul: Mufidz At-thoriq S.

Cetakan Pertama, Agustus 2021

xii + 371., 14.8 x 21 cm

ISBN 978-623-7461-87-6

Diterbitkan oleh **LANGGAM PUSTAKA**

Perum Bukit Indihiang Permai Blok C2, Cirapih, Indihiang, Tasikmalaya.

Laman: www.langgampustaka.com

Email: apresiasikaryaakasia@gmail.com

Kontak: 0821-2742-4881

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

All rights reserved.

KATA PENGANTAR PENULIS

Segala puji dan syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin-Nyalah kami dapat menyelesaikan buku yang berjudul "Buku Literasi Gender". Buku ini disusun sebagai realisasi dari proyek Penyusunan Kurikulum Terintegrasi Gender di Perguruan Tinggi, yang merupakan program kerja sama antara Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPARI) pada bulan April 2016.

Kerja sama Penyusunan Kurikulum Terintegrasi Gender ini direspon oleh sivitas akademika Uhamka dengan antusias. Semua Stakeholder Uhamka, mulai dari Rektor, Wakil Rektor I, II, III, IV sampai dekan-dekan, para wakil dekan, ketua-ketua Prodi, sekretaris semua ikut berpartisipasi. Sungguh luar biasa respon mereka. Ternyata semua sivitas-akademika Uhamka sudah responsif gender, tidak usah diragukan lagi. Sebagai jawaban kami dalam kapasitas penyelenggara kerja sama dalam Penyusunan Kurikulum Terintegrasi Gender ini Sebagai kelanjutan dalam merespon penyusunan kurikulum terintegrasi gender ini, ingin merealisaskannya dengan penulisan sebuah buku tentang pemahaman gender.

Dengan bimbingan dan petunjuk Allah swt. kami berusaha membuat buku tentang Literasi Gender, yang isinya diusahakan berisi pemahaman, kupasan, dan pengembangan, tentang gender ditinjau dari sudut pandang ilmiah. Kami kupas secara sederhana dan dengan bahasa yang mudah dipahami tentang apa itu Literasi gender. Literasi gender dalam buku ini ingin memberikan tambahan wawasan kepada semua pembaca untuk mencerahkan pemaha-

man tentang gender dalam arti memahami seluk-beluk apa itu gender, apa yang disebut kesetaraan gender, keadilan gender, bias gender, pengarusutamaan gender dan lain-lain. Kami ingin buku ini menjadi pegangan para dosen yang mengampu mata kuliah tentang wawasan gender dan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini .

Akhir kata dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada para pembaca buku ini, untuk memberi kritik yang membangun dan memberi saran untuk perbaikan buku ini. Kritik dan saran dari pembaca tersebut akan kami terima dengan senang hati. Kami sebagai penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pembaca atas semua dukungannya, Selanjutnya tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik berupa moral maupun material agar terwujudnya buku ini. Semoga apa yang telah kami terima dari semua pihak, mudah-mudahan mendapat imbalan dari Allah Subhanahu-wataala dan menjadi amal baik bagi kita semua, amin yarobbil'alamin.

Jakarta, Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I LITERASI DAN GENDER	1
A. Pengertian Literasi.....	1
B. Definisi Literasi	2
C. Membangun Budaya Literasi.....	4
D. Literasi Sebagai Budaya Mencerdaskan Bangsa.....	8
E. Hubungan Literasi dan Bahasa.....	10
F. Literasi Gender.....	13
G. Literasi Perempuan Tentang Mitos	14
H. Literasi Gender Tentang Kisah Drama Kosmis	17
BAB II PERANAN GENDER DALAM PEMAHAMAN BUDAYA LITERASI UNTUK MENCERDASKAN ANAK BANGSA.....	19
A. Pendahuluan	19
B. Gender dan Pemahaman Literasi	19
C. Peranan Literasi Gender dalam Mencerdaskan Anak Bangsa.....	23
D. Peran Guru Di Lingkungan sekolah	24
E. Peran Orang Tua Di Lingkungan Rumah	26
F. Mengembangkan Stereotipe Nongender pada Anak	27
BAB III GENDER, PENDIDIKAN, DAN LITERASI	30
A. Pengertian Gender	30
B. Pendidikan dan Gender	31
C. Pendidikan Memandang Gender	33
D. Membangun Pendidikan Berperspektif Gender	34
E. Gender dan Pendidikan Literasi.....	34
F. Guru sebagai Pilar dalam Pendidikan Gender dan Literasi	37

G.	Peran Bahasa dalam Pendidikan yang peka Gender dan Literasi	37
H.	Kesetaraan Gender dan Peningkatan Pemahaman Literasi dalam Pendidikan	38
I.	Meningkatkan Pemahaman Hubungan Gender, Pendidikan, dan Literasi	39

BAB IV GERAKAN PEREMPUAN (FEMINISME) DAN PERKEMBANGANNYA.....	43	
A.	Pendahuluan.....	43
B.	Barat dan Perempuan	44
C.	Gerakan Perempuan (Woman Movement)	47
D.	Dasar Pemikiran Dan Isu-Isu Feminisme	50
E.	Gerakan Kesetaraan dan Kebebasan Feminisme	57
F.	Perempuan Islam dan Feminis.....	59

BAB V SEJARAH DAN PERKEMBANGAN GENDER	61	
A.	Pendahuluan.....	61
B.	Perkembangan Status dan Peranan Perempuan.....	62
C.	Munculnya Stereotype	63
D.	Munculnya Zaman Neolitikum atau Zaman Baru	64
E.	Pendapat Para Ahli Filsafat tentang Perempuan.....	66
F.	Bangkitnya Kaum Perempuan untuk Membela Kaumnya.....	67
G.	Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	71
H.	Gerakan Emansipasi di Indonesia	73
I.	Sejarah Pergerakan Nasional.....	73
J.	Perkembangan Konsepsi Gender.....	74
K.	Perbedaan Gender Melegitimasi Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan Gender	75
L.	Relasi Gender dalam Hubungan Internasional	77

BAB VI KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN (CEDAW)	80	
A.	Pendahuluan.....	80
B.	Sejarah dan Latar Belakang CEDAW (Sudut Hukum)	81
C.	Mengapa Indonesia Mensahkan/Meratifikasi Konvensi CEDAW	85

D. Makna Pengesahan/Ratifikasi Konvensi Internasional dengan Undang-Undang	86
E. Konsekuensi dari Ratifikasi Konvensi CEDAW	87
F. Konferensi Dunia Tentang Perempuan	89
BAB VII TEORI DAN PEMAHAMAN KONSEP GENDER	93
A. Pendahuluan	93
B. Teori Gender.....	94
C. Konsep Gender.....	102
D. Lebih Jelasnya Apa Itu gender?	104
BAB VIII STUDI GENDER DAN PERKEMBANGANNYA... 109	
A. Pendahuluan	109
B. Feminisme.....	110
C. Lahan Gerakan Feminisme adalah Sastra Feminisme	113
D. Profil Gender dan Identitas Gender.....	118
E. Peran Gender dan Relasi Gender	120
F. Budaya Etnis.....	123
G. Politik (Kebijakan Pemerintah)	124
H. Pemberdayaan Perempuan	127
I. Perempuan dan HAM.....	130
BAB IX ISU-ISU GENDER	132
A. Pendahuluan	132
B. Isu Gender di Era Global	132
C. Isu Diskriminasi Gender	134
D. Bentuk-Bentuk Diskriminasi Gender	136
E. Isu tentang Trafiking	140
F. Sosialisasi Ideologi Nilai Peran Gender.....	141
BAB X BIAS GENDER.....	144
A. Pendahuluan	144
B. Bias Gender.....	144
C. Ketimpangan atau Bias Gender	146
BAB XI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER..... 151	
A. Pendahuluan	151
B. Pengertian Status Sosial	152
C. Kesetaraan dan Keadilan Gender	152

D.	Pengertian Kesetaraan Gender.....	153
E.	Pengertian Keadilan gender	154
F.	Emansipasi dan Kesetaraan Gender.....	154
G.	Ketidakadilan Gender	157
BAB XII PENGARUSUTAMAAN GENDER		162
A.	Pendahuluan.....	162
B.	Konsep Dasar Pengarusutamaan Gender (PUG).....	164
C.	Pengarusutamaan Gender (PUG)	166
D.	Konsep PUG	170
E.	PUG dalam Perencanaan Pembangunan.....	171
F.	PUG dalam Pendidikan	172
G.	Hambatan-hambatan di Indonesia.....	173
H.	Lingkup Kegiatan dan Alur Kerja PUG	175
I.	PUG dalam Pemberdayaan perempuan	177
BAB XIII IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN.....		179
A.	Pendahuluan.....	179
B.	Sistem Pendidikan Nasional.....	180
C.	Pendidikan untuk Semua.....	183
D.	Kondisi Pendidikan Saat Ini	184
E.	Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan	186
F.	Implementasi Program Pengarusutamaan Gender	187
G.	Tujuan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan ..	189
BAB XIV UNITED NATION WOMEN SERTA KAITANNYA DENGAN CEDAW		191
A.	Pendahuluan.....	191
B.	Sejarah lahirnya <i>United Nation Women</i> (<i>UN Women</i>)	191
C.	Dukungan Program. <i>UN Women</i>	193
D.	Dasar Filosofi <i>UN Women</i>	194
E.	Perkembangan dan Kemajuan <i>UN Women</i>	195
F.	SDGs sebagai Agenda Pembangunan Gender	198
G.	Hak Asasi Manusia dan Perempuan	199
H.	Hari Perempuan Internasional.....	201
I.	Relasi gender	203

BAB XV MILLIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs).....	207
A. Pendahuluan	207
B. Pengertian MDGs.....	209
C. MDGS dan Pembangunan di Indonesia	210
D. Pengertian SDGs	212
E. Konsep SDGs.....	213
F. Tujuan SDGs.....	214
G. Prinsip SDG's	216
H. Perbandingan MDGs dan SGDs	216
I. Komitmen Indonesia mengenai MDGs dan SDGs.....	218
J. Target MDG Menuju SGDs di Indonesia	220
BAB XVI HE FOR SHE (DIA UNTUK DIA)	226
A. Pendahuluan	226
B. Pemahaman <i>HeForShe</i>	226
C. Sejarah <i>HeForShe</i>	227
D. Inisiatif DAMPAK 10x10x10	229
E. Wawancara <i>Facebook</i> dengan Emma Watson pada Hari Perempuan Internasional.....	231
F. ATM Chase Mendukung <i>HeForShe</i>	231
G. <i>HeForShe</i> di Media	232
H. Emma Watson: Kesetaraan Gender adalah Masalah Anda.....	233
I. Mengapa Perempuan Merasa Tidak Nyaman?	234
J. Kelangsungan Kampanye <i>HeForShe</i>	237
K. Wawancara <i>Facebook</i> pada Hari Perempuan Internasional dengan Emma Watson	238
L. Sepuluh Kutipan Wawancara Emma Watson di Kantor <i>Facebook</i>	238
BAB XVII GENDER DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN	242
A. Pendahuluan.	242
B. Problematika Gender dan Pendidikan	243
C. Paradigma Pendidikan	247

BAB XVIII INTEGRASI PENDIDIKAN BERWAWASAN GENDER	251
A. Pendahuluan.....	251
B. Keadilan Gender dalam Pendidikan	252
C. Komponen-Komponen Kurikulum	253
D. Metode dan Materi Pembelajaran Berwawasan Gender	258
E. Bahasa dalam Pendidikan yang Peka Gender	259
F. Usaha Mewujudkan Keadilan Gender	259
G. Meningkatkan Partisipasi Pendidikan,	262
H. Meningkatkan Kesadaran Umum dan Relevansi Pendidikan	262
I. Mengembangkan Manajemen Pendidikan sehingga Responsif Gender	263
J. Konsep Dasar Pendidikan Adil Gender	264
K. Pendidikan Adil untuk Anak	265
L. Harapan dalam Realisasi Pendidikan Anak.....	266
BAB XIX KURIKULUM BERWAWASAN GENDER	268
A. Pengertian Kurikulum Berwawasan Gender	268
B. Indikator Kurikulum Berwawasan Gender.....	269
C. Kurikulum Berwawasan Gender di Indonesia	270
D. Kesetaraan dalam Menuntut Pendidikan.....	271
E. Potensi Pendidikan untuk Perempuan	272
F. Peran Perempuan dalam Pendidikan.....	272
G. Kesetaraan Pendidikan Bagi Gender	273
H. Kerangka Kerja Kurikulum Berwawasan Gender	273
I. Prinsip Pembelajaran dalam Kurikulum Berwawasan Gender	277
BAB XX GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA MENUJU KESETARAAN GENDER DALAM SEJARAH REPUBLIK INDONESIA.....	280
A. Pendahuluan.....	280
BAB XXI PEREMPUAN DAN POLITIK	284
A. Pendahuluan.....	284
B. Isu Kesetaraan Gender	285
C. Pendidikan Politik	285

D. Politik dan Perempuan	287
E. Representasi Perempuan dalam Politik.....	289
F. Tantangan Perempuan.....	291
G. Perjuangan Kesetaraan dan Keadilan Gender	296
dalam Politik	296
BAB XXII PENDIDIKAN POLITIK	BAGI PEREMPUAN
INDONESIA	UNTUK MENINGKATKAN
KETERLIBATANNYA DALAM PEMILU	297
A. Pendahuluan	297
B. Perempuan Cerdas dan Berpolitik Sepanjang Sejarah Indonesia.....	299
C. Pengertian tentang Teori-teori Politik	300
D. Gerakan <i>New Age</i> Perempuan.....	301
E. Keterlibatan Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu	302
F. Meningkatkan Keterlibatan Perempuan dalam Pemilu ..	304
G. Rekomendasi Puskapol FISIP UI	305
H. Hak Perempuan dalam Pemilu	306
I. Hak Politik Perempuan dalam Pemilu	308
J. Pemenuhan Kuota Caleg Perempuan.....	309
K. Menghadirkan Caleg Perempuan yang berkualitas	310
L. Mengapa Keterlibatan Perempuan Minim.....	312
dalam Bidang Politik?	312
M. Peran Perempuan dalam Legislatif	313
DAFTAR PUSTAKA	316
INDEKS	328
GLOSARIUM	346
RIWAYAT HIDUP PENULIS	367

BAB I

LITERASI DAN GENDER

A. Pengertian Literasi

Secara sederhana, literasi berarti kemampuan membaca dan menulis atau melek aksara. Dalam konteks sekarang, literasi memiliki arti yang sangat luas. Literasi bisa berarti melek teknologi, politik, berpikiran kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Kirsch dan Jungeblut (1993) dalam bukunya yang berjudul *Literacy: Profile of America's Young Adult* mendefinisikan literasi kontemporer adalah kemampuan seorang dalam menggunakan informasi tertulis atau cetak untuk mengembangkan pengetahuan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Lebih jauh, seseorang baru bisa dikatakan literat jika ia sudah bisa memahami sesuatu karena membaca dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahaman bacaannya.

Saat ini, generasi literat mutlak dibutuhkan agar bangsa kita bisa bangkit dari keterpurukan bahkan bersaing dan hidup sejajar dengan bangsa lain. Wagner (2000) menegaskan bahwa tingkat literasi yang rendah berkaitan erat dengan tingginya tingkat *drop-out* sekolah, kemiskinan, dan pengangguran. Ketiga kriteria tersebut adalah sebagian dari indikator rendahnya indeks pembangunan manusia. Menciptakan generasi literat merupakan jembatan menuju masyarakat makmur yang kritis dan peduli. Masyarakat sebaiknya kritis terhadap segala informasi yang diterima sehingga tidak bereaksi secara emosional dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan literasi yang kondusif menciptakan generasi yang literat, mereka membutuhkan proses dan sarana yang kondusif. Lingkungan yang ideal bagi perkem-

bangun literasi anak harus menyinergikan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Keluarga sangat dominan dalam perkembangan literasi anak. Hasil riset menunjukkan bahwa umumnya anak mulai belajar membaca dan menulis dari orang tua di rumah. Mereka akan gemar membaca jika melihat orang tua atau anggota keluarga lain di rumah sering membaca buku, koran, atau majalah. Anak sebenarnya sudah bisa dirangsang untuk gemar membaca bahkan ketika masih dalam kandungan ibunya. Wanita hamil yang sering membacakan buku bagi janin yang sedang di kandungnya cenderung akan melahirkan anak yang kemudian gemar membaca.

Pendidikan anak usia dini yang semakin mendapat perhatian masyarakat hendaknya mampu meningkatkan minat baca anak. Kegiatan *reading aloud* atau membaca nyaring untuk anak hendaknya dilakukan sedini mungkin. Hal ini bisa mengganti kegiatan mendongeng sebelum tidur yang sudah menjadi tradisi orang tua di masyarakat kita sejak dulu. Seorang ibu juga bisa menumbuhkan kegemaran membaca anaknya dengan mengajak anak melakukan kegiatan yang melibatkan aktivitas membaca seperti membaca resep masakan, sering menulis pesan buat anak dan meminta balasan tertulis, serta meminta anak meminjam buku dari perpustakaan sekolah. Kegiatan ini adalah langkah awal peralihan dari budaya orasi melalui dongeng ke budaya membaca.

B. Definisi Literasi

Banyak pendapat tentang literasi. Dalam *7th Edition Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (2005:898) mengatakan bahwa literasi adalah kemampuan baca tulis. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, makna dari sebuah literasi pun berubah. *National literacy Act* (1991) menyatakan bahwa

literasi adalah kemampuan membaca dan menulis serta berbicara bahasa juga menyelesaikan masalah pada level kecakapan yang dibutuhkan untuk pekerjaan dan kegiatan sosial. Contohnya, literasi mengajarkan kita untuk membuat surat lamaran pekerjaan dan tanda pengenalan di masyarakat. O'Sullivan (1994:170) menyatakan bahwa literasi bukan dan tidak akan pernah menjadi atribut perseorangan atau ideologi yang malas, lebih sederhana untuk memperoleh kepribadian seseorang. Dengan kata lain, literasi berfungsi untuk membentuk kepribadian seseorang. Di abad ke-21 standar kelas dunia akan menuntut semua orang berliterasi tinggi, bernumerat, mempunyai kepercayaan diri untuk menjalankan perannya sebagai warga negara. Jadi, literasi digunakan sebagai tolok ukur untuk bersaing dengan negara-negara lainnya.

London Group (1996) mengemukakan bahwa multiliterasi merupakan cara untuk fokus dalam realitas tentang keanekaragaman lokal dan keterhubungan global. Di sini literasi berfungsi sebagai penghubung dengan negara-negara lain dalam berkomunikasi, berbahasa dsb. Literat menjadikan setiap hari perlu berpartisipasi dalam literat sosial untuk menggugah banyak bagian dari suatu tempat, lokasi dan kejadian yang memerlukan cetakan, visual, digital dan analogi media.

Pendidikan juga harus mempunyai prinsip yang berbasis literasi, di antaranya adalah:

1. Literasi adalah kecakapan hidup yang memungkinkan manusia berfungsi maksimal sebagai anggota masyarakat.
2. Literasi mencakup kemampuan reseptif dan produktif dalam upaya berwacana secara tulis maupun lisan.
3. Literasi adalah kemampuan memecahkan masalah. Mengajarkan siswa berpikir kritis dalam memecahkan masalah.

4. Literasi adalah refleksi penguasaan dan apresiasi budaya. Pendidikan mengajarkan pengetahuan yang dilandasi budaya.
5. Literasi adalah kegiatan refleksi. Pendidikan harus menyadari perbedaan aspek pengetahuan, merefleksikan pengetahuan ke dalam pengalamannya.
6. Literasi adalah hasil kolaborasi antara penulis dan pembaca.
7. Literasi adalah kegiatan melakukan interpretasi (mencari, menebak, dan membangun makna).

C. Membangun Budaya Literasi

Masyarakat memiliki keragaman budaya, budaya itu berasal dari kata *buddhi* yang berarti akal, budaya masyarakat yang ada, dibentuk karena kebiasaan (kecerdasan/akal) dan fasilitas alam yang tersedia sebagai sumber kehidupan. Budaya masyarakat merupakan beradaban turun temurun yang tidak lepas dari ilmu pengetahuan. Budaya itu adalah sebuah proses berfikir, yang dipengaruhi oleh agama (keyakinan hati), politik (aturan), bahasa (komunikasi), pakaian (perlindungan diri), bangunan (karya), seni (rasa). Budaya itu juga merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang dimiliki manusia.

Literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan menulis dan membaca, budaya literasi dimaksudkan untuk melakukan kebiasaan berfikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca, menulis yang pada akhirnya apa yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya. Membudayakan atau membiasakan untuk membaca, menulis itu perlu proses jika memang dalam suatu kelompok masyarakat kebiasaan tersebut memang belum ada atau belum terbentuk.

Ada beberapa cara untuk membentuk budaya literasi di antaranya (dekat, mudah, murah, senang, lanjut):

1. Pendekatan akses fasilitas baca (buku dan nonbuku).
2. Kemudahan akses mendapatkan bahan bacaan.
3. Murah/Tanpa biaya (gratis).
4. Menyenangkan dengan segala keramahan.
5. Keberlanjutan/kontinu/istiqomah.

Sebenarnya upaya itu tidak cukup hanya dengan lima langkah, karena ada penjabaran yang lebih detail. Tidak sekedar ketersediaan fasilitas saja tapi ada cara bagaimana menjalin hubungan antarmanusia sehingga hubungan tersebut akan memengaruhi bagaimana suatu kelompok masyarakat bisa menerima dengan baik apa yang akan menjadi tujuan kita melakukan gerakan literasi.

Hubungan antarmanusia itu bisa terjalin baik apabila ada komunikasi. Komunikasi dan cara pendekatan yang baik akan bisa menjadi syarat bisa diterimanya fasilitas yang sengaja disediakan buat masyarakat tersebut. Perlu belajar sejarah untuk memasukkan sebuah *“budaya baru”* kepada kelompok masyarakat. Dalam sejarah yang bisa kita pelajari adalah masuknya Islam di Indonesia, bagaimana seorang Wali mengajarkan Islam melalui budaya masyarakat. Contoh gamelan sebagai alat musik digunakan untuk syiar Islam, memasukkan ajaran-ajaran Islam melalui penciptaan lagu, penggunaan bedug adalah alat yang digunakan sebagai penanda waktu sholat. Selamatan juga merupakan cara untuk mengajarkan masyarakat memberikan sodakoh dalam bentuk makanan tapi dikemasnya dengan menggunakan budaya atau kebiasaan masyarakat yang selama ini biasa dilakukan oleh komunitas Hindu.

Yang perlu dilakukan dalam pengembangan budaya literasi melalui pendekatan kultural, adalah bagaimana seorang pustakawan yang merupakan garis depan dalam perjuangan pencerdasan masyarakat harus berbuat, misalnya ada beberapa hal yang perlu diingat di antaranya adalah:

1. Kenali budaya/ kebiasaan masyarakat lokal (tradisi/ kebiasaan).
2. Kenali tokoh masyarakat (yang memiliki pengaruh/ kepala suku/pemuka agama/kepala desa).
3. Kenali fasilitas yang ada di masyarakat, (fasilitas umum).
4. Kenali alam dan kondisi lingkungan (alam, geografis, lingkungan, potensi).
5. Kenali kearifan lokal: (petuah, aturan).

Kemudian lakukan pendekatan secara bertahap dengan berbagai cara di antaranya:

1. Sosialisasi, yaitu penyampaian niat dan kegiatan yang akan disediakan buat masyarakat, bagaimana cara mengakses buku, aturan dan kebijakan yang akan menyertai serta semua apa yang bisa dimanfaatkan masyarakat.
2. Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat secara aktif di setiap kegiatan, termasuk kemungkinan menjadi donatur bagi keberlangsungan Taman Belajar Masyarakat (TBM).
3. Silaturahmi: menjalin keakraban antar masyarakat dan tokoh masyarakat, tidak saja untuk sosialisasi tapi untuk keperluan lainnya, memahami karakter masyarakat, mendapatkan dana, dan mendapatkan dukungan, banyak yang bisa dilakukan saat silaturahmi.

Buatlah kerangka acuan dengan disertai target dan rencana program, dengan menyertakan masyarakat untuk membuatnya apa yang akan dicapai dengan fasilitas yang tersedia, untuk membudayakan baca dan tulis. Apa yang sudah dilakukan akan perlu ditinjau ulang untuk melihat tingkat keberhasilannya, dengan tujuan mengatur strategi pendekatan di kemudian hari untuk mencapai tujuan. Ingat jangan paksa masyarakat membaca jika itu belum menjadi budaya. Masuklah mengikuti budaya yang ada, perlahan tapi pasti "membiasakan membaca" akan mudah bagi masyarakat jika kita sudah mengenal budayanya, kita sudah mengenal tokoh

masyarakat, kita sertakan partisipasi masyarakat. Perlu keahlian khusus bagi pustakawan jika memang tujuan mencerdaskan masyarakat melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Masyarakat yang memiliki kearifan lokal sangat kuat, jarang memasukkan budaya membaca dalam lingkungan adatnya, yang ada adalah budaya lisan (tutur), contoh resep obat tradisional disampaikan secara lisan dan turun temurun, jarang ditemukan buku, tetapi dalam suatu temuan bahwa Negara Kertagama memiliki Kakawin (huruf Bali) yang ditulis tahun 1365 oleh Mpu Prapanca, dan ditemukan kembali pada tahun 1894 oleh J.L.A. Brandes, konon naskahnya ada di Perpusnas setelah diserahkan oleh Ratu Juliana sekitar tahun 1973, berisi sejarah kerajaan Majapahit. Masih banyak lagi naskah kuno, dari lontar, kulit kayu dan mungkin dinding batu. Dengan tidak "merasa" perlu akan Kakawin tersebut maka kakawin tersebut berada di Belanda, masih banyak sekali naskah Kuno milik Republik Indonesia yang sebagian berada di Belanda. Mengajarkan baca tulis (literasi) dalam suatu komunitas adat tentu dibutuhkan keahlian khusus, namun apa yang sudah dijelaskan di atas adalah landasan dasar. Jika sudah terbiasa membaca maka menulis juga akan menjadi lebih mudah, begitu juga menulis akan menjadi mudah jika dibekali oleh kebiasaan membaca. Membiasakan membaca perlu digalakkan mulai dari dalam kandungan sampai usia renta. Contoh yang sudah YPPI lakukan selama ini salah satunya di daerah Musi Banyuasin, masyarakat transmigrasi yang tidak terbiasa membaca, aktivitasnya di perkebunan karet dan sawit, maka pendekatan yang dilakukan adalah layanan ke kelompok pada sore hari, mengajak anak-anak bermain. Layanan ke sekolah menggunakan mobil perpustakaan untuk melakukan berbagai kegiatan, di antaranya memberikan fasilitas majalah dinding supaya imajinasi dan karya anak-anak bisa dipajang. Akhirnya dengan seringnya mobil perpustakaan keliling datang, terbentuklah kebiasaan membaca pada masyarakat tersebut,

bahkan ketika mobil berhalangan hadir maka masyarakat menanyakannya melalui SMS dan telp.

Di Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan berbagai aktivitas seperti membaca Gurindam 12, membuat pantun dan puisi, mengadakan bazar buku, memasak bersama di balai pertemuan, cara ini dilakukan untuk sosialisasi dan mengenalkan buku dengan berbagai aktivitas. Setelah melihat, memegang buku, baru kemudian masyarakat akhirnya terbiasa membaca. Tidak ada yang sulit, jika kita mau berupaya, dan tidak ada yang tidak bisa jika kita sudah mencobanya. Tantangan terberat saat ini adalah media visual yang merampas hati sebagian besar masyarakat untuk menikmatinya, tapi buku visual (e-book) menjadi lebih efisien dan semua itu tergantung pilihan masyarakat.

Membaca bagi sebagian masyarakat (komunitas) memiliki berbagai kendala dan kendalanya ini yang perlu ditangani secara bersama, jika tidak, maka kekuatan pribadi tidak akan mampu menjebol tembok pertahanan arus informasi yang mengglobal. Pemerintah, swasta, masyarakat, sekolah, aparat, dan kelompok jika bersama-sama maka akan menjadi kekuatan besar untuk menyadari pentingnya literasi bagi kemajuan dan kecerdasan masyarakat menuju Indonesia cerdas seutuhnya.

D. Literasi Sebagai Budaya Mencerdaskan Bangsa

Genre, wacana, literasi, teks, dan konteks, saat ini menjadi bahan perbincangan di kalangan guru. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan pada zamannya. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, kini literasi pada zaman sekarang literasi adalah praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik. Definisi baru dari literasi menunjukkan paradigma baru dalam upaya memaknai

literasi dan pembelajarannya. Kini ungkapan literasi memiliki banyak variasi, seperti literasi komputer, literasi virtual, literasi gender, literasi matematika, literasi IPA, dan lain sebagainya. Hakikat berliterasi secara kritis dalam masyarakat demokratis diringkas dalam lima verba: memahami, melibati, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasi teks.

Dalam perkembangannya literasi terus berevolusi, makna dan rujukannya semakin meluas dan kompleks. Sedangkan rujukan linguistik dan sastra relatif konstan. Literasi memiliki tujuh dimensi yang berurusan dengan penggunaan bahasa.

1. Dimensi geografis meliputi daerah lokal, nasional, regional, dan internasional. Literasi ini bergantung pada tingkat pendidikan dan jejaring sosial.
2. Dimensi bidang meliputi pendidikan, komunikasi, administrasi, hiburan, militer, dan lain sebagainya. Literasi ini mencirikan tingkat kualitas bangsa dibidang pendidikan, komunikasi, militer, dan lain sebagainya.
3. Dimensi ketrampilan meliputi membaca, menulis, menghitung, dan berbicara. Literasi ini bersifat individu dilihat dari tampaknya kegiatan membaca, menulis, berhitung, dan berbicara. Dalam tradisi orang Barat, ada tiga ketrampilan 3R yang lazim diutamakan seperti *reading*, *writing*, dan *arithmetic*.
4. Dimensi fungsi adalah literasi untuk memecahkan persoalan, mendapatkan pekerjaan, mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan, dan mengembangkan potensi diri.
5. Dimensi media, (teks, cetak, visual, digital) sesuai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, begitu juga teknologi dalam media literasi.
6. Dimensi jumlah, kemampuan ini tumbuh karena proses pendidikan yang berkualitas tinggi. Literasi ini seperti halnya kemampuan berkomunikasi bersifat relatif.

7. Dimensi bahasa, (etnis, lokal, internasional) literasi *singular* dan *plural*, hal ini yang menjadikan monolingual, bilingual, dan multilingual. Ketika seseorang menulis dan berliterasi dengan bahasa daerah, Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka ia disebut seseorang yang multilingual.

E. Hubungan Literasi dan Bahasa

Berbicara tentang literasi bahasa, termasuk literasi multilingual tentu erat kaitannya dengan pembelajaran bahasa asing. Pengajaran bahasa asing dalam metode dan pendekatannya ada lima kelompok besar,

1. Pendekatan struktural dengan *grammar translation methods*. Penggunaan bahasa tulis dan penggunaan tata bahasa. Kelemahan dari metode ini, pendekatan ini tidak menjamin siswa mampu menganalisis persoalan sosial, seperti bahasa iklan, dan lain sebagainya.
2. Pendekatan audiolingual atau dengar-ucap, metode ini menggunakan dialog-dialog saat berkomunikasi secara spontan. Kelemahan dari metode ini adalah kurangnya memberi ruang terhadap variasi ujaran sebagai fungsi-nya.
3. Pendekatan kognitif dan transformatif, metode ini berorientasi pada pembangkitan potensi berbahasa siswa sesuai kebutuhan lingkungannya.
4. Pendekatan kompetensi komunikasi, pengajaran bahasa ini menjadikan siswa mampu berkomunikasi dalam bahasa target, mulai dari komunikasi terbatas sampai komunikasi spontan atau alami.
5. Pendekatan literasi atau pendekatan *genre-based*, tujuan pembelajaran adalah menjadikan siswa mampu menghasilkan wacana yang sesuai konteks komunikasi.

Secara sederhana, literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis. Kita mengenalnya dengan melek aksara atau keberaksaraan. Namun sekarang ini literasi memiliki arti luas, sehingga keberaksaraan bukan lagi bermakna tunggal melainkan mengandung beragam arti (*multi literacies*). Ada bermacam-macam keberaksaraan atau literasi, misalnya literasi komputer (*computer literacy*), literasi media (*media literacy*), literasi teknologi (*technology literacy*), literasi ekonomi (*economy literacy*), literasi informasi (*information literacy*), literasi gender (*gender literacy*), bahkan ada literasi moral (*moral literacy*). Seorang dikatakan literat jika ia sudah bisa memahami sesuatu karena membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut.

Data dari *Association For the Educational Achievement (IAEA)*, mencatat bahwa pada 1992 Finlandia dan Jepang sudah termasuk negara dengan tingkat membaca tertinggi di dunia. Sementara itu, dari 30 negara, Indonesia masuk pada peringkat dua terbawah.

Secara Umum ada tiga kategori besar masyarakat Indonesia, yakni praliterasi, literasi dan posliterasi.

1. Masyarakat praliterasi yang hidup dalam tradisi lisan dan sulit mengakses media seperti buku, TV, internet dan lain-lain. Kalaupun mereka dapat mengakses tetapi tidak bisa mencernanya dengan mudah.
2. Masyarakat literasi yang memiliki akses terhadap buku, tidak berarti tradisi baca-tulis dapat tumbuh dengan subur di kalangan ini.
3. Masyarakat posliterasi yang memiliki akses buku dan teknologi informasi dan audio visual.

Perbandingannya dengan saat ini barangkali tidak berbeda jauh jika melihat indikator yang ada. Suatu tingkat literasi yang sangat ironis bila kita bercermin pada negara-negara tetangga di ASEAN yang sudah terlebih dulu bangkit dari keterpurukan peradaban.

Dalam *survey program for international students assessment* (PISA) tahun 1997, Indonesia pertama kali ikut serta dalam survey tentang budaya literasi, Indonesia menempati peringkat 40 dari 41 negara yang berpartisipasi. Selanjutnya pada tahun 2000 dalam survey yang sama Indonesia menempati peringkat 64 dari 65 negara partisipan. Survey tersebut sudah cukup menjelaskan kurangnya budaya literasi di Indonesia, bahkan kita kalah tingkat literasinya dengan negara-negara ASEAN yang lain sekalipun Vietnam, negara yang jauh lebih muda dibandingkan Indonesia. Karena itu, penguasaan literasi dalam segala aspek kehidupan memang menjadi tulang punggung kemajuan peradaban suatu bangsa. Tidak mungkin menjadi bangsa yang besar, apabila hanya mengandalkan budaya oral yang mewarnai pembelajaran di lembaga sekolah maupun perguruan tinggi. Namun disinyalir bahwa tingkat literasi khususnya di kalangan sekolah semakin tidak diminati, hal ini jangan sampai menunjukkan ketidakmampuan dalam mengelola sistem pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itulah sudah saatnya, budaya literasi harus lebih ditanamkan sejak usia dini agar anak bisa mengenal bahan bacaan dan menguasai dunia tulis-menulis.

Ada sepuluh gagasan kunci tentang literasi yang menunjukkan perubahan paradigma literasi sesuai dengan tantangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, yaitu ketertiban lembaga-lembaga sosial, tingkat kefasihan relatif, pengembangan potensi diri dan pengetahuan, standar dunia, warga masyarakat demokratis, keragaman lokal, hubungan global, kewarganegaraan yang efektif, bahasa ragam dunia, kemampuan berpikir kritis, dan masyarakat semiotik. Semiotik adalah ilmu tentang tanda, kode, struktur, dan komunikasi. Jadi, seseorang dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas membaca dan menulisnya dan mampu menemukan suatu makna dalam teks yang disaring melalui sebuah konteks.

Dalam pendidikan bahasa yang baik seyogianya dilaksanakan dengan mengikuti tujuh prinsip sebagai berikut:

1. Literasi adalah kecakapan hidup yang memungkinkan manusia berfungsi maksimal sebagai anggota masyarakat.
2. Literasi mencakup kemampuan reseptif dan produktif dalam upaya berwacana secara tertulis maupun lisan.
3. Literasi adalah kemampuan memecahkan masalah.
4. Literasi adalah refleksi penguasaan dan apresiasi budaya.
5. Literasi adalah kegiatan refleksi (diri).
6. Literasi adalah hasil kolaborasi. Baca-tulis selalu melibatkan kolaborasi antara dua pihak yang berkomunikasi, sudah dijelaskan pula bahwa baca-tulis adalah kegiatan yang tak terpisahkan.
7. Literasi adalah kegiatan untuk melakukan interpretasi atau penafsiran. Seperti halnya para penafsir Al-Qur'an yang begitu beragam latar belakangnya, baik dari tafsir Maroghi, tafsir Jalalain, tafsir Munir, dan lain sebagainya. Semua para Masyayikh ini melakukan penginterpretasian secara khusus merujuk pada latar belakang pendidikannya.

Jadi, rekayasa literasi adalah suatu cara menuju pada suatu perubahan dan peningkatan literasi anak bangsa dengan metode dan teknik pengajaran literasi yang mencerdaskan, dan dalam memahami bahasa (baca-tulis) dibutuhkan yang namanya keterampilan dimulai dari bahasa ibu, Bahasa Indonesia, dan bahasa asing.

F. Literasi Gender

Literasi gender adalah melek gender, dalam arti memahami seluk beluk mengenai kegenderan Literasi gender membahas tentang status perempuan dari justifikasi negatif

yang diproduksi oleh kultur sosial, merekonstruksi realitas perspektif gender dan melakukan dekonstruksi terhadap diskursus mapan tentang perempuan.

Wacana perempuan sebagai sebuah bentuk praktik sosial yang menyiratkan hubungan dialektik antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi sosial yang mewadahinya, perlu dicari efek ideologis yang sering kali tidak jelas dan tersembunyi. Sebagai contoh:

1. Kisah Drama Kosmis muncul dari ideologi penafsiran Al-Qur'an yang bersifat justifikatif-realistik. Hal ini akibat dari kegagapan penafsir (pada saat itu), misalnya dalam menjelaskan peristiwa menstruasi dari sudut pandang saintifik.
2. Praktik berhijab pada perempuan ter dorong oleh wacana ideologis, motif kultural-sosiologis, dan rentan dengan penyusupan agenda-agenda kapitalisme global.
3. Mitos "cantik" bagi perempuan hanyalah citra tubuh yang dipersepsikan oleh lingkungan sekitar, di antaranya: a) Kaum perempuan hendaknya terus melakukan gerakan literasi, mengkaji secara elaboratif terminologi tafsir tendensius yang dilahirkan dari wacana dominan. b) Perempuan seyogyanya berhati-hati ketika memutuskan berhijab. Jangan sampai laku mulia ini tercemari kepentingan oportunistik agen kapitalis yang ingin meluaskan lahan bisnis dan komoditinya. c) Perempuan sebaiknya tidak larut oleh wacana citra "cantik" yang bersifat simbolik (fisik).

G. Literasi Perempuan Tentang Mitos

Takdir menjadi perempuan berarti harus "cantik". Ide "cantik" diejawantahkan dengan langsing, tanpa lemak berlebih. Fisik perempuan mendominasi persepsi ornamen kecantikan. Publikasi media tentang imej "cantik" dewasa ini

diwakili tema-tema tertentu seperti kulit putih, rambut panjang lurus, tubuh langsing, pantat montok, payudara besar, dan terminologi lain yang secara general berkiblat pada ras. Di luar tema itu, mereka dianggap bukan perempuan yang sebenarnya, nista, dan tidak berwibawa. Penanda kategori perempuan, seperti paparan Prabasmoro (2006), tidak hanya "menaturalisasi" kategori perempuan di "Barat" tetapi juga perempuan di "Timur". Perempuan "Timur" akhirnya di "Barat"-kan, sebagaimana juga perempuan "Barat" di "Timur"-kan oleh diskursus mapan yang menggejala di masyarakat. Setali tiga uang, laki-laki juga tidak kuasa keluar dari lingkaran mitos "tampan". Kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan memungkinkan kaum lelaki melakukan sulap wajah. Tren *thread lift* atau tanam benang makin populer di kalangan pria Indonesia (Savitri, 2014). Tanam benang adalah prosedur mengencangkan kulit dengan memasukkan benang ke bawah jaringan subkutan alias bawah kulit. Kisaran biaya antara satu sampai lima juta rupiah setiap benangnya. Konsep absurd ketampanan berefek pada tingkah konvol. Tidak jarang mereka membawa foto aktor Korea sebagai contoh kontur wajah yang diharapkan. Padahal semua itu sekedar "citra tubuh" penuh kenisbian.

Citra tubuh menurut Annastasia Melliana S. (Hurlock, 1992) merupakan cara seseorang memersepsikan tubuhnya dengan konsep ideal yang dimilikinya pada pola kehidupan setempat dan dalam hubungannya dengan cara orang lain menilai tubuhnya. Tuntutan perawatan tubuh demi citra se-saat, erat kaitannya dengan faktor eksternal, misalnya penilaian atau komentar dari orang lain, pembandingan dengan orang lain, dan peran individu perempuan di ranah publik. Perempuan yang terlanjur dianggap gemuk dengan tidak sadar berkeinginan untuk merubah citra tubuhnya. Begitu juga, di saat mereka melihat citra tubuh orang lain yang diidolakan. Perempuan yang bergelut dalam dunia publik, dengan alasan profesi maupun karir, rela berdesak-desakan

dan antre di salon kecantikan. Walhasil, praktik sosial menjadi perempuan "cantik" ternyata tidak pernah jauh dari produksi dan praktik kewacanaan yang berkembang.

Walaupun citra tubuh perempuan sudah diidealikan sesuai dengan konsepsi "cantik" yang dibangun oleh kultur sosial, terkadang belum mampu menyelamatkan perempuan dari belenggu ketertindasan. Sebut saja, perempuan yang mencari nafkah di ruang publik (Kantor, pabrik, dan sejenisnya) dan sesekali harus pulang larut malam efek dari sistem lembur, alih-alih mendapatkan apresiasi positif. Sebaliknya, cap buruk dari lingkungan sekitar tak terelakkan melalui sugesti perempuan malam, perempuan nakal, perempuan simpanan, dan tidak pandai mengurus keluarga. Padahal, dalam situasi serupa, terhadap laki-laki justru disematkan kata pujian seperti pekerja keras, bertanggung jawab, dan pemimpin rumah tangga teladan.

Kaum perempuan hendaknya tidak tinggal diam dan terus melakukan gerakan literasi, mengkaji secara elaboratif terminologi-terminologi tafsir tendensius yang dilahirkan dari wacana dominan yang bias gender. Sehingga, "tafsir al-Qur'an ramah perempuan" membudaya di kalangan masyarakat luas sekaligus menjadi *counter discourse* atas tafsir justifikatif-rasialistik. Dengan reflektif, perempuan seyogyanya berhati-hati ketika memutuskan berhijab. Jangan sampai laku mulia ini tercemari oleh kepentingan oportunistik agen kapitalis yang ingin meluaskan lahan bisnis dan komoditinya. Perempuan sebaiknya tidak larut oleh wacana citra "cantik" yang bersifat simbolik dalam bentuk tubuh secara fisik. Kecantikan hakiki juga bisa tercermin dari akhlak al-karimah.

H. Literasi Gender Tentang Kisah Drama Kosmis

Istilah literasi dalam tulisan ini bukan saja diidentikkan dengan kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis (Hornby, 1995), tetapi secara esensial dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk menyampaikan dan menerima pesan (Iriantara, 2009, h. 4). Literasi gender berarti kemampuan seseorang untuk menyampaikan dan menerima pesan (wacana) tentang laki-laki dan perempuan yang tanpa diskriminasi.

Ketika Al-Qur'an, meskipun hanya penafsiran dari sebagian pemikir Islam klasik, menempatkan perempuan sebagai "kambing hitam" penyebab keluarnya Adam as. dari mahligai surga yang sarat dengan keindahan ke belantara dunia yang penuh dengan mafsadat dan kejahatan, bias gender mulai menyusup ke dalam wacana keagamaan. Konspirasi Iblis dengan Hawa membuat Adam as. terlena, sehingga menerjang larangan Tuhan dengan memakan buah "keabadian" yang kemudian disebut Iblis dengan "syajarat al-khuld". Konsekuensi dari perbuatan tersebut, Hawa dan kaum perempuan anak turunnya harus menanggung hukuman dalam bentuk menstruasi rutin.

Interpretasi terhadap teks al-Qur'an yang cenderung mendiskreditkan perempuan ini telah dibantah oleh Nasr Hamid Abu Zayd (2003) yang menyatakan bahwa pendapat tersebut tidak masuk akal ditinjau dari sisi keilmiahannya dan berasal dari cerita israilliyat yang kadar kebenarannya masih bisa diperdebatkan. Wacana justifikatif yang demikian lebih berorientasi kepada pemunggiran terhadap status perempuan. Pada saat itu, para ahli kitab belum mampu menjelaskan peristiwa menstruasi dalam perspektif saintifik. Celakanya, mereka mengaitkan aktivitas kodrati perempuan tersebut dengan menafsir teks al-Qur'an berdasarkan kapasitas interpretasi individu yang terbatas. Zayd menandaskan reproduksi berulang-ulang kisah mitologis versi Taurat tersebut

but, mulanya terjadi pada masa kemunduran dan keruntuhan peradaban Islam yang berkecenderungan melakukan pengaburan “perempuan sebagai mitra laki-laki” dan klaim bahwa perempuan “inferior dalam akal dan agama”. Seolah mendukung pandangan Zayd, Nurjannah Ismail (2003) melalui pelacakan secara komprehensif terhadap ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan drama kosmis di atas, Nurjannah menekankan bahwa kedua belah pihak (Adam as. dan Hawa) sama-sama terlibat aktif. Ada lima alasan kuat yang menunjukkan hal demikian.

Pertama, Adam as. dan Hawa sama-sama diciptakan di surga beserta segala fasilitas yang bisa dipergunakannya sepanjang tidak ada larangan dari Allah SWT (QS. al-Baqarah [2]: 35).

Kedua, Adam as. dan Hawa mendapatkan kualitas goa-an yang sama dari setan (QS. al-A'raf [7]: 20).

Ketiga, keduanya memakan buah “khuldi” dan sama-sama menanggung kesalahannya sehingga diturunkan ke bumi (QS. al-A'raf [7]: 22).

Keempat, mereka sama-sama memohon ampun dan akhirnya Allah Yang Maha Pengampun menerima taubatnya (QS. al-A'raf [7]: 23).

Kelima, setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan, saling melengkapi, dan saling membutuhkan (QS. al-Baqarah [2]: 187). Asumsi yang memberatkan Hawa, justru datang dari Alkitab, bukan al-Qur'an. Jadi, tidak ada celah sedikit pun untuk membebankan dosa kolektif ini hanya kepada Hawa secara khusus, dan kepada perempuan pada umumnya.

BAB II

PERANAN GENDER

DALAM PEMAHAMAN BUDAYA LITERASI

UNTUK MENCERDASKAN ANAK BANGSA

A. Pendahuluan

Ibu yang baik adalah ibu yang sadar akan profesi dia sebagai ibu bagi anaknya. Ibu adalah sekolah pertama untuk anaknya. Pelajaran pertama yang diterima anak berasal dari orang tua terutama ibunya, setelah itu baru merambah ke lingkungan keluarga. Jika ibu adalah sekolah pertama, maka ayah menjadi pendamping, penasehat bahkan sebagai pengajar di sekolah pertama tersebut. Inilah dasar pemahaman budaya literasi untuk mencerdaskan anak bangsa.

B. Gender dan Pemahaman Literasi

"Women is more wise than men because they know less but understand more", Ungkapan ini dikemukakan James Thurber untuk menggambarkan tentang perempuan dan cara berpikirnya. Bahwa, seorang perempuan sebenarnya lebih bijaksana dari laki-laki karena mereka tahu lebih sedikit tetapi mengerti lebih banyak. Sebagian orang menganggap bahwa perempuan itu bersifat lemah dan dalam menjalankan aktivitas harus *manut* (patuh) terhadap kaum laki-laki.

Berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, seperti pelecehan seksual, KDRT, diskriminatif masih kerap mewarnai kehidupan kita dan terkesan dibiarkan begitu saja. Berdasarkan data yang diterima dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KNAKP) tercatat sejak 2010

sampai 2011 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) selalu naik secara signifikan dan perlahan telah menjadi budaya tersendiri di negeri ini. Sementara di tahun 2012 laporan mengenai kekerasan terhadap perempuan semakin bertambah di tiap bulannya. Hal ini mengindikasikan bahwa negeri kita yang pernah memiliki tokoh pembela perempuan (RA. Kartini) ternyata masih rawan kekerasan dan tidak aman bagi kaum hawa untuk memberikan pengaruh dalam masyarakat. Banyak faktor yang mendasari kasus-kasus di atas, di antaranya, yaitu karena faktor ekonomi yang menghimpit suatu keluarga dan pada akhirnya perempuanlah yang menjadi sasaran luapan amarah para kaum laki-laki. Selain itu, adanya penanaman konsep berpikir di sebagian masyarakat yang menganggap perempuan adalah makhluk kedua yang selalu dinomorduakan posisinya dalam kehidupan. Hal ini membuat posisi perempuan semakin kurang diperhatikan. Bahkan dengan adanya sebutan kultural "*kanca wingking*," dari kultur Jawa '*dulang tinande*' dari kultur Sunda, yang berkonotasi perempuan secara tidak langsung telah menempatkan laki-laki di garis terdepan dan mendukti posisi superior, maka perempuan senantiasa menjadi sosok yang terdominasi dan tersubordinasi. Sungguh ironis dan menjadi hal yang sampai saat ini masih menjadi fenomena kuno dalam kehidupan kita.

Dalam dunia pendidikan kita saat ini masih kerap juga adanya ketidakadilan gender. Banyak anak perempuan usia sekolah yang tak bisa lagi mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan karena pengaruh cara pandang patriarkis dari orang tua mereka. Orang tua anak-anak perempuan usia sekolah dari keluarga miskin menganggap anak perempuan mereka tidak pantas untuk melanjutkan sekolah. Lebih baik langsung dinikahkan atau didorong bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau buruh informal. Kurangnya pengetahuan dan asupan informasi membuat sebagian orang tua di sekitar kita masih menganut

paham tersebut. Berbeda halnya dengan anak laki-laki yang mendapat tempat istimewa baik segi pendidikan maupun kedudukan. Hal tersebut menyulut adanya ketimpangan antara budaya dan realita yang ada.

Kesetaraan gender pun menjadi suatu bentuk langkah yang diharapkan dapat meningkatkan derajat dan martabat perempuan. Dalam Al-Qur'an yang menjadi pegangan umat Islam dinyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama di dunia ini baik kapasitas moral, spiritual, maupun intelektual. Sebagai bukti pengakuannya terhadap kesetaraan hak dan kewajiban mereka dalam hal menjalankan ibadah atau kewajiban agama, tidak pernah membeda-bedakan beban ibadah antara perempuan dan laki-laki. Hal tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa saling menghargai dan kebersamaan dalam kehidupan manusia. Seharusnya perempuan dengan segala kelebihan dan kekurangannya tidaklah diciptakan hanya sebagai pelengkap tanpa maksud. Tetapi betapa perempuan membuat dunia ini menjadi lebih manusiawi dan berwarna, yaitu dengan perasaan dan kasih sayangnya yang senantiasa mengiringi setiap kehidupan kita. Itulah makna perempuan sebenarnya, bukan untuk disakiti tetapi dia adalah mitra untuk berbagi cinta dan saling mengasihi.

Ada pendapat bahwa anak yang berkualitas pasti lahir dari ibu yang luar biasa, kenapa? Karena ibu adalah "*madrasatul ula lil aulad*", ibu adalah sekolah pertama untuk anaknya. Pelajaran pertama yang diterima anak berasal dari orang tua terutama ibunya, setelah itu baru merambah ke lingkungan keluarga. Pada umumnya saat anak mulai belajar bicara maka kata pertama yang terucap dari mulutnya adalah memanggil mama. Semua ini wajar-wajar saja karena kurang lebih sembilan bulan lamanya bayi mendekam di rahim ibunya. Dia makan dari apa yang dimakan oleh ibunya, saat lahir pun dia akan dilayani sepenuhnya oleh ibu.

Seorang ibu yang baik bukan berarti yang namanya penuh deretan gelar akademik dengan fasilitas dunia yang seperti putri raja. Namun ibu yang baik adalah ibu yang sadar akan profesi dia sebagai ibu sekalipun tanpa gelar kebanggaan. Apa gunanya banyak gelar jika melupakan kewajiban terhadap anak, meskipun dengan dalih bahwa dia sibuk demi membahagiakan anaknya. Mengumpulkan harta dunia lalu lupa dengan diri yang sesungguhnya. Di samping gemerlapnya harta dunia ada hal paling penting yang dibutuhkan oleh anak, mereka butuh kasih sayang dan perhatian.

Jika ibu adalah sekolah pertama, maka ayah menjadi pendamping, penasehat bahkan sebagai pengajar di sekolah pertama tersebut. Sampai kapan profesi mereka? Apakah sampai anak memasuki usia sekolah? Lalu profesi mereka berubah menjadi donatur bagi kelangsungan pendidikan anak atau malah berubah menjadi ibu Kos tempat anak istirahat dan menginap sepulang sekolah? Seharusnya jawaban untuk semua pertanyaan di atas hanya satu jawabannya, yaitu TIDAK, meskipun pada kenyataannya banyak yang kita jumpai seperti itu. Bahkan yang sangat tidak asing lagi saat pendidikan anak diserahkan sepenuhnya kepada guru di sekolah. Padahal pertemuan guru dengan anak di sekolah hanya empat jam per hari, serta satu guru untuk banyak anak. Sesampainya di rumah anak sibuk dengan deretan kewajiban yang harus mereka tunaikan. Sementara orang tua juga sibuk dengan profesi mereka dari pagi hingga sore hari. Saat pulang tubuh sudah lelah, yang terpikirkan hanya istirahat secepatnya karena besok pagi tugas sudah menanti.

Kapan lagi waktu untuk anak? Tidak ada lagi, mereka sibuk, bahkan untuk sekadar bertanya kabar si anak pun seakan tak sempat bagaimana mau membantu mereka belajar di rumah? Sesungguhnya sesibuk apa pun orang tua tanggung jawab mereka terhadap anak tidak pernah bisa diwakilkan kepada siapa pun. Selama hayat masih dikan-dung badan selama itu juga kewajiban mereka masih tetap

ada. Apalagi kita tahu bahwa tidak ada yang namanya mantan guru sebagaimana tak ada mantan murid. Sementara orang tua punya dua profesi utama, sebagai orang tua dan guru bagi anaknya, tidak akan pernah ada yang namanya mantan orang tua dan juga mantan guru. Maka sampai kapan pun kewajiban mereka atas profesi yang diamanatkan tetap harus ditunaikan. Tidak hanya sekadar materi tetapi moral pun dibutuhkan anak. Dalam situasi ini kaum perempuan dan laki-laki dianjurkan memahami apa itu literasi supaya mereka bisa membimbing anak-anaknya menjadi manusia yang cerdas.

C. Peranan Literasi Gender dalam Mencerdaskan Anak Bangsa

Budaya patriarki yang sudah setua peradaban manusia ini berdampak pada perlakuan tidak adil pada kaum perempuan. Laki-laki dipandang lebih tinggi dan unggul dibanding perempuan sehingga mendapatkan peluang dan kemudahan untuk mendominasi di segala aspek kehidupan. Mulai dari buruh laki-laki yang diupah lebih tinggi, korban kekerasan terhadap perempuan yang terus berjatuhan, sampai peluang di dunia politik yang lebih terbuka bagi laki-laki menunjukkan betapa masalah gender ini sangat krusial dan membutuhkan perhatian.

Langkah strategis untuk menumbuhkan kesadaran gender adalah melalui pendidikan di rumah maupun di sekolah dengan menciptakan kondisi belajar yang menghargai keseimbangan gender serta mengkritisi materi-materi ajar yang masih bias gender. Mengapa ini penting? Masalah gender sudah menjadi isu global sama halnya dengan isu lingkungan hidup dan HAM.

Di masa mendatang, orang-orang yang tidak memiliki kesadaran gender dianggap "kurang berbudaya" atau "kurang

beradab". Ambil contoh sekarang saja di negara-negara tertentu tindakan menyiuli, bahkan hanya memelototi perempuan pun sudah dianggap melanggar hukum. Seorang pemimpin pun akan dinilai kompetensinya dari tingkat kesadaran gendernya, Keputusan-keputusan publik yang dibuat tanpa memperhitungkan aspek gender akan menjadi bahan tertawaan. Apakah kita akan membiarkan anak-anak nantinya menjadi generasi konyol dan bahan tertawaan dunia karena tidak peduli lingkungan, pelanggaran HAM, dan ditambah lagi karena sikapnya yang bebal gender.

D. Peran Guru Di Lingkungan sekolah

Perbedaan pelaku antara siswa perempuan dan laki-laki atas dasar gender masih mewarnai praktik pendidikan. Tempat duduk yang terpisah antara laki-laki dan perempuan masih banyak dijumpai di kelas-kelas. Tugas-tugas yang diberikan guru pun seringkali berbeda, misalnya laki-laki diminta mengumpulkan kliping tentang sains dan teknologi, sementara siswa perempuan tentang rumah tangga dan pendidikan. Dalam jenjang yang lebih tinggi, posisi strategis dalam organisasi siswa diduduki siswa laki-laki, sedangkan siswa perempuan cukup menjadi seksi konsumsi, atau maksimal sekretaris sebagai pemanis dan "pembantu" ketua.

Perlakuan yang bias gender ini mencerminkan bahwa para guru (yang mayoritas justru perempuan) pun ternyata masih tipis kesadaran gendernya sehingga tanpa sadar ikut melestarikan budaya patriarki. Betapa sering guru menasihati anak perempuan dengan berkata, "Anak perempuan tidak pantas begitu", dan lebih toleran terhadap kenakalan yang dilakukan siswa laki-laki. Perbuatan bernilai pantas atau tidak bukan atas dasar gender, melainkan nilai moral yang dikandungnya, misalnya perbuatan membolos adalah tidak pantas untuk perempuan maupun laki-laki.

Praktik bias gender makin nampak pada buku-buku pelajaran yang digunakan di sekolah-sekolah. Perhatikan gambar ayah yang sedang bekerja di kantor sementara ibu sibuk di dapur. Ayah sedang baca koran, ibu berkebun. Istilah-istilah yang jamak seperti Pak Tani, Pak Sopir, Pak Polisi, sementara hampir tidak ada Bu Tani, Bu Sopir, dan Bu Polisi. Gambaran anak laki-laki yang nakal dan lebih aktif, sementara perempuan duduk alim dan penurut. Soal-soal pun tak terhindar dari praktik bias gender ini, "Siapa yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga?" Pertanyaan soal semacam ini bukan hanya bias gender, melainkan tidak realistik karena dalam kenyataan lebih banyak ayah dan ibu bersama-sama mencari nafkah, bahkan ada yang hanya memiliki ibu saja. Pendidikan harus kontekstual dan nyambung dengan realitas yang dialami siswa. Lebih daripada itu, pendidikan mesti mampu mencerdaskan dan mencerahkan siswa. Peran strategis dalam penyadaran gender adalah para guru. Sudah saatnya kurikulum sekolah keguruan memasukkan mata kuliah gender. Diknas pun perlu melakukan pelatihan gender terhadap para guru. Dan tentu saja, para guru sendiri berani membuka wawasan tentang kesetaraan gender. Langkah pertama yang perlu diambil guru adalah bersikap kritis terhadap praktik bias gender yang ada di lingkungan sekolah, kemudian susun dan persiapkan sendiri materi ajar, metode, dan pengelolaan kelas, yang mendukung iklim kesetaraan gender. Untuk jenjang yang lebih tinggi, ajak para siswa untuk berdiskusi masalah-masalah gender yang sedang aktual. Ajak mereka untuk mengkritisi praktik eksplorasi dan komersialisasi tubuh perempuan yang mendominasi media dalam segala bentuknya.

Dengan cara demikian, sekolah benar-benar akan menjadi agen perubahan sosial yang efektif dengan merespons secara konstruktif persoalan-persoalan nyata yang sedang dihadapi masyarakat secara lokal maupun global, bukan melalui mata pelajaran, melainkan pembangunan cara berpi-

kir dan bersikap. Perubahan cara berpikir yang bertumpu pada kesetaraan gender akan mengubah tatanan sosial yang lebih adil dan manusiawi, termasuk juga model antara suami dan istri yang saling menghargai harkat dan martabat. Suatu gerakan besar yang akan memperbarui kehidupan dan memberi harapan bagi peradaban manusia.

E. Peran Orang Tua di Lingkungan Rumah

Kesadaran gender anak-anak tumbuh dalam keluarga melalui kondisi real hubungan ayah dan ibu serta perlakuan yang mereka dapatkan. Dalam keluarga-keluarga masih diwarnai praktik bias gender yang tidak adil terhadap perempuan – ibu maupun anak. Posisi suami sebagai "kepala keluarga" yang mengambil keputusan final, serta istri yang harus menanggung beban ganda (peran ganda?) sebagai pengurus rumah tangga dan pencari nafkah, jelas gambaran tidak adil dan tidak setara. Kesempatan pendidikan lebih diberikan kepada anak laki-laki, sementara banyak pembatasan lebih diberikan kepada anak perempuan, juga gambaran bagaimana bias gender ini masih mewarnai kehidupan keluarga. Tradisi dan agama pun ikut melegitimasi budaya patriarki sehingga memperoleh pembenarannya. Pada akhirnya, masyarakat pun mengamini praktik-praktik semacam itu. Dibutuhkan perubahan paradigma, khususnya dalam hubungan suami istri, untuk memulai penumbuhan kesadaran akan kesetaraan gender dalam keluarga. Suami istri saling menghargai sebagai pribadi yang semartabat, kendati tetap mengakui adanya perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan-perbedaan fungsi lebih bertumpu pada pembagian tugas dan partisipasi daripada atas dasar gender. Dalam hal ini, tugas mengurus dan mendidik anak adalah tugas bersama antara ayah dan ibu.

Kesetaraan gender dalam keluarga bukan untuk pertemuan, justru dalam kerangka pembentukan pola relasi dan komunikasi yang lebih manusiawi antara suami dan istri. Dalam kondisi seperti ini, kekerasan domestik tak akan terjadi, suami istri tidak saling mendominasi, anak-anak akan mendapatkan habitat tumbuh yang kondusif bagi masa perkembangannya. Orangtua bisa memulai dari hal sederhana, misalnya tidak terlalu menonjolkan perlakuan yang berbeda antara anak perempuan dan laki-laki seperti anak laki-laki diberi mainan mobil dan senapan sementara perempuan melulu boneka dan alat rumah tangga. Anak laki-laki pun perlu dilibatkan dalam urusan domestik seperti mencuci piring, memasak, dan berbelanja. Hindari kata-kata "Anak perempuan tidak boleh..." atau "Anak laki-laki harus..."

Sama halnya dengan di sekolah, boleh dan tidak boleh suatu perbuatan bukan atas dasar gender, melainkan nilai moral yang dikandungnya. Pendidikan yang paling efektif adalah keteladanan dan anak-anak belajar dari sana. Orang tua yang memiliki kesadaran gender tinggi akan melahirkan anak-anak yang demikian pula, dan ini berarti membekali anak-anak dengan ketrampilan hidup yang sesungguhnya.

F. Mengembangkan Stereotipe Nongender pada Anak

Stereotipe merupakan pelabelan yang diawali dengan proses persepsi terhadap objek persepsi mengenai berbagai macam ciri dan sifat-sifat personal yang melekat (seakan permanen) pada sekelompok orang. Maka peran gender merupakan hasil pelabelan yang akhirnya menjadi ekspektasi (harapan) sosial, dan sangat sulit untuk diadakan perubahan konsep karena sudah menjadi stereotipe.

Gender sendiri merupakan pelabelan atas laki-laki dan perempuan. Konstruksi ini tidak lagi membedakan laki-laki

dan perempuan atas perbedaan seks yang dimiliki. Dasar sosialisasi ini secara kuat telah membentuk ideologi gender, melalui konstruksi sosial yang melembaga. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa, dan jantan.

Perempuan dikonstruksikan sebagai makhluk yang perlu dilindungi, kurang mandiri, tidak rasional, hanya mengandalkan perasaan, dan lain-lain. Konsekuensinya, muncul batasan-batasan yang menempatkan perempuan pada ruang penuh dengan aturan baku yang perlu dijalankan. Padahal, banyak sisi positif dari perempuan yang membedakannya dengan laki-laki dan jarang diekspos, yaitu watak dan karakter, seperti kemampuan pengendalian diri, kekuatan emosi, dan kepekaan sosial. Konsep pembakuan peran gender yang mengotak-kotakkan peran laki-laki atau suami dan perempuan atau istri ini hanya memungkinkan perempuan berperan di wilayah domestik yakni sebagai pengurus rumah tangga sementara laki-laki di wilayah publik sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama.

Kata kunci untuk memahami gender ada pada kata pembagian, yang dapat dibedakan pada dua sifat; yaitu pembagian yang sifatnya kodrat dan pembagian yang sifatnya berubah-rubah sehingga dapat dipertukarkan. Pembagian yang pertama merupakan pemberian Tuhan yang tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan dinamakan sebagai pembagian seksual. Sedangkan pembagian peran, sifat dan watak serta tanggungjawab yang dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan itulah yang dinamakan gender. Dari pembagian itulah kemudian muncul perbedaan gender. Oleh karena itu, gender sesungguhnya berkaitan erat dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan diharapkan untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial dan budaya dimana mereka berada. Berdasarkan keyakinan itulah

masyarakat membedakan peran dan fungsi gender sesuai dengan kebutuhannya.

Untuk mengurangi stereotipe gender pada anak-anak perlu dilakukan beberapa cara oleh orang tua dan guru. Misalnya orang tua maupun guru dapat membantu anak-anak untuk mengenal peran gender laki-laki dan perempuan. Orang tua atau guru hendaknya menghargai apa pun yang dilakukan anak bukan karena dia laki-laki atau perempuan. Contohnya, seorang wanita dapat menjadi presiden dan memahami mengapa seorang ayah dapat pula merawat anak-anaknya di rumah, menyiapkan makanan, dan lain-lain.

Anak juga perlu menyadari akan stereotipe gender di masyarakat. Meskipun peran gender dalam masyarakat berbeda antara laki-laki dan perempuan, namun peran tersebut dapat berganti tergantung situasi dan kebutuhan yang ada. Misalnya banyak dijumpai lingkup pekerjaan atau karier laki-laki ditekuni oleh perempuan. Dalam hal ini orang tua atau guru perlu menjelaskan alasan pemilihan karir tersebut bahwa minat dan keterampilan lebih menentukan pemilihan karir seseorang.

Demikian bahwa stereotipe peran gender juga merupakan kategori luas yang merefleksikan kesan dan keyakinan tentang apa perilaku yang tepat untuk laki-laki dan perempuan (Santrock, tt: 197).

BAB III

GENDER, PENDIDIKAN, DAN LITERASI

A. Pengertian Gender

Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan.

Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan (memilahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan.

Dengan demikian gender sebagai suatu konsep merupakan hasil pemikiran manusia atau rekayasa manusia, dibentuk oleh masyarakat sehingga bersifat dinamis dapat berbeda karena perbedaan adat istiadat, budaya, agama, sistem nilai dari bangsa, masyarakat, dan suku bangsa tertentu. Selain itu gender dapat berubah karena perjalanan sejarah, perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya, atau karena kemajuan pembangunan. Dengan demikian gender tidak bersifat universal dan tidak berlaku secara umum, akan tetapi bersifat situasional masyarakatnya.

B. Pendidikan dan Gender

Studi-studi tentang gender saat ini melihat bahwa ketimpangan gender terjadi akibat rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan sendiri, hal ini mengakibatkan ketidakmampuan mereka bersaing dengan kaum laki-laki. Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan adalah mendidik kaum perempuan dan mengajak mereka berperan serta dalam pembanguna. Namun kenyataannya program peningkatan peran serta perempuan ini justru mengakibatkan beban yang ganda bagi perempuan, dalam arti tanpa hasil yang dapat menguatkan kedudukan perempuan sendiri.

Dalam realitas yang kita jumpai pada masyarakat tertentu terdapat adat kebiasaan yang tidak mendukung dan bahkan melarang keikutsertaan perempuan dalam pendidikan formal. Bahkan ada nilai yang mengemukakan bahwa "perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena akhirnya akan ke dapur juga." Ada pula anggapan seorang gadis harus cepat-cepat menikah agar tidak menjadi perawan tua. Paradigma seperti inilah yang menjadikan para perempuan menjadi terpuruk dan dianggap rendah oleh kaum laki-laki. Rendahnya kualitas pendidikan diakibatkan oleh adanya diskriminasi gender dalam dunia pendidikan. Ada tiga aspek permasalahan gender dalam pendidikan (Muawanah, 2009: 54).

1. Akses

Yang dimaksud dengan *aspek akses* adalah fasilitas pendidikan yang sulit dicapai. Misalnya, banyak sekolah dasar di tiap-tiap kecamatan namun untuk jenjang pendidikan selanjutnya seperti SMP dan SMA tidak banyak. Tidak setiap wilayah memiliki sekolah tingkat SMP dan seterusnya, hingga banyak siswa yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapainya. Di lingkungan masyarakat yang masih tradisional, umumnya orang tua segan mengirimkan anak

perempuannya ke sekolah yang jauh karena mengkhawatirkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu banyak anak perempuan yang 'terpaksa' tinggal di rumah. Belum lagi beban tugas rumah tangga yang banyak dibebankan pada anak perempuan membuat mereka sulit meninggalkan rumah. Akumulasi dari faktor-faktor ini membuat anak perempuan banyak yang cepat meninggalkan bangku sekolah.

2. Partisipasi

Dalam masyarakat kita di Indonesia terdapat sejumlah nilai budaya tradisional yang meletakkan tugas utama perempuan di arena domestik, seringkali anak perempuan agak terhambat untuk memperoleh kesempatan yang luas untuk menjalani pendidikan formal. Sudah sering dikeluhkan bahwa jika sumber-sumber pendanaan keluarga terbatas, maka yang harus didahulukan untuk sekolah adalah anak laki-laki. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tugas pria kelak apabila sudah dewasa dan berumah-tangga, yaitu dia harus menjadi kepala rumah tangga dan pencari nafkah.

3. Manfaat

Kenyataan banyaknya angka buta huruf di Indonesia di dominasi oleh kaum perempuan. Data BPS tahun 2003, menunjukkan dari jumlah penduduk buta aksara usia 10 tahun ke atas sebanyak 15.686.161 orang, 10.643.823 orang di antaranya atau 67,85 persen adalah perempuan. Pendidikan tidak hanya sekedar proses pembelajaran, tetapi merupakan salah satu "nara sumber" bagi segala pengetahuan. Dengan demikian pendidikan juga sarana sosialisasi kebudayaan yang berlangsung secara formal termasuk di sekolah. Semakin rendah tingkat pendidikan semakin besar kesenjangan gender misalnya bisa dilihat dari masalah pengupahan. Angka statistik menunjukkan perbandingan upah laki-laki dan perempuan adalah 60,46% dan 39,54%, dimana kesenjangan

gender dalam pengupahan untuk pendidikan rendah adalah 65,68% untuk laki-laki dan 35,32 % untuk perempuan.

C. Pendidikan Memandang Gender

Dalam deklarasi Hak-hak Asasi Manusia pasal 26 dinyatakan bahwa: " Setiap orang berhak mendapatkan pengajaran..." Pengajaran harus mempertinggi rasa saling mengerti, saling menerima serta rasa persahabatan antar semua bangsa, golongan-golongan kebangsaan, serta harus memajukan kegiatan PBB dalam memelihara perdamaian dunia ... ".

Terkait dengan deklarasi di atas, sesungguhnya pendidikan bukan hanya dianggap dan dinyatakan sebagai sebuah unsur utama dalam upaya pencerdasan bangsa melainkan juga sebagai produk atau konstruksi sosial, maka dengan demikian pendidikan juga memiliki andil bagi terbentuknya relasi gender di masyarakat.

Pendidikan memang harus menyentuh kebutuhan dan relevan dengan tuntutan zaman, yaitu kualitas yang memiliki keimanan dan hidup dalam ketakwaan yang kokoh, mengenali, menghayati, dan menerapkan akar budaya bangsa, berwawasan luas dan komprehensif, menguasai ilmu pengetahuan, dan keterampilan mutakhir, mampu menganalisis arah perkembangan, berpikir secara analitik, terbuka pada hal-hal baru, mandiri, selektif, mempunyai kedulian sosial yang tinggi, dan bisa meningkatkan prestasi. Perempuan dalam pendidikannya juga diarahkan agar mendapatkan kualifikasi tersebut sesuai dengan taraf kemampuan dan minatnya.

Departemen Pendidikan Nasional berupaya menjawab isu tersebut melalui perubahan kurikulum dan rupanya telah terakomodasi sejak kurikulum 2004 tinggal bagaimana mengaplikasikannya dalam bahan ajar terutama isu gender meskipun pada kenyataannya masih membawa dampak

bias gender dalam masyarakat yang berakibat pada kurang optimalnya sumber daya manusia yang optimal yang unggul di segala bidang tanpa memandang jenis kelamin.

Dengan demikian, pendidikan seharusnya memberi mata pelajaran yang sesuai dengan bakat minat setiap individu perempuan, bukan hanya diarahkan pada pendidikan agama dan ekonomi rumah tangga, melainkan juga masalah pertanian dan ketrampilan lain. Pendidikan dan bantuan terhadap perempuan dalam semua bidang tersebut akan menjadikan nilai yang amat besar dan merupakan langkah awal untuk memperjuangkan persamaan sesungguhnya.

D. Membangun Pendidikan Berperspektif Gender

Jika sekolah memilih jalan untuk tidak sekadar menjadi pengawet atau penyangga nilai-nilai, tetapi penyeru pikiran-pikiran yang produktif dengan berkolaborasi dengan kebutuhan zaman, maka menjadi salah satu tugas sekolah untuk tidak membiarkan berlangsungnya ketidakadilan gender yang selama ini terbungkus rapi dalam kesadaran-kesadaran palsu yang berkembang dalam masyarakat. Sebaliknya ia harus bersikap kritis dan mengajak masyarakat sekolah dan masyarakat di sekitarnya untuk mentransformasikan praktik-praktik yang lebih berpihak kepada keadilan sesama, terutama keadilan bagi kaum perempuan.

E. Gender dan Pendidikan Literasi

Konsep literasi tak lagi dimaknai secara sempit yang terbatas pada kemampuan baca-tulis, tapi juga berkaitan dengan kemampuan memaknai teks, seperti huruf, angka, dan simbol kultural, seperti gambar dan simbol secara kritis.

Literasi dalam arti luas seperti ini seharusnya sudah cukup lama menjadi acuan UNESCO. Ini bisa kita baca dari *Literacy for Life*, laporan UNESCO tahun 2006 tentang literasi dunia. Di situ dinyatakan, literasi adalah hak dasar manusia sebagai bagian esensial dari hak pendidikan. Terpenuhinya hak literasi memungkinkan kita mengakses sains, pengetahuan teknologi, dan aturan hukum, serta mampu memanfaatkan kekayaan budaya dan daya guna media. Singkatnya, literasi menjadi poros upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Karena itu, ia merupakan sumbu pusaran pendidikan.

Untuk mengatasi ketertinggalan Indonesia di bidang literasi ini, yang paling mendesak untuk dilakukan adalah merevisi paradigma usang literasi dan menggantinya dengan paradigma yang lebih merefleksikan kebutuhan berliterasi di era ketika siswa dikelilingi teks, informasi, dan gambar dari pelbagai penjuru. Upaya strategis yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan daya literasi Indonesia secara menyeluruh dan berkesinambungan adalah dengan memulainya dari pendidikan di rumah dan selanjutnya di sekolah. Rumah adalah sekolah pertama bagi anak, dalam hal ini peran gender (ayah dan ibu) sangat dibutuhkan, dalam arti sebaiknya pendidikan literasi diberikan sejak awal dari rumah.

Negara dengan tingkat literasi tinggi, seperti Finlandia, Jepang, dan Amerika, secara sistematis menempatkan buku sebagai pusaran kegiatan pembelajaran. Di Amerika, misalnya, sejak jenjang pendidikan dini, anak diperkenalkan dengan konsep buku dan berdialog dengan teks dan gambar. Dengan dibantu guru, sejak belia siswa dibiasakan bertanya, termasuk pesan apa yang ingin disampaikan oleh pengarang buku. Mereka belajar berdialog dengan teks, bukan sekadar membaca sambil lewat.

Di jenjang sekolah dasar, siswa dikondisikan untuk belajar memperkaya kosakata dan menumbuhkan daya anali-

sis. Mereka menggunakan bacaan berjenjang (*leveled reading*) yang disesuaikan dengan tingkat kognitif dan kematangan mereka. Bacaan berjenjang biasanya dibedakan seberapa kompleks bacaan (seperti kosakata, struktur, logika, dan konsep). Ketika di tingkat menengah, siswa akan terbiasa mendiskusikan buku beragam genre, dan teks beragam bentuk (seperti digital) dengan tingkat kesulitan sesuai dengan yang diharapkan di perguruan tinggi ataupun dengan kebutuhan literasi ketika mereka terlibat langsung dengan masyarakat luas. Pada akhirnya, keterbiasaan dengan buku akan menumbuhkan cinta mereka terhadap membaca.

Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kasus di atas? Satu hal yang pasti: peningkatan literasi terkait erat dengan pengoptimalan peran buku. Fungsi buku dan teks bukan sekadar rujukan, tapi juga sebagai medium untuk berpikir kritis dengan cara mendiskusikan makna yang bukan sekadar permukaan. Pendidikan yang melibatkan buku dan bahan bacaan (lebih dari sekadar buku teks) sebagai sumber ajar akan memfasilitasi guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang dialogis, aktif, dan kritis.

Buku tentu saja bukan satu-satunya faktor di sini. Peningkatan literasi siswa juga mengandaikan perlunya guru dipersiapkan untuk menanamkan pemahaman literasi dan mengajarkannya di kelas. Dengan begitu, siswa punya kesempatan meningkatkan daya literasi mereka di sekolah.

Paradigma baru literasi, yang tak lagi berpuas diri pada kemampuan baca-tulis, tapi juga peningkatan daya nalar siswa, tentunya mensyaratkan proses peningkatan literasi yang berkesinambungan, dari jenjang pendidikan dini hingga dewasa. Tak ada jalan pintas untuk itu.

F. Guru sebagai Pilar dalam Pendidikan Gender dan Literasi

Guru harus diupayakan mendapatkan akses terhadap dasar-dasar pengetahuan dan pendidikan gender dan pendidikan literasi terlebih dahulu, untuk membuka pikiran dan nurani akan adanya persoalan tersebut. Jika guru/pendidik sudah mendapatkan akses yang cukup terhadap pengetahuan gender dan pengetahuan literasi, maka komitmen yang sangat penting untuk dijadikan landasan membangun pendidikan gender dan pendidikan literasi akan jauh lebih mudah dicapai.

Apabila guru memiliki sensitivitas gender maka akan memiliki itikad untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender serta pemahaman literasi dengan sendirinya, melalui proses pembelajaran di kelas, dalam pembuatan soal dan dalam perlakuan di kelas.

G. Peran Bahasa dalam Pendidikan yang peka Gender dan Literasi

Bahasa merupakan unsur yang sangat penting dalam pendidikan peka gender dan literasi, karena di dalam bahasa, lewat pilihan kata, tekanan-tekanan, konstruksi kalimat atau ujaran yang digunakan dalam komunikasi baik tertulis maupun lisan. Bahasa yang dimaksud juga tidak terbatas pada bahasa verbal tetapi termasuk bahasa nonverbal, bahasa tubuh seperti cara bersalaman, memberi penghormatan, memandang atau mengerling menyiratkan makna yang mengandung muatan gender dan pemahaman literasi. Menyepelekan peran bahasa dalam pendidikan peka gender dan pemahaman literasi sama dengan mengabaikan unsur penting dalam pendidikan.

H. Kesetaraan Gender dan Peningkatan Pemahaman Lite-rasi dalam Pendidikan

Usaha untuk menghentikan bias gender terhadap seluruh aspek kehidupan antara lain dengan cara pemenuhan kebutuhan praktis gender (*practical genderneeds*). Kebutuhan ini bersifat jangka pendek dan mudah dikenali hasilnya. Namun usaha untuk melakukan pembongkaran bias gender harus dilakukan mulai dari rumah tangga dan pribadi masing-masing hingga sampai pada kebijakan pemerintah dan negara, tafsir agama bahkan epistemologi ilmu pengetahuan.

Adapun strategi utama menuju kesetaraan gender dalam pendidikan (Siswanto, 2009) adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan akses pendidikan yang bermutu terutama pendidikan dasar secara merata bagi anak laki-laki dan perempuan baik melalui pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah;
2. Penyediaan akses pendidikan kesetaraan bagi penduduk usia dewasa yang tidak dapat mengikuti pendidikan persekolahan;
3. Peningkatan penyediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi penduduk dewasa terutama perempuan;
4. Peningkatan koordinasi, informasi dan edukasi dalam rangka mengarusutamakan pendidikan berwawasan gender; dan berpemahaman literasi;
5. Pengembangan kelembagaan institusi pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah mengenai pendidikan berwawasan gender dan berpemahaman literasi.

I. Meningkatkan Pemahaman Hubungan Gender, Pendidikan, dan Literasi

Dalam disiplin ilmu pendidikan, kemampuan nalar seharusnya berkaitan erat dengan literasi. Perlu dicatat, konsep literasi di sini tak lagi dimaknai secara sempit yang terbatas pada kemampuan baca-tulis, tapi juga berkaitan dengan kemampuan memaknai teks, seperti huruf, angka, dan simbol kultural, seperti gambar dan simbol secara kritis.

Literasi dalam arti luas seperti ini seharusnya sudah cukup lama menjadi acuan UNESCO. Ini bisa kita baca dari *Literacy for Life*, laporan UNESCO tahun 2006 tentang literasi dunia. Di situ dinyatakan, literasi adalah hak dasar manusia sebagai bagian esensial dari hak pendidikan. Terpenuhinya hak literasi memungkinkan kita mengakses sains, pengetahuan teknologi, dan aturan hukum, serta mampu memanfaatkan kekayaan budaya dan daya guna media. Singkatnya, literasi menjadi poros upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Karena itu, ia merupakan sumbu pusaran pendidikan.

Freebody dan Luke (1990) menawarkan pendidikan model literasi sebagai berikut:

1. Memahami sebuah kode dalam teks.
2. Terlibat dalam memaknai teks.
3. Menggunakan teks secara fungsional.
4. Melakukan analisis dan mentransformasikan teks secara kritis

Dari keempat peran literasi dapat diringkas ke dalam lima verba, yaitu memahami, melibatkan, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasikan teks, inilah hakikat berinteraksi. Secara kritis dalam menggunakan literasi dalam sebuah masyarakat yang demokratis, maka makna dalam rujukan literasi selalu berevolusi, semakin meluas, dan berkembang.

Untuk mengatasi ketertinggalan Indonesia di bidang literasi ini, yang paling mendesak untuk dilakukan adalah merevisi paradigma usang literasi dan menggantinya dengan paradigma yang lebih merefleksikan kebutuhan berliterasi di era ketika siswa dikelilingi teks, informasi, dan gambar dari pelbagai penjuru. Upaya strategis yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan daya literasi Indonesia secara menyeluruh dan berkesinambungan adalah dengan memulainya dari pendidikan di sekolah.

Negara dengan tingkat literasi tinggi, seperti Finlandia, Jepang, dan Amerika, secara sistematis menempatkan buku sebagai pusaran kegiatan pembelajaran. Di Amerika, misalnya, sejak jenjang pendidikan dini, anak diperkenalkan dengan konsep buku dan berdialog dengan teks dan gambar. Dengan dibantu guru, sejak belia siswa dibiasakan bertanya, termasuk pesan apa yang ingin disampaikan oleh pengarang buku. Mereka belajar berdialog dengan teks, bukan sekadar membaca sambil lewat.

Di jenjang sekolah dasar, siswa dikondisikan untuk belajar memperkaya kosakata dan menumbuhkan daya analisis mereka menggunakan bacaan berjenjang (*leveled reading*) yang disesuaikan dengan tingkat kognitif dan kematangan mereka. Bacaan berjenjang biasanya dibedakan seberapa kompleks bacaan (seperti kosakata, struktur, logika, dan konsep). Ketika di tingkat menengah, siswa akan terbiasa mendiskusikan buku beragam genre, dan teks beragam bentuk (seperti digital) dengan tingkat kesulitan sesuai dengan yang diharapkan di perguruan tinggi ataupun dengan kebutuhan literasi ketika mereka terlibat langsung dengan masyarakat luas. Pada akhirnya, keterbiasaan dengan buku akan menumbuhkan cinta mereka terhadap membaca. Alah bisa karena biasa!

Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kasus di atas? Satu hal yang pasti: peningkatan literasi terkait erat dengan pengoptimalan peran buku. Fungsi buku dan teks bukan

sekadar rujukan, tapi juga sebagai medium untuk berpikir kritis dengan cara mendiskusikan makna yang bukan sekadar permukaan. Pendidikan yang melibatkan buku dan bahan bacaan (lebih dari sekadar buku teks) sebagai sumber ajar akan memfasilitasi guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang dialogis, aktif, dan kritis.

Buku tentu saja bukan satu-satunya faktor di sini. Peningkatan literasi siswa juga mengandaikan perlunya guru yang dipersiapkan untuk menanamkan pemahaman literasi dan mengajarkannya di kelas. Dengan begitu, siswa punya kesempatan meningkatkan daya literasi mereka di sekolah. Misalnya siswa diminta untuk belajar memahami dan membaca buku dan teks dengan kritis. Ketika membaca buku siswa diajak berilustrasi dan diperkenalkan dengan konsep narasi dalam relasi teks dan gambar yang ada dalam suatu buku. Asumsinya, teks dan gambar sebaiknya memiliki cara unik untuk menyampaikan cerita sesuai dengan yang diinginkan oleh pengarang. Siswa dianjurkan lebih memperhatikan secara saksama pesan dalam teks, dan bagaimana pesan itu disampaikan, juga efek apa yang diinginkan terhadap pembaca. Hasilnya, mereka membaca dengan lebih kritis dan cenderung tidak menerima begitu saja informasi yang mereka baca.

Paradigma baru literasi adalah kita tidak lagi berpuas diri pada kemampuan baca-tulis, tetapi kita juga berusaha meningkatkan daya nalar siswa, tentunya hal ini mensyaratkan proses peningkatan literasi yang berkesinambungan, dari jenjang pendidikan dini hingga dewasa. Dalam hal ini tidak ada jalan pintas untuk melaksanakan peningkatan pemahaman literasi.

Budaya bias gender, yaitu laki-laki membentuk perempuan cenderung *nrimo*, karenanya upaya sistematis dan berkelanjutan tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan menjadi semakin mendesak, akses pendidikan perempuan dan laki-laki harus mendapatkan kesempatan

yang sama. Anak perempuan, sebagaimana anak laki-laki harus mempunyai hak atau kesempatan untuk sekolah lebih tinggi.

Gender di era global berkaitan dengan kesadaran, tanggung jawab laki-laki, pemberdayaan perempuan, dan hak-hak perempuan termasuk hak dalam pendidikan. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menghubungkan semua konsep gender untuk tujuan kesehatan dan kesejahteraan bersama. Pendirian gender perlu diterjemahkan dalam aksi nyata berupa gerakan pembebasan yang bertanggung jawab. Mendorong laki-laki dan perempuan untuk mengubah tradisi pencerahan, yaitu sikap yang didasarkan pada akal, alam, manusia, dan pemahaman literasi agar diperoleh persamaan, kebebasan dan kemajuan bersama, tanpa membedakan jenis kelamin.

Literasi dalam arti luas seperti ini seharusnya sudah cukup lama menjadi acuan dari UNESCO (2005). Ini bisa kita baca dari *Literacy for Life*, laporan UNESCO tahun 2006 tentang literasi dunia. Di situ dinyatakan, literasi adalah hak dasar manusia sebagai bagian esensial dari hak pendidikan. Terpenuhinya hak literasi memungkinkan kita mengakses sains, pengetahuan teknologi, dan aturan hukum, serta mampu memanfaatkan kekayaan budaya dan daya guna media. Singkatnya, literasi menjadi poros upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Karena itu, ia merupakan sumbu pusaran pendidikan.

Literasi tidak berpuas diri pada kemampuan baca-tulis, tetapi diharuskan untuk berusaha meningkatkan daya nalar siswa, tentunya hal ini mensyaratkan proses peningkatan literasi yang berkesinambungan, dari jenjang pendidikan dini hingga dewasa. Dalam hal ini tidak ada jalan pintas untuk melaksanakan peningkatan pemahaman literasi.

BAB IV

GERAKAN PEREMPUAN (FEMINISME) DAN PERKEMBANGANNYA

A. Pendahuluan

Darma (2009) mengemukakan bahwa secara etimologis feminis berasal dari kata “*Femme*” (*woman*), yang berarti perempuan. Feminisme adalah faham perempuan yang berupaya memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sebagai kelas sosial. Dalam hal ini perlu dibedakan antara *male* dan *female* (sebagai aspek perbedaan biologis dan sebagai hakikat alamiah), sedangkan maskulin dan feminin (sebagai aspek perbedaan psikologi dan kultural). Selden (1986: 132) mengungkapkan pengertian *male-female* mengacu pada seks, sedangkan maskulin dan feminin mengacu pada jenis kelamin atau gender, seperti *he* dan *she*. Dalam pengertian yang lebih luas, feminis adalah gerakan kaum perempuan untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh budaya dominan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun kehidupan sosial.

Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa munculnya gerakan feminism dikarenakan adanya dorongan ingin menyetarakan hak antara laki-laki dan perempuan yang selama ini seolah-olah perempuan tidak dihargai dalam pengambilan kesempatan dan keputusan dalam hidup. Perempuan merasa terkekang karena superioritas laki-laki, perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap atau bumbu penyedap dalam hidup laki-laki. Pemikiran yang tampaknya sudah membudaya ini, menyebabkan perempuan harus berjuang keras untuk menunjukkan eksistensi dirinya di mata dunia.

B. Barat dan Perempuan

Untuk mengetahui bagaimana feminism itu lahir dan berkembang, kita harus melihat kondisi Barat (dalam hal ini Eropa) pada abad pertengahan, yaitu masa ketika suara-suara feminis mulai terdengar. Pada Abad pertengahan, gereja berperan sebagai sentral kekuatan, dan Paus sebagai pemimpin gereja, menempatkan dirinya sebagai pusat dan sumber kekuasaan. Sampai abad ke-17, gereja masih tetap mempertahankan posisi hegemoninya, sehingga berbagai hal yang dapat menggoyahkan otoritas dan legitimasi gereja, dianggap sebagai *heresy* dan dihadapkan ke Mahkamah Inkuisisi (Husaini: 2004, hal 158-159). Nasib perempuan Barat tak luput dari kekejadian doktrin-doktrin gereja yang ekstrim dan tidak sesuai dengan kodrat manusia.

32 Menurut McKay, dkk. (1983: 437-541), pada dekade 1560 dan 1648 merupakan penurunan status perempuan di masyarakat Eropa. Reformasi yang dilakukan para pembaharunya gereja tidak banyak membantu nasib perempuan. Studi-studi spiritual kemudian dilakukan untuk memperbaharui konsep Saint Paul's tentang perempuan, yaitu perempuan dianggap sebagai sumber dosa dan merupakan makhluk kelas dua di dunia ini. Walaupun beberapa pendapat pribadi dan hukum publik yang berhubungan dengan status perempuan di barat cukup bervariasi, tetapi terdapat bukti-bukti kuat yang mengindikasikan bahwa perempuan telah dianggap sebagai makhluk inferior. Sebagian besar perempuan diperlakukan sebagai anak kecil-dewasa yang bisa digoda atau dianggap sangat tidak rasional. Bahkan pada tahun 1595, seorang profesor dari Wittenberg University melakukan perdebatan serius mengenai apakah perempuan itu manusia atau bukan. Pelacuran merebak dan dilegalkan oleh negara. Perempuan menikah di abad pertengahan juga tidak memiliki hak untuk bercerai dari suaminya dengan alasan apa pun.

Maududi (1995: 23) berpendapat ada dua doktrin dasar gereja yang membuat kedudukan perempuan di Barat pada abad pertengahan tak ubahnya seperti binatang. Pertama, gereja menganggap perempuan sebagai ibu dari dosa yang berakar dari setan jahat. Perempuanlah yang menjerumuskan lelaki ke dalam dosa dan kejahatan, dan menuntunnya ke neraka. Tertullian (150M) sebagai Bapak Gereja pertama menyatakan doktrin Kristen tentang wanita sebagai berikut: Perempuan yang membukakan pintu bagi masuknya godaan setan dan membimbing kaum pria ke pohon terlarang untuk melanggar hukum Tuhan, dan membuat laki-laki menjadi jahat serta menjadi bayangan Tuhan. St John Chrysostom (345M-407M) seorang bapak Gereja bangsa Yunani berkata: Perempuan adalah setan yang tidak bisa dihindari, suatu kejahatan dan bencana yang abadi dan menarik, sebuah resiko rumah tangga dan ketika beruntungan yang cantik hilang.

Konsep utuh tentang perempuan dalam doktrin Kristen dimulai dengan ditulisnya buku *Summa Theologia* oleh Thomas Aquinas antara tahun 1266 dan 1272. Dalam tulisannya Aquinas sepakat dengan Aristoteles, bahwa perempuan adalah laki-laki yang cacat atau memiliki kekurangan (*defect male*). Menurut Aquinas, bagi para filsuf, perempuan adalah laki-laki yang diharamkan, dia diciptakan dari laki-laki dan bukan dari binatang. Sedangkan Immanuel Kant berpendapat bahwa perempuan mempunyai perasaan kuat tentang kecantikan, keanggunan, dan sebagainya, tetapi kurang dalam aspek kognitif, dan tidak dapat memutuskan tindakan moral (Arivia, 2002, hal. 95).

Doktrin gereja lainnya yang menentang kodrat manusia dan memberatkan kaum perempuan adalah menganggap bahwa hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan adalah peristiwa kotor walaupun mereka sudah dalam ikatan perkawinan sah. Hal ini berimplikasi bahwa menghindari perkawinan adalah simbol kesucian dan kemurnian serta

ketinggian moral. Jika seorang laki-laki menginginkan hidup dalam lingkungan agama yang bersih dan murni, maka laki-laki tersebut tidak diperbolehkan menikah, atau mereka harus berpisah dari istrinya, mengasingkan diri dan berpantang melakukan hubungan badani (Maududi, 1995:2324).

Kehidupan keras yang dialami oleh perempuan-perempuan pada saat Gereja memerintah Eropa tertuang dalam essai Francis Bacon yang berjudul *Marriage and single Life* (Kehidupan Perkawinan dan Kehidupan Sendiri) pada tahun 1612.

Pada awal mula Abad Pencerahan yaitu abad ke 17, saat Bacon menulis esainya, kondisi perempuan Inggris pada saat itu mengalami kehidupan yang sulit dan keras. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan Ratu Elizabeth. Saat itu yang bertindak sebagai penguasa adalah Raja James I, dan ternyata ia sangat membenci perempuan. Pembunuhan dan pembakaran terhadap perempuan-perempuan yang dituduh sebagai "neneh sihir", yang dipelopori oleh para pendeta, pada dasarnya merupakan ekspresi anti perempuan. Hukuman yang brutal dijatuhkan kepada seorang perempuan yang melanggar perintah suaminya.

Tradisi ini mengembangkan pemikiran bahwa perempuan menyimpan bibit-bibit "keburukan" sehingga harus terus menerus diawasi dan ditertibkan oleh anggota keluarganya yang laki-laki atau suaminya bila ia sudah menikah. Pemikiran ini membawa konsekuensi bagi pemikiran lainnya seperti ide bahwa lebih baik seorang laki-laki tinggal sendiri, tidak menikah dan jauh dari perempuan. Hidup tanpa nikah ini merupakan kehidupan ideal laki-laki, jauh dari pengaruh buruk dan beban anak-anak sehingga laki-laki bisa berkonsentrasi pada dunia publiknya.

Pemikiran-pemikiran seperti ini tercermin dalam karya Francis Bacon (Maududi, 1995: 52) Jelaslah, penindasan terhadap perempuan barat di bawah pemerintahan gereja mem-

buat suara-suara perempuan yang menginginkan kebebasan semakin menggema di mana-mana. Perempuan barat, menjadi makhluk lemah dan tidak berdaya dilihat dari hampir seluruh aspek kehidupan. Hal itulah yang kemudian mendorong para perempuan barat bergerak untuk mendapatkan kembali hak individu dan hak sipil mereka yang terampas selama ratusan tahun.

C. Gerakan Perempuan (*Woman Movement*)

Latar belakang perempuan Barat yang kelam akhirnya memunculkan gerakan-gerakan perempuan yang menuntut hak dan kesetaraan dengan kaum laki-laki. Gerakan perempuan memunculkan sejumlah tokoh perempuan, sebut saja Susan B. Anthony dan Elizabeth Cady Staton, yang memiliki surat kabar sendiri yaitu *The Revolution*. Melalui surat kabar ini perempuan-perempuan itu menuliskan pemikiran mereka yang mempersoalkan masalah perceraian, prostitusi dan peran gereja dalam mensubordinasi perempuan (Arivia, 2002: 20). Sebelum feminis digunakan sebagai ungkapan umum dalam bahasa Inggris, kata-kata seperti *“womanism, the woman movement, atau woman questions* telah digunakan terlebih dulu (Sheila, 1992, hal. 11).

Kata “feminist” pertama kali ditemukan pada awal abad ke 19 oleh seorang sosialis berkebangsaan Perancis, yaitu Charles Fourier. Ide yang diusungnya adalah transformasi perempuan oleh masyarakat berdasarkan saling ketergantungan dan kerjasama, bukan pada kompetisi dan mencari keuntungan. Pemikirannya ini mempengaruhi banyak perempuan dan mengkombinasikan antara emansipasi pribadi dengan emansipasi sosial.

Revolusi yang terjadi di Eropa membuat gerakan perempuan mendapatkan kesempatan untuk ikut menyuarakan kepentingan mereka. Pada Revolusi Puritan di Inggris Raya

pada abad 17, kaum perempuan puritan berusaha untuk mendefinisikan ulang area aktivitas perempuan dengan menarik legitimasi dari doktrin-doktrin yang menjadi otoritas bapak, laki-laki, pendeta dan pemimpin politik. Revolusi Puritan telah menghasilkan *ferment* di mana semua bentuk hirarki ditulis oleh semua anggota sekte yang radikal di Inggris Raya (Sheila, 1992:11). Pada tahun 1890, kata feminis digunakan untuk mendeskripsikan kampanye perempuan pada pemilihan umum ketika banyak organisasi telah didirikan di Inggris untuk menyebarkan ide liberal tentang hak individual perempuan (Sheila, 1992:8).

Revolusi Perancis (1789) juga telah memberi pengaruh besar pada gerakan perempuan di Barat. Kaum perempuan saat itu terus bergerak memanfaatkan gejolak politik di tengah revolusi yang mengusung isu *liberty, equality, and fraternity*. Pada bulan oktober 1789 perempuan-perempuan pasar di Perancis berjalan dari Versailles yang diikuti oleh pasukan keamanan Nasional. Roti hilang dari pasaran, para perempuan miskin kemudian melakukan aksi masa menuntut Raja agar mengontrol harga dan konsumsi dan menye diakan roti murah bagi rakyat. Di Perancis, saat itu masyarakat terpecah menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok moderat yang masih menghendaki Konstitusi Monarki dan kelompok radikal yang menginginkan Monarki berakhir. Gerakan perempuan aktif mendukung kelompok radikal yang mendukung ide-ide Republik, walaupun kemudian akhirnya mereka terlibat dalam pertikaian politik antar faksi-faksi yang ada. Dan akhirnya pada tahun 1792, kaum perempuan memperoleh hak untuk bisa bercerai dengan suaminya (Sheila, 1992:27-29). 35

Dua feminis yang terkemuka, Lucretia Mott dan Elizabeth Cady Stanton, pada tahun 1848 mengorganisir pertemuan akbar Konvensi Hak-Hak Perempuan di Seneca Falls yang dihadiri oleh 300 peserta laki-laki dan perempuan. Pertemuan itu kemudian menghasilkan deklarasi yang menuntut

reformasi hukum-hukum perkawinan, perceraian, properti dan anak. Di dalam deklarasi tersebut mereka memberi penekanan kepada hak perempuan untuk berbicara dan berpendapat di dunia publik. Konvensi di Seneca Falls merupakan bentuk protes kaum perempuan terhadap pertemuan akbar konvensi penghapusan perbudakan sedunia pada tahun 1840, dimana kaum perempuan tidak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya (Arivia, 2002:114).

Pada awal abad 20 "Feminisme" digunakan di Amerika dan Eropa untuk mendeskripsikan elemen khusus dalam pergerakan perempuan yang menekankan pada keistimewaan" dan perbedaan perempuan, dari pada mencari kesetaraan. Feminisme digunakan untuk mendeskripsikan tidak hanya kampanye politik untuk pemilihan umum tetapi juga hak ekonomi dan sosial, seperti pembayaran yang setara (*equal pay*) sampai KB atau (*birth control*). Dari sekitar perang dunia I, beberapa perempuan muda meyakinkan bahwa feminism saja tidak cukup, kemudian mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai feminis sosialis. Kaum sosialis perempuan yang lain menentang feminism. Mereka melihat feminism hanya mengekspresikan secara eksklusif kepentingan perempuan kelas menengah dan professional (Sheila, 2002:9).

Kaum Feminis kemudian mengembangkan konsep gender pada tahun 1970 sebagai alat untuk mengenali bahwa perempuan tidak dihubungkan dengan laki-laki di setiap budaya dan bahwa kedudukan perempuan di masyarakat pada akhirnya berbeda-beda (Sheila, 2002:12). Kemudian wacana jender diperkenalkan oleh sekelompok feminis di London pada awal tahun 1977. Sejak itu para feminis mengusung konsep gender *equality* atau kesetaraan jender sebagai mainstream gerakan mereka. Gender menurut Unger (Lips, 2003, hal. 6-7) adalah, "*a term used to encompass the social expectations associated with femininity and masculinity.*" Para

feminis berpendapat jender merupakan konstruk sosial, dan berbeda dengan "sex" yang merujuk pada anatomi biologis. Gender dipengaruhi oleh kondisi sosial-budaya, agama, dan hukum yang berlaku di masyarakat serta faktor-faktor lainnya. Lips berpendapat, gender tidak hanya terdiri dari dua jenis, yaitu feminin dan maskulin, seperti umumnya diketahui oleh masyarakat luas. Tetapi beliau mengakui adanya gender ketiga yang bersifat cair dan bisa berubah-ubah, dan telah dikenal oleh masyarakat pada berbagai macam budaya yang berbeda. Gender ketiga ini tidak bisa dikategorikan sebagai feminin atau maskulin, tetapi mereka adalah kaum homoseksual dan *transvestite* (seseorang yang senang berpakaian gender lainnya).

D. Dasar Pemikiran dan Isu-Isu Feminisme

Pada mulanya para feminis menggunakan isu "hak" dan "kesetaraan" perempuan sebagai landasan perjuangannya, tetapi feminism akhir 1960-an menggunakan istilah "penindasan" dan "kebebasan" yang kemudian feminism menyatakan dirinya sebagai "gerakan pembebasan perempuan". Secara umum kelahiran Feminisme dibagi menjadi tiga gelombang (*wave*) yang mengangkat isu yang berbeda-beda.

1. Gelombang Pertama

Gelombang pertama ditandai dengan publikasi Mary Wollstonecraft yang berjudul "*Vindication of the Rights of Women*" tahun 1792. Wollstonecraft mendeskripsikan bahwa kerusakan psikologis dan ekonomi yang dialami perempuan disebabkan oleh ketergantungan perempuan secara ekonomi kepada laki-laki dan pemunggiran perempuan dari ruang publik (Sheila, 2002:8). Ada dua tokoh lainnya seperti Sejourner Truth, dan Elizabeth Cady Stanton. Perhatian feminis gelombang pertama adalah memperoleh hak-hak poli-

tik dan kesempatan ekonomi yang setara bagi kaum perempuan. Feminis berargumentasi bahwa perempuan memiliki kapasitas rasio yang sama dengan laki-laki. Aksi politik feminis yang dimotori oleh kaum feminis liberal telah membawa perubahan pada kondisi perempuan saat itu. Perempuan berhasil mendapatkan hak pilihnya dalam pemilu pada tahun 1920, dan bukan hanya itu, kaum feminis berhasil memenangkan hak kepemilikan bagi perempuan, kebebasan reproduksi yang lebih dan akses yang lebih besar dalam bidang pendidikan dan professional (Cudd and Andreasen (2005:7).

Teori-Teori Feminisme Gelombang Pertama

	Dasar Pemikiran	Isu-Isu Feminis	Tokoh Feminis & Karyanya
Feminisme Liberal	Manusia adalah otonom yang dipimpin oleh akal (<i>reason</i>). Dengan akal manusia mampu untuk memahami prinsip-prinsip moralitas, kebebasan individu. Prinsip-prinsip ini juga menjamin hak-hak individu.	Akses pendidikan Kebijakan negara yang bias gender. Hak-hak sipil, politik.	Mary Wollstonecraft: <i>A Vindication Rights of The Woman</i> (1779), John Stuart Mill & Harriet Taylor: <i>Early Essay on Marriage and Divorce</i> (1832), <i>Enfranchisement of Women</i> (1851). Betty Friedan : <i>The Feminine Mystique</i> (1974), <i>The Second Stage</i> (1981)

Feminisme Radikal	Sistem seks/jender merupakan dasar penindasan terhadap perempuan	Adanya seksisme, masyarakat patriarki. Hak-hak reproduksi. Hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki (<i>power relationships</i>). Dikotomi <i>Private/Public</i> . Lesbianisme	Kate Millet: <i>Sexual Politics</i> (1970). Shulamith Firestone; <i>The Dialectic of Sex</i> (1970). Marilyn French: <i>Beyond Power</i> (1985). Mary Daly: <i>Beyond God the Father Toward a Philosophy of Women's Liberation</i> (1973). Ann Koedt : <i>The Myth of the Virginal Orgasm</i> (1970)
Feminisme Marxis/Sosialis	Materialisme Historis Marx yang mengatakan bahwa modus produksi kehidupan material mengkondisikan proses umum kehidupan sosial, politik dan intelektual. Bukan kesadaran	Ketimpangan ekonomi. Kepemilikan properti. Keluarga dan kehidupan domestik dibawah kapitalisme. Kampanye pengupahan kerja domestik.	Friederich Engels: <i>The Origin of The Family, Private Property and the State</i> (1845). Margareth Benston: <i>The Political Economy of Women's Liberation</i> (1960). Mararosa Dalla Costa & Selma

<p>yang menentukan eksistensi seseorang tetapi eksistensi sosial mereka yang menentukan kesadaran mereka.</p>		<p>James: <i>The Power of Women and the Subversion of Community</i> (1972).</p>
---	--	---

Sumber: Gadis Arivia, 2002

2. Gelombang Feminis Kedua

Pada tahun 1949 ditandai dengan munculnya publikasi dari Simone de Beauvoir's, *The Second Sex*. Beauvoir berargumentasi bahwa perbedaan gender bukan berakar dari biologi, tetapi memang sengaja diciptakan untuk memperkuat penindasan terhadap kaum perempuan. Pernyataan ini terrefleksikan dari pernyataan klasiknya, " *one is not born, but rather becomes a woman; it is civilization as a whole that produce this creature... which is described as feminine.*" Bagi feminis gelombang ke-2 kesetaraan politik dan hukum tidak cukup untuk mengakhiri penindasan terhadap kaum perempuan. Dalam sudut pandang mereka, penindasan sexist tidak hanya berakar pada hukum dan politik, tetapi penyebabnya *embedded* pada setiap aspek dari kehidupan sosial manusia, termasuk ekonomi, politik dan sosial *arrangements*, serta norma-norma, kebiasaan, interaksi sehari-hari dan hubungan relasi personal. Mereka berpendapat bahwa feminism harus mendapatkan kesetaraan ekonomi secara penuh bagi perempuan, dan bukan hanya sebatas untuk bertahan secara ekonomi. Feminis gelombang kedua juga mulai menggugat institusi pernikahan, *motherhood*, hubungan lawan jenis (*heterosexual relationships*), seksualitas perempuan dan

lain-lain. Mereka berjuang keras untuk merubah secara radikal setiap aspek dari kehidupan pribadi dan politik (Cudd dan Andreasen, 2005:7). 38

Teori-Teori Feminisme Gelombang Kedua

	Dasar Pemikiran	Isu-Isu Feminis	Tokoh Feminis & Karyanya
Feminisme Psikoanalisis	Penjelasan mendasar pembedaan perempuan terletak pada psihologi perempuan, cara perempuan berpikir.	Drama psikoseksual Oedipus dan kompleksitas kastasi (Freud). Ego-sentrisme laki-laki yang menganggap perempuan menderita "penis envy" Reinterpretasi Oedipus kompleks. Dual Parenting. Feminisme Gender-etika perempuan.	Karen Horney
Feminisme Eksistensialisme	Konsep adadari Jean Paul Sartre: <i>Etre-en-soi, Etre-pour-soi, Etre-Pour-les-autres</i>	Analisa ketertindasan perempuan karena dianggap sebagai "other" dalam cara beradanya di <i>entre-pour-lesautres</i>	Simone de Beauvoir: <i>The Second Sex</i> (1949)

Sumber: Gadis Arivia, 2002

3. Feminis Gelombang Ketiga

Dimulai pada tahun 1980 oleh feminis yang menginginkan keragaman perempuan (*women's diversity*) atau keragaman secara umum, secara khusus dalam teori feminis dan

politik. Sebagai contoh perempuan kulit berwarna dipertahankan ketika dahulu pengalaman, kepentingan dan perhatian mereka tidak terwakili oleh feminis gelombang kedua yang didominasi oleh wanita kulit putih kelas menengah. Sebagai contoh ketertindasan perempuan perempuan putih kelas menengah berbeda secara signifikan dengan penindasan yang dialami oleh perempuan kulit hitam Amerika. Ketertindasan kaum perempuan *heterosexual* berbeda dengan ketertindasan yang dialami oleh kaum lesbi, dan sebagainya.

Teori-Teori Feminisme Gelombang Ketiga

	Dasar Pemikiran	Isu-isu Feminis	Tokoh/ Pemikiran dan Karya Feminis
Feminisme Postmodern	Seperti aliran posmoderenisme menolak pemikiran <i>phallogocentrism</i> (ide-ide yang dikuasai oleh logos absolut yakni "laki-laki" berreferensi pada phallus)	"Otherness" dari perempuan yang dilontarkan oleh Simone de Beauvoir, merupakan sesuatu yang lebih dari kondisi inferioritas dan keter-tindasan tetapi juga merupakan cara berada, cara berpikir, berbicara, keterbukaan, pluralitas,	Helene Cixous, "L'écriture Feminine". Luce Irigaray, "Speculum"-refleksi perempuan. Julia Kristeva, "To be able to "Play" between Semiotic and Symbolic Realism." Linda Nicholson, "Feminism Postmodern".

	Dasar Pemikiran	Isu-isu Feminis	Tokoh/ Pemikiran dan Karya Feminis
		diversitas dan perbedaan	
Feminisme Multikultural	Sejalan dengan filsafat postmodern tetapi lebih menekankan kajian kultural.	Pemindasan terhadap perempuan tidak dapat hanya dijelaskan lewat patriarki te-tapi ada keterhubungan masalah dengan ras, etnisitas, dsb, (<i>interlocking system</i>). Didalam Feminisme Global bukan saja ras dan etnisitas, tetapi juga hasil kolonialisme dan diktomi "dunia pertama" dan "dunia ketiga"	Audre Lorde: <i>Age, Race, Class and Sex: Women Redefining Difference</i> (1995). Alice Walker: <i>Coming Apart</i> (1991). Angela Y Davis: <i>Women, Race and Class</i> (1981). Charlotte Bunch: <i>Prospects For Global Feminism</i> (1985). Susan Brownmiller: <i>Against Our Will: Men, Women and Rape</i> (1976). Susan Bordo: <i>Feminism, Postmodernism, and Gender-Skepticism</i>

	Dasar Pemikiran	Isu-isu Feminis	Tokoh/ Pemikiran dan Karya Feminis
			(1990). Maria Mies; <i>The Need for a New Vi-sion</i> (1993).

Sumber: Gadis Arivia, 2002

E. Gerakan Kesetaraan dan Kebebasan Feminisme

Isu kesetaraan dan kebebasan yang diperjuangkan kaum feminis merupakan konsep abstrak, bias dan absurd karena sampai saat ini para feminis sendiri belum sepakat mengenai kesetaraan dan kebebasan seperti apa yang diinginkan kaum perempuan. Terminologi "Feminis" sendiri memiliki beragam definisi berdasarkan latar belakang sejarahnya (Beasley, 1999:27). Walaupun pada awal kemunculannya feminism tampak seperti gerakan reaktif terhadap penindasan gereja, tetapi perkembangannya di kemudian hari memperlihatkan akar dari gerakan ini adalah paham relativisme yang menganggap bahwa benar atau salah, baik atau buruk, senantiasa berubah-ubah dan tidak bersifat mutlak, tergantung pada individu, lingkungan maupun kondisi sosial.

Salah satu efek dari paham relativisme yang dianut oleh kaum feminis, adalah menyuburkan praktik-praktik homoseksual di dalam masyarakat, karena apa yang dulu dianggap salah, kini dengan dalih penghormatan terhadap HAM, telah berubah menjadi sebuah kebenaran. Di Barat, pasangan lesbi kini dapat menikah secara legal dan diakui oleh negara secara sah. Para feminis radikal berpendapat dominasi laki-laki berpusat dari seksualitas, karena dalam hubungan heteroseksual, perempuan menjadi pihak yang ter-

subordinasi. Tetapi dengan menjadi lesbi, perempuan memiliki kontrol yang sama dan tidak ada dominasi dalam hubungan seksual di antara mereka. Hal itu tertuang dalam pernyataan Charlotte Bunch (1978),

The Lesbian is most clearly the antithesis of patriarchy—an offense to its basic tenets. It is woman-hating; we are woman-loving. It demands female obedience and docility; we seek strength, assertiveness, and dignity for women. It bases power and defines roles on one's gender and other physical attributes; we operate outside gender-defined roles and seek a new basis for defining power and relationship (Chrisler, Joan C, et all, 2000:174-175). (Lesbian adalah antitesis paling jelas dari patriarki yang melanggar prinsip dasar. Hal inilah yang menjadikan kami perempuan pembenci, padahal kami adalah perempuan pencinta. Patriarki menuntut kepatuhan dan ketaatan perempuan; kami mencari kekuatan, ketegasan, dan harga diri bagi perempuan. Hal inilah yang mendasari kekuatan untuk memaknai peran gender seseorang dan atribut-atribut fisik lainnya; kami beroperasi di luar definisi peran gender dan kami mencari dasar baru untuk memaknai relasi dan kekuatan).

Garnets berpendapat kaum lesbian pada umumnya mengalami perasaan bebas dari ikatan hambatan-hambatan peran gender. Pasangan lesbian memiliki kemampuan untuk menciptakan pola hubungan baru dan dapat mengurangi kekuatan yang tidak berimbang yang kadang ditemukan dalam hubungan tradisional heteroseksual (Chrisler, 2000: 174).

Begitulah kira-kira pandangan para feminis terhadap kaum lesbian. Ketika ajaran agama menentang dengan keras penyimpangan moral semacam itu, para aktivis feminis justru menyuarakan dengan lantang pembelaan terhadap praktik lesbian kepada tokoh-tokoh agama atas nama 'kebebasan. "

Gerakan feminis juga memunculkan masalah-masalah sosial baru yang membuat peradaban Barat berada di ambang kehancuran. Isu kebebasan telah membuat perzinahan

diakui sebagai hak individu dan negara tidak boleh memberikan sangsi hukum bagi para pelakunya. Kaum perempuan Barat banyak yang memilih untuk tidak menikah dan menganggap pernikahan sebagai bentuk pengekangan terhadap kebebasan mereka. Penemuan alat kontrasepsi dan dilegal-kannya praktik aborsi telah menjadikan perempuan Barat terjerumus dalam pergaulan bebas tanpa takut resiko memiliki anak di luar pernikahan. Bagi perempuan yang masih memiliki sedikit hati nurani kemudian memilih untuk menjadi *single parents* walau konsekuensinya anak-anak itu terlahir dan tumbuh tanpa mengenal sosok ayahnya. Saat ini, eksplorasi terhadap kaum perempuan dan anak-anak semakin merajalela, yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Gerakan feminis pada akhirnya telah menjauhkan perempuan dari kehangatan sebuah keluarga. Kaum perempuan terlalu sibuk mengejar karir dan bersaing dengan laki-laki untuk membuktikan eksistensi mereka. Banyak dari mereka kemudian mengalami alienasi, depresi dan masalah psikologis lainnya, karena melawan naluri dan kodrat sebagai perempuan. Masyarakat Barat pun akhirnya tersadar dari kekeliruannya dan gerakan feminis dituding sebagai biang kerok atas kehancuran moral yang menimpa kaum perempuan sehingga gerakan ini berangsur-angsur surut dan kini hanya tinggal wacana saja.

F. Perempuan Islam dan Feminis

Melihat latar belakang sejarah, konsep dan isu-isu feminism, perempuan di dunia Islam sebenarnya tak perlu silau oleh pemikiran-pemikiran kaum feminis. Isu hak dan kesejahteraan yang diagung-agungkan Barat, muncul karena penolakan perempuan Barat terhadap doktrin gereja yang memmarginalkan kaum perempuan selama berabad-abad. Doktrin gereja telah mengekang hak-hak perempuan untuk me-

ngembangkan diri dan memiliki akses kepada pendidikan. Begitu juga dengan hak-hak sipil perempuan yang terpinggirkan karena perempuan dipandang sebagai masyarakat kelas dua. Tentunya hal-hal tersebut tidak ditemui dalam ajaran dan doktrin-doktrin Islam. Agama Islam sejak abad ke-7 M telah menempatkan perempuan dalam posisi yang begitu mulia, seperti pendapat beberapa wanita Barat yang memeluk agama Islam karena tertarik oleh keadilan dan kemuliaannya. Annie Besants berkata tentang wanita Islam, "Sesungguhnya kaum perempuan dalam naungan Islam jauh lebih merdeka dibandingkan dalam mazhab-mazhab lain. Islam lebih melindungi hak-hak perempuan daripada agama Masehi. Sementara kaum perempuan Inggris tidak memperoleh hak kepemilikan, kecuali sejak 20 tahun yang lalu, Islam telah memberikan sejak awal (Jamal, 1991: 1)."

Isu "kebebasan" telah membuat perempuan Barat mengingkari kodrat mereka sebagai perempuan. Melihat problematika sosial yang melanda masyarakat Barat saat ini, terutama kaum perempuannya, sungguh naif jika masih ada saja orang-orang yang menganggap bahwa feminism dapat memberikan solusi bagi permasalahan perempuan di dunia Islam. Kita sepatutnya merasa iba kepada Barat karena tanpa sadar mereka telah menjadi korban ideologi yang merusak tatanan sosial kemasyarakatan dan mencabut nilai-nilai religius dari peradaban mereka.

BAB V

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN GENDER

A. Pendahuluan

Gerakan perempuan dimulai dengan gerakan feminis yang pada mulanya adalah gerakan sekelompok aktivis perempuan Barat, yang kemudian lambat laun menjadi gelombang akademik di universitas-universitas, termasuk di negara-negara Islam, melalui program "*woman studies*". Gerakan perempuan telah mendapat "restu" dari Perserikatan Bangsa Bangsa dengan dikeluarkannya CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Negara dan lembaga serta organisasi-organisasi di dunia terus mendukung gerakan-gerakan perempuan, walaupun menurut Khan (Suki, 2000:5) dukungan tersebut memiliki efek negatif bagi gerakan perempuan karena aktivis perempuan telah kehilangan sudut pandang politik (*political edge*) dan juga untuk beberapa kasus telah kehilangan komitmennya.

Bagaimanakah sebenarnya awal kemunculan gerakan feminis di Barat? Benarkah gerakan feminis menawarkan solusi bagi berbagai permasalahan yang dialami kaum perempuan? Perlu dibuktikan bahwa feminisme yang mengusung isu gender, lahir dari latar belakang kultural-historis yang dialami dunia Barat. Walaupun beberapa tokoh feminis bersikukuh bahwa gender bukan merupakan konsep Barat, tetapi berasal dari konstruksi linguistik dari berbagai bahasa yang memberi kata sandang tertentu untuk memberikan perbedaan jenis kelamin perempuan dan laki-laki.

Kesetaraan gender disosialisasikan dengan gencar dan sistematis ke seluruh dunia melalui media, ormas, LSM, lembaga pendidikan formal dan nonformal. Wilayah gerakan

gender begitu luas, dari tingkat internasional sampai menjangkau institusi masyarakat yang terkecil, yaitu RT. Dengan mengatasnamakan HAM, para aktivis perempuan kemudian berusaha mempengaruhi pemerintah dalam masalah kebijakan sampai teknis operasional. Usaha mereka sepertinya mulai menampakkan hasil dengan diratifikasinya isi CEDAW sehingga keluarlah UU no. 7 tahun 1984.

B. Perkembangan Status dan Peranan Perempuan

Secara biologis perempuan dan laki-laki memang tidak sama, akan tetapi sebagai makhluk jasmani dan rohani yang diperlengkapi dengan akal budi dan kehendak merdeka, kedua macam insan itu mempunyai persamaan yang hakiki. Keduanya adalah pribadi yang mempunyai hak sama untuk berkembang. Namun dalam kenyataannya, baik di negara maju maupun di negara berkembang, perempuan dianggap sebagai warga negara kelas dua yang selalu mengalami kesulitan untuk menikmati hak yang dimilikinya.

Jawaban untuk pertanyaan sejak kapan perempuan dikategorikan sebagai "kelamin kedua" yang berada di bawah subordinasi laki-laki, antara lain dapat dicari pada pelacakan kaum arkeolog yang meneliti kehidupan dan kebudayaan penduduk pada zaman pra-sejarah. Di antara hasil penelitian zaman paleolitikum, sebuah periode yang sangat panjang dan berakhir pada sekitar tahun 12.000 S.M., penduduknya adalah pengumpul pangan dan pemburu hewan serta ikan (Lucas, 1953). Mengingat mata pencaharian utamanya sebagai pemburu (*hunter*), maka Washburn dan Lancaster (1968) memunculkan konsep *Man the Hunter* yang menunjukkan bahwa hanya laki-laki saja yang melakukan pekerjaan berburu. Akibatnya banyak antropolog mengartikan istilah *man* (manusia) sinonim dengan *male* (laki-laki). Dalam hal ini berburu tidak hanya merupakan aktivitas ekonomi, melainkan

sebagai keseluruhan pola aktivitas kehidupan kaum pria (Reiter, 1975).

Selanjutnya untuk mendukung argumen bahwa berburu itu penting bagi kaum laki-laki, maka Washburn dan Lancaster (1968) mengingatkan bahwa kaum laki-laki pada zaman modern pun mempunyai arti ekonomis. Berburu digambarkan sebagai kegiatan laki-laki untuk dibedakan dari perempuan. Konsep *Man the Hunter* itu akhirnya menggiring kita pada kesimpulan bahwa kaum laki-laki memiliki postur tubuh yang kekar dan kuat, rasional, dan bersifat agresif, sehingga mampu berburu hewan liar secara kasar dan membunuhnya.

C. Munculnya Stereotipe

Kiranya dapat disebutkan bahwa *domination rape* merupakan kejahatan perkosaan oleh kaum laki-laki dikarenakan ingin menunjukkan kekuasaan atau superioritasnya sebagai laki-laki terhadap perempuan dengan tujuan akhir penaklukan dari segi seksual. Sebaliknya perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah, emosional, memerlukan perlindungan, kurang inisiatif, kurang dinamis, lebih pasif dan lebih submisif daripada laki-laki.

Sebagai pemburu, kaum laki-laki mendapatkan kemanjangan kultural yang jauh lebih banyak daripada yang diperoleh kaum perempuan. Hal ini dikaitkan dengan cara mereka berburu secara kelompok ke tempat-tempat yang cukup jauh. Agar supaya usaha mereka itu berhasil baik, maka mereka belajar bekerjasama, mengembangkan teknik berburu dengan menciptakan alat-alat baru dan senjata, meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan berorganisasi. Mereka juga mulai menggunakan bahasa dan menghasilkan benda-benda kesenian, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Menurut Gough, seorang antropolog, pada wak-

tu itu telah berbentuk keluarga. Perempuan dan anak-anak tidak ikut berburu dan mereka tinggal di tempat kediannya, mencari dan mengumpulkan makanan dari tempat yang tidak berjauhan. Hidup mereka sedikit banyak tergantung pada laki-laki pemburu yang datang dengan membawa basil buruannya yang kaya protein (Reiter, 1975).

D. Munculnya Zaman Neolitikum atau Zaman Baru

Sebuah revolusi terjadi pada sekitar tahun 6.000 S.M. dan mulailah zaman neolitikum, atau zaman baru. Mata pencaharian sebagai pengumpul pangan dan berburu hewan serta ikan mulai ditinggalkan, diganti dengan cara bertanam bahan makanan dan buah-buahan serta beternak. Perubahan besar dalam kebudayaan ini tidak hanya terbatas pada bidang agraris dan peternakan saja, melainkan juga dalam kegiatan lain. Di antaranya timbulnya perdagangan, adanya penemuan-penemuan baru yang memungkinkan perluasan kehidupan ekonomi dengan membuat perahu-perahu, penemuan-penemuan roda, sehingga orang mampu membawa barang-barang berat dari jarak jauh, selanjutnya penemuan bajak yang membawa kemajuan besar dalam bidang pertanian (Lucas, 1953).

Kemajuan dalam berbagai bidang itu memantapkan pembagian kerja berdasarkan seksual, yang akarnya telah tumbuh pada zaman paleolitikum. Kaum laki-laki secara leluasa melakukan aktivitas dalam kehidupan publik, berarti peran yang dilakukan memungkinkan dirinya untuk berkembang. Sebaliknya kaum perempuan semakin disibukkan oleh pekerjaan rumah tangga, menjaga dan membesarkan anak-anak, mengurus ternak, membakar roti, membuat susu, keju, dan mentega dari susu sapi atau kambing (Reiter, 1975). Melihat keunggulan kaum laki-laki itu, kaum perempuan mulai dihinggapi perasaan inferior.

Pembagian kerja berdasarkan seksual itu berlaku secara universal dan berlangsung sejak zaman pra-sejarah, melewati zaman kuna, zaman abad-abad pertengahan, zaman kapitalis-merkantilisme sampai pada zaman masyarakat industrial. Walaupun sudah hidup pada zaman maju, namun kehidupan perempuan masih banyak yang berputar sekitar kehidupan rumah tangga.

Pada zaman maju itu makin besar ketergantungan ekonomis kaum perempuan pada laki-laki, karena suami bekerja mendapatkan gaji yang dipakai untuk biaya seluruh kebutuhan keluarga. Sebaliknya perempuan yang bekerja dalam rumah tangga tidak menghasilkan uang. Perasaan inferior pada perempuan semakin bertambah dan sebab utamanya adalah faktor keterasingan yang membuat perkembangan kepribadiannya tidak terangsang. Di kalangan para ahli filsafat pembagian kerja secara seksual itu menarik perhatiannya. Menurut Aristoteles (384-422 S.M.), seorang intelek terbesar zaman Yunani kuna yang dikenal sebagai ahli filsafat dan ilmuwan, berpendapat bahwa perempuan adalah "Laki-laki yang tidak lengkap". Pendapat ini dapat dihubungkan dengan istilah *famulus* (Latin) atau *family* (Inggris), yang mula-mula berarti budak domestik. *Familia* berarti sejumlah budak yang dimiliki seorang laki-laki dewasa, termasuk di dalamnya anak-anak dan istri. Perempuan digolongkan dalam kelompok yang dikuasai oleh laki-laki, karena jiwanya dianggap tidak sempurna. Oleh sebab itu, dapatlah dimengerti bahwa dalam pelaksanaan demokrasi di Yunani kuno pada sekitar tahun 5000 S.M., kaum perempuan, sama seperti yang berlaku pada anak-anak dan budak, tidak mempunyai hak memilih.

E. Pendapat Para Ahli Filsafat tentang Perempuan

Para ahli filsafat abad XVIII dan XIX antara lain Kant (1724-1804) dan muridnya, Fichte (1762-1814), juga Schopenhauer (1788-1860) menganggap bahwa kaum perempuan lebih lemah daripada laki-laki, sebab itu wajar kalau tempat mereka di rumah. Mill (1806-1873), tokoh pemikir Inggris yang berhaluan liberal, mendasarkan pendapatnya pada falsafah liberal, yaitu bahwa semua orang diciptakan dengan hak-hak yang sama, dan setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. Dalam melaksanakan kebebasan mengembangkan bakat, perempuan memilih rumah tangga, sedang kaum laki-laki memilih kehidupan publik atau profesi.

Montagu (1971) mengemukakan bahwa sifat-sifat psikologis dan sosial membuktikan bahwa perempuan lebih unggul daripada laki-laki. Selain itu terdapat pula fakta-fakta yang membuktikan bahwa perempuan adalah organisme yang secara biologis lebih unggul, unggul dalam arti menikmati nilai kelangsungan hidup (*survival*) yang lebih tinggi daripada laki-laki berkat sifat-sifat biologisnya. Fakta-fakta itu seharusnya dapat melenyapkan mitos inferioritas fisik terhadap pria. Kekuatan otot tidak boleh dikacaukan dengan kekuatan komposisi dan menurut komposisinya adalah yang lebih kuat (Montagu, 1971).

Tokoh lain, Freud (1856-1939), pendasar ajaran psychoanalisis, bahwa dunia, dunianya laki-laki. Perempuan diukur dengan kacamata: apa yang berlaku bagi laki-laki dan apa yang ditentukan oleh laki-laki. Pandangan Freud ini dikenal sebagai *phallocentric*, karena penekanannya pada organ kelamin laki-laki sebagai sumber kekuasaan (Sadli, 1988). Pemikiran teoretis di atas menunjukkan bahwa masalah perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki mencakup dua bagian. *Pertama*, pemikiran yang dipengaruhi oleh pendekatan biologis (*nature*) yang tidak memberi pertimbangan

pada unsur sosial-budaya. Ini berarti bahwa faktor-faktor luar hampir tidak berpengaruh sarna sekali. *Kedua*, pemikiran yang dipengaruhi oleh pendekatan sosial-budaya yang mempertimbangkan peranan yang besar dari kekuatan-kekuatan luar. Kedua bagian itu merupakan kutub-kutub yang sulit dipertemukan dan merupakan sumber diskusi atau perdebatan. Sesudah secara sepintas dikemukakan mengenai akan adanya pembagian secara seksual dan beberapa pendapat para ahli pikir, maka uraian berikut ini dibatasi pada perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya dalam rumah tangga. Pembahasan mengenai hal ini tidak dapat lepas dari struktur masyarakat tempat keluarga-keluarga itu berada.

Marshall, peneliti status dan peranan perempuan Skotlandia sejak abad XI sampai abad XX, membagi status perempuan di negeri itu menjadi dua kategori. *Pertama*, *the passive Women* yang berlangsung cukup lama dan berakhir pada tahun 1830. *Kedua*, *the active Woman* yang dimulai sejak tahun 1830 (Marshall, 1983). Pembagian Marshall ini kiranya dapat diterapkan di negara-negara lain, baik negara maju maupun negara berkembang, dengan catatan bahwa awal periode *the active Women* itu tidak sama.

F. Bangkitnya Kaum Perempuan untuk Membela Kaumnya

Di Amerika Serikat, bangkitnya perempuan untuk membela kaumnya lebih dulu dari sahabat-sahabatnya di Eropa. Gerakan Feminisme di negeri itu bertujuan memperjuangkan hak-hak bagi kaumnya untuk merasakan seperti apa yang dinikmati oleh kaum laki-laki. Perjuangan ini diawali dengan mendirikan *College* untuk anak-anak perempuan yang didirikan pada tahun 1823 di New York dan di Massachusetts pada tahun 1837, kemudian diikuti dengan pendiri-

an *colledge-colledge* lainnya. Mula-mula *College* untuk anak-anak perempuan itu dicemoohkan oleh kaum laki-laki yang disebutnya sebagai *She College* (Lucas, 1953). Di Skotlandia gerakan semacam itu dimulai pada tahun 1830, sedang di Inggris berlangsung lebih kemudian.

Inggris pada waktu pemerintahan Ratu Victoria (1837-1901) merupakan periode yang menyenangkan bagi kaum laki-laki, karena mereka aman dalam kubu *infallibilitas*-nya (sifat tidak dapat salah). Mereka sangat pasti terhadap superioritas jenis kelaminnya dan inferioritas kaum perempuan. Sebagai ilustrasi dapat disertakan di sini bahwa Ratu Victoria pernah marah sekali terhadap siapa pun yang membaca, menulis dan bergabung dengan gerakan yang memperjuangkan "Hak-hak Perempuan". Ratu berpendapat bahwa Tuhan menciptakan laki-laki berbeda dari perempuan, sebab itu dibiarkan mereka tetap pada kedudukannya masing-masing (Bowman, 1954).

Di negara berkembang pada umumnya, termasuk Indonesia, peranan perempuan baru dimulai sejak abad XX. Pada periode *Perempuan Pasif*, kehidupan perempuan berputar di sekitar kehidupan rumah tangga. Tujuan seakan-akan hanyalah untuk menikah dan membangun rumah tangga, oleh karena itu anak gadis tidak sempat memiliki cita-cita. Mereka tidak mengenal masa remaja, karena sesudah berusia sekitar dua belas tahun mereka telah berumah tangga. Calon suami ditentukan oleh orang tuanya, terutama oleh ayahnya (Marshall, 1983; Kartini, 1979).

Sesudah perempuan menikah hampir seluruh kehidupannya disibukkan oleh pekerjaan rumah tangga. Di kalangan tingkat tinggi pola kawin muda untuk anak-anak perempuan juga sering dilakukan. Banyak di antara perkawinan itu, terutama yang berlaku pada putri-putri raja, menggunakan dasar kepentingan diplomatik yang menguntungkan bagi negerinya. Pada umumnya pria yang dimulai mencari jodohnya sangat memperhatikan faktor kekayaan, status,

reputasi keluarga gadis yang akan dilamar, dan juga faktor penampilan yang menarik dari gadis itu. Maksudnya agar dengan perkawinan itu kekayaan, kedudukan dan kehormatannya menjadi tambah. Akan tetapi gadis bangsawan pada umumnya juga mengajukan persyaratan bagi calon suaminya, di antaranya yang paling penting adalah kekayaan dan kedudukan.

Dengan demikian perkawinan di kalangan atas dan menengah dikaitkan dengan macam-macam tujuan perkawinan itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kedudukan sosialnya atau memindahkan kekayaan. Namun baiknya perkawinan di kalangan rakyat pada umumnya maupun golongan atas seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa perhatian ditujukan pada segi biologis. Sejak kecil anak-anak perempuan telah didasarkan akan kewajibannya apabila mereka kawin dan sebagai persiapannya mereka memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai ibu rumah tangga. Perlakuan orang tua terhadap anak perempuan dan laki-laki tidaklah sarna. Anak gadis dididik sebagai persiapan berumah tangga, sedang anak laki-laki dikirim ke sekolah sebagai persiapan memperoleh suatu profesi. Sesudah gadis-gadis diizinkan masuk sekolah, mereka diarahkan untuk mengambil jurusan kerumahtanggaan atau mengurus anak-anak. Ternyata pemilihan jurusan atau mata pelajaran yang dianut merupakan cermin pandangan tradisional mengenai peranan perempuan dan kaum laik-laki. Dengan demikian bidang-bidang pelajaran itu terbagi, sebagian khusus untuk laki-laki dan sebagian lainnya untuk perempuan. Pada zaman Renaissance (abad XVI) Erasmus mengarang buku pegangan mengenai sopan-santun untuk sekolah-sekolah anak laki-laki. Ini berarti bahwa yang perlu mengetahui sopan-santun, baik mengenai sikap, tingkah laku, tata cara di meja makan, maupun berbicara, hanyalah anak laki-laki (Elias, 1982). Sopan-santun dipakai sebagai

bekal bergaul atau berkomunikasi, apabila mereka di kemandirian hari terjun dalam masyarakat memegang suatu profesi.

Orang tua, termasuk kaum ibu yang pada umumnya menerima keunggulan laki-laki sebagai sesuatu yang wajar, secara tidak terasa telah menanamkan sifat superioritas laki-laki kepada anak-anaknya sejak usia dini. Hal ini tercermin pada ungkapan atau pepatah, antara lain sebagai berikut: "Anak laki-laki tidak boleh menangis". Berbuatlah seperti anak laki-laki". "Ia anak laki-laki yang sesungguhnya." Ungkapan terakhir itu biasanya disampaikan oleh seorang ayah yang menilai bahwa anaknya memenuhi standar sifat anak laki-laki (Bowman, 1954). Dalam bahasa Jawa terdapat ungkapan: mikul dhuwur, mendhem jero (memikul tinggi, menanam dalam), diperuntukkan bagi anak laki-laki yang mak-sudnya anak laki-laki dapat mengangkat derajat orang tuanya. Sebaliknya anak perempuan disebutnya "satru mung-ging cangklakan (seteru pakta ketiak), artinya anak perem-puan merupakan beban berat bagi orang tuanya.

Contoh lain, anak perempuan boleh bermain seperti anak laki-laki, misalnya memanjat pohon, tetapi hanya sampai waktu yang terbatas, selanjutnya ia tidak diizinkan lagi. Anak perempuan diizinkan berpakaian seperti anak laki-laki, sehingga seakan-akan tercipta mode unisex, sedangkan laki-laki yang tidak diperkenankan memakai pakaian perempuan. Seandainya ada yang melakukan, maka hal itu dinilai tidak normal. Sebaiknya yang kedudukannya supe-rior dilarang mengikuti yang inferior. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa secara tidak disadari pusat pendidikan keluarga, dalam melakukan enkulturasasi, ikut memperkuat kultur maskulin. Dikotomi laki-laki-perempuan tetap berlangsung, sehingga perempuan selalu dibayangi oleh su-perioritas laki-laki dan menyadari bahwa statusnya adalah sebagai *kanca wingking* (teman di garis belakang), dan sebagai sosok yang *swarga nunut, neraka katut* (kalau suami masuk sorga, istri ikut dan suami masuk neraka, istri terseret).

G. Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Uraian yang telah disampaikan di atas menggambarkan keadaan perempuan pada umumnya pada masa lampau. Perempuan Indonesia dewasa ini keadaannya sudah jauh berbeda: mereka juga dituntut untuk berpartisipasi secara aktif dalam Pembangunan Nasional. Perempuan Indonesia, termasuk yang sudah berkeluarga, dalam kedudukannya sebagai sumberdaya manusia, diusahakan agar mendapat kesempatan untuk mewujudkan potensi-potensinya secara optimal.

Jika pada awal abab ini, mengirim anak gadisnya ke sekolah dianggap menyuruh anaknya untuk menempuh jalan menuju kebinasaan, seperti yang berlaku di daerah Minangkabau (Subadio, 1983), maka anak-anak perempuan dewasa ini bebas memasuki sekolah yang diinginkan. Setelah berhasil menyelesaikan studinya, di SLTA atau di perguruan Tinggi, sebagian besar dari mereka masuk angkatan kerja, memegang suatu profesi tertentu. Pemilihan profesi tidak terbatas pada profesi guru, dosen, bidan, perawat, dokter, memimpin berbagai panti asuhan, dan lainnya yang tidak jauh dari tugas ibu di dalam rumah, melainkan juga telah menerobos bidang-bidang lain yang semula dimonopoli oleh kaum laki-laki. Di antaranya angkatan bersenjata, dunia bisnis modern dan jasa komputer, jasa notaris, bisnis media, katering, bisnis *public relations*, *marketing research*, serta bisnis kesenian dan teater. Menduduki pimpinan tertinggi dalam universitas atau dekan fakultas dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Selanjutnya perlu dicatat partisipasi perempuan dalam kegiatan politik, baik dalam badan legislatif maupun eksekutif. Diangkatnya perempuan sebagai Manteri Sosial untuk beberapa kali menunjukkan bahwa untuk kedudukan tradisional perempuan dianggap cocok memangku jabatan itu (Tahun, 1991).

Seperti yang dikemukakan oleh Marshall (1983), peneliti dari Skotlandia, pergantian dari periode *The Passive Women* ke periode *The Active Women* tidak berlangsung secara tiba-tiba, demikian pula dengan keadaan di Indonesia. Untuk sampai pada kemajuan perempuan Indonesia abad XX sekarang ini diperlukan suatu masa transisi. Pada masa transisi itu, berarti sejak zaman penjajahan Belanda banyak perempuan yang mendarmabaktikan dirinya dengan melakukan kegiatan sosial lewat jalur organisasi, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah, Adanya keragaman daerah, antara lain mengenai agama, adat, tingkat pendidikan, dan tingkat kehidupannya, maka usaha untuk memajukan kaum perempuan disesuaikan dengan keadaan setempat. Para ibu pejuang itu menyadari perlunya memperhatikan sifat kontinuitas dalam kehidupan dan budaya penduduk dan diperjuangkannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pergerakan perempuan, merupakan pendorong paling kuat bagi terjadinya perubahan mengenai kehidupan yang mencakup banyak bidang. Di dunia Barat terdapat gerakan Feminisme, yang dapat digolongkan menjadi tiga, yakni kaum Feminis Liberal, kaum Feminis Radikal, dan kaum Feminis Sosial yang menuntut emansipasi dengan kaum laki-laki. Gerakan emansipasi di Indonesia dilakukan oleh organisasi-organisasi perempuan Indonesia yang berlandaskan pada gagasan R.A.Kartini. Kartini menuntut pendidikan bagi kaum perempuan, yang orientasinya lebih ditekankan pada tingkatan kecerdasan secara individual. Sasaran yang lebih jauh ingin dicapai adalah mengangkat martabat kaumnya, sehingga sejajar dengan martabat kaum laki-laki.

H. Gerakan Emansipasi di Indonesia

Gerakan emansipasi yang dilakukan oleh kaum perempuan Indonesia yang diartikan sebagai gerakan pembebasan kaum perempuan dari ketergantungan pada orang lain, terutama pada kaum laki-laki. Tujuan gerakan itu agar dapat hidup mandiri, menggunakan hak-haknya seperti halnya yang berlaku pada kaum laki-laki, sehingga mereka tidak lagi menyandang sebutan "warga negara kelas dua". Dalam perjuangan menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, Kartini tidak pernah mempertentangkan kaum perempuan dan kaum laki-laki. Dalam salah satu suratnya, ia mengatakan bahwa bagi kaum perempuan yang menyukai kemajuan, bukan orang laki-laki yang dilawannya, melainkan pendapat kolot yang turun temurun.

Bertolak dari gagasan Kartini yang menuntut pendidikan bagi kaumnya dan menyadari adanya ketidakadilan dalam perkawinan, maka Kongres Perempuan I (1928) memasukkan pendidikan untuk anak-anak perempuan dan usaha perlindungan dalam perkawinan sebagai program perjuangannya. Yang disebut terakhir itu membutuhkan perjuangan yang ulet dan hasilnya baru dapat tercapai setengah abad kemudian dengan diterimanya Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

I. Sejarah Pergerakan Nasional

Dalam Sejarah Pergerakan Nasional disebutkan bahwa dalam usaha mencapai kemerdekaan negara dan bangsanya kaum perempuan melakukan kerja sama dengan kaum laki-laki. Prinsip kerja sama itu tetap dipegang dan dapat dibuktikan pada waktu perang kemerdekaan dan pada masa Pembangunan Nasional. Tahun 1978 merupakan tonggak sejarah yang penting bagi peningkatan peranan perempuan. *Perta-*

ma, karena pada tahun itu peranan dan status sosial secara eksplisit mendapatkan pengakuan konstitusional dalam GB-HN. *Kedua*, pada tahun itu pertama kalinya pemerintah meletakkan suatu perlengkapan nasional yang bertanggung jawab meningkatkan peranan perempuan dalam Pembangunan dengan titik pusat Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Pada tahun 1983 status Menteri Muda itu ditingkatkan menjadi Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENU-PW). Tugas pokok MENU-PW adalah menangani peningkatan peranan perempuan dalam segala bidang (Tjokrowinoto, 1988), sekarang namanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Mengenai masalah perempuan Indonesia sebagai pemimpin masa depan dapat dijawab dengan nada positif, bahwa hal itu mungkin dicapai bila bersedia bekerja keras untuk mengejar ketinggalannya dari kaum laki-laki. Akan tetapi mengingat secara biologis perempuan karir, yang juga seorang ibu rumah tangga, sulit melepaskan citra "keibuan"-nya, maka jawaban yang sifatnya pesimistik ikut menyertainya. Sudah saatnya bagi keluarga yang berwawasan maju untuk mengubah manajemen keluarga yang tradisional menjadi manajemen berdasarkan kebersamaan.

J. Perkembangan Konsepsi Gender

Latar belakang penyebab munculnya gender sebagai salah satu isu baru dalam studi hubungan internasional adalah diawali dengan mendefinisikan konsep gender dan melulusi perkembangan konsepsi gender, sehingga pada akhirnya menjadikannya sebagai isu penting dalam studi dan praktik hubungan internasional. Gender bukanlah suatu istilah yang mengacu pada karakter biologis (seks) laki-laki dan perempuan secara fisik. Namun gender, menurut Mansoer Fakih, lebih merupakan "sifat yang melekat pada

laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural."

Definisi ini menunjukkan bahwa gender adalah sifat atau karakter maskulin dan feminin dimana keduanya dapat muncul baik pada laki-laki maupun perempuan. Maksudnya adalah seorang laki-laki tidak semata-mata identik dengan salah satu karakter, yaitu maskulin, namun juga memiliki karakter feminin dalam dirinya. Selain itu, definisi tersebut juga menegaskan bahwa gender adalah suatu produk dari konstruksi sosial budaya. Hal ini berarti konsepsi tentang gender dapat berbeda antarkelompok masyarakat dan berubah seiring dengan perkembangan zaman.

Pada tahun 1920-an, konsepsi gender dipahami sebagai suatu perbedaan (*differences*) antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya atribut personal. Pada masa itu konsep gender sangat terkait erat dengan faktor fisik atau biologis. Perbedaan karakteristik fisik antara laki-laki dan perempuan menciptakan konstruksi peran dan fungsi sosial tertentu serta ekspektasi perilaku yang seharusnya ada atau melekat pada laki-laki atau perempuan. Akibatnya, jenis kelamin sebagai sebuah *personal traits* menghasilkan perbedaan peran sosial dan menentukan pembagian kerja yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan.

K. Perbedaan Gender Melegitimasi Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan Gender

Memahami gender sebagai "perbedaan" tidak lagi hanya terkait dengan hubungan personal tapi juga struktur sosial karena perbedaan gender telah melegitimasi ketidaksetaraan sosial yang lebih menghargai laki-laki daripada perempuan. Penyebab mengapa karakter maskulin mendapat nilai atau status yang lebih tinggi daripada karakter feminitas tidak hanya terkait dengan fakta perbedaan biologis tapi juga

karena eksistensi struktur sosial yang melembagakan kontrol laki-laki terhadap perempuan. Pada tahap inilah perbedaan gender telah menciptakan ketidaksetaraan gender (*gender inequality*) dalam sistem ekonomi, sosial dan politik. Ketidaksetaraan gender akibat perbedaan jenis kelamin kian menjadi persoalan ketika hal tersebut mengakibatkan ketidakadilan gender.

Dalam perkembangannya, memahami persoalan ketidakadilan gender tidak lagi cukup hanya dengan konsep gender yang sifatnya dikotomis, yaitu hanya melihat perbedaan laki-laki dan perempuan. Beberapa ilmuwan menganggap bahwa konsepsi gender sebagai suatu "perbedaan" antara laki-laki dan perempuan seakan-akan melihat bahwa ketidaksetaraan dan ketidakadilan terjadi hanya pada jenis laki-laki dan jenis perempuan. Maksudnya adalah konsep tersebut mengarah pada generalisasi akan karakteristik laki-laki dan perempuan serta tidak melihat keterkaitan atau relasi antara keduanya.

R.W Connell, misalnya, berargumen bahwa konsepsi yang cenderung dikotomi ini tidak dapat menangkap kompleksitas gender dalam kehidupan manusia. Konsep gender seharusnya juga mampu mengakomodir fakta akan keberagaman dalam laki-laki maupun perempuan dan tidak secara mudah membuat dikotomi hanya antara dua jenis kelamin itu. Dalam konteks ini Connell menyoroti pluralitas dalam maskulinitas. Connell berargumen bahwa karakter maskulin tidaklah tunggal namun beragam dan terdapat *hegemonic masculinity* sebagai salah satu karakter maskulin yang mendominasi dan menghegemoni struktur dan sistem internasional sehingga memmarginalkan karakter lainnya. Jika kembali dikaitkan dengan persoalan ketidakadilan gender maka Connell menegaskan bahwa korban ketidakadilan gender tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki yang memiliki karakter maskulinitas tertentu.

L. Relasi Gender dalam Hubungan Internasional

Sekitar tahun 1960-an Connell dan ilmuwan lain seperti Jill Steans mengusulkan perubahan konsepsi gender dengan tidak lagi berkutat pada isu perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya dikotomis tapi lebih melihat relasi gender (*gender relations*) antar keduanya. Lebih jelasnya, Connell (1993) kemudian mendefinisikan gender sebagai "*a matter of the social relations within which individuals and groups act.*" Steans (2013) juga mengartikan gender sebagai "*ideological and material relations*" yang eksis di antara laki-laki dan perempuan. Kedua definisi ini menunjukkan bahwa konsepsi relasi gender tidak hanya mencerminkan hubungan personal dan sosial tapi juga hubungan kekuasaan dan simbolik.

Konsep relasi gender, yang mengandung unsur kekuasaan dan simbolisasi, pada akhirnya mempengaruhi kompleksitas isu gender dalam studi dan praktik hubungan internasional. Manifestasi kedua unsur tersebut dalam hubungan internasional tidak hanya berupa material, tapi juga nonmaterial sehingga meningkatkan signifikansi perspektif gender dalam memahami politik internasional. Unsur kekuasaan dan simbolisasi dalam relasi gender yang bersifat non-material dapat berupa diskursus teori dan paradigma dalam bahasa tertulis atau tidak tertulis. Dalam konteks ini, melihat isu relasi gender dalam hubungan internasional menjadi penting karena hubungan internasional sebagai suatu studi bertanggung jawab dalam "*the production of knowledge and discourse.*"

Studi hubungan internasional dikritik sebagai bias gender karena menghasilkan diskursus yang lebih mencerminkan dan mendorong pandangan dunia yang maskulin. Kritikan tersebut tercermin dalam berbagai studi yang dilakukan oleh generasi pertama feminis hubungan internasional yang perhatian terhadap "*the nature of international relations*". Para feminis yang dikenal sebagai feminis analitis dan feminis

normatif ini terlibat dalam debat ketiga (*third debates*) dalam hubungan internasional yang mengkritisi sisi ontologis dan epistemologis dari pendekatan positivitis.

Rebecca Grant dan Kathleen Newland (1991), misalnya, mengkritisi konsepsi positivitis dalam hubungan internasional yang tidak memasukkan pengalaman perempuan sebagai subjek penelitian mereka dan mengkonstruksi teori-teori hubungan internasional dengan "male eyes" serta menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya aktor politik. Selain itu feminis lainnya J. Ann Tickner (1992) juga melakukan dekonstruksi terhadap teori-teori hubungan internasional dengan menguji konsep enam prinsip dari *political realism* yang diformulasikan oleh Hans Morgenthau (1948) dalam bukunya *Politics Among Nations*. Tickner yang berargumen bahwa cara Morgenthau menggambarkan dan menjelaskan politik internasional berakar pada perspektif maskulin.

Selain dalam tataran studi hubungan internasional, perspektif gender juga penting untuk melihat praktik-praktek hubungan internasional karena dapat membantu memahami persoalan global kontemporer yang nyata di banyak negara, misalnya isu pembangunan. Hal ini menjadi fokus perhatian feminis generasi kedua yang mengembangkan feminism empiris. Mereka mengkritisi aktivitas hubungan internasional yang menggeneralisasi dan tidak membedakan implikasi pembangunan bagi laki-laki dan perempuan. Misalnya, sistem dan kebijakan ekonomi politik internasional yang berlaku di banyak negara ternyata telah menyebabkan terciptanya posisi subordinat pada perempuan. Karena isu gender bukan hanya terkait dengan ketidakadilan terhadap perempuan tapi juga laki-laki, maka perspektif gender penting dalam membantu untuk merumuskan kebijakan yang tepat bagi masing-masing kelompok laki-laki dan perempuan sebagai respons atas berbagai persoalan global. Ketidakadilan gender dalam aktivitas hubungan internasional memiliki implikasi yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa menggunakan gender sebagai *category of analysis* dalam studi hubungan internasional penting karena mampu membuka mata dan menawarkan cara pandang baru. Selain dari sisi hubungan internasional sebagai suatu studi, perspektif gender juga penting dalam memahami praktek-praktek ekonomi, politik, dan keamanan internasional yang mempengaruhi relasi gender antara perempuan dan laki-laki.

BAB VI

KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN (CEDAW)

A. Pendahuluan

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) telah disahkan/diratifikasi Indonesia dengan UU Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29). Konvensi internasional ini kini dikenal dunia, juga di Indonesia, dengan sebutan Konvensi CEDAW atau CEDAW1 saja.

Menciptakan keadilan dalam masyarakat yang pluralistik atas dasar ras, kelas sosial, gender, agama dan kekuasaan selalu memunculkan fenomena sosial, yakni perbedaan dan perlakuan diskriminatif karena berbagai macam alasan seperti halnya gender, setrata sosial dan kekuasaan dalam persoalan hukum dan peradilan. Pencapaian kesetaraan dan keadilan di depan hukum masih jauh dari harapan karena diyakini terbentur oleh berbagai nilai budaya, meskipun harus diakui upaya mereformasi undang-undang dan menciptakan produk hukum baru dengan mengadopsi kepentingan masyarakat mulai diwujudkan

Realitas sosial membuktikan antara perempuan dengan laki-laki mempunyai kebutuhan dan pengalaman yang berbeda dalam keseharian di masyarakat. Sudah semestinya bahwa substansi hukum lebih aspiratif dengan pengalaman dan kepentingan perempuan yang selama ini kurang diperhitungkan. CEDAW merupakan perjanjian internasional yang

paling komprehensif tentang hak asasi perempuan yang menetapkan kewajiban yang mengikat kepada negara peserta untuk secara hukum mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, menyatakan persamaan hak sipil, politik ekonomi, sosial budaya antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan melalui langkah-langkah umum, program, serta kebijakan-kebijakan.

Pada tanggal 18 Desember 1979, majelis umum PBB menyetujui sebuah rancangan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Majelis umum PBB mengundang negara-negara anggota PBB untuk meratifikasinya. Konvensi ini kemudian dinyatakan berlaku pada tahun 1981 setelah 20 negara menyetujui. Disetujuinya Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang selanjutnya disebut Konvensi Perempuan, merupakan puncak dari upaya Internasional dalam dekade perempuan yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan perempuan di seluruh dunia. Ini merupakan hasil dari inisiatif yang diambil oleh komisi kedudukan perempuan (*United States Commission on the Status of women*), sebuah badan yang dibentuk pada tahun 1974 oleh PBB untuk mempertimbangkan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang akan dapat meningkatkan posisi perempuan.

B. Sejarah dan Latar Belakang CEDAW (Sudut Hukum)

Menciptakan keadilan dalam masyarakat yang pluralistik atas dasar ras, kelas sosial, gender, agama dan kekuasaan selalu memunculkan fenomena sosial, yakni pembedaan dan perlakuan diskriminatif karena berbagai macam alasan seperti halnya gender, strata sosial dan kekuasaan dalam persoalan hukum dan peradilan.

Pencapaian kesetaraan dan keadilan di depan hukum masih jauh dari harapan karena diyakini terbentur oleh berbagai nilai budaya, meskipun harus diakui upaya mereformasi undang-undang dan menciptakan produk hukum baru dengan mengadopsi kepentingan masyarakat mulai diwujudkan.

Realitas sosial membuktikan antara perempuan dengan laki-laki mempunyai kebutuhan dan pengalaman yang berbeda dalam keseharian di masyarakat. Sudah semestinya bila substansi hukum lebih aspiratif dengan pengalaman dan kepentingan perempuan yang selama ini kurang diperhitungkan.

Perubahan fundamental yang perlu dilakukan selain perubahan hukum yang sering ditentang oleh mereka yang mengklaim diri sebagai otoritas patriarki, proses penciptaan hukum sering kali hanya milik penguasa dan elite tertentu. Subtansi hukum yang belum spesifik gender akan membawa dampak di tingkat implementasi dalam konteks kinerja, di jajaran tata peradilan pidana, maupun badan lainnya sebagai pelaksana hukum.

Hukum Internasional memang pada akhirnya mulai menyadari pentingnya sebuah struktur untuk mencegah diskriminasi. CEDAW (*Convention on The Elimination of All Forms of Diskrimination against Women*) merupakan langkah maju untuk bukan saja secara pasif memaparkan pasal-pasalnya. Namun juga secara aktif melakukan perbaikan bahasa (*corrective language*) bahasa hukum yang secara tegas memihak kepada hak asasi perempuan. Perbaikan bahasa tersebut penting untuk menunjukan dan memantapkan peranan pergerakan perempuan dalam setiap langkah implementasi CEDAW.

CEDAW telah berjasa untuk membawa perempuan dalam arena perbincangan hak. Ketika pemerintah telah meratifikasi CEDAW, maka artinya pemerintah telah melakukan

kontrak sosial dengan perempuan. CEDAW menjadi alat untuk selalu menagih pemerintah berada dalam jalur HAM.

CEDAW merupakan perjanjian internasional yang paling komprehensif tentang hak asasi perempuan yang menetapkan kewajiban yang mengikat kepada negara peserta untuk secara hukum mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, menyatakan persamaan hak sipil, politik ekonomi, sosial budaya antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan melalui langkah-langkah umum, program, serta kebijakan kebijakan.

Pada tanggal 18 Desember 1979, majelis umum PBB menyetujui sebuah rancangan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Majelis umum PBB mengundang negara-negara anggota PBB untuk meratifikasinya. Konvensi ini kemudian dinyatakan berlaku pada tahun 1981 setelah 20 negara menyetujui.

Disetujuinya Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang selanjutnya disebut Konvensi Perempuan, merupakan puncak dari upaya Internasional dalam dekade perempuan yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan perempuan di seluruh dunia. Ini merupakan hasil dari inisiatif yang diambil oleh komisi kedudukan perempuan (*United States Commission on the Status of women*), sebuah badan yang dibentuk pada tahun 1974 oleh PBB untuk mempertimbangkan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang akan dapat meningkatkan posisi perempuan.

Pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1959, Komisi Kedudukan Perempuan mempersiapkan berbagai kesepakatan internasional termasuk di dalamnya Konvensi tentang hak-hak politik perempuan dan Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan yang menikah. Pada tahun 1963, Majelis Umum PBB mencatat bahwa diskriminasi terhadap pe-

rempuan masih terus berlanjut, dan meminta agar dapat dibuat suatu rancangan Deklarasi.

Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Pada tahun 1965, Komisi tersebut memulai menyiapkan upaya yang kemudian pada tahun 1966 keluar sebuah rancangan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Hasilnya pada tahun 1967 rancangan ini disetujui menjadi sebuah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan berdasarkan Resolusi XXII. Deklarasi ini merupakan instrumen internasional yang berisi pengakuan secara universal dan menjadi standar-standar persamaan hak laki-laki dan perempuan.

Pada tahun 1968, Dewan Ekonomi dan Sosial mengambil inisiatif untuk menyusun sistem pelaporan terhadap pelaksanaan deklarasi tersebut oleh anggota-anggota PBB. Mengingat deklarasi ini bukan kesepakatan (*treaty*), meskipun ada penekanan secara moral dan politik terhadap para anggota PBB untuk menggunakannya, anggota PBB tidak mempunyai kewajiban yang mengikat untuk bersandar padanya. Pada tahun 1970 Majelis Umum PBB kemudian mendesak adanya ratifikasi atau aksesi pada instrumen internasional yang relevan yang berkaitan dengan kedudukan perempuan.

Melanjutkan upaya tersebut pada tahun 1972, Komisi Kedudukan Perempuan mempersiapkan sebuah kesepakatan yang akan mengikat pelaksanaan apa yang termuat dalam deklarasi. Seiring dengan hal tersebut, Dewan Ekonomi dan Sosial kemudian menunjuk suatu kelompok kerja yang terdiri dari 15 orang untuk memulai menyusun suatu konvensi pada tahun 1973. Persiapan ini mendapat sambutan dan dorongan yang besar oleh Konferensi Dunia yang di selenggarakan di Meksiko pada tahun 1975.

Konferensi ini sedianya untuk menyusun kerangka kerja dunia tentang perempuan. Konferensi ini mendesak adanya sebuah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskrimi-

nasi terhadap Perempuan. Konvensi ini kemudian diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1979. Dalam resolusinya Majelis Umum PBB menyampaikan harapan bahwa konvensi dapat di berlakukan dalam waktu dekat dan meminta agar Sekretaris Jenderal PBB mempresentasikan teks konvensi pada Konferensi Dunia pertengahan dekade perempuan di Copenhagen tahun 1980. Ada 64 negara yang menandatangani Konvensi dan 2 negara meratifikasi pada saat acara khusus tersebut dilakukan. Pada tanggal 3 September 1981, 30 hari setelah 20 negara anggota PBB meratifikasi konvensi tersebut, Konvensi ini dinyatakan berlaku. Situasi ini menjadi puncak yang berdampak pada adanya sebuah standar hukum internasional yang komprehensif untuk perempuan.

C. Mengapa Indonesia Mensahkan/Meratifikasi Konvensi CEDAW

Dalam diktum “Menimbang” UU Republik Indonesia No. 7 tahun 1984, dinyatakan: bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;

CEDAW, adalah suatu Komite PBB yang bertugas untuk melakukan kajian dan penilaian tentang implementasi Konvensi di Negara-negara Peserta Konvensi (Pasal 17 Konvensi). Untuk tidak membingungkan, digunakan istilah Komite CEDAW untuk Komite, dan Konvensi CEDAW (atau CEDAW) untuk Konvensi.

D. Makna Pengesahan/Ratifikasi Konvensi Internasional dengan Undang-undang

1. Ratifikasi telah diatur dalam UU Republik Indonesia No. 24 tahun 2000, tanggal 23 Oktober 2000, tentang Perjanjian Internasional. Ditentukan dalam Pasal 1 butir 2: Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*), dan persetujuan (*approval*). Pasal 9 menentukan: (1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah R.I. dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut, (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan Undang-undang atau Keputusan Presiden.
2. Menurut Ilmu Hukum, perjanjian internasional seperti konvensi yang telah diratifikasi, menjadi sumber hukum dalam arti formal, di samping peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin. Dengan demikian, sejak ratifikasi Konvensi CEDAW dengan UU Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984, maka Konvensi CEDAW resmi menjadi sumber hukum formal berkedudukan setingkat dengan undang-undang. Dasar hukum Undang-undang tentang ratifikasi Konvensi CEDAW, seperti tercantum dalam Diktum "Mengingat" bukan suatu undang-undang, tetapi langsung UUD 1945 (a.l. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan TAP MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dalam Diktum "Menimbang" butir (a) dinyatakan bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
3. Perhatikan pula UU Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 7 ayat (2) yang

menentukan bahwa: "Ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum Nasional."

4. Makna dari pengesahan/ratifikasi konvensi internasional dengan undang-undang ialah suatu perjanjian antar-negara (*treaty*) yang menciptakan kewajiban dan akuntabilitas Negara yang meratifikasinya. Ratifikasi oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR menjadikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan Konvensi internasional tersebut sebagai hukum formal dan bagian dari hukum Nasional.

E. Konsekuensi dari Ratifikasi Konvensi CEDAW

1. Konsekuensi dari ratifikasi Konvensi CEDAW, yaitu bahwa Negara Republik Indonesia menyetujui pernyataan:
 - a. mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya,
 - b. bersepakat untuk menjalankan dengan dengan segala cara yang tepat, tanpa ditunda-tunda,Kebijakan menghapus diskriminasi terhadap perempuan. (Pasal 2 Konvensi)
2. Implikasinya adalah bahwa aparat negara, aparat provinsi dan daerah, legislator di pusat maupun daerah, aparat penegak hukum di pusat maupun daerah, dapat dituntut pertanggungjawabannya (akuntabilitas) jika:
 - a. masih ada ketentuan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan,
 - b. tidak ditegakkan perlindungan hukum bagi perempuan terhadap praktik/tindakan diskriminasi, (iii) lembaga-lembaga negara dan pejabat pemerintah itu sendiri melakukan diskriminasi.

3. Konsekuensi ratifikasi konvensi ialah bahwa Negara Peserta (*States Party*) memberikan komitmen, mengikatkan diri untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan tindakan khusus sementara (tindakan afirmasi), mewujudkan keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Yang disebut dalam (a) dan (b) adalah kelalaian, sedangkan (d) dan (c) adalah perbuatan.

Pada tahun 1970 Majelis Umum PBB kemudian mendorong adanya ratifikasi atau aksesi pada instrumen internasional yang relevan yang berkaitan dengan kedudukan perempuan. Melanjutkan upaya tersebut pada tahun 1972, Komisi Kedudukan Perempuan mempersiapkan sebuah kesepakatan yang akan mengikat pelaksanaan apa yang termuat dalam deklarasi. Seiring dengan hal tersebut, Dewan Ekonomi dan Sosial kemudian menunjuk suatu kelompok kerja yang terdiri dari 15 orang untuk memulai menyusun suatu konvensi pada tahun 1973. Persiapan ini mendapat sambutan dan dorongan yang besar oleh Konferensi Dunia yang diselenggarakan di Meksiko pada tahun 1975.

Konferensi ini sedianya untuk menyusun kerangka kerja dunia tentang perempuan. Konferensi ini mendorong adanya sebuah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Konvensi ini kemudian diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1979. Dalam resolusinya Majelis Umum PBB menyampaikan harapan bahwa konvensi dapat di berlakukan dalam waktu dekat dan meminta agar Sekretaris Jenderal PBB mempresentasikan teks konvensi pada Konferensi Dunia pertengahan dekade perempuan di Copenhagen tahun 1980. Ada 64 negara yang menandatangani Konvensi dan 2 negara meratifikasi pada saat acara khusus tersebut dilakukan. Pada tanggal 3 September 1981, 30 hari setelah 20 negara anggota PBB meratifikasi konvensi

tersebut, konvensi ini dinyatakan berlaku. Situasi ini menjadi puncak yang berdampak pada adanya sebuah standar hukum internasional yang *komprehensif* untuk perempuan.

F. Konferensi Dunia tentang Perempuan

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan isu yang secara intensif dibicarakan sejak tahun 1975 di Konferensi Dunia tentang perempuan, yaitu pertama di Meksiko, kedua di Kopenhagen, ketiga di Nairobi, dan keempat Konferensi di Beijing pada tahun 1995. Pada Konferensi Dunia tentang Perempuan yang keempat di Beijing, dihasilkan apa yang dikenal sebagai *Beijing Platform for Action* yang merupakan landasan aksi bagi Negara-negara di dunia untuk melaksanakan CEDAW. *Platform for Action* atau Kerangka Aksi ini memberikan fokus pada 12 area kritis, yaitu:

1. Perempuan dan Kemiskinan;
2. Perempuan dan Pendidikan;
3. Perempuan dan Kesehatan; Kemudian
4. Kekerasan terhadap Perempuan;
5. Perempuan dan Konflik Bersenjata;
6. Perempuan dan Ekonomi;
7. Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan;
8. Mekanisme Kelembagaan untuk Memajukan Perempuan;
9. Hak-hak Azasi untuk Perempuan;
10. Perempuan dan Media Massa;
11. Perempuan dan Lingkungan Hidup;
12. Anak Perempuan.

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 2000 mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Beberapa hal dalam Inpres tersebut analisis gender. Analisa Gender ada-

lah proses yang dibangun secara sistematik untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa. Pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan:

1. Analisis gender;
2. Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Analisis gender dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya. Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dilaksanakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah tentang gender. Kegiatan analisis gender meliputi:

1. Mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan;
2. Mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun faktor-faktor penyebabnya;

3. Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
4. Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Pemecahan permasalahan yang dihasilkan dalam analisis gender diwujudkan dan diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan dan proses pembangunan nasional, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kota / kabupaten. Menilik pengaruh lingkungan regional dan global yang berpengaruh terhadap beragam program pemerintah adalah adanya *Millenium Development Goals / MDGs* yang terdiri dari:

1. Memberantas estreme kemiskinan dan kelaparan (*Eradicate estreme poverty and hunger*);
2. Mencapai pendidikan dasar universal *Achieve universal primary education*);
3. Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (*Promote gender equality and empower women*);
4. Menurunkan angka kematian anak (*Reduce child mortality*);
5. Meningkatkan kesehatan ibu (*Improve maternal health*);
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya (*Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases*);
7. Memastikan kelestarian lingkungan (*Ensure environmental sustainability*);
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (*Develop a global partnership for development*).

Dari delapan tujuan pembangunan tersebut terlihat perempuan menjadi subyek utama, yaitu di ranah pendidikan perempuan masih termaginalkan, juga promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi sangat penting. Di ranah kesehatan jelas tujuan mengurangi kematian bayi dan balita terkait perempuan (ibu) yang hamil dan melahirkan dan menyusui (kesehatan reproduksi perempuan) yang masih belum dipenuhi hak-haknya. Begitupun

dengan penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit mematikan lainnya terkait dengan rentannya perempuan sebagai korban. Perempuan juga masih menjadi korban terbesar dari kerusakan lingkungan (misalnya kekeringan / sulitnya air bersih membuat perempuan harus menanggung beragam kesulitan pekerjaan domestik seperti mengasuh anak, memasak, mandi, membersihkan rumah, memberi minum hewan peliharaan, dan rawan terhadap serangan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, kulit, ISPA, dan sebagainya). Polusi (baik udara, air, maupun tanah) membuat perempuan dan anak menjadi korban karena akses kesehatan juga terbatas terutama bagi perempuan kepala rumah tangga.

BAB VII

TEORI DAN PEMAHAMAN KONSEP GENDER

A. Pendahuluan

Gender merupakan jenis kelamin sosial, yang tentunya berbeda dengan jenis kelamin dalam pengertian biologis. Dikatakan jenis kelamin sosial karena gender merupakan suatu keadaan yang telah melekat pada masyarakat yang sudah membudaya dan norma sosial masyarakat yang diberikan pada kaum laki-laki dan perempuan dan tentu adanya pembedaan antara peran jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Gender merujuk pada peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang diciptakan dalam keluarga, masyarakat dan budaya" (UNESCO, 2007).

Pemahaman konsep gender menurut HT.Wilson (1998) bahwa gender sebagai "suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan." Sementara Mansour Fakih (2008:8) mengartikan gender sebagai "suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural".

Gender dipersoalkan karena secara sosial telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, hak, dan fungsi serta ruang aktivitas laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut akhirnya membuat masyarakat cenderung diskriminatif dan pilih-pilih perlakuan akan akses, partisipasi, serta kontrol dalam hasil pembangunan laki-laki dan perempuan.

B. Teori Gender

Teori gender diturunkan dari pemikiran-pemikiran dan teori-teori sosial. Pada mulanya dikenal dua aliran teori, yaitu teori nurtur dan teori natur. Kemudian dikembangkan teori yang bersifat kompromistik yang disebut teori keseimbangan atau teori equilibrium. Demikian selanjutnya terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk membahas permasalahan gender.

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, yaitu *gender* yang berarti jenis kelamin. Dalam *Webster's News Dictionary* (Echols dan Shadily, 1983: 265), gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam berbagai kamus bahasa, pengertian seks (jenis kelamin) dan gender tidak dibedakan secara jelas. Padahal pengertian dan istilah ini harus betul-betul dibedakan. Jenis kelamin adalah pembagian dua jenis kelamin manusia, yang mengacu pada ciri-ciri biologis masing-masing jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, jaka, dan mempunyai alat produksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, mempunyai vagina, memproduksi telur, dan mempunyai alat untuk menyusui.

Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada laki-laki dan perempuan selamanya serta tidak dapat dipertukarkan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan Tuhan yang disebut kodrat. Sedangkan *gender* adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Lebih jelasnya gender adalah perbedaan perilaku (*behavioural differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, bukan kodrat (ketentuan Tuhan), melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial kultural yang panjang (Fakih, 1999: 7-8). Selanjutnya, Fakih menguraikan bahwa perem-

puan di masyarakat dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dikenal kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dan sifat ini bisa dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, dan keibuan, sementara ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perbedaan ciri-ciri dan sifat-sifat ini dapat terjadi dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lain atau dari kelas yang satu ke kelas yang lain. Hal inilah yang dikenal dengan konsep gender (Fakih, 1999: 9). Jadi, gender bukanlah kodrat, melainkan peran yang ditampilkan oleh budaya yang menempatkan perempuan dan laki-laki menjadi feminin dan maskulin. Konsep ini sesuai dengan pengertian gender menurut Mosse (1996: 3), yang membatasi pengertian gender sebagai seperangkat peran, yang seperti halnya kostum dan topeng di pertunjukan teater yang menyampaikan kepada orang lain bahwa seseorang adalah feminin atau maskulin.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu "sifat" yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Gender dalam hal ini didefinisikan dari sudut nonbiologis antara laki-laki dan perempuan. Gender merupakan konstruksi sosiokultural atau kategori sosial (feminitas dan maskulinitas) yang tercermin dalam perilaku, keyakinan, dan organisasi sosial. Oleh karena itu, gender merupakan konsep sosial. Latar belakang perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan dibentuk oleh beberapa teori dasar, yaitu (1) *nature* atau kodrat, (2) teori nurtur (3) teori psikoanalisis, (4) teori konflik, dan (5) teori fungsionalis struktural.

1. Teori Natur (Kodrat)

Teori natur mengemukakan bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang

berbeda. Ada peran dan tugas yang bias dipertukarkan, tetapi ada yang tak bisa dipertukarkan karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. Banyak kaum perempuan yang yang sadar terhadap kelemahan teori nurtur, lalu beralih ke teori natur. Pendekatan nurtur dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Perbedaan biologis diyakini memiliki pengaruh pada peran yang bersifat naluri (*instinct*). Perjuangan kelas tidak pernah mencapai hasil yang memuaskan, karena manusia memerlukan kerjasama kemitraan secara struktural dan fungsional. Manusia, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan sosial ada pembagian tugas (*division of labor*). Begitu pula dalam kehidupan keluarga. Harus ada kesepakatan antara suami dan istri, siapa yang menjadi kepala rumah tangga dan siapa yang menjadi ibu rumah tangga. Dalam organisasi sosial juga dikenal adanya pimpinan dan anggota, atasan dan bawahan, yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewajiban yang berbeda. Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peran, asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan antara suami dan istri dalam keluarga, atau antara kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat.

2. Teori Nurtur (Kebudayaan)

Teori ini merupakan teori bantahan terhadap teori natur. Teori ini tidak menyetujui bahwa pemindahan posisi dan peran laki-laki dan perempuan merupakan kodrat alam, faktor biologis tidak menunjukkan keunggulan laki-laki terhadap perempuan, pemilahan sekaligus pengunggulan terhadap laki-laki disebabkan karena elaborasi kebudayaan terhadap biologis masing-masing (Anderson, 1995: 409). Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat lebih bersifat politis. Dengan demikian apa yang disebut masku-

linitas dan feminitas merupakan hasil konstruksi sosiobudaya.

Menurut teori nurtur, perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan perannya dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis, sedangkan perempuan sebagai kelas proletar. Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh kaum feminis internasional yang cenderung mengejar kesamaan (*sameness*) dengan konsep *fifty-fifty*, konsep yang kemudian dikenal dengan istilah *perfect equality* (kesamaan kuantitas). Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan baik dari nilai agama maupun nilai budaya. Berangkat dari kenyataan tersebut, para feminis berjuang dengan menggunakan pendekatan sosial konflik, yaitu konsep yang diilhami oleh ajaran Karl Marx (1818-1883) dan Machiavelli (1469-1527), dilanjutkan oleh David Lockwood (1957) dengan tetap menerapkan konsep dialektika. Randall Collins (1987) beranggapan bahwa keluarga adalah wadah tempat pemaksaan, suami sebagai pemilik dan wanita sebagai pelayan. Konsep sosial konflik menempatkan kaum laki-laki sebagai kaum penindas (borjuis) dan perempuan sebagai kaum tertindas (proletar). Bagi kaum proletar tidak ada pilihan lain kecuali dengan perjuangan lain menyingkirkan penindas demi mencapai kebebasan dan persamaan hak. Aliran nurtur melahirkan paham sosial konflik yang banyak dianut masyarakat sosialis komunis yang menghilangkan strata penduduk (egalitarian). Paham sosial konflik memperjuangkan kesamaan proporsional (*perfect equality*) dalam segala aktivitas masyarakat, seperti di DPR, militer, manajer, menteri, gubernur, pilot, dan partai politik. Untuk mencapai tujuan tersebut,

dibuatlah program khusus (*affirmative action*) guna memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan agar bisa termotivasi untuk merebut posisi yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki. Akibatnya sudah dapat diduga, yaitu timbulnya reaksi negatif dari laki-laki yang apriori terhadap perjuangan tersebut yang dikenal dengan perilaku “*male backlash*.”

3. Teori Psikoanalisis atau Identifikasi.

Teori ini diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Melalui konsep *penis envy*, Freud mengatakan bahwa seumur hidupnya perempuan akan dihinggapi *histeris* dan *neurosis* karena mereka memendam rasa iri terhadap laki-laki. Teori feminis membantah bahwa perempuan iri akan status sosial laki-laki dan kebebasan bukanlah ciri biologis laki-laki. Misalnya *de Beauvoir* (Humm, 2002: 337) mendeskripsikan kecemburuan akan penis ini sebagai menggambarkan kekecewaan perempuan akan hak istimewa laki-laki. Ketiadaan alat kelamin tersebut membuat perempuan mengalami *inferior complex* (Yulianeta, 2003: 36). Perwujudan dari rasa rendah diri tersebut bermacam-macam bentuknya, dimulai dari sifat atraktif untuk menarik perhatian laki-laki agar menikahinya, dan secara tidak sadar ayahnya dijadikan objek cinta dan ibunya dijadikan objek iri hati. Kemudian cenderung untuk tampil seperti laki-laki, maka keinginan utamanya memiliki anak laki-laki. Kebahagiaan seorang perempuan akan besar sekali, apabila keinginannya untuk memiliki anak laki-laki menjadi kenyataan, karena anak laki-laki membawakan kelamin yang diidam-idamkannya (Umar, 1999: 49). Oleh karena itu, Freud menganggap bahwa pembagian tugas yang terjadi di masyarakat merupakan konsekuensi logis dari kodrat laki-laki dan perempuan.

4. Teori Equilibrium (keseimbangan)

Teori equilibrium atau teori keseimbangan menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan di antara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan, melainkan komplementer, saling melengkapi satu sama lain. Terjadinya keragaman peran apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, atau budaya pada hakekatnya adalah realita kehidupan manusia. Hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan hubungan yang saling bertentangan, bukan dilandasi konflik dikotomis, bukan pula struktural fungsional, melainkan hubungan komplementer, saling melengkapi, dilandasi kebutuhan kebersamaan guna membangun kemitraan yang harmonis. Ini karena setiap pihak mempunyai kelebihan sekaligus kekurangan dan kekuatan sekaligus kelemahan yang perlu diisi dan dilengkapi pihak lain dalam kerjasama yang setara.

5. Teori Adaptasi Awal

Teori adaptasi awal pada prinsipnya menyatakan bahwa adaptasi awal manusia merupakan dasar pembagian kerja secara seksual, sekaligus dasar subordinasi perempuan.

Teori ini dibangun berdasarkan asumsi sebagai berikut:

- a. Berburu sangat penting bagi kelangsungan nenek moyang kita.
- b. Laki-lakilah yang hampir selalu melakukan kegiatan berburu.

- c. Perempuan bergantung pada laki-laki untuk memperoleh daging.
- d. Laki-laki berbagi daging buruannya terutama dengan istri-istri dan anak-anaknya.
- e. Sekali pola pembagian berdasarkan jenis kelamin ini terbentuk, dia tidak berubah sampai sekarang.

6. Teori Teknik Lingkungan

.Teori teknik lingkungan didasarkan pada apa yang dianggap sebagai hukum alam, yaitu kelangkaan sumber-daya alam dan tekanan penduduk. Teori ini menjelaskan bahwa upaya untuk mengontrol pertumbuhan penduduk sudah terjadi sejak jaman dahulu. Dalam konteks ini pandangan mengenai perempuan berakar pada peran reproduktif mereka.

7. Teori Fungsionalis Struktural atau Teori Sistem Sosial

Teori ini dipelopori oleh Talcott Parson (Yulianeta, 2002: 17) yang berangkat dari asumsi bahwa masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang relatif saling mempengaruhi. Teori ini menitikberatkan pada kestabilan bagi keseluruhan, yakni setiap bagian dalam masyarakat harus menguatkan posisi masing-masing. Penyimpangan yang melanggar norma akan melahirkan gejolak. Oleh karena itu, harmoni dan integrasi dipandang sebagai sesuatu yang fungsional, bernilai tinggi, dan harus dijalankan. Sedangkan konflik harus ditinggalkan. Dengan kata lain *status quo* harus tetap diperlakukan. Dengan demikian, pemilahan peran antara laki-laki dan perempuan seperti apa yang terjadi saat ini merupakan pengaturan yang paling baik dan berguna bagi keharmonisan dan keuntungan masyarakat secara keseluruhan. Menurut teori ini pembagian kerja seksual mutlak dibentuk demi menjaga keharmonisan dan keseluruhan sistem. Oleh karena itu, tugas utama perempuan adalah di dalam rumah (*domestic sphere*). Hal ini bertujuan untuk menghindari persa-

ingan antara keduanya serta menciptakan ketenangan rumah tangga.

Selain itu teori ini mengakui adanya keanekaragaman dalam kehidupan sosial. Dalam kondisi seperti itu, dibuatlah suatu sistem yang berlandaskan konsensus nilai agar terjadi interelasi demi sesuatu yang dinamakan harmoni, stabilitas, dan keseimbangan. Sistem ini mensyaratkan aktor dalam jumlah memadai, sehingga fungsi dan struktur seseorang dalam sistem menentukan tercapainya stabilitas atau harmoni. Ini berlaku untuk semua sistem sosial: agama, pendidikan, politik, sampai rumah tangga. Sosialisasi fungsi dan struktur dilakukan dengan institusionalisasi, melalui norming, atau norma-norma yang disosialisasikan.

8. Teori Konflik Sosial

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa di dalam susunan suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Oleh karena itu, perbedaan posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan penindasan dari kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan suami dan istri tidak ubahnya dengan hubungan borjuis dan proletar, tuan dan hamba, pemeras yang diperas. Dengan kata lain, ketimpangan peran gender dalam masyarakat bukan karena faktor biologis, tetapi karena konstruksi masyarakat (Umar, 1999: 61). Implikasinya, perempuan terkondisikan untuk bekerja di sektor domestik, sedangkan laki-laki di sektor publik.

Teori ini pun meyakini bahwa inti perubahan dalam sistem sosial dimotori oleh konflik. Konflik timbul karena adanya kepentingan dan kekuasaan. Bila salah satu kepentingan yang memiliki kekuasaan memenangkan konflik, maka ia akan menjadi dominan dan melanggengkan sistem sosial yang telah terbentuk. Teori ini sangat sinis terhadap keku-

saan, kemapanan, sifat borjuis, sistem kapitalis, dan semua hal yang memiliki strata dan struktur. Selain itu teori ini juga memandang institusionalisasi sebagai sistem yang melem-bagakan pemaksaan. Istilah mereka adalah *imperatively coordinate association*, yaitu pemaksaan koordinasi relasi sosial dalam sebuah sistem. Dalam hubungan ini termasuk juga hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan.

C. Konsep Gender

Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan mana perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan mana yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari, dan disosialisasikan. Pembedaan ini sangat penting karena selama ini kita sering sekali mencampuradukkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrat dan tidak berubah dengan yang bersifat nonkodrat (gender) yang sebenarnya bisa berubah atau diubah.

Perbedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan dan laki-laki. Dengan mengenali perbedaan gender sebagai sesuatu yang tidak tetap, tidak permanen, akan memudahkan kita untuk membangun gambaran tentang realitas relasi perempuan dan laki-laki yang dinamis, yang lebih cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Kita perlu memisahkan perbedaan jenis kelamin dan gender, karena konsep jenis kelamin biologis yang bersifat permanen dan statis itu tidak dapat digunakan sebagai alat analisis yang berguna untuk memahami realitas kehidupan dan dinamika perubahan relasi laki-laki dan perempuan.

Di pihak lain, alat analisis sosial yang telah ada seperti analisis kelas, analisis diskursus (*discourse analysis*) dan ana-

lisis kebudayaan yang selama ini digunakan untuk memahami realitas sosial tidak dapat menangkap realitas adanya relasi kekuasaan yang didasarkan pada relasi gender dan sangat berpotensi menumbuhkan penindasan. Dengan begitu analisis gender sebenarnya menggenapi sekaligus mengoreksi alat analisis sosial yang ada yang digunakan untuk meneropong realitas relasi sosial laki-laki dan perempuan serta akibat-akibat yang ditimbulkannya. Dengan demikian gender adalah perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat dan dikontruksikan oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.

Untuk memahami konsep gender, harus dibedakan antara kata gender dengan kata seks. Seks adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis, yang secara fisik melekat pada masing-masing jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan, sehingga sifatnya permanent atau universal. Jenis kelamin atau sex adalah karakteristik biologis hormonal dan anatomic. Seks tidak bisa berubah, dalam arti permanen dan tidak bisa dipertukarkan karena bersifat mutlak. Sedangkan gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal persifatan, peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh masyarakat. Karenanya ia bersifat relatif, dapat berubah, dan dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Dua hal pokok perlu diperhatikan dalam memahami konsep gender saat ini, yaitu: ketidakadilan dan diskriminasi gender di satu pihak, dan kesetaraan serta keadilan gender di pihak lain.

D. Lebih Jelasnya Apa Itu gender?

Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan.

Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan (memilahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan.

Dengan demikian gender sebagai suatu konsep merupakan hasil pemikiran manusia atau rekayasa manusia, dibentuk oleh masyarakat sehingga bersifat dinamis dapat berbeda karena perbedaan adat istiadat, budaya, agama, sistem nilai dari bangsa, masyarakat, dan suku bangsa tertentu. Selain itu gender dapat berubah karena perjalanan sejarah, perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya, atau karena kemajuan pembangunan. Dengan demikian gender tidak bersifat universal dan tidak berlaku secara umum, akan tetapi bersifat situasional masyarakatnya.

Kata **Gender** berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (John M. echols dan Hassan Sadhily, 1983: 256). Secara umum, pengertian Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam Women Studies Ensiklopedia dijelaskan bahwa Gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam buku *Sex and Gender* yang ditulis oleh Hilary M. Lips (Mansour Fakih 1999: 8-9) mengartikan Gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya; perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.

Heddy Shri dan Ahimsha Putra (2000) mengatakan bahwa istilah Gender dapat dibedakan ke dalam beberapa pengertian berikut ini: Gender sebagai suatu istilah asing dengan makna tertentu, Gender sebagai suatu fenomena sosial budaya, Gender sebagai suatu kesadaran sosial, Gender sebagai suatu persoalan sosial budaya, Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis, Gender sebagai sebuah perspektif untuk memandang kenyataan.

Gender merupakan aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia. Istilah "gender" berasal dari bahasa Inggris yang di dalam kamus tidak secara jelas dibedakan pengertian kata seks dan gender. Untuk memahami konsep gender, perlu dibedakan antara kata seks dan kata gender.

Seks adalah perbedaan jenis kelamin secara biologis sedangkan gender perbedaan jenis kelamin berdasarkan konstruksi sosial atau konstruksi masyarakat. Dalam kaitan dengan pengertian gender, dalam hal ini adalah hubungan laki-laki dan perempuan secara sosial. Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan ini dibentuk dan diubah dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Secara umum, pengertian Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dapat dijelaskan bahwa Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat per-

bedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Istilah ini memiliki kandungan yang sangat besar, karena isu ini memaksa suatu komunitas untuk mengganti tradisi yang sudah berjalan berabad-abad bahkan para pejuang gender tidak segan-segan untuk memaksa suatu agama mengubah ajarannya yang tidak sesuai dengan tuntutan gender. Para penganut paham ini meletakkan gender sebagai standar kebenaran, sebagai contoh para feminis menuduh banyak ajaran Islam yang memandang perempuan sebagai mahkluk yang harganya separuh dari laki-laki. Ajaran-ajaran tersebut antara lain, hukum aqiqah dimana bayi laki-laki disunahkan menyembelih dua ekor kambing sedang bayi perempuan satu kambing, *diyat* laki-laki dua kali lipat *diyat* perempuan, perempuan disunahkan sholat di rumah sedang laki-laki di masjid.

Menurut para ahli, gender didefinisikan sebagai isu perbedaan kelas antara laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Inggris istilah ini berkembang dengan beberapa variasi. *Gender Bender* adalah seseorang yang melakukan sesuatu seperti perbuatan lawan jenis. Tindakan laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan yang melakukan tindakan seperti tindakan laki-laki. *Gender Dysphoria* (dalam dunia kedokteran) adalah seseorang yang merasa bahwa ketika lahir dia memiliki organ kemaluan yang salah. Jadi seseorang merasa bahwa dia harusnya laki-laki tetapi memiliki kemaluan perempuan. Istilah lain yang berkembang adalah *Gender Reas'signment*. *Gender Reas'signment* adalah tindakan merubah anggota tubuh dengan cara operasi

sehingga memiliki anggota tubuh lawan jenis dan nampak seperti lawan jenis.

Nasaruddin Umar (1999) adalah seorang tokoh yang menulis disertasi doktoral tentang gender menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Hilary M. Lips dalam *Sex and Gender an Introduction* menerangkan bahwa gender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Linda L. Lindsey menjelaskan bahwa gender adalah semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan. H.T Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif.

Julia Cleves Mosse menjelaskan dalam bukunya "*Half the World, Half a Change an Introduction to Gender and Development*" bahwa gender adalah seperangkat peran, seperti halnya kostum dan topeng teather, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita perempuan atau laki-laki. Perangkat perilaku khusus ini mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles "peran gender." Definisi lain, gender berkaitan dengan konstruk sosial yang diberikan masyarakat tentang peran, sikap, aktivitas, dan atribut/perlengkapan yang dianggap sesuai bagi laki-laki dan perempuan.

Perbedaan redaksi para ilmuwan dan feminis dalam mendefinisikan gender, tetap mengacu pada persamaan *meaning* atau maksud yang mereka kehendaki, yaitu adanya perbedaan tugas, peran dan hak antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasayarakat. Perbedaan tugas, peran dan hak ini, kadang merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain, tetapi secara umum perempuan sering dirugikan. Sebagai contoh

kasus maskawin menjadi permasalahan keluarga Hindu India. Berdasarkan tradisi mereka, memiliki anak perempuan membutuhkan modal yang besar, karena mereka harus menyiapkan maskawin ketika anak perempuan menikah. Kondisi ini yang memunculkan pepatah di India "Membesarkan seorang anak perempuan sama saja seperti mengairi pohon rindang di halaman rumah orang lain."

Perbedaan antara perempuan dan laki-laki ini ditentang oleh sebagian kelompok feminism tetapi sebagian yang lain menganggap bahwa perbedaan ini sesuatu yang alami. Hal ini yang menyebabkan timbulnya perbedaan antara dua kelompok feminism atau gender yang bertolak belakang.

1. Kelompok gender yang berpendapat bahwa perbedaan gender merupakan konstruksi sosial sehingga perbedaan jenis kelamin tidak perlu mengakibatkan perbedaan peran dan perilaku gender dalam tatanan sosial.
2. Kelompok gender yang berpendapat bahwa perbedaan jenis kelamin akan selalu berdampak terhadap konstruksi konsep gender dalam kehidupan sosial, sehingga akan selalu ada jenis-jenis pekerjaan *berstereotip* gender.

BAB VIII

STUDI GENDER DAN PERKEMBANGANNYA

A. Pendahuluan

Aristoteles beranggapan bahwa perempuan adalah laki-laki yang tidak sempurna, sehingga wajar bagi laki-laki dewasa untuk menguasai budak-budak, anak-anak, dan perempuan-perempuan. Istilah *family* (bahasa Inggris) berasal dari kata *famulus* yang berarti "budak domestik" dan kata *familia* berarti sejumlah budak-budak yang dimiliki oleh seorang laki-laki dewasa, termasuk perempuan dan anak-anaknya (Budiman, 1981). Ide tentang perempuan lebih lemah dari laki-laki terus digulirkan oleh hampir semua ahli filsafat, seperti Immanuel Kant yang menyatakan bahwa sulit diperlakukan perempuan bakal punya kesanggupan untuk mengerti prinsip-prinsip. Lalu Schopenhauer menyatakan anggapan-nya bahwa perempuan dalam segala hal terbelakang, tidak memiliki kesanggupan untuk berfikir dan berefleksi, posisinya berada di antara laki-laki dewasa dan anak-anak, yang pada akhirnya perempuan itu diciptakan hanya untuk mengembangkan keturunan. Kemudian Fichte mengemukakan bahwa perempuan posisinya dikuasai, karena hal ini muncul berdasarkan keinginan-keinginan yang lahir dari moral perempuan itu sendiri untuk dikuasai. Apa sebabnya perempuan diposisikan dikuasai? Theodor Reik mengemukakan pendapatnya bahwa perempuan pada umumnya ingin dicintai, sedangkan laki-laki ingin disukai dalam setiap perbuatannya. Selanjutnya Bruno Bettelheim menyatakan bahwa banyak perempuan yang ingin menjadi sarjana yang baik dan berguna, tetapi pada dasarnya yang pertama dan yang terutama adalah ingin menjadi istri seorang laki-laki yang

baik dan menjadi ibu dari anak-anaknya (Budiman, 1981). Sesuai dengan perkembangan zaman munculnya feminism dan kemudian gender mengubah konsep-konsep semua ahli filsafat.

B. Feminisme

Persoalan gender erat hubungannya dengan persoalan feminism. Secara etimologis feminis berasal dari kata *femme* (*woman*), yang berarti perempuan yang berupaya memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sebagai kelas sosial. Dalam hal ini perlu dibedakan antara *male* dan *female* (sebagai aspek perbedaan biologis dan sebagai hakikat alamiah), sedangkan maskulin dan feminin (sebagai aspek perbedaan psikologi dan kultural). Selden (1986: 132) mengungkapkan pengertian *male-female* mengacu pada seks, sedangkan maskulin-feminin mengacu pada jenis kelamin atau gender, seperti *he* dan *she*. Dalam pengertian yang lebih luas, feminism adalah gerakan kaum perempuan untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh budaya dominan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun kehidupan sosial. Emansipasi perempuan merupakan salah satu aspek dalam kaitannya dengan persamaan hak. Dalam ilmu sosial kontemporer lebih dikenal dengan kesetaraan gender.

Goefe (Sugihastuti, 2003: 23) mengartikan feminism sebagai teori tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik, ekonomi, dan sosial, atau kegiatan berorganisasi yang memperjuangkan hak-hak serta kepentingan perempuan.

Dipandang dari sudut sosial, "feminisme muncul dari rasa ketidakpuasan terhadap sistem patriarki yang ada pada masyarakat" (Selden, 1996: 139). Selden menggunakan istilah patriarki untuk menguraikan sebab penindasan terhadap

perempuan. Patriarki menentukan bahwa laki-laki itu superior dan menempatkan perempuan sebagai inferior.

Feminisme berbeda dengan emansipasi. Emansipasi cenderung lebih menekankan pada partisipasi perempuan dalam pembangunan tanpa mempersoalkan keadilan gender, sedangkan feminismen sudah mempersoalkan hak serta kepentingan mereka yang selama ini dinilai tidak adil. Perempuan dalam pandangan feminismen mempunyai aktivitas dan inisiatif sendiri untuk memperjuangkan hak dan kepentingan tersebut dalam berbagai gerakan.

Penjelasan mengenai munculnya feminismen dikemukakan oleh Stimpson (1981: 230) yang mengemukakan "asal mula kritik feminis berakar pada protes-protes perempuan melawan diskriminasi yang mereka derita dalam masalah pendidikan dan sastra." Setelah 1945 kritik feminis menjadi satu proses yang lebih sistematis, yang kemunculannya didorong oleh kekuatan modernisasi yang begitu kuat seperti masuknya perempuan dari semua kelas dan ras ke dalam kekuatan-kekuatan publik dan proses-proses politik.

Perjuangan serta usaha gerakan feminismen untuk mencapai berbagai cara, di antaranya, yaitu memperoleh hak dan peluang yang sama dengan yang dimiliki laki-laki. Berkaitan dengan itu muncullah istilah gerakan persamaan hak (*equal rights movement*). Cara lain adalah membebaskan perempuan dari ikatan lingkungan domestik atau lingkungan keluarga dan rumah tangga. Cara tersebut sering dinamakan *women liberation movement* disingkat *women's lib* atau *women's emancipation movement*, yaitu gerakan pembebasan perempuan (Djajanegara, 2000: 4).

Pada tahun 1960 dan awal 1970-an, kritik feminis berhasil mengakhiri dominasi kultural laki-laki atas perempuan dan atas keterasingan kaum perempuan dari kekuatan-kekuatan kultural. (Stimpson dalam Sugihastuti, 2003). Pada tahun 1984 diadakan konvensi di Seneca Falls yang dianggap sebagai awal timbulnya gerakan perempuan secara teror-

ganasi dan dianggap pula sebagai *Women's Great Rebellion* (pemberontakan besar kaum perempuan). Para tokoh feminis memproklamasikan versi lain dari *Deklarasi Kemerdekaan Amerika* yang berbunyi *All men are created equal* (semua laki-laki diciptakan sama) menjadi *All men and women are created equal* (semua laki-laki dan perempuan diciptakan sama) (Djanegara, 2000: 1). Sementara itu, kata feminis oleh Charlotte Broute disebut sebagai satu figur yang melambangkan berbagai teori ambisi dan usaha-usaha mereka (Stimpson dalam Sugihastuti, 2003).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa munculnya gagasan-gagasan feminis berangkat dari kenyataan bahwa konstruksi sosial gender yang ada mendorong cita-cita persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kesadaran atau ketimpangan struktur, sistem, dan tradisi dalam masyarakat inilah yang kemudian melahirkan kritik feminis. Eksplorasi feminism dilakukan dengan berbagai hal, baik melalui sikap, penulisan artikel, puisi, novel, maupun berbagai media lain yang memungkinkan untuk dapat mentransformasikan gagasan atau pandangan sebagai bentuk kritik feminis terhadap situasi dan pandangan masyarakat.

Teori feminis merupakan suatu wilayah yang memberikan kontribusi penting dan orisinal terhadap pemikiran kontemporer, yang unik dalam teori feminism adalah ketegasananya mengenai keterkaitan antara teori dan praktik, dan antara publik dan individu. Teori dan pengalaman mempunyai hubungan khusus di dalam feminism yang dikemas dalam slogan *the personal is political* (Humm, 2002: ix).

Tujuan pokok dari teori feminism adalah memahami penindasan perempuan secara ras, gender, kelas, dan pilihan seksual, serta bagaimana mengubahnya. Teori feminism mengungkap nilai-nilai penting individu perempuan beserta pengalaman-pengalaman yang dialami bersama dan perjuangan yang mereka lakukan. Feminisme menganalisis bagaimana perbedaan seksual dibangun dalam dunia sosial dan

intelektual, serta bagaimana feminism membuat penjelasan mengenai pengalaman dari berbagai perbedaan itu.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian feminis adalah orang yang menganut feminism, yaitu perjuangan kaum perempuan untuk mengubah struktur hierarki antara laki-laki dan perempuan menjadi persamaan hak, status, kesempatan, dan peranan dalam masyarakat. Feminisme memunculkan dua istilah mengenai tokohnya, yaitu tokoh profeminis, yang mendukung ide-ide feminism dan tokoh kontrafeminis yang tidak mendukung ide-ide feminism.

C. Lahan Gerakan Feminisme adalah Sastra Feminisme

Dalam hubungan gerakan feminis dengan karya sastra, Register (Stimpson, 1981: 234) menilai karya sastra sebagai sesuatu yang berguna bagi pengarahan kebebasan perempuan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Faruk (1997:34) mengemukakan bahwa "hubungan sastra dengan struktur gender menjelaskan masalah bahasa terlebih dahulu, bahasa merupakan proses terus-menerus melakukan tindakan gender." Sastra modern misalnya, sejak awal menempatkan diri sebagai suatu aktivitas, dan hasil aktivitas yang dimaksudkan untuk menerobos segala kemungkinan yang ditutupi oleh Bahasa. Perempuan dalam karya sastra ditampilkan dalam kerangka hubungan ekuivalensi dengan seperangkat tata nilai marginal dan yang tersubordinasi lainnya, yaitu sentimental, perasaan, dan spiritualitas. Perempuan hampir selalu merupakan tokoh yang dibela, korban yang selalu diimbau untuk mendapatkan perhatian (Faruk, 1997: 35), namun cara tersebut ternyata tidak dapat mengeluarkan sastra dari struktur gender. Sastra hanya menempatkan perempuan sebagai korban, makhluk yang hanya mempunyai perasaan dan kepekaan spiritual. Di balik nada pembelaan

terhadap perempuan, ternyata dalam karya sastra pun tersembunyi *kekuatan struktur gender* yang timpang dan berkuasa dominan, menjadi kekuatan reproduktif terselubung.

Adanya tarik-menarik antara keinginan agar karya sastra dapat menjadi penentang subordinasi perempuan dan kenyataan bahwa di dalam karya sastra tersembunyi "kekuasaan struktur gender" mengundang perhatian. Beberapa ilmuwan sastra menghubungkan ilmu kritik sastra dengan feminism. Hasilnya berupa kritik sastra feminis, yaitu studi sastra yang mengarahkan fokus analisis pada perempuan. Jika selama ini ada tanggapan bahwa yang mewakili karya sastra Barat adalah laki-laki, maka Sugihastuti (1998: 29), dengan kritik sastra feminisnya mencoba menunjukkan bahwa pembaca perempuan membaca persepsi dan harapan ke dalam pengalaman sastranya.

Penggunaan berbagai teori feminism tersebut diharapkan mampu memberikan pandangan-pandangan baru terutama yang berkaitan dengan bagaimana karakter-karakter perempuan diwakili dalam karya sastra. Para feminis menggunakan kritik sastra feminis untuk menunjukkan citra perempuan dalam karya penulis-penulis laki-laki yang menampilkan perempuan sebagai makhluk yang dengan berbagai cara ditekan, disalahtafsirkan, serta disepulekan oleh tradisi patriarki yang dominan. Selain itu, kajian tentang perempuan yang ditulis laki-laki bisa juga menunjukkan tokoh-tokoh perempuan yang kuat dan mungkin sekali mendukung nilai-nilai feminis. Hal ini dapat menimbulkan beberapa ragam kritik sastra feminis. Di antara beberapa ragam kritik sastra feminis, kritik sastra ideologis merupakan kritik sastra feminis yang paling banyak digunakan, kritik ini melibatkan perempuan, khususnya kaum feminis sebagai pembaca. Yang menjadi pusat perhatian pembaca perempuan adalah citra serta stereotip perempuan dalam karya sastra.

Betty Friedan (Djajanegara, 2000: 63) yang beraliran feminism moderat, menyatakan bahwa ideologi feminis tidak menentang perkawinan. Perempuan tidak dianjurkan melajang seumur hidupnya. Feminisme moderat menjung-jung tinggi kodrat perempuan yang memungkinkan melahirkan dan merawat bayi, dan mendukung perempuan dalam melaksanakan tugas-tugas alami. Sementara itu, feminism moderat juga menganjurkan agar perempuan mampu hidup mandiri, baik secara intelektual maupun secara ekonomis. Kesanggupan ini akan membuat perempuan memiliki kedudukan sejajar dengan laki-laki, dan melepaskan dirinya dari ketergantungan pada laki-laki.

Sugihastuti (1998: 30) menyatakan bahwa studi perempuan dalam sastra, lebih cenderung merupakan studi berbagai disiplin ilmu. Studi sastra yang memiliki objek khas berupa karya sastra harus menerapkan studi multidisipliner, yaitu dengan mengaitkan pada disiplin ilmu lain, seperti ilmu sosial, budaya, ekonomi, psikologi, hukum, antropologi, dan sejarah.

Sugihastuti (2003: 35) menguak citra perempuan dalam novel "Layar Terkembang." Dia memandang makna kritik feminism sebagai kritik sastra disesuaikan dengan pandangan kodrat perempuan. Konsep yang pantas dipakai untuk membongkar praduga dan ideologi patriarki sampai sekarang diasumsikan menguasai penulisan dan pembacaan sastra, konsep ini adalah *reading as a women* (Culler, 1983: 43-66) yang memandang sastra dengan kesadaran khusus, yaitu kesadaran bahwa ada jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan.

"Layar Terkembang," melalui tokoh Tuti yang berjuang dalam gerakan "Puteri Sedar" menampilkan masalah feminism. Dalam segala hal, perempuan banyak diangkat sebagai makhluk yang tidak mempunyai kehendak dan keyakinan. Perempuan dianggap manusia yang terikat oleh ratusan ikatan dan hanya menurut kehendak kaum laki-laki. Keada-

an perempuan yang amat buruk ini diperjuangkan Puteri Sedar. Uraian tentang kedudukan perempuan terdapat dalam pidato Tuti dalam kapasitasnya sebagai ketua Puteri Sedar.

Hitam, hitam sekali penghidupan perempuan bangsa kita di masa yang silam, lebih hitam, lebih kelam dari kelam malam yang gelap. Perempuan bukan manusia seperti laki-laki yang mempunyai pikiran dan pemandangan sendiri, yang mempunyai hidup sendiri, perempuan hanya hamba sahaya, perempuan hanya budak yang harus bekerja dan melahirkan anak bagi laki-laki, dengan tiada mempunyai hak. Setinggi-tingginya ia menjadi perhiasan, menjadi permainan yang dimulia-muliakan selagi disukai, tetapi dibuang dan ditukar apabila telah kabur cahayanya, telah hilang sarinya. Dan untuk menjaga supaya perempuan itu jangan insyaf kedudukannya, akan nasibnya yang nista itu, maka diikat oranglah dengan bermacam-macam ikatan: bermacam-macam adat, bermacam-macam kebiasaan, bermacam-macam nasihat. Perempuan dikurung orang dalam rumah sampai bersuami, perempuan tidak boleh berjalan ke mana kehendaknya. Segalanya itu namanya melindungi perempuan dari kejahanatan dan aib, tetapi pada hakikatnya segala itu melemahkan perempuan (Alisjahbana, 1999: 35 dan 38).

Uraian di atas menggambarkan bagaimana seharusnya kedudukan dan peranan perempuan pada masa yang akan datang. Kaum perempuan seharusnya insyaf akan dirinya dan berjuang untuk mendapatkan penghargaan dan kedudukan yang lebih banyak. Berbagai masalah feminism tersebut termuat dalam sikap perempuan baru yang disampaikan Tuti:

Perempuan tiada boleh menyerahkan nasibnya kepada golongan laki-laki yang merasa akan kerugian, apabila ia harus melepaskan kekuasaannya yang telah berabad-abad dipertahankannya. Kita harus membanting tulang sendiri

untuk mendapat hak kita sebagai manusia kita harus merintis jalan untuk lahirnya perempuan yang baru, yang bebas berdiri menghadapi dunia, yang berani membentangkan matanya akan tenaga dirinya dan dalam segala soal pandai berdiri sendiri dan berfikir sendiri. Demikianlah perempuan yang dicita-citakan oleh *Puteri Sedar* bukanlah perempuan yang berdiri dalam masyarakat sebagai hamba dan sahaya, tetapi sebagai manusia yang sejajar dengan laki-laki, yang tidak usah takut dan minta dikasihani. Yang tiada suka melakukan yang berlawanan dengan hatinya, malahan yang tidak hendak kawin apabila perkawinan itu baginya berarti melepaskan hak-hak sebagai manusia yang mempunyai hidup sendiri dan berupa mencari perlindungan dan meminta kasihan. Ya, pendeknya seratus persen manusia bebas dalam segala hal (Alisjahbana, 1999: 40-41).

Perempuan harus berperan dalam dunia pengetahuan, dan menjalankan pemerintahan, menjelaskan jiwanya dalam seni, turut bekerja dan memimpin dalam berbagai macam pekerjaan dan perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Tuti, yaitu perempuan yang dapat berperan sebagai pemimpin di kantor-kantor, sebagai hakim dan jurnalis, sebagai ahli pengetahuan dan sebagai juru terbang. Dalam kenyataannya di masyarakat banyak keganjilan. Masih banyak perempuan yang menerima kemandirian itu hanyalah kulit belaka, sulit sekali mengubah pekerti kaum perempuan karena berbagai adat dan kebiasaan yang turun-temurun dan telah berurat berakar. Jumlah perempuan yang sesungguhnya bebas berdiri sendiri, mau menggunakan pertimbangan dan pikirannya sendiri, dan berani bertanggung jawab atas segala perbuatannya diperkirakan masih dapat dihitung.

D. Profil Gender dan Identitas Gender

Perempuan sebagai “empu” (yang dihormati) mempunyai kewajiban untuk berbuat sesuatu demi kesejahteraan kehidupan kaumnya. Karena itu profil perempuan harus bisa menumbuhkan transformasi sosial secara berbudaya dan manusiawi, apalagi profil perempuan itu dituntut untuk bisa mengkaji permasalahan yang sangat mendasar, berat, dan mengangkat kaum perempuan itu sendiri.

Dalam pengalaman sejarah perempuan, kehidupannya sudah dijalankan sejak dulu oleh ideologi gender masyarakat. Dalam hal ini perempuan harus berusaha menantang semua kelemahan yang telah dipolakan secara kultural dari awal kehidupannya. Kelemahan-kelemahan ini akhirnya berurat berakar dalam penampilan profil perempuan (Murniati, 2004: 52-53).

Kelemahan-kelemahan itu antara lain:

1. kesulitan perempuan untuk menghilangkan rasa malu dan rasa salah, yang merupakan akibat dari struktur budaya, akibatnya perempuan sukar menemukan identitas dirinya sendiri;
2. pandangan stereotipe sudah masuk ke dalam mental perempuan, menyebabkan perempuan kurang mampu berpikir tajam dan jernih;
3. kurang berani menerima kekuasaan, apalagi merebut kekuasaan;
4. faktor lingkungan sangat berpengaruh sebab lingkunganlah yang menciptakan perempuan sebagai makhluk pemelihara yang melayani segala kebutuhan hidup, khususnya lewat lingkungan keluarga. Oleh karena itu, perempuan bermental sebagai perempuan yang dipendam;
5. berbagai kelainan jiwa mudah hinggap dalam diri perempuan, seperti keterasingan diri, rendah diri yang berlebihan, dan sikap tertutup;

6. ketidakmampuan menjalin persatuan yang solid karena tidak dapat mengendalikan rasa iri dan cemburu, sehingga mudah tercerai berai;
7. kurang berminat dalam meningkatkan kemampuan berpikir dan lebih tertarik pada keterampilan motorik;
8. kurang menyadari kekuatan perempuan sebagai kelompok yang sebenarnya dapat membuat gerakan-gerakan perubahan dalam masyarakat;
9. cenderung menciptakan dunianya sendiri yang tertutup karena merasa lebih aman.

Dari kelemahan-kelemahan yang dibahas di atas terbentuklah profil gender yang *nrimo*, pasrah, tidak banyak tuntutan, dan selalu berusaha menutup diri, agar semuanya berjalan aman tidak menimbulkan konflik, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat.

Identitas gender merupakan perasaan subjektif tentang keberadaan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan dan merupakan bagian penting dari seseorang. Identitas gender ini merupakan definisi seseorang tentang dirinya, khusus dirinya sebagai laki-laki atau perempuan, yang merupakan interaksi kompleks antara kondisi biologisnya dan berbagai karakteristik perilakunya yang dikembangkan sebagai hasil proses sosialisasinya (Darma, 2002: 30). Identitas gender berkembang sejak usia dini dan diperkuat oleh interaksi dan sosialisasi seorang anak dengan orang dewasa. Orang dewasa biasanya menampilkan sikap dan perilaku yang telah dibentuk oleh keanggotaannya dalam kelompok gender tertentu.

E. Peran Gender dan Relasi Gender

Melalui keanggotaan di masyarakat dalam kelompok gender tertentu, orang dewasa belajar tentang peran gender untuk masing-masing jenis kelamin. Peran gender ini mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat atau usia seseorang. Peran gender akan selalu ada dalam lingkungan tempat seseorang tumbuh dan berkembang.

Peran gender seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan, bergantung pada nilai-nilai budaya yang berkembang di dalam masyarakatnya. Dalam masyarakat patriarki, sejak awal, peran gender anak laki-laki lebih dominan dibandingkan anak perempuan, sehingga terdapat perbandingan peran gender dan pada gilirannya laki-laki dianggap lebih superior dalam kehidupan daripada perempuan. Dalam masyarakat tersebut, perempuan mendapat posisi yang tidak diuntungkan secara kultural, struktural dan ekologis, perempuan dipojokkan ke dalam urusan-urusan reproduksi, menjaga rumah, dan mengasuh anak (Umar, 1999: 84-85). Pembagian peran gender lebih dikenal dengan pembagian kerja seksual, seperti apa yang dikemukakan Kementerian Negara Urusan Peranan Wanita (1992: 3) bahwa gender digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Dalam pembagian kerja secara seksual ini, pada umumnya, perempuan diberi peran dan diposisikan untuk berkiprah dalam sektor domestik atau rumah tangga (ruang domestik), sedangkan laki-laki di sektor publik atau masyarakat (ruang publik). Sektor domestik atau ruang domestik merupakan sektor yang statis dan konsumtif, sedangkan sektor publik atau ruang publik adalah sektor yang dinamis dan memiliki sumber kekuasaan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan, yang dapat menghasilkan serta dapat mengendalikan perubahan sosial.

Selain merugikan perempuan, sebenarnya pembagian kerja seksual ini juga merugikan laki-laki. Akan tetapi, pada implikasinya lebih merugikan perempuan, karena laki-laki mendapat peran yang lebih berpengaruh dan lebih besar dalam setiap bidang kehidupan. Peran perempuan di sektor domestik sebagai pengelola rumah tangga menyebabkan perempuan menanggung beban kerja domestik yang lebih banyak. Akibatnya, tumbuh tradisi dan keyakinan pada masyarakat bahwa perempuanlah yang harus bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh pekerjaan domestik. Peran tersebut menjadikan perempuan merasa bersalah jika tidak melaksanakannya, sementara bagi laki-laki, pekerjaan domestik bukan merupakan tanggung jawabnya, bahkan banyak tradisi yang melarang secara adat laki-laki berpartisipasi dalam pekerjaan domestik.

Dari uraian peran gender bisa terungkap tentang bagaimana hubungan atau relasi gender terjadi, dan dialami oleh kaum perempuan dalam kehidupannya di masyarakat dan sudah menjadi keadaan yang wajar-wajar saja (*taken for granted*).

Relasi gender terasa timpang, karena perempuan harus menghadapi tantangan-tantangan yang berasal dari luar diri perempuan itu sendiri. Ketimpangan-ketimpangan relasi gender terjadi karena adanya sikap-sikap dominasi laki-laki (patriarki). Murniati (2004: 53) mengungkap masalah-masalah yang perlu dianalisis yang berhubungan dengan timpanngnya relasi gender karena:

1. struktur budaya patriarki yang terwujud dalam adat dan aturan-aturan yang menyikapi perempuan, sebagai pribadi, maupun kelompok;
2. pandangan yang salah dari kaum laki-laki atau perempuan sendiri, tentang emansipasi perempuan, feminis dan ideologi gender;

3. sikap *defence* (menolak) dari laki-laki sebagai pribadi maupun kelompok, karena merasa terancam kedudukan dan kekuasaannya;
4. sikap dominasi dari laki-laki, sebagai pribadi maupun kelompok, yang menjadikan perempuan sebagai sasaran dominasinya;
5. gambaran mengenai perempuan ideal yang diciptakan laki-laki, yang merupakan "impian" sekaligus "hantu" bagi perempuan, hal ini membuat perempuan sukar untuk berbuat "luar biasa" yang menyimpang dari gambaran ideal tersebut;
6. politik pemerintah yang menangani perempuan di Indonesia tidak mendukung perkembangan perempuan sebagai pribadi yang mandiri;
7. sistem pendidikan yang berlaku dalam masyarakat, baik pendidikan keluarga, sekolah, masyarakat kurang bahkan tidak mendukung perkembangan pribadi perempuan;
8. pandangan stereotip terhadap perempuan merupakan beban mental bagi perempuan sebagai pribadi maupun kelompok dalam masyarakat;
9. pembagian kerja dalam masyarakat masih dipandang berdasarkan seks, bukan kemampuan dari pribadi manusia;
10. ajaran agama yang masih mendukung budaya patriarki. Poin-poin uraian di atas lebih menunjukkan ancaman bagi perempuan, karena pola ini sudah ada di masyarakat secara turun temurun. Hal tersebut tidak terasa sebagai ancaman. Keadaan ini terasa begitu saja berlaku di masyarakat yang harus ditaati. Hal ini membuat perempuan berada dalam kedudukan inferior dan laki-laki pada superior.

F. Budaya Etnis

Budaya etnis merupakan salah satu faktor pelestari ideologi gender. Hal ini dikemukakan secara mengesankan dan mendalam (Sudewa, 1992; Kusujarti, 1997; Saptari dan Holzner, 1997; Hafidz, 1998; Fananie, 1994; Purnama, 2001; dalam Yulianeta, 2002: 49). Dalam masyarakat Jawa, yang budayanya terkenal dengan sistem patriarki yang melahirkan ungkapan-ungkapan yang dianggap menyiratkan inferiorisme perempuan, seperti *kanca wingking, swarga nunut neraka katut* (perempuan hanya mengurus dapur, perempuan hanya bergantung pada suami) menegaskan bahwa perempuan tampak menduduki struktur bawah (inferior). Simak saja kedudukan perempuan Jawa dalam sejarah raja-raja Jawa yang memandang laki-laki sebagai tema sentral. Konsepsi tersebut mengisyaratkan adanya ideologi gender, bahwa keberadaan perempuan dalam struktur masyarakat Jawa hanyalah bertugas sebagai istri atau *kanca wingking*, kuatnya konsepsi tersebut menimbulkan perlakuan-perlakuan yang memberatkan gerak perempuan seperti halnya konsep pingitan yang melarang perempuan untuk bebas bergerak. Dalam konsepsi Jawa, perempuan harus *nrimo*, pasrah, halus, sabar, setia, dan berbakti. Keadaan ini berlangsung lama sesuai budaya masyarakat yang berkembang pada saatnya.

Pada masa Kartini, posisi dan peran perempuan masih belum bergerak, perempuan tetap inferior. Surat-surat Kartini merefleksikan pemberontakan perempuan pada konteks budaya jamannya. Kartini mempermasalahkan mengapa posisi kaum perempuan masih tetap menjadi objek kaum laki-laki, misalnya, poligami sebagai institusi yang diskriminatif dan membelenggu kaum perempuan. Akibatnya perempuan Jawa, khususnya kalangan priyayi, tersubordinasi dan termarginalisasi. Sistem kekuasaan feodal aristokratik telah menempatkan perempuan pada peran sebagai penjaga nilai-

nilai halus-kasar dan adiluhung di dalam rumah. Dalam perkembangan sejarah budaya Jawa, kedudukan perempuan selalu diusahakan berada di bawah laki-laki dan ruang geraknya dibatasi. Ideologi ini, disosialisasikan dan dinetralisasikan pada jiwa perempuan dari sejak dini. Dalam masyarakat patriarki, dominasi laki-laki meliputi berbagai aspek. Keadaan ini menunjukkan adanya paralelisme dan kesamaan di berbagai budaya suku bangsa di seluruh Indonesia.

G. Politik (Kebijakan Pemerintah)

Politik yang dijalankan oleh Negara/Pemerintah (Kebijakan Pemerintah) tidak lepas dari budaya yang berlaku secara maksimal. Karena itu, jika dicermati tidak sedikit kebijakan pemerintah yang terkait dengan posisi dan peran perempuan yang meminimalkan adanya ideologi gender. Ihromi, 1995; Suryo Chondro, 1995; Rahayu, 1996; Saptari dan Holzner, 1997; Muchtar, 1997; Yulianeta, 2002; dan Aisyah, 2003, telah menguraikan atau memaparkan pembangunan, politik, dan kebijakan pemerintah sebagai salah satu faktor pelestari ideologi gender. Sebagai contoh organisasi-organisasi perempuan yang didukung pemerintah, seperti PKK, Dharma Pertiwi, Dharma Wanita sangat handal dengan ketimpangan gender. Menurut Muchtar (yulianeta, 2002) pemerintah orde baru menginstruksikan sebuah ideologi, yakni ideologi ibuisme dengan menggunakan konsep "kodrat." Konsep ini menggambarkan bahwa kegiatan ekonomi perempuan sebagai bagian dari perannya sebagai ibu dan partisipasi perempuan dalam politik dianggap sebagai hal yang tidak layak. Politik (kebijakan pemerintah) ini dengan jelas dimanifestasikan dalam dokumen-dokumen negara, seperti GBHN, UU Perkawinan No.1/1974 dan Pancasila Dharma Wanita.

Dalam usaha untuk memperkuat politik gender tersebut, pemerintah merevitalisasi dan mengelompokkan organisasi-organisasi perempuan yang berafiliasi dengan departemen pemerintah pada tahun 1974. Organisasi ini membantu pemerintah untuk menyebarluaskan ideologi gender. *Pertama*, pengelompokan Dharma Wanita untuk para istri pegawai negeri dan pegawai negeri perempuan. *Kedua*, Dharma Pertiwi untuk para istri militer dan kepolisian. *Ketiga* adalah PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) untuk semua perempuan Indonesia, khususnya di pedesaan. Melalui ketiga organisasi perempuan ini, pemerintahan Orde Baru mengontrol perempuan Indonesia di seluruh lapisan masyarakat dalam rangka menguatkan subordinasi perempuan.

Organisasi-organisasi perempuan ini mengharapkan semua anggotanya ikut berperan dalam pembangunan. Peran tersebut dirumuskan dalam Panca Dharma Wanita (Lima Tugas Utama Wanita), yaitu (1) mendampingi suami; (2) melahirkan, merawat dan membesarkan anak; (3) mengatur ekonomi rumah tangga; (4) pencari nafkah tambahan; dan (5) sebagai anggota masyarakat, terutama sebagai organisasi perempuan, badan-badan sosial, dan lain-lain. Peran-peran tersebut jelas menunjukkan adanya ideologi gender. Dengan demikian peran dan posisi perempuan adalah di sektor domestik dan tersubordinasi di bawah bayang-bayang kekuasaan suami dan laki-laki.

Peraturan dan perundang-undangan pada masa rezim orde baru menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam meraih kesempatan pendidikan, kerja, dan aktivitas di bidang politik. Bahkan perempuan pada saat itu diakui dan dilibatkan keberadaannya dalam pembangunan sehingga dikenal "wanita dan pembangunan." Pada kenyataannya dalam pencanangan-pencanangan program yang dilakukan Menteri UPW, pemerintah tampak bersikap dualisme, pencanangan Panca Dharma

Wani-ta, tuntutan peran ganda wanita, dan mitra seajar antara laki-laki dan perempuan menunjukkan pelestarian ideologi gender. Perempuan dituntut berperan aktif di sektor publik, sekaligus dituntut juga untuk tidak mengabaikan "kewajibannya" di sektor domestik sebagai ibu rumah tangga dan pendamping suami, yang dianggap sebagai tugas utama atau kodrat. Sedangkan tuntutan peran ganda bagi laki-laki tidak ada.

Selain itu, kenyataannya masyarakat sendiri belum dapat keluar dari nilai-nilai lama yang menempatkan perempuan pada stereotip yang inferior dalam hal ini dapat dilihat masih dalamnya jurang antara *das sollen* dan *das sein*. Fakta yang ada di masyarakat menjelaskan hal itu. Contohnya, HAM, pelecehan, dan kekerasan seksual masih merupakan berita sehari-hari di berbagai media massa. Terjadinya kawin kontrak, kawin siri, dan penyimpangan pemberian upah dan gaji TKW, tanpa ada pembelaan yang memadai dan masih merupakan peristiwa yang tak terelakkan. Tidak ketinggalan juga terjadinya berbagai ketidakadilan yang banyak dirasakan oleh perempuan dalam bidang perburuhan dan ketenagakerjaan.

Undang-undang pemerintah yang menyatakan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan masih tinggal anagan-angan. Penelitian Djumaldi, 1985 (Aisyah, 2003: 62) mengungkap bahwa masih terjadi diskriminasi upah antara laki-laki dan perempuan, pelanggaran-pelanggaran ketentuan dan keselamatan kerja, serta persyaratan-persyaratan kerja yang masih banyak melanda kaum perempuan. Dengan demikian perjuangan perempuan untuk mewujudkan cita-cita agar mendapat keadilan dan kesetaraan gender masih harus terus dilakukan.

H. Pemberdayaan Perempuan

Perempuan Indonesia masa kini tidak lagi diragukan untuk menjadi salah satu agen pemberdayaan dan sekaligus menjadi agen penegak HAM. Kajian pemberdayaan perempuan saat ini sangat relevan dengan terjadinya transformasi sosial yang tidak hanya bersifat lokal dan regional, tetapi juga yang bersifat global. Pemberdayaan adalah suatu istilah yang luar biasa populernya saat ini. Kinlaw (1995) menulis dalam bukunya bahwa istilah pemberdayaan sedang melesat dan membumbung tinggi seperti meteor dengan cahaya dan tenaganya yang luar biasa. Istilah ini muncul dalam wacana perbincangan hampir di semua aspek kehidupan orang-orang modern, misalnya dalam perbincangan masalah ekonomi, sosial, politik, bahkan keagamaan, semua menggunakan jargon pemberdayaan.

Perlu diyakini bahwa ketidakberdayaan masyarakat akan menghambat kemajuan suatu bangsa dalam membangun hari esok yang lebih baik dan lebih cerah. Oleh karena itu, kajian dan sekaligus tindakan nyata pemberdayaan masyarakat merupakan bagian integral dalam upaya suatu bangsa untuk membangun, seperti halnya bangsa Indonesia. Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi masa-masa sulit karena krisis moneter yang berkepanjangan.

Pemberdayaan bagi orang-orang miskin, orang-orang terbelakang, anggota partai politik, anggota dewan, para pendidik, tokoh-tokoh agama, dan kaum perempuan, selalu menjadi topik unggulan serta menjadi pembicaraan sehari-hari. Selain itu media massa, media elektronik, jurnal-jurnal ilmiah, seminar dan simposium sangat peduli akan pembahasan pemberdayaan. Kalau boleh dibuat slogannya dapat dikatakan "tak ada hari tanpa perbincangan tentang pemberdayaan."

Sebetulnya apa peran perempuan dengan masalah pemberdayaan? Peranan perempuan dalam kaitannya dengan

pemberdayaan sangat erat. Pemberdayaan perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemberdayaan menyeluruh untuk membangun tatanan kehidupan bermasarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan rangkaian kegiatan yang dapat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memiliki keterampilan sehingga mandiri, mampu menciptakan lapangan kerja, baik untuk diri sendiri atau orang lain, mampu berperan dalam berbagai bidang sesuai keahliannya, dan mampu mengakses berbagai kepentingan sesuai dengan haknya, serta memahami makna keadilan dan kesetaraan gender. Sebelum melangkah lebih lanjut, kita perlu membahas dahulu tentang pengertian pemberdayaan.

Pemberdayaan adalah suatu proses yang alamiah, dalam arti pemberdayaan itu kita alami dalam kehidupan sehari-hari secara wajar. Pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi" bukan "proses instan" (Randy&Rian, 2007). Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap penyadaran. Pada tahap ini, target yang akan di berdayakan diberi "pencerahan" dalam bentuk pemberian penyadaran pada perempuan bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai "sesuatu."
2. Tahap pengkapsitasan, sering disebut *capacity building* atau dalam Bahasa Indonesia yang sederhana disebut "memampukan."
3. Tahap pemberian daya atau *empowerment*, pemberian daya ini sesuai dengan kualitas kecakapan penerima.

Jadi, pengertian pemberdayaan mengacu pada suatu proses sengaja yang berkelanjutan, berpusat pada masyarakat, melibatkan saling menghormati, kepedulian, dan partisipasi kelompok. Melalui proses ini, orang-orang yang kurang memiliki bagian yang setara mengenai sumber daya berharga akan memperoleh akses yang lebih besar dan me-

miliki kendali atas sumber daya tersebut. Para ahli kemasyarakatan telah mengembangkan teori pemberdayaan selama dua puluh tahun terakhir ini. Pemberdayaan diartikan sebagai suatu proses atau suatu mekanisme bagi individu, organisasi, dan masyarakat untuk menjadi ahli dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Teori pemberdayaan mengasumsikan bahwa pemberdayaan akan berbeda bentuk untuk orang yang berbeda, pemberdayaan akan berbeda bentuk untuk konteks yang berbeda, dan pemberdayaan akan berfluktuasi atau berubah sejalan dengan waktu (Randy&Riant, 2007).

Dalam upaya pemberdayaan perlu dicermati pendekatan pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Pendekatan tersebut memiliki tujuan yang harus dipahami, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin yang ditandai terutama dengan semakin meningkatnya penghasilan keluarga miskin dan selanjutnya ditandai dengan semakin menurunnya beban pengeluaran keluarga miskin.

Mengukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat bisa dilihat dari pendekatan "komprehensif rasional" dan pendekatan "inkremental." Pendekatan komprehensif rasional diperlukan untuk perencanaan berjangka dan penggerahan sumber daya yang tersedia untuk pengembangan potensi yang ada secara rasional yang mencakup seluruh masyarakat. Dalam upaya ini perlu dilibatkan semua lapisan masyarakat, di antaranya pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial dan kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, dan individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk membantu. Oleh karena itu, programnya harus bersifat nasional dengan kapasitas sumber daya yang cukup besar agar menghasilkan dampak yang berarti.

Pendekatan inkremental diperlukan untuk desentralisasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan. Tingkat pengambilan keputusan harus dekat dengan masyarakat.

Dalam pendekatan ini, perubahan yang terjadi tidak selalu terjadi secara cepat atau bersamaan pada saat yang sama. Kemajuan dapat dicapai secara bertahap, dalam arti langkah demi langkah, mungkin saja kemajuan kecil pun tidak selalu merata. Percepatan pada satu sektor dan sektor lainnya bisa berbeda, demikian pula antara satu wilayah dengan wilayah lainnya atau suatu kondisi dengan kondisi lainnya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan, perlu adanya pembelajaran dengan menggunakan pendekatan andragogi, yaitu pembelajaran yang diperuntukkan bagi orang dewasa. Metodenya bisa menggunakan diskusi, dinamika kelompok, praktik, dan simulasi. Materinya dapat meliputi kecakapan umum, kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan vokasional, dan isu gender. Langkah-langkah kegiatan meliputi (1) mengidentifikasi masalah dan analisis kebutuhan, hal ini perlu dilakukan dengan melihat kondisi dan potensi daerah, (2) merencanakan bentuk kegiatan, (3) menentukan bentuk kegiatan yang telah direncanakan, seperti pelatihan, pendampingan dengan dinamika kelompok dan pengembangan usaha, (4) menentukan peserta, (5) menentukan nara sumber, (6) menentukan materi pelatihan, dan (7) menentukan tempat dan waktu.

I. Perempuan dan HAM

Etika adalah norma moral tertinggi yang mulai ditanamkan di keluarga/di lingkungan terdekatnya melalui pendidikan. Etika ini kelak akan menentukan kualitas kemanusiaan dan kepekaan hati nurani seseorang. Hati nurani hanya bisa dipakai sebagai pegangan kalau kita terdidik dengan baik, dan keharmonisan dalam keluarga adalah awal semua ini. Sopan santun tidaklah cukup, karena banyak orang yang bersikap sopan santun, tetapi untuk menipu. Lain halnya

dengan sebuah nilai etika, karena etika sangat mendasar dan berpusat di dalam sanubari seseorang.

Demokrasi yang dilandasi dengan nilai etika akan membawa suatu keluarga ke dalam kehidupan yang jelas arahnya, baik untuk suami, istri, anak, saudara dekat, kakek nenek, dan masyarakat sekitarnya. Apabila paham demokrasi tidak dilandasi etika, maka kita akan terjebak pada sebuah *ochlokrasi*, yaitu *eforia* (pesta berlebihan) dari demokrasi yang tidak pada tempatnya. Misalnya anak merasa dewasa, ia mempertahankan pendapat dengan alasan kebebasan menentukan jalan hidupnya atau misalnya orang tua membiarkan anaknya terjerumus dalam sebuah pergaulan dengan alasan bahwa manusia dewasa harus bertanggung jawab sendiri atas semua tindakannya.

Dalam kehidupan sehari-hari tampaknya sulit untuk melihat contoh sempurna sebuah keluarga yang demokrasi dan menerapkan etika sekaligus, serta mendapatkan ruang publik yang beradab. Saat ini kita tidak usah mencari contoh di luar keluarga kita, tetapi kita yang berperan sebagai istri, ibu, dan anggota masyarakat mulailah mencoba menerapkan etika dalam kehidupan keluarga yang demokrasi secara lebih baik, sehingga dapat diteladani oleh anak, suami, saudara, tetangga, dan masyarakat

BAB IX

ISU-ISU GENDER

A. Pendahuluan

Isu gender di era global adalah masalah penindasan dan eksplorasi, kekerasan, dan persamaan hak dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Masalah yang sering muncul adalah perdagangan perempuan (trafiking), yang umumnya timbul dari berbagai faktor yang saling terkait, antara lain dampak negatif dari proses urbanisasi, relatif tingginya angka kemiskinan, dan pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan.

Mengapa terjadi “perbedaan” gender? Terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap seolah-olah ketentuan Tuhan. Sebaliknya melalui dialektika konstruksi sosial gender secara evolusional dan perlahan-lahan mempengaruhi biologis masing-masing.

B. Isu Gender di Era Global

Istilah Gender menurut Oakley (1972) dalam *Sex, Gender and Society* berarti perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis jenis kelamin (sex) merupakan kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen dan universal berbeda. Sementara “gender” adalah *behavioural differences* antara laki-laki dan

perempuan yang dikonstruksi secara sosial (*socially constructed*), yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan melainkan diciptakan masyarakat, baik untuk laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Sedangkan menurut Caplan (1987) dalam *The Cultural Construction of Sexuality* menegaskan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Oleh karena itu gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas, sementara jenis kelamin biologis (sex) akan tetap tidak berubah. Gender dalam pengertian ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi lelaki dan perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing-masing. Tercakup di dalamnya pembagian kerja, pola relasi kekuasaan, perilaku, peralatan, bahasa, persepsi yang membedakan laki-laki dengan perempuan dan banyak lagi. Sebagai pranata sosial, gender bukan sesuatu yang baku dan tidak berlaku universal. Artinya, berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain dan dari satu waktu ke waktu lainnya. Pola relasi gender di Yogyakarta misalnya sangat berbeda dengan di Aceh, berbeda dengan di Saudi Arabia dan sebagainya.

Jadi, konsep gender ialah suatu sifat laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh masyarakat baik secara kultural maupun sistemik. Misalnya perempuan secara kultural dikenal lemah lebut, cantik, emosional atau keibuan, sedangkan laki-laki dikenal kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Perempuan juga sering mendapatkan stigma-stigma atau label-label yang merugikan kaum perempuan dari masyarakat, misalnya: emosional, tukang ngerumpi, tidak rasional, cerewet, pesolek, genit, penakut sehingga beberapa pekerjaan atau posisi penting tidak diberikan kepada perempuan karena takut gagal. Sementara itu, sesungguhnya keadaan seperti di atas biasanya terjadi sebagai akibat dari ketidakadilan yang ditanggung oleh perempuan.

Perbedaan gender melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi perempuan. Hal ini dapat dilihat dari manifestasi ketidakadilan yang ada. Mansour Fakih (1999) membagi manifestasi ketimpangan gender dalam marginalisasi atau pemiskinan perempuan, subordinasi, stereotip, kekerasan, beban ganda dan sosialisasi ideologi nilai peran gender.

C. Isu Diskriminasi Gender

Diskriminasi yang berasal dari kata Latin “dis” yang berarti memilah atau memisah dan “crimen” yang berarti diputusi berdasarkan suatu pertimbangan baik-buruk. Diskriminasi adalah sebuah istilah yang secara harfiah berarti memilah untuk menegaskan perbedaan atas dasar suatu tolok nilai. UU No. 39/1998 tentang HAM menyebutkan pengertian diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya.

Diskriminasi gender merujuk kepada bentuk ketidakadilan terhadap individu tertentu, dimana bentuknya seperti pelayanan (fasilitas) yang dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan sistem dan struktur dimana baik perempuan dan laki – laki menjadi korban dalam sistem tersebut.

Diskriminasi hampir terjadi pada setiap periode sejarah. Dalam lintasan sejarah, setiap kelompok masyarakat mempunyai konsepsi ideologis tentang jenis kelamin. Di beberapa kelompok masyarakat, jenis kelamin digunakan sebagai kriteria yang penting dalam pembagian kerja. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut membagi peran, tugas dan kerja berdasarkan jenis kelamin, meskipun sebagian di antaranya ada yang dipandang cocok dan wajar untuk dilakukan oleh kedua jenis kedua jenis kelamin. Pembagian tersebut adalah awal mula dari munculnya diskriminasi.

Diskriminasi gender banyak terjadi dalam masyarakat, dengan bentuk yang bervariasi baik berupa marginalisasi, stereotip, subordinasi, kekerasan, maupun peran ganda. Hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya faktor kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada perempuan atau laki - laki, kesalahan pemahaman agama, yaitu memandang perempuan kaum yang lemah dan nomor dua. Selain itu faktor tradisi, kebiasaan, asumsi ilmu pengetahuan dan kemajuan IPTEK.

Pembedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki baik secara langsung yang berupa perlakuan maupun sikap, yang tidak langsung berupa peraturan perUU, kebijakan yang telah menimbulkan berbagai ketidak adilan yang telah berakar dalam sejarah, adat, norma dalam masyarakat. Ketidak adilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pemberian yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpakan perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Pada umumnya ketidak adilan gender ini lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidakadilan gender itu berdampak pula pada laki- laki.

Dengan adanya diskriminasi gender telah menyebabkan kesengsaraan dan kemiskinan bagi masyarakat terutama bagi kaum perempuan yang lebih sering mengalami diskriminasi gender. Untuk menghindari atau minimalisir perma-

salahan ini diperlukan peran semua pihak agar lebih memahami konsep gender dan tidak mengabaikan kepentingan laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan suatu keputusan pemerintah. Sehingga korban diskriminasi gender semakin sedikit.

D. Bentuk-Bentuk Diskriminasi Gender

1. Marginalisasi atau Proses Pemiskinan Ekonomi.

Marginalisasi adalah bentuk diskriminasi gender berupa pemunggiran atau proses penyisihan terhadap perempuan, yang terjadi di negara berkembang pada umumnya. Pemunggiran terjadi di rumah, tempat kerja, masyarakat, bahkan negara. Pemiskinan atas perempuan maupun laki-laki yang disebabkan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender. Perempuan dipinggirkan dari berbagai jenis kegiatan pertanian dan industri yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki laki-laki. Selain itu perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang umumnya dikerjakan oleh tenaga laki-laki.

2. Subordinasi

Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsiran ajaran agama maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan sebagai subordinasi dari kaum laki-laki. Kenyataan memperlihatkan bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak terutama perempuan dalam kehidupan. Contohnya. Subor-

dinasi atau Anggapan bahwa Perempuan tidak Penting dalam Keputusan Politik, yaitu

- a. Perampasan daya sosial perempuan mencakup perampasan akses seperti informasi, pengetahuan, pengembangan, keterampilan, dan potensi kolektif, serta partisipasi dalam organisasi dan sumber-sumber keuangan.
- b. Perampasan daya politik perempuan meliputi perampasan akses individu pada pengambilan keputusan politik, termasuk kemampuan memilih dan menyuarakan aspirasi serta bertindak kolektif. Tekanan ini lebih merupakan akibat dari operasi watak otoritarian rezim dan pendukung koersifnya. Kebisuan ini yang harus dibongkar.
- c. Perampasan daya psikologis perempuan mencakup tekanan eksternal yang menyebabkan hilangnya perasaan individual mengenai potensi dirinya dalam kancah sosial-politik, sehingga individu itu tidak punya peluang untuk berpikir kritis. Tekanan eksternal itu dinetralisasikan si miskin menjadi kesadaran palsu. Mereka percaya bahwa mereka miskin dan bodoh, tidak bisa apa-apa, selain mengandalkan orang lain untuk mengubah keadaannya.

3. Stereotipe

Stereotipe (citra buruk) adalah pandangan yang keliru terhadap perempuan, dimana pelabelan atau penandaan yang sering sekali bersifat negatif secara umum melahirkan ketidakadilan gender. Salah satu stereotipe yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis kelamin.

Banyak pandangan masyarakat yang melihat sifat dari individu tersebut dari perilaku kehidupannya sehari-hari. Misalnya pada masyarakat desa yang beranggapan negatif pada seorang perempuan jika ia pulang ke rumah terlalu malam. Karena perempuan yang pulang terlalu lama dianggap oleh masyarakat sebagai perempuan tuna susila. Pada

lah anggapan tersebut belum tentu benar dengan kenyataan yang sebenarnya. Bisa saja perempuan tersebut pulang malam karena ada pekerjaan yang menuntut ia harus pulang malam dan juga bisa karena adanya hambatan di jalan. Anggapan-anggapan masyarakat yang memandang negatif beberapa perilaku ini dapat dikatakan sebagai stereotipe. Stereotipe muncul dari anggapan masyarakat itu sendiri dan juga karena adanya pengaruh dari adat istiadat setempat. Contohnya, Pembentukan Stereotipe atau Pelabelan Negatif.

Stereotipe yang dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu stereotipe yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yakni terjadi terhadap perempuan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya, pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan.

Konsep gender ialah suatu sifat laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh masyarakat baik secara kultural maupun sistemik. Misalnya perempuan secara kultural dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan, sedangkan laki-laki dikenal kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan dan berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain. Hal ini tidak hanya terjadi dalam lingkup rumah tangga tetapi juga terjadi di tempat kerja dan masyarakat, bahkan di tingkat pemerintah dan negara.

4. ***Violence (Kekerasan)***

Berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan merupakan terjemahan dari *violence* artinya

suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan tetapi bersifat nonfisik seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik.

Pelaku kekerasan bermacam-macam, ada yang bersifat individu, baik di dalam rumah tangga sendiri maupun di tempat umum, ada juga di dalam masyarakat itu sendiri. Pelaku bisa saja suami/ayah, keponakan, sepupu, paman, mertua, anak laki-laki, tetangga, majikan.

5. Beban Kerja yang Panjang dan Lebih Banyak (*double burden*).

Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kalamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan laki-laki, dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Berbagai observasi, menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Peran ganda ini adalah bentuk diskriminasi gender di mana beban/peran kerja yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin terlalu banyak. Terdapat ketidakadilan di antara laki - laki dan perempuan dalam tugas dan tanggung jawab. Perempuan memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih berat dan terus - menerus, terutama dalam mengurus rumah tangga. Bagi perempuan di rumah mempunyai beban kerja lebih besar dari laki - laki. Sembilan puluh persen (90%) pekerjaan domestik/rumah tangga dilakukan oleh perempuan, belum lagi jika dijumlahkan dengan pekerjaan di luar rumah.

E. Isu tentang Trafiking

Secara sederhana, trafiking adalah sebuah bentuk perbudakan modern. Kebanyakan korban trafiking adalah perempuan dan anak-anak dari desa yang dirayu untuk ikut pergi ke kota besar atau ke luar negeri dengan janji diberi pekerjaan menarik seperti pelayan, penjaga toko, dan pekerja rumah tangga, tapi malah ditipu dan dipaksa ke dalam pekerjaan yang menyiksa atau bahkan prostitusi. Pada dasarnya siapa pun bisa menjadi korban trafiking.

Perdagangan Manusia juga disebut sebagai trafiking atau *Human Trafficking*, istilah ini diambil dari bahasa Inggris. *Trafficking* yang berarti perpindahan atau migrasi. Realisasi pengertian ini adalah korban dibawa keluar dari kampung halamannya yang aman ke tempat berbahaya dan dikerjapaksakan. Jadi, inilah yang membedakan trafiking dari bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Trafiking tidak hanya merampas hak asasi tapi juga membuat mereka rentan terhadap pemukulan, penyakit, perkosaan, prostitusi, trauma, dan bahkan sampai kematian. Pelaku trafiking menipu, mengancam, mengintimidasi dan melakukan tindak kekerasan untuk menjerumuskan korban ke dalam pekerjaan mirip perbudakan atau ke dalam prostitusi. Korban menghadapi penyiksaan, kekejaman, kerja paksa, pemerasan dan eksplorasi. Banyak yang hanya menerima sedikit gaji atau tidak sama sekali sebagai bayaran pekerjaan mereka dan dipaksa terus bekerja untuk jam kerja yang berlebihan bahkan seringkali tanpa istirahat.

Seiring dengan terkumpulnya lebih banyak informasi dari tahun ke tahun mengenai kejahatan yang dilakukan para pelaku trafiking, kini disepakati bahwa beragam bentuk trafiking bertujuan akhir untuk beragam jenis kerja paksa dan prostitusi. Oleh karena itu definisi trafiking telah menjadi proses yang berevolusi secara terus menerus. Pada tahun 2002, pemerintah Indonesia membuat Rencana Aksi

Nasional (RAN) untuk Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak dimana sebuah definisi sedang diusahakan untuk mendukung hukum di Indonesia.

F. Sosialisasi Ideologi Nilai Peran Gender.

Ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender memberi pengaruh yang cukup besar terhadap kemiskinan. Misalnya, investasi terhadap SDM, khususnya anak-anak dan perempuan dalam pendidikan dan kesehatan. Perempuan yang berpendidikan dan mempunyai kesehatan yang baik akan mempunyai kesempatan untuk aktif bekerja secara produktif pada sektor-sektor formal serta akan menikmati pendapatan yang baik dibanding dengan perempuan yang tidak punya pendidikan dan sakit-sakitan. Selain itu, perempuan yang punya pendidikan akan memberikan perhatian yang lebih besar pada anak-anaknya yang merupakan investasi bagi masa depan anak-anak.

Studi-studi tentang gender saat ini melihat bahwa ketimpangan gender terjadi akibat rendahnya kualitas sumber-daya kaum perempuan sendiri, dan hal tersebut mengakibatkan ketidakmampuan mereka bersaing dengan kaum laki-laki. Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan adalah mendidik kaum perempuan dan mengajak mereka berperan serta dalam pembangunan. Namun kenyataannya proyek-proyek peningkatan peran serta perempuan agak salah arah dan justru mengakibatkan beban ganda bagi perempuan tanpa hasil yang memang menguatkan kedudukan perempuan sendiri.

Ketimpangan gender seperti tersebut di atas seringkali amat sulit untuk dipersoalkan karena berbagai hal sebagai berikut: Anggapan umum bahwa aktivitas/peran gender adalah kodrat, sehingga ketika kita mempersoalkannya maka itu dianggap sebagai melawan kodrat atau kepercayaan,

yang sifatnya tentu sangat privat. Beberapa perempuan sendiri tidak menyadari adanya ketimpangan gender karena telah lama mengadopsi ideologi patriarki yang terlanjur mendarah daging. Mereka lega-lila, ikhlas pasrah terhadap ideologi yang menempatkan mereka sebagai kaum kedua, dan menerima kekerasan atau penindasan sebagai kewajiban atau kodrat mereka. Banyak perempuan rela dan menikmati posisi sebagai alat saja atau objek keinginan patriarki.

Aparat ideologi yang tumbuh dalam struktur masyarakat kita, baik yang berwujud tokoh, kegiatan maupun teks masih bernaaskan patriarki, seperti sekolah-sekolah, sastra, buku-buku sekolah, media massa, awak media, hukum, dsb. Media massa yang mestinya tidak hanya berfungsi sebagai reflektor dari kenyataan sosial tetapi juga *agent of change* yang diharapkan menjadi konstruktur ideologi perubahan, ternyata justru menjadi pelestari ideologi patriarki. Banyak media yang masih melestarikan konsep feminitas tradisional yang menempatkan perempuan di wilayah domestik melulu atau membebani perempuan dengan beban ganda. Mereka juga ikut serta melecehkan perempuan karena seringkali menggunakan perempuan sebagai komoditas atau alat jaja. Seringkali teks mempledoi pemerkosa dan mengorbankan korban dan atau menginstruksikan kembali konsep *the glory of suffering* atau pemuliaan pengorbanan bagi perempuan. Bahkan media massa yang mengklaim sebagai media massa perempuan, tidak luput dari ideologi patriarki yang amat sering ditunggangi pula oleh ideologi kapitalisme. Film, telenovela, sinetron, komik atau novel yang banyak ditonton kaum perempuan juga telah ikut serta melestarikan konsep-konsep tersebut di atas, sehingga kebenaran patriarki dikuukuhkan kembali melalui teks yang mereka renungi.

Diskriminasi gender merupakan bentuk ketidakadilan terhadap individu tertentu, terutama bagi perempuan. Pembedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki baik secara langsung yang berupa perlakuan maupun

sikap, yang tidak langsung berupa peraturan per-UU, kebijakan yang telah menimbulkan berbagai ketidak adilan yang telah berakar dalam sejarah, adat, norma dalam masyarakat. Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan sistem dan struktur dimana baik perempuan dan laki – laki menjadi korban dalam sistem tersebut

Diskriminasi gender hampir terjadi pada setiap periode sejarah. Dalam lintasan sejarah, setiap kelompok masyarakat mempunyai konsepsi ideologis tentang jenis kelamin. Di beberapa kelompok masyarakat, jenis kelamin digunakan sebagai kriteria yang penting dalam pembagian kerja. Diskriminasi gender banyak terjadi dalam kehidupan kita terutama dilingkungan sekitar kita. Banyak kasus yang kita temui dilingkungan sendiri terkait dengan diskriminasi gender baik berupa marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan peran ganda.

Dalam hal ini pemerintah disarankan agar lebih memperhatikan kesejahteraan perempuan, terutama dalam pengambilan kebijakan atau keputusan agar tidak menutup akses perempuan dalam ikut serta mengembangkan skilnya. Para penegak hukum sebaiknya melaksanakan hukum dengan baik terutama yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya masyarakat diharapkan menjalankan kehidupan terutama rumah tangga hendaknya memperhatikan kewajiban dan hak, status, dan perannya dalam keluarga, agar tidak terjadi diskriminasi gender yang merugikan salah satu pihak.

BAB X

BIAS GENDER

A. Pendahuluan

Masyarakat memiliki ekspektasi yang berlebihan terhadap laki-laki. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki yang mengatakan, bahwa sungguh tidak mudah menjadi laki-laki. Karena ekspektasi masyarakat ini, maka laki-laki harus menjadi sosok yang kuat, tidak cengeng, dan perkasa. Ketika seorang anak laki-laki diejek, dipukul, dan dilecehkan oleh kawannya yang lebih besar, maka biasanya ia tidak ingin menunjukkan bahwa ia sebenarnya sedih dan malu. Sebaliknya, ia ingin tampak percaya diri, gagah, dan tidak memperlihatkan kekhawatiran dan ketidakberdayaannya. Sebetulnya keadaan ini menjadi beban yang sangat berat bagi anak laki-laki yang senantiasa bersembunyi di balik topeng maskulinitasnya. Pada kenyataannya untuk menjadi perempuan pun tidaklah mudah. Pelabelan stereotipe perempuan yang pasif, emosional, dan tidak mandiri telah menjadi citra baku yang sulit diubah. Oleh karena itu, jika seorang perempuan mengekspresikan keinginan atau kebutuhannya yang meyalahi stereotipe, maka ia akan dianggap egois, tidak rasional dan agresif. Hal ini menjadi beban tersendiri pula bagi perempuan.

B. Bias Gender

Ulasan mengenai bias gender memang tiada pernah habis, bahkan sejak manusia tercipta di alam raya, perempuan selalu menempati panggung utama dalam menyusun drama

kehidupan. Kita tentu tidak lupa dengan drama kosmis tentang hikayat Adam as. dan istrinya, Hawa, terusir dari surga. Selain itu tidak cukup dengan membawa nama "Tuhan", stereotipe dan subordinasi perempuan juga dikemas dengan sangat halus melalui pelabelan negatif dalam aktivitas keseharian. Misalnya, tubuh perempuan yang gemuk disebut gembrot dan berkonotasi tidak "cantik", sehingga mau tidak mau harus dirampingkan bagaimanapun caranya, sementara pada kondisi yang sama, laki-laki gemuk berarti ayem (tentram), makmur, dan sejahtera hidupnya.

Begitu pula dalam hal berpakaian, perempuan menjadi sorotan. Ketika berhijab dengan muka tertutup yang hanya kelihatan matanya, maka stigma fundamentalis mengemuka. Dengan mudahnya orang memberinya predikat teroris, Islam radikal, wahabi, bukan Islam Indonesia, dan penganut aliran sesat. Bisa juga perempuan yang memakai hijab beraneka model yang modes didalihkan sebagai agen kapitalis yang mengkomersialkan simbol-simbol agama. Oleh karena itu, perlu adanya upaya menjernihkan status perempuan dari justifikasi negatif yang terlanjur diproduksi oleh kultur sosial. Perempuan hendaknya mampu keluar dari kubangan budaya bisu (*silent society*) yang menerima begitu saja setiap dominasi wacana yang mengkungkung, tanpa sedikitpun diberi ruang melakukan pembelaan. Sama sekali tidak ada untungnya bagi perempuan atas aksi diamnya, sebab budaya bisu menurut Freire (2007) bukanlah sebuah entitas yang diciptakan atau muncul dengan sendirinya, melainkan hasil hubungan antara yang mendominasi dan yang didominasi.

Pendekatan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) yang selanjutnya disingkat AWK (CDA) cukup proporsional digunakan untuk mendudukkan wacana-penggunaan bahasa dalam tuturan dan tulisan-perempuan sebagai sebuah bentuk praktik sosial yang menyiratkan suatu hubungan dialektik antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi-situasinya, institusi-institusi, dan struktur sosial yang

mewadahinya (Titscher, dkk., 2009). Selain itu, CDA berusaha mencari efek ideologis yang sering kali tidak jelas dan tersembunyi dalam penggunaan bahasa maupun pengaruh relasi kekuasaan. (Darma, 2013)

C. Ketimpangan atau Bias Gender

Keadaan di atas menunjukkan adanya ketimpangan atau bias gender yang sesungguhnya merugikan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Membicarakan gender tidak berarti membicarakan hal yang menyangkut perempuan saja. Gender dimaksudkan sebagai pembagian sifat, peran, kedudukan, dan tugas laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan norma, adat kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat. Bias gender ini tidak hanya berlangsung dan disosialisasikan melalui proses serta sistem pembelajaran di sekolah, tetapi juga melalui pendidikan dalam lingkungan keluarga. Jika ibu atau pembantu rumah tangga (perempuan) yang selalu mengerjakan tugas-tugas domestik seperti memasak, mencuci, dan menyapu, maka akan tertanam di benak anak-anak bahwa pekerjaan domestik memang menjadi pekerjaan perempuan (Darma, 2013).

Pendidikan di sekolah dengan komponen pembelajaran seperti media, metode, serta buku ajar yang menjadi pegangan para siswa ternyata sarat dengan bias gender. Dalam buku ajar misalnya, banyak ditemukan gambar maupun rumusan kalimat yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Sebut saja gambar seorang pilot selalu laki-laki karena pekerjaan sebagai pilot memerlukan kecakapan dan kekuatan yang "hanya" dimiliki oleh laki-laki. Sementara gambar guru yang sedang mengajar di kelas selalu perempuan karena guru selalu diidentikkan dengan tugas mengasuh atau mendidik. Ironisnya siswa pun melihat bahwa meski guru-gurunya lebih banyak berjenis kelamin perempuan, tetapi

kepala sekolahnya umumnya laki-laki. Dalam rumusan kalimat pun demikian. Kalimat seperti "Ini ibu Budi" dan bukan "ini ibu Suci", "Ayah membaca Koran dan ibu memasak di dapur" dan bukan sebaliknya "Ayah memasak di dapur dan ibu membaca koran", masih sering ditemukan dalam banyak buku ajar atau bahkan contoh rumusan kalimat yang disampaikan guru di dalam kelas. Rumusan kalimat tersebut mencerminkan sifat feminin dan kerja domestik bagi perempuan serta sifat maskulin dan kerja publik bagi laki-laki.

Demikian pula dalam perlakuan guru terhadap siswa, yang berlangsung di dalam atau di luar kelas. Misalnya ketika seorang guru melihat murid laki-lakinya menangis, ia akan mengatakan "Masak laki-laki menangis. Laki-laki enggak boleh cengeng". Sebaliknya ketika melihat murid perempuannya naik ke atas meja misalnya, ia akan mengatakan "anak perempuan kok tidak tahu sopan santun". Hal ini memberikan pemahaman kepada siswa bahwa hanya perempuan yang boleh menangis dan hanya laki-laki yang boleh kasar dan kurang sopan santunnya.

Dalam upacara bendera di sekolah selalu bisa dipastikan bahwa pembawa bendera adalah siswa perempuan. Siswa perempuan itu dikawal oleh dua siswa laki-laki. Hal demikian tidak hanya terjadi di tingkat sekolah, tetapi bahkan di tingkat Nasional. Paskibraka yang setiap tanggal 17 Agustus bertugas di istana negara, selalu menempatkan dua perempuan sebagai pembawa bendera pusaka dan duplikatnya. Belum pernah terjadi dalam sejarah: laki-laki yang membawa bendera pusaka itu. Hal ini menanamkan pengertian kepada siswa dan masyarakat pada umumnya bahwa tugas pelayanan seperti membawa bendera, lebih luas lagi, membawa baki atau pemukul gong dalam upacara resmi sudah selayaknya menjadi tugas perempuan. Semuanya ini mengajarkan kepada siswa tentang apa yang layak dan tidak layak dilakukan oleh laki-laki dan apa yang layak dan tidak layak dilakukan oleh perempuan.

Bias gender yang berlangsung di rumah maupun di sekolah tidak hanya berdampak negatif bagi siswa atau anak perempuan tetapi juga bagi anak laki-laki. Anak perempuan diarahkan untuk selalu tampil cantik, lembut, dan melayani. Sementara laki-laki diarahkan untuk tampil gagah, kuat, dan berani. Ini akan sangat berpengaruh pada peran sosial mereka di masa datang. Singkatnya, ada aturan-aturan tertentu yang dituntut oleh masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki. Jika perempuan tidak dapat memenuhinya ia akan disebut tidak tahu adat dan kasar. Demikian pula jika laki-laki tidak dapat memenuhinya ia akan disebut benci, penakut ata bukan laki-laki sejati.

William Pollacek dalam *Real Boys* menunjukkan pemerintahannya, sebenarnya, bayi laki-laki secara emosional lebih ekspresif dibandingkan bayi perempuan. Namun ketika sampai pada usia sekolah dasar, ekspresi emosionalnya hilang. Laki-laki pada usia lima atau enam tahun belajar mengontrol perasaan-perasaannya dan mulai malu mengungkapkannya. Penyebabnya adalah pertama, ada proses menjadi kuat bagi laki-laki yang selalu diajari untuk tidak menangis, tidak lemah, dan tidak takut. Kedua, proses pemisahan dari ibunya, yakni proses untuk tidak menyerupai ibunya yang dianggap masyarakat sebagai perempuan lemah dan harus dilindungi. Meski berat bagi anak laki-laki untuk berpisah dari sang ibu, namun ia harus melakukannya jika tidak ingin dijuluki sebagai "anak mami".

Tidak mengherankan jika banyak guru mengatakan bahwa siswa laki-laki lebih banyak masuk dalam daftar penerima hukuman, gagal studi, dan malas. Penyebabnya menurut Sommers, karena anak laki-laki lebih banyak mempunyai persoalan hiperaktif yang mengakibatkan kemunduran konsentrasi di kelas. Sementara itu, menjelang dewasa, pada anak perempuan selalu ada tuntutan-tuntutan di luar dirinya yang memaksa mereka tidak memiliki pilihan untuk bertahan. Satu-satunya cara yang dianggap aman adalah

dengan membunuh kepribadian mereka untuk kemudian mengikuti keinginan masyarakat dengan menjadi suatu objek yang diinginkan oleh laki-laki. Objek yang diinginkan ini selalu berkaitan dengan tubuhnya. Jadilah mereka kemudian anak-anak perempuan yang mengikuti stereotip yang diinginkan seperti tubuh langsing, wajah putih nan cantik, kulit halus dll. Tidak heran jika semakin banyak anak perempuan mengusahakan penampilan sempurna bak peragawati dengan cara-cara yang justru merusak tubuhnya. Padahal, di sekolah, siswa perempuan umumnya memiliki prestasi akademik yang lebih baik jika dibandingkan dengan laki-laki. Situasi dan kondisi memungkinkan mereka jauh lebih tekun dan banyak membaca buku.

Keterlibatan Semua Pihak Lalu apa yang dapat dilakukan terhadap fenomena bias gender dalam pendidikan ini? Keterlibatan semua pihak sangat dibutuhkan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih egaliter. Kesetaraan gender seharusnya mulai ditanamkan pada anak sejak dari lingkungan keluarga. Ayah dan ibu yang saling melayani dan menghormati akan menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Demikian pula dalam hal memutuskan berbagai persoalan keluarga, tentu tidak lagi didasarkan atas "apa kata ayah". Jadi, orang tua yang berwawasan gender diperlukan bagi pembentukan mentalitas anak baik laki-laki maupun perempuan yang kuat dan percaya diri. Memang tidak mudah bagi orang tua untuk melakukan pemberdayaan yang setara terhadap anak perempuan dan laki-lakinya. Sebab di satu pihak, mereka dituntut oleh masyarakat untuk membesarkan anak-anaknya sesuai dengan "aturan anak perempuan" dan "aturan anak laki-laki". Di lain pihak, mereka mulai menyadari bahwa aturan-aturan itu melahirkan ketidakadilan baik bagi anak perempuan maupun laki-laki.

Kesetaraan gender dalam proses pembelajaran memerlukan keterlibatan Depdiknas sebagai pengambil kebijakan di bidang pendidikan, sekolah secara kelembagaan dan ter-

utama guru. Dalam hal ini diperlukan standardisasi buku ajar yang salah satu kriterianya adalah berwawasan gender. Selain itu, guru akan menjadi agen perubahan yang sangat menentukan bagi terciptanya kesetaraan gender dalam pendidikan melalui proses pembelajaran yang peka gender.

BAB XI

KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER

A. Pendahuluan

Gender adalah perbedaan dan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Sehingga gender belum tentu sama di tempat yang berbeda, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Seks/kodrat adalah jenis kelamin yang terdiri dari perempuan dan laki-laki yang telah ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu tidak dapat ditukar atau diubah. Ketentuan ini berlaku sejak dahulu kala, sekarang dan berlaku selamanya.

Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan demikian gender dapat dikatakan pembedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk/dikonstruksi oleh sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.

Dengan demikian perbedaan gender dan jenis kelamin (seks) adalah Gender: dapat berubah, dapat dipertukarkan, tergantung waktu, budaya setempat, bukan merupakan kodrat Tuhan, melainkan buatan manusia. Lain halnya dengan seks, seks tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan, berlaku sepanjang masa.

B. Pengertian Status Sosial

Menurut Darma (2013) status sosial adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakatnya. Orang yang memiliki status sosial yang tinggi akan ditempatkan lebih tinggi dalam struktur masyarakat dibandingkan dengan orang yang status sosialnya rendah. Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis atau macam-macam status sosial serta jenis/macam stratifikasi yang ada dalam masyarakat luas:

1. *Ascribed Status*

Ascribed status adalah tipe status yang didapat sejak lahir seperti jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, usia, dan lain sebagainya.

2. *Achieved Status*

Achieved status adalah status sosial yang didapat seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya. Contoh *achieved status* yaitu seperti harta kekayaan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dll.

3. *Assigned Status*

Assigned status adalah status sosial yang diperoleh seseorang di dalam lingkungan masyarakat yang bukan didapat sejak lahir tetapi diberikan karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Contohnya seperti seseorang yang dijadikan kepala suku, ketua adat, sesepuh, dan sebagainya.

C. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan dan Keadilan Gender adalah suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang, dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan aspek konteks dan situasi. Sifat situasional dari

suatu konteks menunjukkan penerapan kesetaraan gender tidak bisa dilakukan secara sama di semua strata masyarakat. Vandana Shiva menyebutnya *equality in diversity* (persamaan dalam keragaman).

Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan yang sama itu bersumber dari pandangan bahwa semua manusia tanpa dibedakan adalah diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibanding makhluk lain. Di hadapan Tuhan, semua manusia adalah sama derajat, kedudukan, atau tingkatannya. Yang membedakan nantinya adalah tingkat ketakwaan manusia tersebut terhadap Tuhan.

Persamaan atau tingkatan manusia ini berimplikasi pada adanya pengakuan akan kesetaraan atau kesederajatan manusia. Jadi, kesetaraan atau kesederajatan tidak sekedar bermakna adanya persamaan kedudukan manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Implikasi selanjutnya adalah perlunya jaminan akan hak-hak itu agar setiap manusia bisa merealisasikan serta perlunya merumuskan sejumlah kewajiban-kewajiban agar semua bisa melaksanakan agar tercipta tertib kehidupan.

D. Pengertian Kesetaraan Gender

Dari uraian di atas jelas bahwa kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam

menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

E. Pengertian Keadilan Gender

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

F. Emansipasi dan Kesetaraan Gender

Peranan perempuan sangatlah besar dalam berbagai bidang. Baik dalam peran pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, bahkan peranan perempuan di ranah publik, seperti contohnya di ranah politik, artinya perempuan dapat memajukan bangsa dan negara melalui SDM yang dimilikinya.

Di Indonesia, emansipasi dipelopori oleh sang pioner emansipasi perempuan, Raden Ajeng Kartini yang melegenda dengan kutipan bukunya "Habis Gelap Terbitlah Terang" muncullah istilah emansipasi perempuan. Berkat jasa beliau, di era globalisasi ini peran perempuan bukanlah suatu hal yang tabu untuk melakukan aktivitas yang di luar perkiraan perempuan, namun masih dalam batas-batas yang wajib diperhatikan. Sebelum membahas lebih jauh antara emansipasi dan kesetaraan gender, perlu dibahas dahulu maksud dan arti dari keduanya.

Emansipasi artinya memberikan hak yang sepatutnya diberikan kepada orang atau sekumpulan orang di mana hak tersebut sebelumnya dirampas atau diabaikan dari mereka. Refleksi emansipasi yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini adalah untuk membawa perubahan besar perempuan Indonesia, yaitu perjuangan menuntut hak pendidikan bagi perempuan. Perlu diketahui bahwa pada zaman dahulu, pendidikan bagi perempuan ataupun kaum pribumi adalah hal yang sangat tabu dan sangat susah untuk dicapai.

Sedangkan kesetaraan gender adalah suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hak (hukum) dan kondisi (kualitas hidup) adalah sama. Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan.

Dari arti di atas sudah terlihat jelas perbedaan keduanya, namun seringkali orang-orang mengartikannya sama. Lalu bagaimanakah kesetaraan gender di dalam Islam? Benarkah Islam menyebutkan adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan?

Islam memandang laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama, tanpa ada perbedaan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kodrat sebagai perempuan dan laki-laki. Menurut pandangan Islam. Islam memandang keadilan

antara laki-laki dan perempuan, bukan kesetaraan. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Sementara kesetaraan adalah menyetarakan antara dua hal tanpa adanya perbedaan.

Sesungguhnya emansipasi yang sebenarnya adalah bentuk pemberian hak kepada perempuan untuk mengembangkan diri dan profesionalismenya agar bisa bergandeng tangan, bahu-membahu dengan laki-laki dalam pembangunan negara. Tidak ada maksud negatif yang tersembunyi di balik gerakan emansipasi. Jika pun ada, maka hal itu kembali ke niat orang atau kumpulan orang yang memperjuangkannya dan apa latar belakang yang memotivasinya.

Kesetaraan gender dengan emansipasi adalah 2 hal yang berbeda arti. Kesetaraan gender adalah persamaan peran antara laki-laki dan perempuan. Jika kita lihat dari fisik, seorang perempuan dan laki-laki jelas sangat berbeda. Secara psikologis menyebutkan 90% perempuan menggunakan perasaan dan sisanya adalah logika. Hal ini berbanding terbalik dengan laki-laki yang 90% menggunakan logika dan sisanya adalah perasaan. Bagaimana bisa kita menyamakan fakta-fakta tersebut? Makna dari emansipasi mungkin sudah keluar dari zona artian yang sebenarnya sehingga banyak orang menyebutkan emansipasi adalah kesetaraan gender. Namun dalam hal ini sangat berbeda. Emansipasi perempuan adalah memperjuangkan hak perempuan. Istilah emansipasi perempuan pada prinsipnya memberikan seluruh hak dasar manusia (*Human Rights*) kepada perempuan, misalnya hak berbicara, hak hidup, dan lain sebagainya. Namun perempuan diharuskan berada pada kodrat yang telah ditentukan untuknya. Inilah yang diajarkan oleh Kartini. Alangkah lebih bijaksananya jika kita mengartikan dan memaknai emansipasi wanita sebagai salah satu bentuk kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan. Sebagai seorang partner, tentu saja mempunyai

kedudukan sama tinggi dan mempunyai hak yang sama tanpa adanya perbedaan yang memandang keduanya.

G. Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial yang di dalamnya baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Berbagai perbedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki baik secara langsung berupa perlakuan dan sikap, maupun tidak langsung berupa dampak suatu perundang-undangan dan kebijakan yang menimbulkan berbagai ketidak-adilan yang telah berakar dalam sejarah dan budaya serta dalam berbagai struktur yang ada dalam masyarakat. Ketidak-adilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pemberian yang tertanam sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja, melainkan dialami pula oleh laki-laki. Meskipun secara agregat ketidakadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan ini lebih banyak dialami oleh perempuan, namun hal itu berdampak pula terhadap laki-laki. Bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan akibat diskriminasi gender itu meliputi marginalisasi, subordinasi, diskriminasi, pandangan stereotipe, kekerasan, dan beban kerja.

1. Marginalisasi

Marginalisasi adalah proses pemunggiran atau penysihan yang mengakibatkan keterpurukan. Hal ini banyak terjadi dalam masyarakat di Negara berkembang seperti penggusuran dari kampung halaman, eksplorasi. Namun, pemiskinan atas perempuan maupun laki-laki yang disebabkan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender. Sebagai contoh, banyak

pekerja perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan petani laki-laki. Perempuan dipinggirkan dari berbagai jenis kegiatan pertanian dan industri yang lebih memerlukan ketrampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki laki-laki. Selain itu perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang umumnya dikerjakan oleh tenaga laki-laki.

Contoh lain marginalisasi:

- a. Design teknologi terbaru diciptakan untuk laki laki, dengan postur tun.
- b. Mesin-mesin digerakkan membutuhkan tenaga laki laki.
- c. Baby sister adalah perempuan.
- d. Perusahaan garmen banyak membutuhkan perempuan.
- e. Direktur banyak oleh laki laki.

2. Subordinasi

Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsiran ajaran agama maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan sebagai subordinasi dari kaum laki-laki. Kenyataan memperlihatkan bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak terutama perempuan dalam kehidupan.

Contoh subordinasi:

- a. Persyaratan melanjutkan studi untuk istri harus ada ijin suami.
- b. Dalam kepanitiaan perempuan paling tinggi pada jabatan sekretaris.

3. Diskriminasi

Diskriminasi yaitu suatu tindakan, prilaku atau anggapan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang individu maupun kelompok terhadap individu atau kelompok lain. Diskriminasi merupakan suatu tindakan yang dapat merampas hak orang lain termasuk hak seorang perempuan maupun laki-laki.

Diskriminasi gender merupakan suatu tindakan atau anggapan yang dilakukan terhadap diri seseorang yang berakibatkan terampasnya hak-hak seseorang dalam kehidupannya. Hak tersebut diantaranya:

- a. Hak untuk hidup tenang dan tenram sesuai yang diharapkan.
- b. Hak untuk mendapatkan kelayakan hidup.
- c. Hak untuk mendapat pekerjaan.
- d. Hak untuk mendapat pendidikan.
- e. Hak untuk mendapatkan kesehatan, dll

Dengan adanya diskriminasi tersebut maka dapat berpengaruh terhadap hak-hak yang dimiliki seseorang. Bahkan seseorang akan merasa tidak nyaman dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya diskriminasi tersebut.

4. Pandangan Stereotipe

Adalah penandaan atau cap yang sering bermakna negatif. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu stereotipe yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis kelamin perempuan, misalnya.

- a. Pekerjaan di rumah seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah diidentikkan dengan pekerjaan perempuan atau ibu rumah tangga
- b. Laki-laki sebagai pencari nafkah yang utama, harus perlakukan dengan istimewa di dalam rumah tangga, misalnya yang berkaitan dengan makan.

Hal ini tidak hanya terjadi dalam lingkup rumah tangga tetapi juga terjadi di tempat kerja dan masyarakat, bahkan di tingkat pemerintah dan Negara. Apabila seorang laki-laki marah, ia dianggap tegas, tetapi bila perempuan marah atau tersinggung dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Standar nilai terhadap perilaku perempuan dan laki-laki berbeda, namun standar nilai tersebut banyak menghakimi dan merugikan perempuan. Label kaum perempuan sebagai "ibu rumah tangga" merugikan, jika hendak aktif dalam "kegiatan laki-laki" seperti berpolitik, bisnis atau birokrat. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama, (*breadwinner*), mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan.

5. Kekerasan (Represi)

Berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan merupakan terjemahan dari *violence* artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan tetapi juga bersifat nonfisik seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik.

Adapun contoh-contoh tindak kekerasan, yaitu:

- a. Suami memperketat istri dalam urusan ekonomi keluar-ga.
- b. Suami milarang istri bersosialisasi di masyarakat.
- c. Istri mencela pendapat suami di depan umum.
- d. Istri merendahkan martabat suami di hadapan masyarakat.
- e. Suami membakat/memukul istri.

Pelaku kekerasan bermacam-macam, ada yang bersifat individu, baik di dalam rumah tangga sendiri maupun di tempat umum, ada juga di dalam masyarakat itu sendiri.

Pelaku bisa saja suami, / ayah, keponakan, sepupu, paman, mertua, anak laki-laki, tetangga, majikan.

6. Beban kerja (*Double Burden*)

Beban kerja yang dilakukan oleh jenis kelamin terlalu lebih banyak. Bagi perempuan di rumah mempunyai beban kerja lebih besar dari pada laki-laki, 90% pekerjaan domestik/rumah tangga dilakukan oleh perempuan belum lagi jika dijumlahkan dengan bekerja di luar rumah. Dalam proses pembangunan, kenyataannya perempuan sebagai sumber daya insani masih mendapat pembedaan perlakuan terutama bila bergerak di bidang publik. Dirasakan banyak ketimpangan, meskipun ada juga ketimpangan yang dialami kaum laki-laki di satu sisi.

Beban kerja yang berlebihan, yaitu tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus menerus. Misalnya, seorang perempuan selain melayani suami (seks), hamil, melahirkan, menyusui, juga harus menjaga rumah. Di samping itu, kadang ia juga ikut mencari nafkah (di rumah), dimana hal tersebut tidak berarti menghilangkan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang perempuan.

BAB XII

PENGARUSUTAMAAN GENDER

A. Pendahuluan

Isu-isu tentang kesetaraan gender memang selalu menjadi distorsi di kalangan akademisi dan nonakademisi dari zaman ke zaman. Permasalahan ini akan terus diangkat sepanjang kaum perempuan benar-benar merasakan hak-haknya dan tidak ada bias gender. Sebuah *statement* yang mengatakan bahwa perempuan adalah makhluk kedua, artinya adalah ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan tidak memiliki hak sebagaimana laki-laki. Hal ini berimplikasi pada sikap merendahkan perempuan yang dianggap sebagai makhluk nomor dua yang tidak boleh berpolitik dan tidak boleh menyuarakan hak-haknya. Seperti di dalam istilah klasik menyebutkan tugas perempuan tidak boleh lebih dari sekedar di dapur, sumur, dan kasur. Dominasi peran laki-laki dalam sektor publik, sementara peran perempuan terbatas dalam sektor domestik adalah konstruksi sosial dan dengan demikian harus direkonstruksi menegakkan keadilan gender.

Kurangnya peran perempuan pada wilayah publik, misalnya menjadi politikus, DPR, Menteri, bahkan seorang Presiden, menjadi hal yang wajar, karena dalam kenyataannya kebanyakan perempuan bergelut di wilayah domestik seperti yang telah dijelaskan di atas. Tentunya fenomena seperti ini harus cepat dicarikan solusi, karena fenomena seperti ini hanya akan melanggengkan perspektif patriarki yang akan berimplikasi pada semakin termarjinalkannya sosok perempuan.

Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan inilah yang kemudian membawa pada permasalahan yang menghambat pembangunan nasional, di mana peran perempuan dirasa 'kurang' dibandingkan dengan peran yang dimainkan oleh laki-laki sebagai penguasa dalam berbagai aspek kehidupan di mana peran perempuan tidak dilibatkan dalam pembangunan nasional sama sekali.

Pemerintah Indonesia sendiri melalui Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 mengusung tentang pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional. Instruksi ini adalah bentuk usaha preventif supaya tercipta *balance* antara laki-laki dan perempuan dalam upaya percepatan pembangunan Nasional. Dengan strategi ini diharapkan akan terjadi percepatan peningkatan partisipasi dan kedudukan perempuan karena setiap tahap proses pembangunan dilakukan dengan cara pandang (perspektif) gender dengan disertai adanya kesadaran bahwa ada perbedaan kapasitas, potensi, aspirasi, kepentingan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki di semua sektor pembangunan dan di pelbagai dimensi kehidupan.

Pengarusutamaan adalah upaya atau strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan gender dalam seluruh proses pembangunan nasional dipandang perlu untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Konsep Dasar Pengarusutamaan Gender (PUG)

Negara menjamin persamaan hak dan kedudukan setiap warga negara, laki-laki dan perempuan. Dalam konstitusi dasar negara UUD 1945, misalnya, dikemukakan jaminan negara atas persamaan hak bagi setiap warga dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1), pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27, ayat 2), usaha bela negara (Pasal 30) dan dalam memperoleh pendidikan (Pasal 31). Secara lebih operasional, GBHN 1999 mengamanatkan perlu adanya lembaga yang mampu mengembangkan kebijakan nasional untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi dunia dan menandatangani sejumlah deklarasi internasional berkaitan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, seperti:

1. Konvensi ILO No. 100 tahun 1950 dengan UU No. 80/1957 tentang Pengupahan yang Sama bagi Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya;
2. Konvensi Hak Politik Perempuan (New York) dengan UU No 68/1958;
3. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dengan UU No 7/1984.
4. Konvensi ILO No. 111 tahun 1985 dengan UU No. 21/1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan; Konferensi Dunia ke IV tentang Perempuan (Beijing tahun 1985).
5. Deklarasi Jakarta (ASPAC tahun 1994);
6. Konferensi Internasional tentang Pembangunan Sosial (Copenhagen tahun 1994); Optional Protocol 28 Februari 2000;

Adanya jaminan konstitusi dan berbagai kebijakan formal tersebut ternyata tidak dengan sendirinya bisa mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan

nyata. Dalam kenyataan, masih tampak berbagai bentuk ketimpangan gender pada berbagai aspek kehidupan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan ini adalah *Gender Empowerment Measurement* (GEM) dan *Gender-related Development Index* (GDI) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari *Human Development Index*. Berdasarkan *Human Development Report 2000*, GDI Indonesia menduduki urutan ke 109 dari 174 negara yang diukur, dan lebih rendah dari Negara-negara ASEAN lainnya.

Kesenjangan gender tampak terjadi di berbagai bidang pembangunan. Dalam bidang pendidikan, misalnya, menurut Susenas 1997 diperoleh data, penduduk perempuan yang berpendidikan tinggi sekitar 2,7%, lebih sedikit ketimbang laki-laki yang mencapai 3,34%. Selain itu, representasi penduduk perempuan yang buta huruf mencapai 14, 46%, sementara laki-laki hanya 6, 6%. Dalam Susenas 1999, jumlah penduduk perempuan yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SLTP baru mencapai 31, 4%, lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 36%. Dalam bidang politik, terlihat bahwa representasi gender pada anggota legislatif masih amat timpang. Anggota DPR perempuan baru mencapai 11, 62% pada tahun 1997 dan 9, 82% pada tahun 1999 (Profil Wanita Indonesia, 1998). Di berbagai Lembaga Tinggi Negara lainnya pun persentase perempuan rata-rata sangat kecil, yaitu: MPR = 7, 8%, MA = 10, 7%, dan DPA = 6, 6% (Soetjipto, A.W., 1997). Dalam jajaran eksekutif, PNS perempuan yang menduduki jabatan struktural eselon III hingga eselon I hanya 7, 2% sementara laki-laki 92, 8% (Profil Wanita Indonesia, 1998). Di bidang ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan baru mencapai 43,5%, sementara TPAK laki-laki 72,6% (Susenas 1999), dan masih ditemui adanya pemberian upah yang berbeda dengan pekerja laki-laki untuk pekerjaan yang sama (RIPNAS PP 2000-2004). Di bidang pemerintahan,

pejabat perempuan yang menduduki jabatan bupati/wali-kota masih amat terbatas, dan hingga kini belum ada yang terpilih menjadi gubernur. Pada tingkat menteri, di samping amat terbatas, perempuan umumnya menempati posisi jabatan stereotipe.

Untuk memperkecil kesenjangan gender yang terjadi pada berbagai sektor kehidupan, maka kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan saat ini dan di masa mendatang harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, pada seluruh kebijakan dan program pembangunan Nasional. Guna menjamin penyelenggaraan pembangunan seperti ini, pemerintah menerbitkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan yang mewajibkan seluruh departemen maupun lembaga pemerintah nondepartemen di pusat dan di daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program yang berada di bawah tugas dan tanggung jawab masing-masing.

C. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG), atau dalam istilah Inggris: *Gender Mainstreaming*, merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki:

1. memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan,
2. berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan. Termasuk proses pengambilan keputusan,
3. mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan, dan
4. memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender mencakup baik pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. **Kebutuhan praktis gender** adalah kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan perbaikan kondisi perempuan dan/atau laki-laki guna menjalankan peran-peran sosial masing-masing, seperti perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih, dan pemberantasan buta aksara. **Kebutuhan strategis gender** adalah kebutuhan perempuan dan/atau laki-laki yang berkaitan dengan perubahan pola relasi gender dan perbaikan posisi perempuan dan/atau laki-laki, seperti perubahan di dalam pola pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumberdaya. Pemenuhan kebutuhan strategis ini bersifat jangka panjang, seperti perubahan hak hukum, penghapusan kekerasan dan diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, persamaan upah untuk jenis pekerjaan yang sama, dan sebagainya.

Dalam buku Panduan Pelaksanaan Inpres No 9 Tahun 2000 *Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan*, yang diterbitkan oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, dikemukakan sejumlah kondisi awal dan komponen kunci yang diperlukan rangka menyelenggarakan pengarusutamaan gender. Kondisi awal dan komponen kunci yang dimaksud, dikemukakan pada Tabel 1 berikut:

Tabel: Kondisi Awal dan Komponen Kunci PUG

No	Kondisi Awal yang Diperlukan	Komponen Kunci
1.	<p><i>Political will</i> dan kepemimpinan dari lembaga dan pemimpin eksekutif, yudikatif, dan legislatif.</p> <p>Adanya kesadaran, kepekaan, dan respons, serta motivasi yang kuat dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.</p>	<p>Peraturan perundang-undangan, misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UUD 1945 2. Tap MPR 3. Undang-undang 4. Peraturan Pemerintah 5. Kepres 6. Perda
2.	<p>Adanya kerangka kebijakan yang secara jelas menyatakan komitmen pemerintah, propinsi, kabupaten/kota terhadap perwujudan kesetaraan dan keadilan gender</p>	<p>Kebijakan-kebijakan yang secara sistemik mendukung penyelenggaraan PUG, termasuk kebijakan, strategi, program, kegiatan, beserta penyediaan anggarannya, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyerasian berbagai kebijakan dan peraturan yang responsive gender. 2. penyusunan kerangka kerja akuntabilitas. 3. penyusunan kerangka pemantauan dan evaluasi yang responsive gender. 4. Pelembagaan institusi pelaksana dan penunjang PUG.

	<p>3. Struktur dan mekanisme pemerintah, propinsi, kabupaten/kota yang mengintegrasikan perspektif gender</p>	<p>Struktur organisasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan PUG di lingkup nasional, propinsi, dan kabupaten/kota, yang ditandai oleh terbentuknya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit PUG 2. <i>Focal point</i> 3. Kelompok Kerja 4. Forum <p>Mekanisme pelaksanaan PUG diintegrasikan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi.</p>
	<p>4. Sumber-sumber daya yang memadai</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki kesadaran, kepekaan, keterampilan, dan motivasi yang kuat dalam melaksanakan PUG di unitnya. 2. Sumber dana dan sarana yang memadai untuk melaksanakan PUG.
	<p>6. Sistem Informasi dan data yang terpisah menurut jenis kelamin.</p>	<p>Data dan statistik yang terpisah menurut jenis kelamin.</p>

7.	Alat analisis	Analisis gender untuk: 1. Perencanaan 2. Penganggaran 3. Pemantauan dan evaluasi
8.	Dorongan dari masyarakat madani kepada pemerintah	Partisipasi masyarakat madani yang dilakukan dalam mekanisme dialog dan diskusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. (2000)

D. Konsep PUG

Di Indonesia sendiri pada bulan Desember 2000 diterbitkan instruksi presiden No.9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. Presiden memberikan instruksi kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Walikota, untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Strategi tersebut dapat dilaksanakan melalui sebuah proses yang memasukkan analisa gender ke dalam program kerja, pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam proses pembangunan.

Namun demikian, sejak diberlakukannya instruksi presiden tersebut, implementasi PUG belum berjalan optimal sesuai dengan yang diamanatkan di dalam inpres tersebut. Dalam upaya pengoptimalan pelaksanaan strategi tersebut, pemerintah mencantumkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu menjadi salah satu arah pembangunan di dalam misi 2 untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, adalah pemberdayaan perempuan dan anak. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan perlindungan anak, penurunan kekerasan, eksplorasi dan diskriminasi serta penguatan kelembagaan dan jaringan PUG.

E. PUG dalam Perencanaan Pembangunan

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan terfokus pada peningkatan perempuan dalam pembangunan. Strategi ini dibangun atas asumsi bahwa permasalahan kaum perempuan berakar pada rendahnya kualitas sumber daya perempuan itu sendiri yang menyebabkan mereka tidak mampu bersaing dengan kaum laki-laki dalam masyarakat termasuk dalam pembangunan. Berangkat dari asumsi di atas, bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Lembaga pemerintahan yang dibebani dan diberikan amanah sekaligus representatif dalam hal ini adalah kementerian pemberdayaan perempuan. Oleh karena penguatan lembaga ini adalah suatu keniscayaan. Penguatan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak (KPPPA), merupakan respon yang konkret dalam mewujudkan PUG ini, di mana institusi ini menetapkan visi dan misinya, dan menyusun pengertian, isu dan masalah serta peren-

canaan terkait gender dan penganggaran responsif gender, dan telah disosialisasikan ke K/L dan pemerintah daerah dalam bentuk seminar dan forum diskusi, agar strategi PUG semakin dapat dipahami dan semakin mendapat perhatian, agar semua pihak dapat lebih berpartisipasi dalam implementasinya. Pendokumentasian pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif.

F. PUG dalam Pendidikan

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengarusutamaan gender di bidang pendidikan di antaranya: kurikulum, evaluasi, pengajar dan kelas, serta peran pimpinan. Elliot, menyatakan bahwa kurikulum sesungguhnya menggambarkan dan mencerminkan sikap dan pandangan yang ada di kelas, lembaga pendidikan, masyarakat dan bahkan negara mengenai isu-isu tertentu. Memang apabila dilihat secara sepintas, kurikulum tampak hanya sebagai daftar mata kuliah, namun apabila dicermati sampai ke silabinya, maka akan ditemukan beberapa asumsi yang sangat penting dan salah satunya adalah pandangan tentang budaya, kelas sosial, dan gender.

Kurikulum pada dasarnya merupakan wadah dan sara-na untuk memuat dan mengembangkan visi dan misi yang dimiliki sebuah lembaga pendidikan supaya visi dan misi tersebut dapat diimplementasi dengan baik. Dengan kata lain kurikulum menggambarkan dan menerjemahkan visi dan misi yang dimiliki. Kemudian kurikulum akan dijabar-kan dalam komponen-komponennya yang terdiri dari tuju-an pembelajaran, materi dan topik perkuliahan, bahan baca-an atau referensi yang dipakai, strategi pembelajaran, media atau sarana dan prasarana yang digunakan, dan evaluasi. Lembaga pendidikan yang memperjuangkan kesetaraan gender, dengan demikian, akan mencantumkan upaya kese-

taraan gender ini sebagai bagian dari visi dan misinya, yang kemudian akan terimplementasi melalui kurikulum beserta komponen-komponennya. Kurikulum yang sensitif gender seharusnya secara eksplisit berkaitan dengan permasalahan-permasalahan gender. Dengan kata lain kurikulum sensitif gender tersebut bersifat *overt curriculum* sehingga tergambar mulai dari tujuan pembelajaran, materi dan topik-topik perkuliahan, bahan bacaan, strategi pembelajaran dan evaluasi, di samping juga *hidden curriculum* yang disampaikan oleh pengajar di kelas dalam menggunakan strategi pembelajaran dan media yang dipakai, termasuk bahasa komunikasi yang ia gunakan.

G. Hambatan-Hambatan di Indonesia

Zaitunah Subhan (1999) mencatat ada beberapa faktor yang menjadi kendala atau penghambat dalam peningkatan peran perempuan, baik secara internal maupun eksternal, di antaranya:

Pertama, penilaian sebagian masyarakat kita terhadap kaum perempuan yang masih dianggap sebagai makhluk lemah, tergantung, sehingga perlu dilindungi dan tidak boleh menjadi pemimpin. Ini terjadi di berbagai tempat di mana kaum perempuan bekerja, di kantor misalnya, bahkan di rumah tangga dan kemudian menyebar dalam dunia politik. Semua itu mengesankan kecilnya peranan wanita dalam perencanaan dan pelaksanaan pengambilan keputusan.

Kedua, kaum perempuan tidak berorientasi pada dirinya, pada kepentingan perempuan dan pada peranan perempuan, tetapi berorientasi pada peranan yang diinginkan laki-laki. Jadi permasalahan pokok pada diri perempuan sendiri adalah sikap rela atau patuh terhadap segala sesuatu yang meremehkan dan mengecilkan peranannya, serta merasa puas dengan perlakuan yang memanjakannya. Inilah

pada hakikatnya yang mengikis hasrat berprestasi diri kaum perempuan, sehingga akhirnya melemparkan dirinya hanya sebagai peranan pelengkap atau objek.

Ketiga, seringnya media massa menampilkan perempuan sebagai objek seks, paling tidak dengan tujuan menawarkan daya tarik, sehingga tubuh perempuan dijadikan komoditi yang serupa dengan benda-benda layak jual. Bahkan seringkali atas nama estetika, tubuh perempuan dieksplotasi seakan tanpa ruh (tidak mempunyai pikiran dan perasaan), serta menjadikan penampilannya sebagai 'penggoda'.

Keempat, peran kaum perempuan (dalam rumah tangga) seringkali diidentikkan dengan kodrat perempuan, sehingga pekerjaan domestik (seperti merawat, mengasuh, dan mendidik) dianggap sebagai kodrat yang tidak boleh diganggu gugat karena telah menjadi ketentuan Tuhan.

Yumi Satria (tt, makalah) mencatat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan, antara lain:
 - a. kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya,
 - b. rendahnya indeks pemberdayaan gender dan indeks pembangunan gender
2. meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai kekerasan, antara lain, masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan.
3. meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, antara lain:
 - a. Belum optimalnya penerapan peranti hukum, peranti analisis dan dukungan politik terhadap keseimbangan gender sebagai prioritas pembangunan,

- b. Belum memadainya kapasitas kelembagaan pelaksanaan PUG serta koordinasi pelaksanaannya

H. Lingkup Kegiatan dan Alur Kerja PUG

Pengarusutamaan gender dilakukan dalam seluruh rangkaian kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Operasionalisasi kegiatannya melibatkan tahapan dan alur kerja analisis gender.

Seperti digambarkan pada Alur Kerja Analisis Gender, dalam perencanaan yang responsif gender, terdapat tiga tahap utama, yaitu (1) melakukan analisis kebijakan gender, (2) memformulasi kebijakan yang responsif gender, dan (3) menyusun rencana aksi kebijakan/program/proyek/kegiatan yang responsif gender.

Tahap pertama dalam perencanaan, yaitu Analisis Kebijakan Gender, perlu dilakukan karena pada umumnya kebijakan pemerintah hingga saat ini masih netral gender (*gender neutral*) dan kadang-kadang, secara tidak sengaja, mempunyai dampak kurang menguntungkan bagi salah satu jenis kelamin. Dengan menggunakan *Data Pembuka Wawasan* kita dapat melihat bagaimana kebijakan dan program yang ada saat ini memberikan dampak berbeda kepada laki-laki dan perempuan. Tahap kedua, Formulasi Kebijakan Gender, dilakukan untuk menyusun Sasaran Kebijakan Kesetaraan dan Keadilan Gender yang menggiring kepada upaya mengurangi atau menghapus kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, tahap ketiga, Rencana Aksi Kebijakan Kesetaraan dan Keadilan Gender disusun sebagai suatu rencana aksi berupa kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Seluruh kegiatan dalam rencana aksi harus sesuai dengan tujuan yang telah

diidentifikasi dalam tahap Formulasi Kebijakan Kesetaraan dan Keadilan Gender di atas. Rencana aksi kebijakan ini perlu disertai dengan indikator keberhasilan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan rencana aksi.

Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berperspektif gender diselenggarakan setelah tahap-tahap perencanaan yang responsif gender seperti dikemukakan di atas dilakukan. Dalam upaya mendukung dan mengefektifkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, perlu dilakukan beberapa hal, antara lain:

1. Kemampuan dan peningkatan kapabilitas pelaksana pengarusutamaan gender.
2. Penyusunan perangkat pengarusutamaan gender, seperti perangkat analisis, perangkat pelatihan, serta perangkat pemantauan dan evaluasi.
3. Pembentukan mekanisme pelaksanaan pengarusutamaan gender, seperti forum komunikasi, kelompok kerja, *stering commite* antar lembaga, dan pembentukan *focal point* pada masing-masing sektor.
4. Pembuatan kebijakan formal yang mampu mengembangkan komitmen segenap jajaran pemerintah dalam upaya pengarusutamaan gender.
5. Pembentukan kelembagaan dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk pengarusutamaan gender.
6. Pengembangan mekanisme yang mendorong terlaksananya proses konsultasi dan berjejaring.

Pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi yang bertujuan untuk menjamin tercapainya kesetaraan dan keadilan gender, yaitu memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses kepada, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas, dan memperoleh manfaat yang sama dari berbagai kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Keadilan dan kesetaraan gender sebagai salah satu cita-cita dan arah dalam

pembangunan nasional hanya dapat terwujud jika masyarakat, khususnya aparat negara, memiliki kesadaran, kepekaan, dan respons serta motivasi yang kuat dalam mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender tersebut.

I. PUG dalam Pemberdayaan Perempuan

Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan memperbaiki kondisi dan posisi perempuan untuk dapat setara dengan posisi laki-laki di berbagai sektor pembangunan. Hal ini mengingat bahwa perempuan lebih banyak jumlahnya dari laki-laki, yang akan menjadi beban pembangunan apabila perempuan tidak mau maju, karena dengan kualitas hidup perempuan yang prima akan menjadi aset pembangunan nasional yang potensial dan memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.

Program pemberdayaan perempuan harus dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan bertujuan sebagai berikut: (1) meningkatkan kemampuan kaum perempuan agar dapat berpartisipasi aktif untuk melibatkan diri dalam program pembangunan dan tidak hanya menjadi objek pembangunan, (2) meningkatkan kepentingan kaum perempuan untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pemerintah, (3) meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha ekonomi produktif dan mandiri, dan (4) meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan perempuan. Untuk tercapainya pengarusutamaan gender ini diperlukan persyaratan awal, di antaranya adalah *political will* dan *leadership* dari lembaga-lembaga dan pemimpin-pimpin eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu ada-

nya kerangka kebijakan yang berkomitmen pada kesetaraan dan keadilan gender serta adanya partisipasi masyarakat untuk terus-menerus melakukan dialog dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan.

BAB XIII

IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN

A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan bukti dikeluarkannya INPRES No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang menginstruksikan kepada seluruh pejabat negara, termasuk Gubernur dan Bupati I Walikota untuk melaksanakan PUG di seluruh wilayah Indonesia. PUG yang dimaksudkan adalah melakukan seluruh proses pembangunan mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang berperspektif gender dengan melibatkan peran serta warga negara baik laki-laki maupun perempuan.

Departemen Pendidikan Nasional mengemban tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 yang tertera pada Pasal 27, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa; Pasal 28C (1) bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya, berhak atas pendidikan dan untuk memetik manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, untuk meningkatkan mutu kehidupannya dan untuk kebaikan seluruh umat manusia; Pasal 31 (1) bahwa setiap warga negara berhak menerima pendidikan; dan Pasal 31 (2) bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib mendanai ini.

Penyediaan akses pendidikan yang bermutu, Penyediaan akses pendidikan, Peningkatan penyediaan pelayanan pen-

didikan, Peningkatan koordinasi, informasi dan edukasi, *capacity building* pendidikan berwawasan gender diharapkan mampu membawa perubahan pada tingkat keadilan dan kesetaraan gender yang nantinya akan berimbang pada peningkatan kualitas pendidikan.

Pengarusutamaan gender merupakan suatu pendekatan pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan pengalaman kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam rancangan, rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program, proyek, peraturan dan anggaran dalam bidang politik ekonomi, sosial, budaya, dan peraturan hukum dan kemasyarakatan. Ada beberapa teknik implementasi, program pengarusutamaan gender menempuh strategi sebagai berikut: Penyediaan akses pendidikan yang bermutu, Penyediaan akses pendidikan, Peningkatan penyediaan pelayanan pendidikan, Peningkatan koordinasi, informasi dan edukasi, *capacity building* pendidikan berwawasan gender. Dari beberapa teknik implementasi tersebut diharapkan mampu membawa perubahan pada tingkat keadilan dan kesetaraan gender yang nantinya akan berimbang pada peningkatan kualitas pendidikan.

B. Sistem Pendidikan Nasional

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi itu di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencer-

daskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Renstra Kemendiknas 2010 – 2014).

Beberapa masalah yang mewarnai atmosfer dunia pendidikan pada umumnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1). *Dichotomi*, adanya kesenjangan gender 2). *To General Knowledge*, sifat ilmu yang terlalu umum 3). *Lack Spirit of Inquiry*, rendahnya semangat untuk melakukan penelitian 4). *Memorisasi* 5). *Certificate Oriented* (Ismail, dkk 2001).

Keberhasilan pembangunan suatu negara berhubungan dengan keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusianya. Linda menjelaskan, "Salah satu indikator dalam mengukur kesenjangan gender, yakni gender empowerment measurement (GEM) dan gender related development index (GD) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari human development index (HDI) atau indeks pembangunan manusia, HDI Indonesia pada 2011 berada di peringkat 124 dari 187 negara dengan nilai 0,617,

yang turun dari 108 pada 2010. Sementara di level Asean, Indonesia berada pada peringkat enam dari 11 negara.", Sedangkan 'Gender in equity indeks` (GII), Indonesia berada pada urutan 100 dari 187 negara, sedangkan di tingkat Asean berada urutan delapan dari 11 negara" (Antara, 2012).

Rasio kesetaraan gender pada jenjang pendidikan menengah dari 93,8% pada tahun 2004 menjadi 95,6% pada tahun 2008, dan diperkirakan menjadi 95,9% pada tahun 2009. Rasio gender pada jenjang pendidikan tinggi dari 90,1% pada tahun 2004 menjadi 102,3% pada tahun 2008. Rasio kesetaraan gender tingkat literasi pada pendidikan nonformal dari 92,7% pada tahun 2004 menjadi 96,8% pada tahun 2008 (Renstra 12 Kemendiknas 2010 – 2014).

Menurut Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, jenis pendidikan di Indonesia terbagi menjadi tiga jalur, yaitu jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di masyarakat, pendidikan formal biasa dikenal sebagai SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dalam pendidikan formal, siswa belajar dan dididik menurut kurikulum tertentu, diadakan di sekolah, serta belajar menurut materi ajar dan jadwal yang ditetapkan sebelumnya (Nugroho, 2010).

Pendidikan, minimal pada tingkat pendidikan dasar, adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global.

Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan asas keadilan dan penyetaraan gender dalam bidang pendidikan khususnya, untuk itu penulis memberikan kajian tentang implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) harapannya nanti akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

C. Pendidikan untuk Semua

Pendidikan untuk semua (*Education for All*) esensinya merupakan kesepakatan global untuk memberikan hak-hak anak memperoleh pendidikan secara tanpa terkecuali, setidaknya pada jenjang minimal. Deklarasi pendidikan untuk semua ini dilahirkan dari Forum Pendidikan Dunia yang diadakan di Dakar 26-28 April 2000 yang salah satu isinya adalah melenyapkan kepincangan jender dalam akses terhadap pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan mencapai kesetaraan jender pada tahun 2015 (Danim, 2010).

Pendidikan seyogianya merupakan hak warga Negara yang diatur oleh Undang-Undang 1945. Tuntutan akan sekolah berstandar internasional yang bertujuan memiliki daya saing dalam era globalisasi ini tidak diimbangi oleh analisis social masyarakat Indonesia. Sekolah bertaraf internasional dengan mengedepankan asas bisnis *profit oriented*, menyebabkan pembengkakkan harga pendidikan yang mahal. "pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang mahal" inilah istilah yang pada akhirnya lahir di masa kontemporer. Mu-

ranya adalah banyak anak bangsa yang harus putus sekolah karena biaya pendidikan yang mahal.

Kondisi ini diperparah dengan kehadiran Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang telah menandakan berkurangnya peran Negara dalam kebijakan dunia pendidikan. Meskipun UU BHP ini telah resmi dicabut, tetap saja wajah baru dari ruh "privatisasi" UU BHP ini akan diupayakan kebangkitannya. Inti dari UU BHP adalah bagaimana lembaga pendidikan memiliki otonomi sendiri dalam hal mengatur system pendidikan, mulai dari manajemen operasional hingga manajemen keuangan (Tim kreatif LKM UNJ, 2011)

D. Kondisi Pendidikan Saat Ini

Dampak laju komersialisasi pendidikan lambat laun akan membuat diskriminasi hak memperoleh fasilitasi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Padahal hak untuk menikmati pendidikan yang berbiaya murah dan berkualitas adalah merupakan bentuk perwujudan hak asasi manusia, hak sosial-ekonomi-budaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara

Kompas, 2011 terdapat 10,268 juta siswa usia wajib belajar (SD dan SMP) yang tidak menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Di sisi lain, masih ada sekitar 3,8 juta siswa yang tidak dapat melanjutkan ke tingkat SMA.

Media Indonesia.com, 2012 Angka melek huruf selama periode 2004-2010 perkembangannya terus meningkat walau-pun diakui bahwa angka buta huruf perempuan usia 15 tahun ke atas lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 9,48 persen untuk perempuan sedangkan untuk laki-laki hanya 4,3 persen atau separuhnya saja.

Di samping itu, seperti halnya angka melek huruf, untuk besaran rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki lebih ting-

gi pada kisaran 1 tahun dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk perempuan, yaitu laki-laki mencapai 8,34 tahun sedangkan perempuan 7,50 tahun di tahun 2010.

Pendidikan perempuan di perguruan tinggi di perkotaan juga sedikit lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, yaitu perempuan 10,24 persen dan laki-laki 11,20 persen dan di perdesaan angkanya lebih rendah lagi, yaitu perempuan 2,90 persen dan laki-laki 2,95 persen.

Orang tua anak-anak perempuan usia sekolah dari keluarga miskin, menganggap anak-anak perempuan mereka tidak usah melanjutkan sekolah, lebih baik langsung dinikahkan atau didorong untuk bekerja di sektor publik sebagai PRT (pembantu rumah tangga) atau buruh informal.

Kondisi demikian yang menjadikan anak-anak perempuan usia sekolah dari keluarga miskin menjadi kelompok sosial yang dilanggar hak sosial-ekonomi-budayanya. Mereka tidak bisa mendapatkan hak memperoleh (menikmati) pendidikan yang berkualitas dan berbiaya murah. Demikian andaikata anak-anak perempuan usia sekolah dari keluarga miskin bisa meneruskan studi sampai jenjang sekolah menengah, mereka terpuruk menjadi pekerja sektor informal berupah murah (Saiful, 2012).

Oleh karena itu pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting. Komitmen untuk melaksanakan ini sangat kuat karena didasari pada amandemen UUD 1945, ketetapan MPR, GBHN, Program Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden, dan Keputusan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Depdiknas tentang kelompok kerja pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan (Kamil, 2012).

E. Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan

Pengarusutamaan gender merupakan suatu pendekatan pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan pengalaman kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam rancangan, rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program, proyek, peraturan dan anggaran dalam bidang politik ekonomi, social, budaya, dan peraturan hukum dan kemasyarakatan (Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan dalam Suryadi, 2009).

Isu kesetaraan gender menurut persamaan hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dibidang pendidikan menjadi dasar kebijakan program pengarusutamaan gender di segala aspek penyelenggaraan pendidikan. Dengan pendekatan pengarusutamaan gender, semua perencanaan pembangunan pendidikan, pengambilan kebijakan dan program pendidikan non-formal seperti pemberantasan buta aksara, pendidikan usia dini, pendidikan kesetaraan dan pendidikan kecakapan hidup, dirumuskan dan dijabarkan dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender tersebut harus tercermin pada indikator-indikatornya dari aspek peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk para pelaku manajemen dan tenaga-tenaga struktural dan fungsional lainnya di bidang pendidikan.

Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan mengacu pada arah dan strategi Pembangunan Pendidikan seperti tercantum pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) dengan tujuan pembangunan pendidikan yang diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskri-

minatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, mulai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Kurikulum pendidikan berwawasan gender tidak hanya terpaku kepada materi ajar saja tetapi juga bagaimana proses mengajar dapat dilaksanakan tanpa bias gender seperti halnya dalam pemilihan kepala kelas dan juga bagi kepala sekolah diharapkan membiasakan untuk memberikan tugas pada guru sesuai dengan bidang kemampuannya tanpa membedakan guru tersebut laki-laki atau perempuan. Pengarusutamaan gender di bidang pendidikan bukan merupakan hal yang baru mengingat sudah ada peraturan yang telah lama mengatur tentang pengarusutamaan gender di Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000,

F. Implementasi Program Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender merupakan suatu pendekatan pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan pengalaman kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam rancangan, rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program, proyek, peraturan dan anggaran dalam bidang politik ekonomi, social, budaya, dan peraturan hukum dan kemasyarakatan (Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan dalam Suryadi, 2009).

Isu kesetaraan gender menurut persamaan hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dibidang pendidikan menjadi dasar kebijakan program pengarusutamaan gender di segala aspek penyelenggaraan pendidikan. Dengan pendekatan pengarusutamaan gender, semua perencanaan pembangunan pendidikan, pengambilan kebijakan dan program pendidikan non-formal seperti pemberantasan buta aksara, pendidikan usia dini, pendidikan kesetaraan dan pendidikan kecakapan hidup, dirumuskan dan dijabar-

kan dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender tersebut harus tercermin pada indikator-indikatornya dari aspek peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk para pelaku manajemen dan tenaga-tenaga struktural dan fungsional lainnya di bidang pendidikan.

Pada tataran implementasi, program pengarusutamaan gender menempuh strategi sebagai berikut:

1. Penyediaan akses pendidikan yang bermutu terutama pendidikan dasar secara merata bagi anak laki-laki dan perempuan baik melalui pendidikan formal maupun non formal.
2. Penyediaan akses pendidikan kesetaraan bagi penduduk usia dewasa laki-laki dan perempuan yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal.
3. Peningkatan penyedia pelayanan pendidikan keaksaraan bagi penduduk dewasa terutama perempuan. Bekerjasama dengan PSW dan LSM dalam hal pengembangan pendidikan gender. Hal ini bertujuan untuk melakukan analisis kebijakan pendidikan berwawasan gender dengan menerapkan Gap dan POP untuk menghasilkan profil pendidikan di tiap provinsi serta bahan masukan rumusan rekomendasi kebijakan untuk mengintervensi beberapa masalah gender di lingkungan pendidikan.
4. Peningkatan koordinasi, informasi dan edukasi dalam rangka mengarusutamakan pendidikan berwawasan gender.
5. Pengembangan dan penguatan kelembagaan (*capacity building*) pendidikan berwawasan gender, baik dipusat maupun daerah mengenai pendidikan gender. Perluaan pemahaman para pengambil keputusan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Kegiatan di tingkat pusat; RTD Eselon II,III,IV pada unit 7 utama di lingkungan Depdik-

nas, yang diharapkan dapat menghasilkan *Position Paper* yang merupakan salah satu wujud komitmen Depdiknas dalam melaksanakan PUG pendidikan.

6. Peningkatan koordinasi dan penyebaran Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).

Caranya dengan mensosialisasikan pesan PUG melalui TV dan Radio di seluruh *channel* dalam bentuk filter, dialog tokoh. Kegiatan KIE ini akan lebih bermakna bagi masyarakat apabila didukung anggaran yang lebih kuat, dan dengan kegiatan yang sederhana tetapi lebih dipahami oleh masyarakat (Suryadi, 2009)

G. Tujuan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan

Secara umum pengarusutamaan gender bidang pendidikan bertujuan untuk membangun komitmen Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dalam upaya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai komponen sistem pendidikan nasional, melalui kebijakan, perluasan pemahaman, dan rencana aksi nasional bidang pendidikan yang berwawasan gender. Secara khusus pengarusutamaan gender bidang pendidikan bertujuan:

1. Mewujudkan kesempatan pendidikan yang lebih merata pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan dengan memperhatikan kesetaraan gender.
2. Memacu peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan melalui pemberdayaan potensi perempuan secara optimal, baik dalam kedudukan sebagai pengambil keputusan, pengembang kurikulum, penulis buku, pengelola pendidikan, tenaga kependidikan maupun sebagai peserta didik.

3. Memperkecil ketimpangan gender pada semua jurusan, bidang kejuruan atau program studi yang ada pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang keahlian dan profesionalisme (Suryadi, 2009).

BAB XIV

UNITED NATION WOMEN SERTA KAITANNYA DENGAN CEDAW

A. Pendahuluan

United Nation Women yang disingkat *UN Women* adalah Entitas Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan atau entitas PBB yang bekerja untuk memberdayakan perempuan dan anak-anak perempuan. *UN Women* dibentuk pada Juli 2010 dan mulai dioperasionalisasikan sejak Januari 2011. Majelis Umum PBB sepakat untuk mendirikan *UN Women*. Dengan demikian, Negara-negara anggota PBB mengambil langkah bersejarah dalam mempercepat tujuan organisasi tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pembentukan *UN Women* muncul sebagai bagian dari agenda reformasi PBB, menyatukan sumber daya dan mandat untuk dampak yang lebih besar. Ini menggabungkan dan berdiri di atas pekerjaan penting dari empat bagian berbeda sebelumnya dari sistem PBB, yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

B. Sejarah Lahirnya *United Nation Women* (UN Women)

Terbentuknya *UN Women* dilatarbelakangi atas tanggapan Sekretaris Jenderal PBB terhadap resolusi Majelis Umum PBB. Kemudian pada Januari 2006 Sekretaris Jenderal mempresentasikan laporan A/64/588 yang berjudul "Proposal Komprehensif Badan Majemuk untuk Kesetaraan Gender

dan Pemberdayaan Perempuan atau *Comprehensive Proposal for the Composite Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.*" Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal memutuskan bahwa, dibentuknya sebuah entitas baru (dalam hal ini dimaksud adalah *UN Women*) akan lebih membantu sistem badan-badan PBB lainnya dalam tanggung jawab mereka untuk berkontribusi mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan entitas baru harus berusaha untuk mempertajam fokus dan dampak dari kegiatan kesetaraan gender dari seluruh sistem PBB.

UN Women menggantikan entitas sebelumnya, yaitu UNIFEM (Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan atau *United Nations Development Fund for Women*) dan juga merupakan anggota kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian dipilihnya Michelle Bachelet, mantan Presiden Chile sebagai Direktur Eksekutif pertama *UN Women*. Atau yang sering disebut dengan Wanita PBB. Pembentukan *UN Women* merupakan salah satu agenda reformasi PBB dan memiliki gabungan mandat dari berbagai bagian sistem PBB yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang terdiri dari: Divisi untuk Pemajuan Perempuan atau *Division for the Advancement of Women (DAW)*. "*UN Women*"

(dalam http://wikipedia.org/wiki/UN_Women, diakses pada 9 Maret 2016).

Institut Penelitian dan Pelatihan Internasional untuk Kemajuan Perempuan atau *International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW)*, Kantor Penasihat Khusus Isu Gender dan Kemajuan Wanita atau *Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI)*, Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan atau *United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)* merupakan gabungan mandat di atas, *UN Women* memimpin, mengoordinasikan, dan mempromosikan akun-

tabilitas PBB dalam kinerja pada masalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Tujuan dibentuknya *UN Women* adalah untuk meningkatkan upaya yang dilakukan sistem PBB lainnya, seperti UNICEF, UNDP, dan UNFPA, yang semuanya bekerja secara berkelanjutan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, di area keahlian masing-masing. *UN Women* memiliki dana di tahun pertamanya sekitar \$ 500.000.000. Sekretaris Jenderal Ban Ki-Moon memperkirakan bahwa sekitar \$125.000.000 per tahun dibutuhkan untuk biaya operasional dan menyediakan kapasitas di Negara, regional dan tingkat kantor pusat. Selain itu, tambahan \$ 375.000.000 per tahun dibutuhkan dalam tahap awal untuk menanggapi permintaan tingkat Negara untuk "About *UN Women*".

(dalam <http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>, diakses 9 Maret 2016).

C. Dukungan Program *UN Women*

Biaya tersebut adalah dana untuk mendukung *UN Women* dan badan-badan antar pemerintahan lainnya dalam menyusun kebijakan dan juga untuk negara-negara anggota dalam menerapkan standar yang relevan dengan isu-isu perempuan, termasuk juga untuk pemantauan berkala atas kemajuan sistem yang meluas. Setelah bertahun-tahun negosiasi antara negara-negara anggota PBB, kelompok-kelompok perempuan dan masyarakat sipil. Pada 2 Juli 2010, Majelis Umum PBB dengan suara bulat mengadopsi resolusi 64/2289, sehingga menciptakan *UN Women* dengan menggabungkan Divisi untuk Pemajuan Perempuan (DAW); Institusi Penelitian dan Pelatihan Internasional untuk Kemajuan Perempuan (INSTRAW, didirikan pada tahun 1976); Kantor Penasihat Khusus Isu Gender Kemajuan Wanita (OSAGI,

didirikan pada tahun 1997), dan Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan (UNIFEM, didirikan pada tahun 1976).

Berdirinya *UN Women* merupakan bentuk pengambilan langkah besar bagi perkembangan perempuan di dunia ke depan yang melibatkan negara-negara anggota PBB. *UN Women* akan secara signifikan meningkatkan upaya-upaya PBB untuk mempromosikan kesetaraan gender, memperluas kesempatan, dan mengatasi diskriminasi di seluruh dunia. Pada tanggal 14 September 2010, diumumkan bahwa mantan Presiden Chile Michelle Bachelet diangkat sebagai pimpinan *UN Women*. Berbagai Negara mendukung pembentukan badan *UN Women* ini dan menyambut Bachelet sebagai ketua. Selama Debat Umum pada pembukaan Majelis Umum ke-65 PBB, para pemimpin dunia memuji dan merespon positif dalam hal pembentukan badan tersebut dan niat untuk memperdayakan perempuan serta menyambut posisi Bachelet sebagai pemimpin *UN Women* yang pertama. Ketentuan yang ditetapkan oleh resolusi 63/311 pada seluruh sistem koherensi, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 2 Oktober 2010, merupakan *blue print* bagi *UN Women*.

D. Dasar Filosofi *UN Women*

Di dalam resolusi itu juga tercantum bahwa dasar memperkuat pengaturan kelembagaan PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, PBB mendukung konsolidasi empat bagian yang berbeda dari sistem PBB yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi sebuah entitas komposit yang akan dipimpin oleh seorang Perwakilan Sekretaris Jenderal (*Under Secretary-General*). Selain itu, resolusi juga meminta agar Sekretaris Jenderal PBB menghasilkan proposal yang menentukan pernyataan misi dan entitas komposit dan aturan-aturan

organisasi, pendanaan dan dewan eksekutif untuk mengawasi kegiatan operasionalnya. Mandat dan fungsi UN Women terdiri dari mandat konsolidasi dan fungsi dari Kantor Penasihat Khusus Isu Gender dan Kemajuan Perempuan, Divisi untuk Kemajuan Perempuan, Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan, serta Institut Penelitian dan Pelatihan Internasional untuk Kemajuan Perempuan. Selain itu, entitas harus memimpin, mengkoordinasikan dan mempromosikan akuntabilitas dari sistem PBB dalam pekerjaannya pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan *UN Women* adalah untuk meningkatkan, bukan menggantikan upaya yang dilakukan oleh bagian lain dari sistem PBB seperti *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, *United Nations Development Programme (UNDP)*, dan *United Nations Population Fund (UNFPA)*, yang semuanya akan terus bekerja untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang keahlian mereka, *UN Women* akan bekerja dalam kerangka Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi termasuk wilayah kritis kepedulian dan hasil khusus dua puluh tiga sidang Majelis Umum serta instrumen PBB yang berlaku lainnya, standar dan resolusi yang membahas kesetaraan gender dan pemberdayaan dan kemajuan perempuan.

E. Perkembangan dan Kemajuan *UN Women*

UN Women dan Perkembangannya didirikan oleh negara anggota PBB pada tahun 2010 untuk mempercepat kemajuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Ini adalah organisasi yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan berfungsi sebagai pendukung penuh perempuan dan anak perempuan secara global. *UN Women* telah tumbuh sebagai lembaga yang besar dalam setiap bidang, apakah itu norma-

tif antar pemerintah dan komitmen politik; advokasi dan komunikasi; hubungan pengetahuan; pusat keunggulan dan pelatihan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta agenda hak-hak perempuan; pemantauan dan pembentuk akuntabilitas ; koordinasi sistem PBB untuk memberikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Program ini berjalan di 90 negara menempatkan arsitektur regional, diperkuat dan didorong dalam undang-undang, kebijakan, tindakan, jasa dan pelaksanaannya serta kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi dan sektor swasta. Setelah enam tahun berjalan, *UN Women* telah ditetapkan oleh perdana menteri PBB sebagai badan terbesar yang memajukan kesetaraan gender. Prioritasnya meliputi:

1. Meningkatkan kepemimpinan dan partisipasi perempuan;
2. Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, melibatkan perempuan dalam semua proses perdamaian dan keamanan;
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan; dan,
4. Membuat kesetaraan gender sebagai pusat untuk perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran.

UN Women juga berkoordinasi dan mempromosikan kerja sistem PBB dalam memajukan kesetaraan gender. *UN Women* memiliki agenda yang sangat terfokus, tetapi juga praktis, yakni membangun sebuah organisasi yang dapat membuat perbedaan berkelanjutan pada kehidupan perempuan dan anak perempuan di mana pun. *UN Women* telah menumbuhkan kesadaran bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tidak hanya memegang peranan sangat penting untuk kesejahteraan perempuan dan anak perempuan sendiri, tetapi juga untuk pembangunan berkelanjutan, perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, perubahan iklim dan kemanusiaan. Keberadaan *UN Women*

telah diterima dengan sangat baik oleh negara anggota, mitranya di masyarakat sipil, sektor swasta, media, akademisi, organisasi pemuda dan lain-lain. Meskipun masih perjuangan besar, keahlian, pekerjaan *UN Women*, sangat dihargai oleh pemerintah, badan-badan PBB, dan oleh perempuan di dunia. Mandat universal *UN Women* adalah harus mempromosikan pergeseran besar dalam tindakan dan norma negara, mengubah norma-norma sosial, stereotipe gender dan praktik diskriminasi yang tertanam dalam budaya, tradisi, dan agama.

Langkah ini bertujuan untuk merangkul menjadi pertanda perubahan yang ingin *UN Women* lihat bagi perempuan dan anak perempuan yang hidup dalam kemiskinan, menderita kekerasan setiap hari, tidak memiliki suara, didiskriminasikan dan dirampas hak dasar mereka sebagai manusia. Dua puluh tahun sejak Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan, di mana *Beijing Platform for Action* diadopsi masih dianggap sebagai salah satu dokumen paling komprehensif tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, meskipun kemajuan dunia masih sangat jauh ke arah kesetaraan gender dan tidak ada negara yang bisa mengklaim bahwa mereka telah mencapai kesetaraan gender, namun, *UN Women* tahu bahwa tanpa kesetaraan gender dan peran penuh untuk melindungi perempuan dalam masyarakat, dalam perekonomian, di pemerintahan, *UN Women* dan dunia tidak akan dapat mencapai masa depan yang kita inginkan. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan penerapan kuat pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menawarkan kesempatan nyata untuk mendorong perubahan yang berlangsung selama hak-hak perempuan dan kesetaraan, serta untuk membawa perubahan universal, komprehensif dan transformatif pada perempuan dan hidup manusia.

F. SDGs sebagai Agenda Pembangunan Gender

Dimasukkannya SDGs di agenda pembangunan baru adalah pengakuan dari nilai intrinsik dari kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dalam konteks manusia berbasis hak dan pendekatan berbasis kesetaraan indispensabilitas untuk adil dan merata ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tahap berikutnya dari pelaksanaan dan lokalisasi sangat penting dalam memastikan keberhasilan SDGs. Sebagai pemimpin global tentang hak-hak perempuan, AS memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural dan mempercepat kemajuan bagi perempuan dan anak perempuan, meletakkan fondasi yang kuat yang akan mendukung keberhasilan pelaksanaan seluruh Agenda 2030. Selain itu, jika kesetaraan gender tidak dicapai, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan akan sangat rentan.

Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan terus menjadi pandemi global yang telah mengambil berbagai bentuk mengerikan dan tidak manusiawi dalam konteks dan ruang yang berbeda. Eksplorasi seksual dan trafiking adalah masalah yang tidak mengenal batas bagi perempuan dan anak perempuan. Ketidaksetaraan gender adalah jantung dari faktor yang terkait dengan peningkatan risiko kekerasan terhadap perempuan termasuk oleh mitra intim. Selain itu, situasi konflik, pasca konflik, dan perpindahan dapat memperburuk kekerasan yang ada dengan mitra intim dan bentuk tambahan dalam kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan ini telah diakui sebagai penghalang untuk pembangunan berkelanjutan dan selanjutnya ditegaskan kembali oleh inklusi Agenda 2030 tentang SDGs yang menargetkan agar kekerasan terhadap perempuan berakhir dan ini adalah target SDGs terkait gender. Hal ini juga dapat mengurangi tingkat pendidikan dan produktivitas, membawa ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat dan tidak efektif bagi perem-

puan dan anak perempuan dalam memenuhi potensi mereka.

Sebuah penelitian dari Oxford University menemukan bahwa biaya ekonomi dan sosial dari semua kekerasan di seluruh dunia adalah sekitar Rp 9,5 triliun per tahun, setara dengan 11,2 persen dari produk domestik bruto dunia. Fem berdayaan Ekonomi Perempuan membuat kontribusi besar untuk ekonomi, baik dalam bisnis, di pertanian, sebagai pengusaha atau karyawan, atau dengan melakukan pekerjaan perawatan yang dibayar di rumah. Misalnya perempuan di Afrika di daerah Sahara berjalan jutaan mil dan miliaran jam untuk mengambil air dan kayu bakar. Mereka tetap hidup dipengaruhi oleh kemiskinan, diskriminasi, dan eksploitasi

G. Hak Asasi Manusia dan Perempuan

Diskriminasi gender menempatkan perempuan pada posisi tidak aman, beban pekerjaan dengan upah rendah, dan merupakan kelompok minoritas. Hak Asasi Manusia dan Perempuan secara harfiah mempunyai makna sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia, dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat seorang individu sebagai seorang manusia. Secara umum HAM dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran.

Isu mengenai HAM merupakan suatu tuntutan kemanusiaan yang telah menjadi sebuah konsep hukum tertulis. Seperti halnya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengeluarkan dan menetapkan *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948. Sebagaimana di dalam Deklarasi PB3 ini

diakui bahwa manusia adalah individu yang menyandang status sebagai subjek hukum internasional di samping Negara. "Dengan menempatkan keprihatinan dan aspirasi perempuan di dalam paradigma hak asasi manusia, yang tidak bisa disangkal: bahwa perempuan adalah manusia dan oleh karena itu mereka menuntut dan memiliki hak terhadap hak-hak mendasar serta kebebasan yang ada di dalam diri semua manusia." Para aktifis telah menggunakan kerangka HAM untuk mentransformasi pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Kerangka HAM menyatakan bahwa perempuan memiliki hak terhadap perlindungan, pendukungan, dan pemenuhan hak asasi mereka sebagai manusia. Kerangka HAM menyediakan bahasa sebagai alat penting untuk "mendefinisikan, menganalisis, dan mengartikulasikan pengalaman kekerasan yang dialami perempuan, serta untuk menuntut penanggulangan dengan cara-cara yang telah diakui oleh komunitas internasional." Kekerasan terhadap perempuan tidak bisa lagi hanya dianggap sebagai suatu urusan Berikut ini adalah beberapa perjanjian dan deklarasi HAM internasional yang telah diciptakan di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, isinya membahas tentang kekerasan terhadap perempuan dan menuntut Pemerintah untuk mengambil tindakan: Konfensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW 1979), Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (DEVAW, 1993), Deklarasi dan Platform Tindakan Beijing (1995), Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (1998), Deklarasi Milenium (2000), dan Resolusi PBB bagi Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (2000).

H. Hari Perempuan Internasional

Tanggal 8 Maret 1947 PBB mencanangkan hari perempuan internasional. Peringatan tersebut didasarkan atas penghormatan terhadap kejadian saat era industrialisasi baru dimulai, dimana kaum proletar perempuan di New York melakukan aksi demonstrasi karena mereka merasa terasa terdiskriminasi. Pergerakan ini dipicu karena para buruh perempuan merasa bahwa gajinya tidak setara dengan buruh laku-laki. Dan pada saat itu pula para demonstran menunjukkan bahwa kaum perempuan tidak ingin dipandang sebelah mata, apalagi dibedakan dengan kaum laki-laki. Sebetulnya pergerakan perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya, bukan hanya ada pada tataran fisik, atau seperti demonstrasi yang dilakukan di New York pada waktu itu. Namun juga memunculkan perdebatan lairnya yang melahirkan pemikiran alternatif pada awal abad ke-20, yaitu feminism.

Feminisme hadir sebagai alat ajar, untuk membedah fenomena dari tataran akademis. Teori feminis berusaha menganalisis berbagai kondisi yang membentuk kehidupan kaum perempuan dan berusaha menyelidiki beragam pemahaman kultural mengenai makna menjadi perempuan. Namun demikian, persepsi terhadap kaum perempuan sebagai pemimpin, masih menjadi polemik dalam negeri, karena alasan emosional, kultural, maupun tendensi agama. Akan tetapi, kita harus memberikan pandangan penting terkait posisi perempuan, khususnya sebagai pemimpin. Dalam Dasasila Bandung, yang dirumuskan pada Konferensi Asia-Afrika, 1955, tercermin semangat baru bagi perdamaian, kesetaraan serta harmoni, yaitu Bandung Spirits (Semangat Bandung). Sangat jelas dalam poin pertama Dasasila Bandung: "Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB" Hak dasar manusia yang disebutkan di atas, pada intinya menghasil-

kan pernyataan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara. Kesetaraan di sini adalah untuk memberikan jaminan pada laki-laki maupun perempuan, bahwa dalam bidang apa pun, pekerjaan apa pun hak-hak dasar mereka harus dipenuhi. Baik itu hak hidup, maupun hak berbangsa dan bernegara penuh kedamaian (<http://sahabatmkaa.com/20-16/03/menapaki-jejak-perempuan-untuk-dunia>).

Konstruksi identitas perempuan, dalam sejarah kewarganegaraan, seringkali dikaitkan dengan peran aklamiahnya sebagai ibu. Konstruksi demikian dikritik oleh feminism dari generasi ke generasi semenjak abad ke-18. Mereka mempersoalkan posisi yang menyulitkan perempuan karena di satu pihak perempuan seolah-olah menjadi bagian warganegara, namun dilain pihak perempuan dianggap sebagai pihak asing-eksklusif. Di sisi lain perempuan menjadi bagian penting bagi proses penyelesaian konflik. Sebagai warga Negara, secara kuantitas perempuan berjumlah separuh dari jumlah penduduk dan selayaknya suara perempuan mendapat perhatian yang sama dengan laki-laki dalam upaya penyelesaian konflik. Dalam memainkan peran penyelesaian konflik, perempuan seringkali bertindak praktis, yaitu memainkan peran kesehatan (Agbajobi 2010). Perempuan adalah kelompok yang rentan dalam situasi konflik, bahkan menjadi korban pelecehan seksual, termasuk yang dilakukan oleh para pasukan penjaga perdamaian (*peace keepers*). Oleh karenanya penting untuk mengakui peran perempuan dalam proses perdamaian agar mereka tidak selalu menjadi korban.

*"About UN Women",
diakses dalam <http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>, diakses 9 Maret 2016*

I. Relasi Gender

Perempuan seringkali terkena dampak jangka panjang maupun jangka pendek dari perang. Kondisi ini dapat memperbaiki relasi gender, misalnya ketika perempuan mengambil alih peran sebagai kepala rumah tangga karena pasangannya tidak lagi mampu menjalankan peran tersebut. Dalam keadaan demikian perempuan memegang peran utama dalam pengambilan keputusan yang dapat memperbaiki posisi tawarnya yang dapat meningkatkan peran publiknya. Percaya bahwa perempuan dapat menjadi warga Negara aktif dalam proses perdamaian menempatkan perempuan pada posisi sentral sebagai warga Negara, dan dengan demikian menegaskan pandangan kaum esensialis yang secara tegas mendikotomi peran privat-publik dalam relasi gender. "Kekerasan terhadap perempuan mungkin merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang paling memalukan dan juga paling umum terjadi.

Kekerasan terhadap perempuan tidak mengenal batasan geografis, budaya atau tingkat kesejahteraan. Selama kekerasan terhadap perempuan terus berlanjut, kita tidak bisa berkata bahwa kita sudah mengalami kemajuan yang nyata dalam hal kesetaraan, pembangunan dan perdamaian." "A World Free of Violence Against Women (Dunia yang Bebas dari Kekerasan Terhadap Perempuan)." Ini adalah konferensi video Perserikatan Bangsa-Bangsa, 8 Maret 1999. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi. Kekerasan terhadap perempuan juga adalah suatu bentuk krisis kesehatan masyarakat, dan merupakan suatu penghalang terhadap kesetaraan, pembangunan, keamanan dan perdamaian. Istilah "kekerasan terhadap perempuan" dan "kekerasan berbasis gender" digunakan untuk mengacu pada serangkaian penganiayaan yang dilakukan terhadap perempuan, yang berakar dari ketidaksetaraan gender dan rendahnya status perempuan

dibandingkan laki-laki. Pada tahun 1993, Deklarasi Perse-rikanan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Kekerasan Ter-hadap Perempuan mendefinisikan kekerasan terhadap pe-rempuan sebagai "Setiap tindak kekerasan berbasis gender yang yang berakibat atau mungkin berakibat pada keseng-saraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi." Definisi ini mencakup kekerasan yang terjadi di dalam keluarga, di dalam masyarakat umum, dan kekerasan yang dilakukan atau yang dilanggengkan oleh Negara.

Bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender termasuk tapi tidak hanya terbatas pada: kekerasan di dalam rumah tangga, penganiayaan seksual, pemerkosaan, pelecehan sek-sual, perdagangan perempuan, pelacuran paksa, dan praktik-praktek yang membahayakan. Selain itu, identitas perempuan yang beragam dan saling bersilangan antara kelas sosial, ras, etnis, agama, keturunan, seksualitas dan status kewarganegaraan bisa menjadi faktor-faktor yang meningkatkan subordinasi dan kerentanan perempuan terhadap kekerasan. Diperkirakan ada satu dari tiga perem-puan di seluruh dunia yang mengalami suatu bentuk keker-a-san berbasis gender di dalam hidupnya. Partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam kehidupan politik dan ekonomi harus dipastikan. Perempuan harus memiliki akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak-hak reproduksi. Perempuan harus memiliki hak yang sama untuk ekonomi sumber daya-tanah, properti dan jasa keuangan. Kesetaraan Gender Pengalaman masa lalu meng-ajarkan bahwa tiadanya kesadaran gender dalam kebijakan dan perencanaan menimbulkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketidakefisienan, ketidaksejahteraan dan ketidakadilan (Kabeer, 2001). Berkaitan dengan hal tersebut

adalah seperti dikemukakan oleh para feminis, marginalisasi dan eksklusi perempuan dalam demokrasi deliberatif menyebabkan perempuan tidak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi secara penuh sebagai warganegara aktif (Guothro, 2007). Tiadanya kesadaran gender yang bergandengan dengan eksklusi perempuan menghasilkan pembuatan kebijakan yang tidak menyejahterakan, tidak saja perempuan, namun seluruh warga Negara. Melihat kesetaraan gender sebagai pencapaian kesetaraan dan kesempatan yang sama. Mengkonseptualisasikan kesetaraan gender dengan cara menegaskan perbedaan antara norma perempuan dan norma laki-laki. Perlu adanya anggapan bahwa kesetaraan gender dapat dicapai dengan cara mengubah semua norma, standar dan rutinitas yang seharusnya berlaku bagi perempuan dan laki-laki. Bagi kelompok yang beranggapan ini, pengarusutamaan gender dianggap sebagai strategi yang tepat untuk mencapai hal tersebut. Argumen ini lebih dari sekedar pengarusutamaan gender, sadar gender merupakan kebutuhan yang secara melekat terdapat dalam struktur masyarakat dan sistem sosial. Agar dampak substansial bagi demokrasi dapat dirasakan, diperlukan kebijakan yang emansipatoris dan mendekonstruksi relasi gender. Berkaitan dengan relasi gender, terdapat dua pandangan dalam paradigm gender. Kaum esensialis berasumsi bahwa terdapat perbedaan antara 'dunia perempuan' dan 'dunia laki-laki' dan oleh karenanya dua dunia itu memiliki pengalaman yang sama sekali berbeda. Perspektif ini berfokus pada atribut kerjasama dan damai yang dimiliki perempuan. Sedangkan kaum feminis post-modern berfokus pada interaksi antara konstruksi sosial individu dan konstitusi individu dari diri mereka sendiri. Dengan berfokus pada bahasa, simbol, wacana alternatif dan makna, studi feminism post-modern memandang bagaimana kekuatan sosial dilaksanakan dan bagaimana hubungan gender, kelas dan ras dapat dibutuhkan. Melibatkan perempuan secara aktif sebagai

warga negara menegaskan kembali peran perempuan sebagai warga Negara yang bertanggung jawab, yang menepis konstruksi sosial mengenai pemahaman tradisional relasi gender. "Ketidakbertanggungjawaban" perempuan dalam ruang publik merupakan konsekuensi dari tidak diakuinya peran perempuan sebagai warga negara aktif, yang secara sistematis dieksklusi dari sistem patriarkal yang mendominasi Negara. Salah satu aspek yang berperan penting dalam mengubah relasi gender perempuan dan laki-laki adalah aspek kolonialisme dan imperialisme. Eurocentrik yang secara tegas mendikotomi peran perempuan dan laki-laki, dan peran publik domestik. Ketika kolonialis menduduki Afrika, posisi dan peran perempuan Afrika dikonstruksi menurut relasi gender dalam masyarakat Barat (Ogbomo 2005); Berger (2008). Panjangnya masa kolonialisme dan imperialism Barat menyebabkan menurunnya status perempuan di tengah masyarakat Afrika. "Masa keemasan" kesetaraan gender di Afrika pada masa pra-kolonial berakhir dengan kuatnya pengaruh kolonialisme dan imperialism Barat yang hal ini berujung pada distorsi peran relasi gender pada masa Afrika kontemporer (Ogbomo 2005).

BAB XV

MILLIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

A. Pendahuluan

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan antara berbagai dimensi, baik dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan selama ini cenderung memanfaatkan sumber daya alam dengan semena-mena, tanpa memperhatikan aspek lingkungan yang ada. Akibatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin sering terjadi.

Dampak-dampak tersebut dapat merugikan atau mengganggu kehidupan manusia. Perhatian dunia terhadap masalah lingkungan yang terjadi sudah lama dilakukan. Dimulai dari dilaksanakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Stockholm, Swedia tahun 1972. Dalam konferensi tersebut dicapai kesepakatan tentang hubungan antara masalah lingkungan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Sejak saat itu konsep pembangunan yang ramah lingkungan mulai diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan oleh berbagai negara. Pada tahun 2000, para pemimpin dunia menyepakati tentang 8 tujuan pembangunan global yang spesifik dan terukur yang disebut *Millennium Development Goals (MDGs)*.

MDGs adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintahan. Target yang tercakup dalam MDGs sangat beragam, mulai dari

mengurangi kemiskinan dan kelaparan, menuntaskan tingkat pendidikan dasar, mempromosikan kesamaan gender, mengurangi kematian ibu dan anak, mengatasi HIV/AIDS dan berbagai penyakit lainnya, serta memastikan kelestarian lingkungan hidup dan membentuk kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan. Pencapaian tujuan dalam MDGs memiliki target waktu hingga 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs, dikembangkan suatu konsepsi dalam konteks kerangka/agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *deflation* sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Berbeda halnya dengan MDGs yang ditujukan hanya pada negara-negara berkembang, SDGs memiliki sasaran yang lebih universal. SDGs dihadirkan untuk menggantikan MDGs dengan tujuan yang lebih memenuhi tantangan masa depan dunia.

B. Pengertian MDGs



Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “Tujuan Pembangunan Milenium”, adalah sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan.

Deklarasi ini merupakan kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam beberapa tujuan, yaitu:

1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan,
2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua,
3. Mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan,
4. Menurunkan Angka Kematian Anak,
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu,
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya,
7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan
8. Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.

Deklarasi MDGs merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Negara-negara berkembang berkewajiban untuk melaksanakannya, termasuk salah satunya Indonesia dimana kegiatan MDGs di Indonesia mencakup pelaksanaan kegiatan monitoring MDGs. Sedangkan negara-negara maju berkewajiban mendukung dan memberikan bantuan terhadap upaya keberhasilan setiap tujuan dan target MDGs.

C. MDGS dan Pembangunan di Indonesia

Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani deklarasi MDGs, Indonesia mempunyai komitmen untuk melaksanakannya serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan program pembangunan nasional baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada hakikatnya setiap tujuan dan target MDGs telah sejalan dengan program pemerintah jauh sebelum MDGs menjadi agenda pembangunan global dideklarasikan. Potret dari kemakmuran rakyat diukur melalui berbagai indikator seperti bertambah tingginya tingkat pendapatan penduduk dari waktu ke waktu, kualitas pendidikan dan derajat kesehatan yang membaik, bertambah banyaknya penduduk yang menempati rumah layak huni, lingkungan permukiman yang nyaman bebas dari gangguan

alam dan aman. Penduduk mempunyai kesempatan untuk mengakses sumber daya yang tersedia, lapangan kerja yang terbuka untuk semua penduduk, serta terbebas dari kemiskinan dan kelaparan.

Pemerintah Indonesia mengklaim delapan target MDGs hampir semuanya tercapai. Itu tertera dalam laporan Bappenas 2010. Di antaranya pemerintah mengklaim berhasil menurunkan angka kemiskinan penduduk yang berpendapatan 1 dolar per hari (standar Bank Dunia), dari 20,6 persen tahun 1990 menjadi 5,8 persen tahun 2008. Namun, klaim keberhasilan itu dibantah oleh sejumlah organisasi massa yang berhimpun dalam *Indonesian Peoples Alliance* (IPA) atau Aliansi Rakyat Indonesia. IPA menilai, pencapaian MDGs gagal. Ini seiring meningkatnya kemiskinan, tidak adanya akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan dasar, ketahanan pangan, dan kerusakan lingkungan serta konflik agraria. Namun, gagal atau tidaknya kembali lagi kepada masyarakat Indonesia sendiri bagaimana menanggapinya.

Setelah pelaksanaan MDGs, *mainstream* agenda pembangunan global dipandu oleh dokumen baru sebagai kelanjutan MDGs yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Meskipun saat ini dalam tahap pembahasan, namun nampaknya dokumen SDGs tidak akan banyak mengalami perubahan dari draf yang sudah ada. Artinya, bila komunitas masyarakat global bersepakat dengan konsep dan berbagai indikator yang tertuang dalam dokumen yang sudah ada, maka SDGs akan efektif diterapkan mulai tahun 2016 untuk 15 tahun ke depan, yaitu tahun 2030 untuk melanjutkan MDGs yang akan berakhir pada tahun 2015.

D. Pengertian SDGs



<http://www.mitrakesmas.com/2016/03/17-goals-sdgs-tujuan-sdgs-pengganti-mdgs.html>

Sustainable development goals (SDGs), yaitu sebuah dokument yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Post-2015, juga dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Berbeda dengan MDGs yang lebih bersifat birokratis dan teknokratis, penyusunan butir-butir SDGs lebih inklusif melibatkan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil atau *Civil Society Organization* (CSO). Penyusunan SDGs sendiri memiliki beberapa tantangan karena masih terdapat beberapa butir-butir target MDGs yang belum bisa dicapai dan harus diteruskan di dalam SDGs. Seluruh tujuan, target dan indikator dalam dokumen SDGs juga perlu mempertimbangkan perubahan situasi global saat ini. (Yohanna, 2015)

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kelanjutan dari *global goals*, yaitu *Melenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir tahun 2015. Secara formal, SDGs didiskusikan pertama kali di *United Nations Conference on Sustai-*

nable Development yang diadakan di Rio de Janeiro bulan Juni 2012.

Dokumen SDGs disahkan pada KTT Pembangunan berkelanjutan PBB yang berlangsung di New York tanggal 25-27 September 2015. Dalam KTT tersebut ditetapkan bahwa SDGs akan mulai diberlakukan pasca tahun 2015 sampai tahun 2030. SDGs tidak hanya berlaku untuk negara berkembang, tapi juga untuk negara-negara maju. (Akhir, 2015)

E. Konsep SDGs

Sustainable Development Goals (SDGS) ini menjadi salah satu isu yang dibahas di KTT Rio.de Yunairo. Oleh karena itu Bappenas beserta Kementerian/Lembaga lainnya merumuskan suatu konsep penyusunan indikator untuk SDGS ini. Ditambahkan Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Perekonomian dan Pembangunan Berkelanjutan, terkait dengan pengembangan konsep awal SDGs mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan pasca MDGs 2015 semestinya dapat menjamin kelanjutan SDGs dari lingkungan hidup dan sumber daya alam, terutama yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh dunia internasional ke depannya, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi dan ketahanan air. Ketiga masalah tersebut sangat penting diperhatikan dalam pengembangan konsep SDGs 2015.

Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Jadi, kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep MGDs sekarang diganti SDGs. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu:

Pertama indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya pendidikan, kesehatan. Kedua indikator yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi.

Ketiga indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

F. Tujuan SDGs

1. Tanpa Kemiskinan

Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apa pun di seluruh penjuru dunia.

2. Tanpa Kelaparan

Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan

Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

4. Pendidikan Berkualitas

Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang.

5. Kesetaraan Gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.

6. Air Bersih dan Sanitasi

Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

7. Energi Bersih dan Terjangkau

Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang. (Barberita, 2015)

8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak

Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi.

10. Mengurangi Kesenjangan

Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas

Membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan.

12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab

Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.

13. Aksi Terhadap Iklim

Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14. Kehidupan Bawah Laut

Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan.

15. Kehidupan di Darat

Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah.

16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian

Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

G. Prinsip SDG's

Prinsip-prinsip SDG's berdasarkan *Outcome Document Rio+20*, yaitu:

1. Tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian MDGs pada tahun 2015.
2. Mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas Nasional.
3. Fokus pada pencapaian ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan secara berimbang, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.
4. Koheren dan terintegrasi dengan agenda pembangunan pasca 2015.

H. Perbandingan MDGs dan SGDs

Saat ini PBB telah merubah arah dan tujuan pembangunan global dari MDGs 2015 menjadi SDGs 2030, ini harus menjadi perhatian kita semua sebagai praktisi kesehatan, khususnya dibidang kesehatan lingkungan agar kita mencermati lebih jeli program dan kegiatan apa saja yang mesti dilakukan dalam mendukung pembangunan global yang dicanangkan oleh PBB tersebut.

Dalam laporan *citiscope* yang terbaru dikatakan bahwa tujuan PBB bekerja selama 2010-2030, yang dikenal sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Aktivitas perkotaan di seluruh dunia bekerja keras untuk mendapatkan tujuan eksplisit terkait dengan kota-kota yang termasuk dalam daftar yang disetujui oleh kelompok kerja PBB pada bulan juli 2015. Tujuan akan disempurnakan lebih lanjut dan dipilih oleh majelis umum PBB di September 2015.

Maksud SDGs adalah upaya untuk melanjutkan tindak lanjut secara luas dipublikasikannya *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah dilaksanakan dari tahun 2000-2015. Beberapa lembaga yang menyetujui adanya SDGs mengatakan bahwa upaya ini belum pernah terjadi sebelumnya di era MDGs untuk memenuhi kebutuhan orang-orang termiskin di dunia. Para kritis mengatakan sudah ada implementasi di beberapa Negara namun pencapaiannya sangat tidak merata sesuai dengan tujuan berdasarkan topic MDGs, Negara atau wilayah dunia. Untuk itulah SDGs ini dicadangkan oleh PBB

Pada dasarnya MDGs dan SDGs punya persamaan dan kesamaan tujuan yang sama, yakni SDGs melanjutkan cita-cita mulia MDGs yang ingin konsen menanggulangi kelaparan dan kemiskinan di dunia.

Namun, dokumen yang disepakati pimpinan dunia pada tahun 2000 tersebut habis pada tahun 2015. Para pemimpin dunia merasa agenda *Millennium Development Goals* (MDGs) perlu dilanjutkan, sehingga muncul sebuah dokumen usulan bernama *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang akan dilaksanakan dari 2015-2030.
(<http://www.berberita.com/2015/11/pengertian-tujuan-target-sdgs-menggantikan-mdgs.html>)

I. Komitmen Indonesia Mengenai MDGs dan SDGs

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru saja meluncurkan program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama *Sustainable Development Goals (SDGs)*, menggantikan program sebelumnya *Millennium Development Goals (MDGs)* yang selesai pada akhir tahun 2015. SDGs tersebut akan otomatis berlaku bagi negara-negara maju dan berkembang untuk 15 tahun ke depan.

Tujuan dari agenda baru PBB tersebut tidak berbeda jauh dari program sebelumnya, yang di antaranya mengakhiri kemiskinan, menjamin kehidupan sehat, mempromosikan pendidikan dan memerangi perubahan iklim. *The Guardian* menulis 7 alasan mengapa SDGs akan jauh lebih baik dari MDGs, yakni:

1. SDGs lebih global dalam mengkolaborasikan program-programnya. MDGs sebelumnya yang dibuat oleh anggota negara *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* dan beberapa lembaga internasional. Sementara SDGs dibuat secara detail dengan negosiasi internasional yang juga terdiri dari negara berpendapatan menengah dan rendah.
2. Sekarang, sektor swasta juga akan memiliki peran yang sama, bahkan lebih besar.
3. MDGs tidak memiliki standar dasar hak asasi manusia (HAM). MDGs dianggap gagal untuk memberikan prioritas keadilan yang merata dalam bentuk-bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM, yang akhirnya berujung kepada masih banyaknya orang yang terjebak dalam kemiskinan. Sementara SDGs dinilai sudah didukung dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip HAM yang lebih baik.
4. SDGs adalah program inklusif. Tujuh target SDG sangat eksplisit tertuju kepada orang dengan kecacatan, dan tambahan enam target untuk situasi darurat, ada juga

- tujuh target bersifat universal dan dua target ditujukan untuk antidiskriminasi.
5. Indikator-indikator yang digunakan memberikan kesempatan untuk keterlibatan masyarakat sipil.
 6. PBB dinilai bisa menginspirasi negara-negara di dunia dengan SDGs.
 7. Konferensi Iklim (*Conference of Parties/COP21*) di Paris adalah salah satu kesempatan untuk maju.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan SDGs pasca penandatangan di New York dalam Sidang Umum PBB (25-27 September 2015). "Presiden Joko Widodo harus memimpin langsung implementasi SDGs sebagai bentuk keseriusan pemerintah," kata Direktur Program Transparansi Internasional Indonesia, Muhamad Ilham Saenong, seperti yang dikutip *Republika Online*, Kamis (8/10/2015). Ia menilai jika implementasi di bawah Bappenas, seperti yang disampaikan pemerintah selama ini, pelaksanaan SDGs tidak akan berhasil karena Bappenas merupakan lembaga teknis perencanaan pembangunan. Untuk memperkuat komitmen itu, Presiden perlu mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) mengenai SDGs.

Di sisi lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada 2015 belum berhasil mencapai target. "Ketidaksetaraan dan kemiskinan menjadi masalah global hingga kini. Bahkan sejumlah tantangan baru muncul seperti kesenjangan energi, infrastruktur, pola konsumsi, keterbatasan produksi, dan perubahan iklim," kata Jusuf Kalla, dalam pidato KTT Pergeseran Agenda Pembangunan Pasca-2015 di Markas Besar PBB, New York, seperti dalam siaran pers yang diterima *Tempo*. Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti pentingnya meningkatkan upaya dan tanggung jawab dalam melaksanakan agenda pembangunan yang baru, capaian Indonesia dalam agenda pembangunan global, dan penting-

nya memperkuat kemitraan dalam agenda pembangunan global. Selain itu, perencanaan pembangunan nasional telah disesuaikan dengan agenda pembangunan global. "Indonesia telah berhasil menurunkan persentase kemiskinan hingga setengahnya, sesuai target MDGs," kata dia.

(<https://beritagar.id/artikel/berita/tujuh-alasan-sdgs-lebih-baik-dari-mdgs>).

J. Target MDG Menuju SGD di Indonesia

Posted on 3rd May 2016 by hmpdfk



Posted in ISMKI, Program Kerja HMPD.

MDGs (millennium development goals) merupakan kesepakatan kepala negara dan perwakilan Negara dari 189 negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang dijalankan mulai September tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2015 kemarin, MDGs diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala Negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut dan Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta dalam mendeklarasikan tujuan MDGs. Sebagai Negara yang ikut mendeklarasikan MDGs, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya untuk mencapai

target dan memonitor perkembangan kemajuan pencapaian-nya.

Target dari MDGs ini adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat tahun 2015. Target ini merupakan tantangan bagi seluruh dunia. Untuk mencapai target-target ini yang terdapat dalam 8 butir tujuan MDGs

Di Indonesia sendiri sudah berhasil menyelesaikan beberapa poin dari tujuan MDGs sendiri. Namun pencapaian target target tersebut dibagi dalam 3 kategori, yaitu target yang telah dicapai, target yang menunjukkan kemajuan signifikan, dan target yang masih memerlukan upaya keras untuk pencapaiannya.

Target MDGs 1 telah berhasil dicapai yaitu menurunkan tingkat kemiskinan yang diukur oleh pendapatan perkapita yang kurang dari 1 dolar AS per hari, telah turun dari 20,6 persen pada tahun 1990 menjadi 5,9 persen pada tahun 2008. Selain itu juga dilihat dari penurunan tingkat kemiskinan, diukur oleh garis kemiskinan nasional dan dari tingkat saat ini sebesar 13,33 persen di tahun 2010 menuju targetnya 8-10 persen pada tahun 2004. Selain itu tingkat kekurangan gizi pada anak anak telah menurun dari 31 persen pada tahun 1989 menjadi 18,4 persen di tahun 2007, sehingga Indonesia diperkirakan bisa mencapai target MDGs sebesar 15,5 persen pada tahun 2015.

Target MDGs 2 pendidikan dasar untuk semua sudah tercapai. Bahkan melebihi target karena di Indonesia sendiri pendidikan dasar (SD) dan menengah pertama (SMP) merupakan pendidikan umum yg bisa diterima semua kalangan.

Target MDGs 3 mendorong kesetaraan gender dan pem-berdayaan perempuan bisa dilihat bawa di Indonesia sendiri tidak hanya laki-laki yang bisa menyongsong pendidikan, bahkan di semua umur dan di semua jenjang pendidikan tentunya. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di SD dan SMP berurutan turut adalah 99,73 dan 101,99 pada tahun 2009, dan rasio melek huruf perem-

puan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun telah mencapai 99,85 persen.

Target MDGs 4 dalam menurunkan angka kematian anak telah menunjukkan nilai yang signifikan dari 97 per 1000 kelahiran pada tahun 1991 menjadi 44 per 1000 kelahiran pada tahun 2007, serta target sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 diperkirakan dapat tercapai

Target MDGs 5 masih perlu kerja keras yang lebih untuk pencapaian yang baik. Angka kematian ibu menurun pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada 2007. Hanya terjadi penurunan yang sedikit. Namun pada akhirnya, angka kematian ibu malah naik dari 228 menjadi 359 per 100.000 kelahiran.

Target MDGs 6 tentang memerangi HIV/AIDS, jumlah penderita HIV/AIDS meningkat, khususnya diantara kelompok resiko tinggi pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. Tingkat kenaikan juga sangat tinggi di beberapa daerah dimana kesadaran tentang penyakit ini rendah. Jumlah kasus HIV/AID yang dilaporkan di Indonesia meningkat 2x lipat antara tahun 2004 dan 2005. Angka kejadian malaria per 1000 penduduk menurun dari 4,68 pada tahun 1990 menjadi 1,85 pada tahun 2009. Sementara itu pengendalian penyakit tuberculosis yang meliputi penemuan kasus dan pengobatan telah mencapai target.

Target MDGs 7, Indonesia memiliki target emisi gas rumah kaca yang tinggi, namun tetap berkomitmen untuk meningkatkan tutupan hutan, memberantas pembalakan liar dan mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan untuk mengurangi emisi co2 paling tidak 26 persen selama 20 tahun ke depan. Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak meningkat dari 37,73 persen pada tahun 1993 menjadi 47,71 persen pada tahun 2009. Sementara itu, proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak meningkat dari 24,81 persen tahun 1993 menjadi 51,19 persen tahun 2009. Upaya untuk mengakselerasi pencapaian target air

minum dan sanitasi yang layak terus dilakukan melalui investasi penyediaan air minum dan sanitasi yang layak terus dilakukan melalui investigasi penyediaan air minum dan sanitasi, terutama untuk melayani jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat. Untuk daerah perdesaan penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat agar memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur dan pembangunan sarana.

Target MDGs 8 tentang Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan, Indonesia berhasil mengembangkan perdagangan serta sistem keuangan yang terbuka, berdasarkan aturan, bisa diprediksi dan non diskriminatif terbukti dengan adanya kecenderungan positif dalam indikator yang berhubungan dengan perdagangan dan sistem perbankan Nasional. Pada saat yang sama, kemajuan signifikan dalam mengurangi rasio peminjaman luar negeri terhadap PDB dari 24,6 persen pada tahun 1996 menjadi 10,9 persen pada tahun 2009. Debt service ratio juga telah dikurangi dari 51 persen pada tahun 1996 menjadi 22 persen pada tahun 2009.

Dari penjabaran di atas masih ada 3 target tujuan MDGs yang masih belum dicapai Indonesia yaitu, MDGs 5 (menurunkan angka kematian ibu melahirkan), MDGs 6 (Mermengangi HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit menular lainnya) dan MDGs 7 (Menjamin daya dukung lingkungan hidup “akses air bersih dan sanitasi dasar”)

Sekarang MDGs telah selesai berakhir. Sejak tahun 2013 telah dibuat kerangka baru untuk menggantikan MDGs yang disebut dengan SDGs (Sustainable Development Goals).

SDGs ditetapkan oleh PBB pada akhir September 2015 di New York dengan masa berlaku mulai Januari 2016 hingga Desember 2030 dan ada sekitar 193 negara anggota PBB yang berkomitmen untuk melaksanakan SDGs.

Agar tercapainya SDGs di Indonesia maka harus ada penyebarluasan tentang SDGs agar dipahami oleh semua pihak tidak hanya pemerintah pusat juga pemerintah daerah, dan masyarakat tentunya. Oleh karena itu, sebagai manusia yang aktif dan cerdas sangat perlu ikut serta membantu Pemerintah dalam menyebarluaskan tentang SDGs ini ke masyarakat luas yang dimulai dari keluarga dekat, kerabat, dan teman kuliah. Mulailah dengan perubahan kecil. Karena perubahan kecil akan membawa Indonesia perubahan yang lebih besar.

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kelanjutan dari global goals *Melenium Development Goals (MDGs)* yang akan berakhir tahun 2015. Secara formal, SDGs didiskusikan pertama kali di *United Nations Conference on Sustainable Development* yang diadakan di Rio de Janeiro bulan Juni 2012.

Dokumen SDGs disahkan pada KTT Pembangunan berkelanjutan PBB yang berlangsung di New York tanggal 25-27 September 2015. Dalam KTT tersebut ditetapkan bahwa SDGs akan mulai diberlakukan pasca tahun 2015 sampai tahun 2030. SDGs tidak hanya berlaku untuk negara berkembang, tapi juga untuk negara-negara maju. (Akhir, 2015)

Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. Jadi, kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep MGDs sekarang diganti SDGs.

Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Develop-*

ment), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Pada dasarnya MDGs dan SDGs punya persamaan dan kesamaan tujuan, yakni, SDGs melanjutkan cita-cita mulia MGDs yang ingin konsen menanggulangi kelaparan dan kemiskinan di dunia. Dokumen yang disepakati pimpinan dunia pada tahun 2000 habis pada tahun 2015. Para pemimpin dunia merasa agenda Millennium Development Goals (MDGs) perlu dilanjutkan, sehingga muncul sebuah dokumen usulan bernama Sustainable Development Goals (SDGs).

BAB XVI

HE FOR SHE (DIA UNTUK DIA)

A. Pendahuluan

He For She yang penulisannya menjadi *HeForShe* adalah kampanye solidaritas untuk pemberdayaan perempuan yang diprakarsai oleh *United Nation Women* (Perempuan PBB). Tujuannya adalah untuk melibatkan laki-laki dan anak laki-laki sebagai agen perubahan dalam pencapaian kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, dengan mendorong mereka untuk mengambil tindakan terhadap ketidaksetaraan yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan. Dasar dari gagasan ini bahwa kesetaraan gender adalah permasalahan yang akan selalu mempengaruhi semua orang secara sosial, ekonomi, dan politik. *HeForShe* berusaha untuk secara aktif melibatkan laki-laki dan anak laki-laki pada suatu gerakan yang pada awalnya dipahami sebagai "perjuangan untuk perempuan oleh perempuan," Ada beberapa kontradiksi dari kampanye *HeForShe* untuk kesetaraan gender ini, yang hanya mengambil tindakan terhadap ketidaksetaraan yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan, tetapi mengabaikan masalah yang mempengaruhi laki-laki dan anak laki-laki.

B. Pemahaman *HeForShe*

HeForShe adalah kampanye solidaritas untuk pemberdayaan perempuan yang diprakarsai oleh Perempuan PBB. Tujuannya adalah untuk melibatkan laki-laki dan anak laki-laki sebagai agen perubahan dalam pencapaian kesetaraan

gender dan hak-hak perempuan, dengan mendorong mereka untuk mengambil tindakan terhadap ketidaksetaraan yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan. [Mondé, Chiderah (22 September 2014). "Emma Watson embraces feminism, introduces 'HeForShe' campaign in speech at UN meeting". New York Daily News. Retrieved 22 September 2014], [McDonald, Soraya Nadia (22 September 2014). "Emma Watson: Feminism too often is seen as 'man-hating'". Washington Post. Retrieved 22 September 2014]. dan [Suhay, Lisa (22 September 2014). "Emma Watson and HeForShe: Points to flaws in man-hating". The Christian Science Monitor. Retrieved 22 September 2014]. Dasar dari gagasan ini bahwa kesetaraan gender adalah permasalahan yang akan selalu mempengaruhi semua orang secara sosial, ekonomi dan politik. *HeForShe* berusaha untuk secara aktif melibatkan laki-laki dan anak laki-laki pada suatu gerakan yang pada awalnya dipahami sebagai "perjuangan untuk perempuan oleh perempuan," Ada beberapa kontradiksi dari kampanye *HeForShe* untuk kesetaraan gender ini, yang hanya mengambil tindakan terhadap ketidaksetaraan yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan, tetapi mengabaikan masalah yang mempengaruhi laki-laki dan anak laki-laki. [Young, Cathy (26 September 2014). "Contributing Editor". Time. Retrieved 26 March 2015], ['HeForShe should work to stop discrimination against both sexes' at dailyorange.com], dan ['Feminism-is-shouting-but-the-movement-is-a-whisper' at inquirelive.co.uk].

C. Sejarah *HeForShe*

Di situs *HeForShe*, ada peta yang menggunakan *geolocator* untuk merekam keterlibatan dunia dalam kampanye *HeForShe* ini, dengan cara menghitung jumlah laki-laki dan anak laki-laki di seluruh dunia yang telah mengikuti janji *HeForShe*. Hal ini digunakan *UN Women* untuk menuju sas-

ran terlibatnya satu juta laki-laki dan anak laki-laki pada bulan Juli 2015, tetapi hasilnya gagal. ['*HeForShe Take Action*' at heforshe.org] termasuk promosi yang melalui website dan rencana penerapan program ini untuk badan-badan PBB, individu, dan masyarakat sipil, serta orang-orang universitas atau kampus perguruan tinggi, baik melalui online maupun keterlibatan langsung [*HeForShe website* (2 October 2014). "*Action Kit*" (PDF). Retrieved 2 October 2014].

"Awalnya kami mengajukan pertanyaan, 'Apakah orang-orang peduli terhadap kesetaraan gender?' Selanjutnya kami menemukan jawaban bahwa mereka peduli ", kata Elizabeth Nyamayaro, penasihat senior direktur eksekutif UN Women."Kemudian kami mulai mendapatkan banyak email dari orang yang mendaftarkan diri, bahkan lebih dari apa yang kami harapkan." [Fairchild, Caroline (December 18, 2014). "*Meet the woman behind Emma Watson's viral feminism campaign*" *Fortune*. Retrieved 26 March 2015].

Sebuah acara khusus diadakan untuk memulai kampanye *HeForShe* pada 20 September 2014 di Markas Besar PBB di New York [UN Women (22 September 2014). "*Press release: UN Women Goodwill Ambassador Emma Watson calls out to men and boys to join HeForShe campaign*" . UN Women. Retrieved 22 September 2014]. Hal ini diselenggarakan oleh UN Women Goodwill Ambassador Emma Watson. Emma Watson berbicara mengenai feminism dan ajakan untuk melibatkan laki-laki dan anak laki-laki dalam mempromosikan kesetaraan gender. Kampanye ini santer beredar melalui media sosial ['*Emma Watson launches 10-by-10-by-10*' at unwomen.org]. dan ["*Emma Watson opens up about that amazing UN speech*". *Woman's Day. Woman's Day*. Retrieved 5 November 2014]. Pada acara itu, UN Women mengupayakan untuk memobilisasi 100.000 orang pada kampanye pertama, hasilnya dicapai hanya dalam tiga hari. Presiden Amerika Serikat Barack Obama, aktor Matt Damon, dan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon merupakan tokoh utama di antara beberapa tokoh

laki-laki penting yang ditampilkan di situs. Inisiatif DAMPAK 10x10x10

D. Inisiatif Dampak 10x10x10

UN Women meluncurkan inisiatif *HeForShe IMPACT 10x10x10* untuk mendapatkan momentum lebih lanjut dalam memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Forum 2015 *World Economic* di Davos pada tanggal 23 Januari 2015. ['*Emma Watson launches 10-by-10-by-10*' at unwomen.org]. Inisiatif ini diluncurkan sebagai pilot proyek satu tahun untuk melibatkan pemerintah, perusahaan dan universitas sebagai instrumen perubahan. DAMPAK 10x10x10 menargetkan beberapa masyarakat yang paling perlu untuk mengatasi pemberdayaan dan kesetaraan gender. Kekhawatiran menguasai perempuan. Mereka berupaya memiliki kapasitas besar untuk membuat dan mempengaruhi perubahan tersebut.

Pemimpin dunia yang berfungsi sebagai tokoh *IMPACT 10x10x10* adalah H.E. Perdana Menteri Mark Rutte dari Belanda; Presiden Ernest Bai Koroma dari Sierra Leone; Perdana Menteri Stefan Löfven Swedia; Paul Polman, CEO Unilever; Rick Goings, Ketua dan CEO *Tupperware Brands Corporation*; dan Dennis Nally, Ketua *Pricewaterhouse Coopers International Ltd.* Direktur dan Wanita Eksekutif *UN Under-Secretary-General Phumzile Mlambo-Ngcuka* mengatakan: *HeForShe* mencontohkan kepemimpinan inovatif Perempuan PBB tentang kesetaraan gender. Kami tahu di mana perubahan ini membuktikan paling sulit. Inisiatif DAMPAK *He ForShe* menempatkan tanggung jawab untuk perubahan yang tepat di mana itu penting sebagai lampu sorot pemimpin yang bisa mewujudkannya. Tokoh pendiri dari industri dan pemerintah akan membuka jalan bagi yang lain untuk bergabung, menggunakan inisiatif percontohan untuk meri-

ngankan pengambilan keputusan pada kegiatan yang relevan dan sukses. Pada akhirnya, kita perlu semua orang untuk terlibat.

DAMPAK 10x10x10 mengutamakan laporan pemerintah dan perusahaan tentang temuan Forum Ekonomi Dunia *Global Gender Gap Report* tahun 2014, yang didasarkan pada tingkat kesenjangan ketidaksetaraan gender di daerah-daerah. Laporan ini menyoroti kesenjangan yang besar antara laki-laki dan perempuan dalam hal pemberdayaan politik yang menunjukkan adanya sedikit peningkatan kesetaraan kerja sejak 2006. Universitas diundang untuk bergabung dengan trio dampak karena keterlibatan kaum muda merupakan salah satu peluang terbesar untuk mempercepat kemajuan dalam pencapaian kesetaraan gender dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.

Aktris Inggris populer dan *Goodwill Perempuan UN Global Ambassador* Emma Watson berfungsi sebagai pencetus gerakan wajah publik. Dia mengatakan bahwa gelombang respon yang kami terima didukung untuk *HeForShe*. Hal ini memberitahu kita untuk memanfaatkan apa yang diinginkan dunia, yaitu menjadi bagian dari perubahan. Sekarang kita harus menyalurkan energi ke dalam tindakan yang terarah. Inisiatif yang dibangun adalah menyediakan percontohan kerangka kerja. Selanjutnya kita memerlukan semua pimpinan negara, serta ratusan universitas dan perusahaan-perusahaan untuk mengikuti *HeForShe*. *IMPACT 10x10x10* dan kita mengharapkan usaha untuk mengakhiri kesenjangan ketidaksetaraan gender yang terus berlangsung yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan secara global. "[Palmer, Ewan (January 23, 2015). "Davos: Emma Watson launches new HeForShe gender equality campaign at World Economic Forum". *International Business Times*. Retrieved 26 March 2015].

E. Wawancara Facebook dengan Emma Watson pada Hari Perempuan Internasional

Dalam perayaan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2015, Emma Watson melanjutkan gerakan *HeForShe*, yaitu hosting wawancara intim dengan Facebook di mana ia diberi pertanyaan tentang kesetaraan gender. [McKenzie, Sheena (March 9, 2015). "Emma Watson: Don't let anyone tell you what you can or cannot achieve". CNN. Retrieved 26 March 2015]. Acara ini dihadiri langsung oleh 120 penggemar dan dilihat oleh jutaan lebih di seluruh dunia sebagai *Watson Galvani*. Begitu pula wawancara tentang isu-isu serius dari gaji yang tidak setara. Mengapa feminism tidak memprotes untuk masalah ini termasuk mengapa laki-laki tidak apa-apa untuk menjadi pecundang.

F. ATM Chase Mendukung *HeForShe*

HeForShe gerakan solidaritas PBB Perempuan untuk kesetaraan gender memperoleh paparan baru pada awal Maret tahun 2015 saat kampanye dengan judul sponsor perusahaan jasa keuangan global terkemuka *J. P. Morgan Chase & Co* yang mendorong dukungan untuk gerakan *HeForShe* ini di layar ATM *Chase* seluruh New York City dan Los Angeles [Angulo, Natalia (March 12, 2015). "JPM's NYC, LA ATMs Going *HeForShe* in March". Fox Business. Retrieved 26 March 2015]. "Kesetaraan gender bukan hanya masalah perempuan; itu masalah hak asasi manusia yang menguntungkan semua orang, "kata spanduk yang berjalan pada ATM *Chase* di bulan Maret 2015. *HeForShe* mendesak laki-laki dan anak laki-laki untuk berdiri tegak melawan ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan secara global.

G. *HeForShe* di Media

Sejak wawancara dengan Emma Watson pada bulan September 2014, kampanye *HeForShe* telah diliput dan dipuji oleh media luas. "Dalam kampanye PBB yang bertujuan untuk mempromosikan hak-hak perempuan, tidak ada seorang wanita pun dilibatkan dengan sengaja. Strategi kampanye, yang akan dimulai pada waktu itu diungkapkan oleh tema '*HeForShe*.' Dengan kata lain, laki-laki harus berdiri untuk hak-hak perempuan, yaitu ibu mereka, saudara perempuan, dan anak perempuan mereka. Inti dari kampanye ini adalah *website*, *HeForShe.org*, di mana pengunjung dapat menonton klip video, tujuannya untuk melayani sebagai teaser yang memperkenalkan inisiatif *HeForShe*. "[Elliott, Stuart (March 7, 2014). "U.N. Women's Rights Group Seeks Men's Support". *The New York Times*. Retrieved 26 March 2015].

Emma Watson meluncurkan kampanye *HeForShe* di PBB dan mengundang resmi laki-laki supaya berpartisipasi dalam wawancara tentang kesetaraan gender. 'Kesetaraan gender adalah masalah Anda, juga, "kata aktris dan *Goodwill Ambassador* Perempuan PBB. Pidato Watson melanda banyak peminat feminism, yaitu perlahaan tapi pasti, mereka mengingat dan memahami. "[Emma, Herman (October 3, 2014). "Emma Watson's UN gender equality campaign is an invitation to men, too". *The Guardian*. Retrieved 26 March 2015]. Watson adalah duta PBB yang menyatakan bahwa *HeForShe* merupakan gerakan kampanye untuk mengingatkan kita semua tentang feminism yang benar-benar hanya berarti bagi orang yang memperlakukan satu sama lain dengan sama dan saling menghormati. Pernyataan ini diucapkan saat wawancara dengan Facebook [Guest, Katy. "Chivalry is dead, long live common courtesy". *The Independent*. Retrieved 26 March 2015]

"(http://www.nytimes.com/2014/03/07/business/media/un-campaign-asks-men-to-support-womens-rights.html?_r=0 <ref>"U.N. Women's

Rights Group Seeks Men's Support". NY Times. NY Times. Retrieved 7 March 2015.

H. Emma Watson: Kesetaraan Gender adalah Masalah Anda

(Pidato *UN Women Goodwill Ambassador* Emma Watson di sebuah acara khusus untuk kampanye *HeForShe* di Markas Besar PBB, New York, 20 September 2014).

Hari ini kami meluncurkan kampanye yang disebut "*HeForShe*." Saya mengundang Anda karena saya membutuhkan bantuan Anda. Kami ingin mengakhiri ketimpangan jenis kelamin untuk melakukan itu kita perlu semua orang untuk terlibat. Ini adalah kampanye pertama *HeForShe* di PBB: kami ingin mencoba dan menggembrelleng banyak laki-laki dan anak laki-laki yang mungkin akan menjadi pendukung kesetaraan gender. Dan kita tidak hanya ingin berbicara tentang itu, tapi pastikan itu adalah tindakan yang nyata. Saya ditunjuk enam bulan yang lalu dan semakin saya banyak berbicara tentang feminism semakin saya menyadari bahwa memperjuangkan hak-hak perempuan telah terlalu sering, sehingga menjadi identik dengan laki-laki-membenci perempuan. Jika terjadi hal serupa, maka saya yakin bahwa hal ini harus dihentikan.

Sebagai catatan, feminism menurut definisi adalah: "Keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki hak dan kesempatan yang sama. Ini adalah teori kesetaraan politik, ekonomi dan sosial dari jenis kelamin." Saya mulai mempertanyakan asumsi berbasis gender ketika saya bingung jika disebut "suka menuntut," karena saya ingin mengarahkan drama feminism hanya untuk orang tua, tapi tidak untuk anak laki-laki.

Ketika umur 14 tahun, saya mulai mengenal seksual dan saya mengenal tentang unsur-unsur seksual tertentu dari

pers. Ketika umur 15 tahun saya putus dengan pacar, sebagai tim olahraga mereka tidak mau tampil "berotot." Ketika umur 18 tahun teman-teman laki-laki saya tidak dapat mengungkapkan perasaan mereka. Saya memutuskan bahwa saya adalah seorang feminis dan ini tampak rumit untuk saya. Tetapi baru-baru ini pemahaman tentang feminis telah menunjukkan bahwa feminisme telah menjadi kata yang tidak populer. Ternyata di antara jajaran perempuan yang ekspresif, saya dipandang sebagai perempuan yang terlalu kuat, terlalu agresif, mengisolasi diri, anti-laki-laki, dan, tidak menarik.

<http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/emma-watson-gender-equality-is-your-issue-too#sthash.9I6JpkNU.dpuf>

I. Mengapa Perempuan Merasa Tidak Nyaman?

Saya dari Inggris dan berpikir hal itu benar bahwa sebagai seorang perempuan saya dibayar sama dengan rekan-rekan laki-laki saya. Saya pikir itu benar bahwa saya harus bisa membuat keputusan tentang tubuh saya sendiri. Saya pikir itu benar bahwa perempuan terlibat atas nama saya dalam kebijakan dan pengambilan keputusan dari negara saya. Saya pikir itu benar bahwa secara sosial saya diberi rasa hormat yang sama seperti laki-laki. Tapi sayangnya saya dapat mengatakan bahwa tidak ada satu negara di dunia di mana semua perempuan dapat mengharapkan untuk menerima hak-hak ini. Tidak ada negara di dunia yang bisa mengatakan mereka telah mencapai kesetaraan gender.

Hak-hak ini saya anggap sebagai hak asasi manusia tapi saya adalah salah satu yang beruntung. Hidup saya mempunyai hak istimewa, karena orang tua saya tidak mencintai saya kurang menyayangi saya, karena saya lahir seorang anak perempuan. Sekolah saya tidak membatasi saya karena saya adalah seorang gadis, mentor saya tidak menganggap

saya akan pergi jauh karena saya mungkin akan melahirkan anak pada suatu hari, Orang yang mempengaruhi (*influencer*) ini adalah duta kesetaraan gender yang membuat saya sadar siapa saya hari ini. Mereka mungkin tidak tahu, tapi mereka adalah kaum feminis yang sengaja akan mengubah dunia saat ini. Dan kita perlu lebih banyak dari mereka. Jika Anda masih membenci kata itu bukan kata yang penting tetapi ide dan ambisi di balik itu. Karena tidak semua perempuan telah diberi hak yang sama seperti yang saya miliki. Bahkan, statistik menghitung persentasenya sangat sedikit.

Pada tahun 1995, Hilary Clinton menyampaikan pidato terkenal di Beijing tentang hak-hak perempuan. Sayangnya banyak hal-hal yang ingin mengubah kenyataan hari ini. Tetapi apa kenyataannya hanya 30 persen dari undangannya adalah laki-laki. Bagaimana kita bisa mempengaruhi perubahan di dunia ketika hanya setengahnya dari yang diundang merasa diterima untuk berpartisipasi dalam dialog? Bagi laki-laki, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memperluas undangan resmi Anda, kesetaraan gender adalah masalah Anda juga. Sampai saat ini, saya merasa peran ayah saya sebagai orang tua dinilai kurang oleh masyarakat, padahal saya sebagai anak membutuhkan kehadirannya sama sebanyak kehadiran ibu saya.

Kami tidak sering berbicara tentang laki-laki yang di-penjara oleh stereotipe gender tapi saya dapat melihat bahwa ketika mereka bebas, keadaanya akan berubah bagi perempuan sebagai konsekuensi alami. Jika laki-laki tidak harus menjadi agresif, maka perempuan diterima tidak akan merasa ter dorong untuk tunduk. Jika laki-laki tidak harus mengontrol, maka perempuan tidak perlu dikontrol. Baik laki-laki maupun perempuan harus merasa bebas untuk menjadi sensitif. Baik laki-laki maupun perempuan harus merasa bebas untuk menjadi kuat. Sudah saatnya kita semua merasakan gender spektrum tidak menjadi dua set menen-

tang cita-cita. Jika kita berhenti mendefinisikan satu sama lain, maka kita semua akan merasa lebih bebas dan ini adalah apa yang kita sebut *HeForShe*, yang berbicara tentang kebebasan.

Saya ingin orang mengambil konsep *HeForShe* ini. Jadi anak perempuan, saudara perempuan dan ibu bisa bebas dari prasangka tetapi agar anak-anak mereka memiliki izin untuk tidak menjadi rentan dan selanjutnya mereka bisa merebut kembali bagian-bagian dari diri mereka sendiri, mereka dalam melakukan sesuatu akan menjadi versi yang lebih benar dan lengkap dari diri mereka sendiri.

Anda mungkin berpikir siapa gadis pemain Film Harry Potter ini? Dan apa yang dia lakukan di atas panggung di PBB. Ini pertanyaan yang bagus dan percayalah, saya telah bertanya pada diri sendiri hal yang sama. Saya tidak tahu apakah saya memenuhi syarat untuk berada di sini. Yang saya tahu adalah bahwa saya peduli tentang masalah ini. Dan saya ingin membuatnya lebih baik. Dan setelah melihat apa yang saya lihat-dan saya diberi kesempatan, saya merasa ini adalah kewajiban saya untuk mengatakan sesuatu. *English Statesman* Edmund Burke mengatakan: "Semua yang diperlukan untuk kemenangan adalah cukup baik bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan apa saja."

Dalam kegugupan saya untuk pidato ini dan di saat-saat saya ragu-ragu saya sudah berkata pada diriku sendiri dengan tegas, bahwa kalau tidak percaya diri bukan aku, saya harus melakukannya, jika tidak sekarang, kapan lagi. Jika Anda memiliki keraguan sama ketika kesempatan disajikan kepada Anda saya berharap kata-kata saya mungkin bisa membantu. Karena kenyataannya bahwa jika kita tidak melakukan apa-apa, maka 75 tahun, atau 100 tahun ke depan, perempuan tidak akan dapat mengharapkan untuk dibayar sama dengan laki-laki dalam pekerjaan yang sama. Lima belas koma lima juta anak perempuan akan menikah di umur 16 tahun ke depan sebagai anak-anak. Dan pada saat

ini tidak akan sampai tahun 2086 sebelum semua gadis pedesaan Afrika akan dapat menerima pendidikan menengah. Jika Anda percaya pada kesetaraan gender, Anda mungkin salah satu dari mereka kaum feminis yang sengaja berbicara berkampanye tentang *HeForShe* dari jauh-jauh hari. Untuk ini saya bertepuk tangan bagi Anda. Saya berjuang untuk kata pemersatu, tetapi kabar baiknya adalah kita memiliki gerakan pemersatu, inilah yang disebut *HeForShe*. Saya mengundang Anda untuk melangkah maju, harus dilihat untuk berdialog, untuk menjadi *HeForShe* atau "dia" untuk "dia". Dan bertanya pada diri sendiri, bahwa" jika tidak saya, siapa lagi?" "Jika tidak sekarang kapan lagi?" Terima kasih.

(*HeForShe.org*:

J. Kelangsungan Kampanye *HeForShe*

"Biasanya, pertama Anda harus menjadi seorang perempuan. Tapi tidak dalam kasus Farhan Akhtar, seorang Bollywood aktor superstar, penyanyi dan pembuat film-yang baru-baru ini menjadi duta laki-laki pertama untuk Perempuan PBB, yaitu sebuah lembaga yang berfokus pada kesetaraan gender. Dia juga seorang advokat untuk kampanye *HeForShe* PBB, yang dirancang untuk mendorong orang-orang membela kesetaraan gender." "Emma Watson meluncurkan kampanye *HeForShe* di PBB minggu lalu dan diperpanjang dengan undangan resmi' untuk laki-laki supaya berpartisipasi dalam wawancara tentang kesetaraan gender.'Kesetaraan gender adalah masalah Anda juga, "kata aktris dan *Goodwill Ambassador* Perempuan PBB. Pidato Watson melanda banyak peminat feminism, yaitu perlahaan tapi pasti, mereka mengingat dan memahami. "

"Emma Watson adalah duta PBB menyatakan bahwa *HeForShe* merupakan kampanye-gerakan untuk mengingat-

kan kita semua tentang feminism yang benar-benar hanya berarti bagi orang yang memperlakukan satu sama lain dengan sama dan saling menghormati. Pernyataan ini diucapkan saat membahas wawancara minggu lalu.

"Penasehat Nyamayaro-senior untuk Direktur Wakil Sekretaris Jenderal dan Eksekutif *UN Women* yang bekerja sama dengan *Publicis Dallas*, *Chief Creative Officer* Brad Roseberry meluncurkan kampanye *HeForShe* sebagai sarana untuk mempromosikan solidaritas di antara kedua jenis kelamin untuk meningkatkan hak-hak perempuan di seluruh dunia."

K. Wawancara Facebook pada Hari Perempuan Internasional dengan Emma Watson

Dalam perayaan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2015, Emma Watson melanjutkan gerakan *HeForShe* dengan hosting wawancara dengan Facebook di mana ia diberi pertanyaan dalam hosting wawancara intim tentang kesetaraan gender. Acara ini dihadiri langsung oleh 120 penggemar dan dilihat oleh jutaan lebih di seluruh dunia sebagai *Watson Galvani*. Begitu pula wawancara tentang isu-isu serius dari gaji yang tidak setara. Mengapa feminism tidak memprotes untuk masalah ini termasuk mengapa laki-laki tidak apa-apa untuk menjadi pecundang atau ksatria.

L. Sepuluh Kutipan Wawancara Emma Watson di Kantor Facebook

Feminisme bukan hanya tren untuk Emma Watson. Sebagai *UN Women Goodwill Ambassador*, salah satu proyek terbesar Emma bekerja menuju kesetaraan gender. Dia saat

ini merupakan tokoh kampanye *HeForShe* PBB, yaitu gerakan solidaritas kesetaraan gender yang menginginkan laki-laki dan anak laki-laki berjuang bersama-sama untuk menolak ketidaksetaraan gender dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Setelah pidato di PBB, Emma Watson membuat acara khusus untuk kampanye *HeForShe*, Emma Watson merupakan wajah baru dalam mendorong feminism secara global. Sebelumnya ia berpartisipasi dalam wawancara di kantor *Facebook*. Dia menjawab setiap pertanyaan penggemar tentang feminism dan dia berbicara tentang bagaimana gerakan *HeForShe* mempengaruhinya. Berikut adalah 10 kutipan pilihan dari *chatting* Emma Watson.

1. "Saya pikir gerakan ini harus dimulai oleh kaum muda, dalam arti benar-benar dimulai oleh kaum muda, seperti gadis-gadis dan anak laki-laki, sebagaimana apa yang telah mereka ketahui tentang *HeForShe*." Emma mengatakan penolakan ketidaksetaraan gender adalah gerakan sosial yang dimulai kaum muda. Dalam rangka memerangi ketidakadilan, maka diperlukan peningkatan gerakan generasi berikutnya untuk lebih terbuka, ramah, dan kebersamaan.
2. "Bagi perempuan, gerakan ini diharapkan menimbulkan perasaan nyaman." dalam arti perempuan tidak lagi punya masalah. Perempuan harus punya keyakinan bahwa semua perempuan tidak punya masalah lagi. Beberapa kritik yang paling sulit Emma jawab adalah datang dari para perempuan yang mengatakan. "Kita perlu memahami bahwa kita terlibat,"
3. "Jika perlu Anda harus percaya pada kesetaraan, hai kaum feminis. Maaf saya berhak untuk memberitahu Anda." Banyak orang mencoba untuk membuat feminism lebih rumit daripada apa yang terjadi. Percayalah pada kesetaraan antar jenis kelamin? Anda seorang feminis! Gerakan ini adalah hal yang sederhana.

4. "Kami tidak mengakui banyak tekanan bagi kami dalam menempatkan orang untuk menyesuaikan diri." Feminisme bukan hanya masalah yang dihadapi oleh perempuan. Kesetaraan gender memberikan lebih banyak kesempatan bagi perempuan dalam menunjang ide-idenya untuk membatasi maskulinitas.
5. Komentar pada skandal foto bugil palsunya, Emma mengatakan, "Jika ada, itu membuat saya jauh lebih meyakinkan. Aku bisa mengamuk. "Setelah pidato di PBB inspirasinya adalah membuat sebuah website untuk mengklaim mereka yang merilis foto bugil Emma. Dia tidak akan mundur dari sikap ke arah kesetaraan. Meskipun situasi itu benar-benar mengerikan, Emma juga mengatakan "ini adalah kejutan" untuk laki-laki di sekelilingnya yang lebih netral tentang feminism.
6. "Kita perlu yin dan yang. Kita perlu keseimbangan. Kita perlu keterwakilan perempuan. Kita perlu kepemimpinan perempuan. "Ada masalah besar akses perempuan dalam industri film dan Emma tahu itu. Akses yang sama mendalam seperti di bidang lain. Kesetaraan gender mempengaruhi kita semua sampai ke orang yang terkaya dan glamourous di bidang yang kita ketahui.
7. "*Chivalry* (sifat-sifat sosial) harus konsensual. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) harus nyaman dengan kesetaraan gender." Ada sebuah anekdot lucu, seorang laki-laki, pertama dia berkencan dengan seorang perempuan, pasti dia merasa kaku dan canggung. Namun, mereka segera mampu membuat situasi lebih mudah dan akrab dengan berdialog. Emma masih menghargai kejujuran, dia berpikir, bahwa tindakan itu bukan tindakan sepihak. Mengapa tidak bisa semua orang untuk bersikap baik satu sama lain sepanjang waktu?
8. "Penindasan yang saling terkait dan interseksionaliti adalah kata yang benar-benar penting dalam hal ini."

Emma mendengar kritik awal tentang *HeForShe* dan titik dia setuju dengan mereka. *HeForShe* bisa menjadi sebuah gerakan untuk semua orang, bukan hanya untuk laki-laki saja.

9. "Ini bukan tentang laki-laki dalam menyelamatkan perempuan." *HeForShe* "bukan kelompok laki-laki," kata Emma. "Ini adalah kelompok kesetaraan bagi kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan)." Kita semua bersama-sama untuk saling mendukung, terlepas dari identifikasi jenis kelamin.
10. "Jika Anda punya jantung yang berdetak dan Anda peduli tentang hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka tindakan ini sangat luar biasa." Mengekspresikan emosi Anda tidak hanya untuk satu jenis kelamin. Bahkan mengekspresikan emosi, itu bagian dari sifat manusia. "Aku benar-benar terganggu oleh gagasan bahwa laki-laki tidak bisa menangis," kata Emma. "Ini gila. Hal itu lah yang membuat Anda sebagai manusia, bagaimana perasaan Anda, bagaimana Anda mengekspresikan diri.

"(<http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/emma-watson-gender-equality-is-your-issue-too#sthash.9I6JpkNU.dpuf>)

BAB XVII

GENDER DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN

A. Pendahuluan.

Kasus atau permasalahan gender dalam dunia pendidikan atau sekolah masih menjadi topik yang hangat dalam setiap perbincangan. Kasus gender ini belum ditemukan juga titik terangnya seperti apa menerapkan keadilan gender yang sesuai. Membicarakan gender tidak berarti membicarakan hal yang menyangkut perempuan saja. Gender dimaksudkan sebagai pembagian sifat, peran, kedudukan, dan tugas laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan norma, adat kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat. Sebenarnya dalam permasalahan bias gender, tidak hanya pihak perempuan yang dirugikan, tetapi pihak laki-laki juga mengalami hal demikian. Hal ini diungkapkan oleh Sri Suciati (dalam Harian Suara Merdeka, 09 Agustus 2006) bahwa bias gender ini tidak hanya berlangsung dan disosialisasikan melalui proses dalam sistem pembelajaran di sekolah, tetapi juga melalui pendidikan dalam lingkungan keluarga. Bila diselami lebih dalam lagi, pendidikan di sekolah dengan komponen pembelajaran seperti media, metode, serta buku ajar yang menjadi pegangan para siswa ternyata sarat dengan bias gender.

Dalam realitas sosial di masyarakat tertentu, terdapat adat kebiasaan masyarakat tersebut yang tidak mendukung atau bahkan melarang perempuan untuk mengikuti pendidikan formal. Bahkan ada nilai dan anggapan bahwa perempuan tidak perlu bersekolah atau mengejar impiannya, karena toh nantinya tugas perempuan hanya di bagian dapur (ruang domestik). Pandangan seperti inilah yang menjadi-

kan perempuan menjadi terpuruk dan dianggap rendah kaum laki-laki, parahnya lagi perempuan merasa tidak percaya diri dengan ke perempuannya (derajatnya).

Sri Suciati (dalam Harian Suara Merdeka, 09 Agustus 2006) mengungkapkan contoh bias gender dalam sistem pendidikan formal misalnya, dalam buku ajar banyak ditemukan gambar maupun rumusan kalimat yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Gambar seorang pilot selalu laki-laki karena pekerjaan sebagai pilot memerlukan kecekapan dan kekuatan yang "hanya" dimiliki oleh laki-laki. Sementara gambar guru yang sedang mengajar di kelas selalu perempuan karena guru selalu diidentikkan dengan tugas mengasuh atau mendidik.

B. Problematika Gender dan Pendidikan

Dalam deklarasi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) pasal 26 dinyatakan bahwa: " Setiap orang berhak mendapatkan pengajaran. Pengajaran harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk sekolah rendah dan tingkat dasar. Pengajaran harus mempertinggi rasa saling mengerti, saling menerima serta rasa persahabatan antar semua bangsa, golongan-golongan kebangsaan, serta harus memajukan kegiatan PBB dalam memelihara perdamaian dunia. "

Terkait dengan deklarasi di atas, sesungguhnya ketika pendidikan bukan hanya dianggap dan dinyatakan sebagai sebuah unsur utama dalam upaya pencerdasan bangsa melainkan juga sebagai produk atau konstruksi sosial, maka dengan demikian pendidikan juga memiliki andil bagi terbentuknya relasi gender di masyarakat.

Statemen di atas mengemuka setelah terjadi banyak ketimpangan gender di masyarakat yang diasumsikan muncul karena terdapat bias gender dalam pendidikan. Aspek yang menunjukkan adanya bias gender dalam pendidikan

dapat dilihat pada perumusan kurikulum dan juga rendahnya kualitas pendidikan. Implementasi kurikulum pendidikan sendiri terdapat dalam buku ajar yang digunakan di sekolah-sekolah. Realitas yang ada, dalam kurikulum pendidikan (agama ataupun umum) masih terdapat banyak hal yang menonjolkan laki-laki berada pada sektor publik sementara perempuan berada pada sektor domestik. Dengan kata lain, kurikulum yang memuat bahan ajar bagi siswa belum bermuansa netral gender baik dalam gambar ataupun ilustrasi kalimat yang dipakai dalam penjelasan materi.

Rendahnya kualitas pendidikan diakibatkan oleh adanya diskriminasi gender dalam dunia pendidikan. Ada empat aspek yang disorot oleh Departemen Pendidikan Nasional mengenai permasalahan gender dalam dunia pendidikan, yaitu akses, partisipasi, proses pembelajaran dan penguasaan. Yang dimaksud dengan aspek akses adalah fasilitas pendidikan yang sulit dicapai. Misalnya, banyak sekolah dasar di tiap-tiap kecamatan namun untuk jenjang pendidikan selanjutnya seperti SMP dan SMA tidak banyak. Tidak setiap wilayah memiliki sekolah tingkat SMP dan seterusnya, hingga banyak siswa yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapainya. Di lingkungan masyarakat yang masih tradisional, umumnya orang tua segan mengirimkan anak perempuannya ke sekolah yang jauh karena mengkhawatirkan keselamatan mereka. Oleh sebab itu banyak anak perempuan yang 'terpaksa' tinggal di rumah. Belum lagi beban tugas rumah tangga yang banyak dibebankan pada anak perempuan membuat mereka sulit meninggalkan rumah. Akumulasi dari faktor-faktor ini membuat anak perempuan banyak yang cepat meninggalkan bangku sekolah.

Faktor yang kedua adalah aspek partisipasi di mana tercakup di dalamnya faktor bidang studi dan statistik pendidikan. Dalam masyarakat kita di Indonesia, tempat terdapatnya sejumlah nilai budaya tradisional yang meletak-

kan tugas utama perempuan di arena domestik, sering kali anak perempuan agak terhambat untuk memperoleh kesempatan yang luas untuk menjalani pendidikan formal. Sudah sering dikeluhkan bahwa jika sumber-sumber pendanaan keluarga terbatas, maka yang harus didahulukan untuk sekolah adalah anak-anak laki-laki. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tugas pria kelak apabila sudah dewasa dan berumah-tangga, yaitu bahwa ia harus menjadi kepala rumah tangga dan pencari nafkah.

Makin tinggi tingkat pendidikan, makin tinggi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Namun yang tak boleh dilupakan adalah, bahwa walaupun perempuan hanya bergerak di arena domestik dan tugasnya adalah mendidik anak dan menjaga kesejahteraan keluarga, ia tetap harus berilmu untuk tugas itu.

Stereotipe gender yang berkembang di masyarakat kita yang telah mengotak-kotakkan peran apa yang pantas bagi perempuan dan laki-laki. Dalam pembangunan pendidikan masih terjadi gejala pemisahan gender (*gender segregation*) dan bentuk diskriminasi gender secara sukarela (*voluntarily discrimination*) dalam bidang keahlian dan selanjutnya dalam bidang pekerjaan yang berlainan. Hal ini disebabkan oleh nilai dan sikap yang dipengaruhi faktor-faktor sosial budaya masyarakat yang secara melembaga telah memisahkan gender ke dalam peran-peran sosial yang berlainan. Pemilihan jurusan-jurusan bagi anak perempuan ketika masuk perguruan tinggi lebih dikaitkan dengan fungsi domestik, sementara itu anak laki-laki diharapkan berperan dalam menopang ekonomi keluarga sehingga harus lebih banyak memilih keahlian-keahlian ilmu keras, teknologi, dan industri.

Sementara pada aspek ketiga yaitu aspek proses pembelajaran masih juga dipengaruhi oleh stereotipe gender. Yang termasuk dalam proses pembelajaran adalah materi pendidikan, seperti misalnya yang terdapat dalam contoh-contoh

soal dimana semua kepemilikan selalu mengatasnamakan laki-laki. Dalam aspek proses pembelajaran ini bias gender juga terdapat dalam buku-buku pelajaran seperti misalnya semua jabatan formal dalam buku seperti camat, direktur digambarkan dijabat oleh laki-laki. Selain itu ilustrasi gambar juga bias gender, yang seolah-olah menggambarkan bahwa tugas wanita adalah sebagai ibu rumah tangga dengan tugas-tugas menjahit, memasak, dan mencuci.

Aspek yang terakhir adalah aspek penguasaan. Kenyataan banyaknya angka buta huruf di Indonesia didominasi oleh kaum perempuan. Data BPS tahun 2003, menunjukkan dari jumlah penduduk buta aksara usia 10 tahun ke atas sebanyak 15.686.161 orang, 10.643.823 orang di antaranya atau 67,85 persen adalah perempuan (Betty D. Sinaga, 2003). Mungkin pada awalnya perempuan di Indonesia menguasai baca tulis, namun pemanfaatannya yang minim membuat mereka lupa lagi pada apa yang telah mereka pelajari. Kondisi ini secara tidak langsung juga mematikan akses masyarakat ke media hingga kemajuan peran perempuan Indonesia banyak yang tidak terserap oleh masyarakat kita dan mereka tetap berpegang pada nilai-nilai lama yang tidak terreformasi.

(<http://www.dikmas.depdknas.go.id/05-p-gender-pedoman.htm>).

Perempuan yang selalu didorong untuk mengalah, bersikap lemah lembut dan menerima kepemimpinan dan bimbingan laki-laki membuat mereka selalu mempertanyakan persetujuan dari pihak laki-laki untuk kemajuan-kemajuan dan kesempatan-kesempatan yang mereka dapatkan. Betty mengatakan bahwa bukannya ia menyarankan untuk tidak bersikap kompromis dengan pihak suami atau laki-laki namun alasan untuk menolak atau menerima suatu kesempatan atau tawaran lebih baik bila didasarkan pada keputusan yang matang dari kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan.

Bias gender ini tidak hanya berlangsung dan disosialisasikan melalui proses serta sistem pembelajaran di sekolah, tetapi juga melalui pendidikan dalam lingkungan keluarga. Jika ibu atau pembantu rumah tangga (perempuan) yang selalu mengerjakan tugas-tugas domestik seperti memasak, mencuci, dan menyapu, maka akan tertanam di benak anak-anak bahwa pekerjaan domestik memang menjadi pekerjaan perempuan. Pendidikan di sekolah dengan komponen pembelajaran seperti media, metode, serta buku ajar yang menjadi pegangan para siswa dalam pendidikan ternyata sarat dengan bias gender.

Keadaan di atas menunjukkan adanya ketimpangan atau bias gender yang sesungguhnya merugikan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Membicarakan gender tidak berarti membicarakan hal yang menyangkut perempuan saja. Gender dimaksudkan sebagai pembagian sifat, peran, kedudukan, dan tugas laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan norma, adat kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat.

C. Paradigma Pendidikan

Ada tiga macam paradigm dalam gerak langkah yang dilakukan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia.

1. Paradigma Konservatif

Paling tidak ada tiga macam paradigm yang biasa mewarnai gerak langkah lembaga-lembaga pendidikan. Bagi mereka yang menganut paradigm konservatif, ketidaksetaraan merupakan hukum alam, dan oleh karenanya mustahil untuk dihindari, karena hal ini merupakan ketentuan sejarah atau bahkan takdir Tuhan. Perubahan sosial bukan sesuatu yang perlu diperjuangkan dengan serius, karena di khawatirkan justru akan membawa manusia kepada keseng-

saraan baru. Bagi pengikut paradigma ini, menjadi miskin, tertindas, terpenjara adalah buah dari kesalahan mereka sendiri, karena kelalaian atau kemalasan mereka untuk belajar dan bekerja keras. Kaum konservatif beranggapan bahwa harmoni dalam masyarakat merupakan hal yang penting agar konflik dapat dihindari.

2. Paradigma Liberal

Paradigma liberal menganggap bahwa persoalan ekonomi dan politik tidak berkaitan langsung dengan pendidikan. Oleh karenanya usaha-usaha pemecahan persoalan pendidikan yang dilakukan pada umumnya berupa usaha-usaha reformasi yang bersifat kosmetik seperti pembangunan kelas dan fasilitas baru, memodernkan peralatan sekolah, pengadaan laboratorium atau komputer dsb. Yang secara umum terisolasi dari sistem dan struktur ketidakadilan kelas, gender, dominasi budaya, dan represi politik yang ada dalam masyarakat.

Pendidikan justru berfungsi untuk menstabilkan norma dan nilai masyarakat, menjadi media untuk mensosialisikan dan memproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan nilai-nilai dasar agar masyarakat luas berfungsi dengan baik. Paradigma ini pada umumnya berupaya membangun kesadaran naif, di mana pendidikan tidak berusaha mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada dianggap sudah baik atau *given* dan oleh karenanya tidak perlu dipertanyakan (Fakih, 1999).

3. Paradigma Kritis

Paradigma yang ketiga adalah paradigma kritis, yang memandang pendidikan sebagai arena perjuangan politik. Pendidikan dengan paradigma ini mengagendakan perubahan struktur secara fundamental dalam politik ekonomi masyarakat di mana ia berada. Bagi mereka, kelas dan diskriminasi gender dalam masyarakat tercermin pula dalam du-

nia pendidikan. Dalam perspektif ini urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap *the dominant ideology*, ke arah transformasi sosial. Dengan demikian, tugas utama pendidik adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil. Paradigma kritis ini sekaligus mengadopsi kesadaran kritis dengan cara melatih anak didik untuk mampu mengidentifikasi segala bentuk ketidakadilan yang mengejawantah dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya. (Fakih, 1999).

Paulo Freire (1999) mengecam pendidikan yang selama ini dianggap sebagai sumber kebaikan sebagai telah menjadi penindas yang ulung. Pendidikan yang pada umumnya dianggap memiliki misi umum untuk mencerdaskan bangsa ternyata malah berperan aktif mengerdilkan anak didik, karena tidak mampu membuat mereka lebih humanis atau lebih manusia. Pendidikan yang selama ini dipercaya memiliki tugas untuk membuka pikiran dan nurani manusia akan berbagai kesadaran palsu yang tumbuh dalam masyarakat justru turut serta menjadi pencipta kesadaran-kesadaran palsu sendiri dan menjadi pengekang kebebasan, dengan cara-caranya yang terselubung. Menurut Freire pendidikan yang sungguh-sungguh membebaskan takkan berjarak dari kaum tertindas, takkan memperlakukan mereka sebagai orang-orang yang tak beruntung, serta menyuguhki kaum tertindas itu model panutan dari antara kaum penindas. Pendidikan yang berawal dari kepentingan-kepentingan egoistik para penindas (egoisme yang berubah keder-mawanan palsu, yakni paternalisme), yang membuat kaum tertindas jadi objek-objek humanitarianism, melestarikan, dan memaparkan penindasan. Pendidikan seperti itu adalah alat mendehumanisasi manusia. (Freire, et al., 1999:444). Jika kita setuju dengan pendapat Freire, tentu kita akan dengan

jeli mencermati kedudukan kita sebagai pendidik, untuk mempertanyakan apakah selama ini kita telah mampu membuka mata anak didik kita terhadap berbagai kesadaran palsu, yang biasanya berjubah kedermawanan atau kemuliaan, atau mungkin tanpa kita sadari, justru telah berse-tubuh dengan para penindas dan menjadi ujung tombak mereka dalam rangka melipurlarkan anak didik kita agar tidak merasa bahwa mereka telah menjadi objek penindasan.

BAB XVIII

INTEGRASI PENDIDIKAN

BERWAWASAN GENDER

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan aktivitas yang khas bagi manusia dalam suatu komunitas masyarakat dengan tujuan untuk memanusiakan manusia. Selain itu pendidikan merupakan instrumen yang penting bagi pemberdayaan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang termarjinalkan. Pendidikan juga merupakan kunci terwujudnya keadilan gender dalam masyarakat, karena di samping merupakan alat untuk mentransfer norma-norma masyarakat, pengetahuan, dan kemampuan manusia, juga sebagai alat untuk mengkaji dan menyampaikan ide-ide dan nilai baru.

Dengan demikian, lembaga pendidikan merupakan sarana formal untuk sosialisasi sekaligus mentransfer nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk nilai dan norma gender. Nilai dan norma tersebut ditransfer secara lugas maupun secara tersembunyi, baik melalui buku-buku teks yang digunakan maupun pada suasana dan proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam lembaga pendidikan, sebagai tempat mentransfer pengetahuan kepada masyarakat, mewujudkan keadilan gender merupakan hal yang niscaya.

B. Keadilan Gender dalam Pendidikan

Untuk mengarah pada terwujudnya keadilan gender yang dimaksud maka perlu;

- a. memberlakukan keadilan gender dalam pendidikan dan menghilangkan pembedaan pada peserta didik,
- b. mengupayakan keadilan gender di kalangan staf dan pimpinan, dan
- c. meredam sebab-sebab terjadinya kekerasan dan diskriminasi melalui materi pengetahuan yang diajarkan, proses pembelajaran yang dilakukan, dan menentang segala ide dan pemikiran yang mengandung stereotipe negatif.

Dari tiga hal di atas, maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan adalah bagaimana menyusun kurikulum yang dapat menciptakan relasi gender yang dinamis. Dalam hal ini perlu dipaparkan tentang urgensi kurikulum yang berperspektif gender dalam pendidikan sebagai upaya sosialisasi dan implementasi pengarusutamaan gender di bidang pendidikan. Kurikulum merupakan program untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan. Menurut Elliot (2014) yang dikutip oleh Susilawingsih (2004) menyatakan bahwa kurikulum sesungguhnya menggambarkan dan mencerminkan sikap dan pandangan yang ada di kelas, lembaga pendidikan, masyarakat, dan negara mengenai isu-isu tertentu. Oleh karena itu, kurikulum seyogyanya menggambarkan tujuan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan kehendak manusia yang membuat kurikulum.

Kehendak manusia siapa pun dan dimana pun pada dasarnya menghendaki terwujudnya masyarakat yang adil, tanpa diskriminasi dan subordinasi terhadap salah satu jenis kelamin. Pengembangan visi dan misi yang dimiliki oleh lembaga pendidikan diaktualisasikan dalam kurikulum. Dengan kata lain, kurikulum menggambarkan dan menerje-

mahkan visi dan misi yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut. Pendidikan merupakan salah satu implementasi dari tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Corak penerima tugas itu berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Dalam hal inilah maka dalam pendidikan, sistem dan tujuan pendidikan masing-masing masyarakat berbeda, bukan hasil eksport atau import, tetapi ia harus timbul dari dalam masyarakat pendidikan itu sendiri.

C. Komponen-Komponen Kurikulum

Kurikulum akan dijabarkan dalam komponen-komponennya yang terdiri dari tujuan pembelajaran, materi, dan topik perkuliahan, bahan bacaan atau referensi yang dipakai, strategi pembelajaran, media atau sarana dan prasarana yang digunakan, dan evaluasi. Lembaga pendidikan yang memperhatikan kesetaraan gender akan mencantumkan upaya kesetaraan gender ini sebagai bagian dari visi dan misinya, yang kemudian akan terimplementasikan melalui kurikulum beserta komponen-komponennya. Pada umumnya isi kurikulum adalah nama-nama mata pelajaran beserta silabinya atau pokok bahasan, tetapi kurikulum sebenarnya tidak harus berupa nama mata pelajaran, ia dapat saja berupa nama kegiatan. Inilah pengertian kurikulum yang paling luas dan yang sering dipakai dalam pendidikan.

Faktor-faktor Penyebab perlu adanya Kurikulum Gender Meskipun pembangunan pemberdayaan perempuan telah mulai dilaksanakan secara terencana sejak tahun 1978, namun data yang ada menunjukkan masih tertinggalnya perempuan dibandingkan dengan laki-laki, tidak terkecuali dalam pendidikan. Dalam hal ini, indikator-indikator yang digunakan adalah angka partisipasi sekolah, angka melek huruf, akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan, dan muatan buku bahan-bahan ajar. Dalam kenyataan

tersebut perumusan kurikulum yang responsif gender menjadi tuntutan. Hal ini disebabkan oleh:

1. Adanya diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat sehingga menimbulkan dominasi terhadap jenis kelamin tertentu dalam bentuk stereotipe, beban ganda, dan kekerasan. Hal ini disebabkan, salah satunya, oleh bangunan kurikulum yang bias gender.
2. Masih terjadinya kesenjangan gender dalam tingkat pendidikan pada laki-laki. Data statistik dan berbagai hasil studi menunjukkan adanya kesenjangan gender di bidang pendidikan. Semakin tinggi jenjang, representasi perempuan semakin kecil dibanding dengan laki-laki. Senas 2000 menunjukkan bahwa penduduk perempuan yang berhasil menamatkan pendidikan SLTP baru mencapai 36, 9%, sedangkan penduduk laki-laki 46 %. Pada jenjang perguruan tinggi, jumlah perempuan hanya sekitar 3, 06%, di bawah jumlah laki-laki yang mencapai 4, 1%.
3. Persentase penduduk perempuan yang buta huruf lebih tinggi dari persentase buta huruf penduduk laki-laki. Berdasarkan data BPS tahun 2000, penduduk perempuan yang buta huruf adalah 23, 1%, sedangkan penduduk laki-laki adalah 10, 7 %.
4. Muatan referensi atau sumber rujukan masih bias gender.
5. Di dalam bahan ajar atau buku-buku yang dipergunakan banyak yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Sebagai contoh dalam materi keagamaan selalu mencantumkan maskulinitas atau laki-laki sebagai sosok yang lebih sempurna dan kuat dibanding perempuan sehingga tugas yang strategis lebih diidentikkan hanya cocok bagi laki-laki, seperti seorang pemimpin harus laki-laki.
6. Untuk mengatasi ketertinggalan perempuan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan, pe-

merintah mencanangkan program pengarusutamaan gender yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa setiap institusi pemerintah wajib memasukkan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program/kebijakan, dan kegiatannya. Hal ini secara tegas juga dituangkan dalam GBHN 1999-2004, UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas dan Kesepakatan Forum Pendidikan Dunia di Dakkar pada bulan April 2000 tentang pendidikan untuk semua, yang salah satu komponennya adalah kesetaraan gender, termasuk di dalamnya bagaimana merumuskan kurikulum yang berbasis pada kesetaraan gender.

Kurikulum yang Berkeadilan Gender Dalam al-Qur'an maupun Hadis telah ditunjukkan tentang kedudukan laki-laki dan perempuan, di mana perempuan dan laki-laki adalah setara. Sebagai contoh dalam surat al-Baqarah (2: 187), "Istri-istrimu adalah pakaianmu, dan engkau adalah pakaian mereka". Pakaian dapat berfungsi sebagai pengganti untuk seseorang, dengan pakaian baru seorang mendapatkan kepribadian baru. Lebih jauh, pakaian menyembunyikan tubuh, menutupi pandangan terhadap bagian-bagian yang bersifat pribadi dan melindungi pemakainya. Dalam interpretasi ini suami-istri berbicara satu sama lain kepada alter ego mereka, dan setiap diri melindungi pasangannya. Hal ini memperlihatkan hubungan kesetaraan dalam kebersamaan dan betapa baiknya prinsip *yin* dan *yang* yang berlaku dalam perkawinan.

Dalam hal kecerdasan, tidak ada satu penelitian pun yang mengatakan bahwa laki-laki secara biologis lebih cerdas dari perempuan, tetapi kecerdasan itu lebih dikarenakan faktor pendidikan. Jika dalam realitasnya laki-laki mengungguli perempuan dalam berbagai kehidupan termasuk masalah kecerdasan, hal itu juga disebabkan oleh sistem pendidikan yang memihak laki-laki. Laki-laki mendapatkan

kesempatan untuk mengenyam pendidikan sementara perempuan tidak.

Perempuan dalam al-Quran dan al-Hadis memiliki kesempatan yang sama dalam mencari ilmu dan berpendidikan. Ini merupakan sebuah konsekuensi untuk mewujudkan nilai kemanusiaan dengan adanya pemerataan yang tidak bias gender. Anak perempuan sebagaimana anak laki-laki harus mempunyai kesempatan untuk bersekolah lebih tinggi. Bukan menjadi alternatif kedua jika kekurangan biaya untuk sekolah. Pernyataan tentang persamaan pendidikan juga dikemukakan oleh Athiyah yang dikutip oleh Roqib bahwa Islam menyerukan adanya kemerdekaan, persamaan, dan kesempatan yang sama antara yang kaya dan miskin dalam bidang pendidikan di samping penghapusan sistem-sistem kelas dan mewajibkan setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu, serta memberikan kepada setiap muslim itu segala jalan untuk belajar, bila mereka memperhatikan adanya minat.

Menurut Abbas Karafat sebagaimana dikutip oleh Nashruddin Baidan (2017) juga dikatakan bahwa Nabi memerintahkan supaya memperhatikan pendidikan perempuan sehingga dengan mendidiknya itu orangtuanya dapat terhindar dari api neraka, "Ibu bagaikan sekolah, bila anda mempersiapkannya secara baik, berarti anda telah mempersiapkan generasi bangsa dengan integritas kepribadian yang baik". Dengan demikian, Islam menginginkan kedua jenis kelamin yang berbeda itu memperoleh pendidikan yang layak agar mereka memiliki pengetahuan yang seimbang sehingga mereka dapat berjalan seiring dalam berbagai aspek kehidupan dan beribadah untuk mencapai kehidupan di dunia dan akhirat.

Membiaran perempuan dalam kebodohan merupakan kezaliman karena membiarkan mereka tidak mengembangkan potensi negara. Perlakuan tersebut di samping akan merugikan potensi negara juga bertentangan dengan al-Qur'an

dan Sunnah. Pendidikan bagi perempuan semakin penting artinya bila dilihat dari tugas dan fungsinya, baik dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga. Tugas-tugas tersebut mustahil dapat terlaksana dengan baik tanpa pendidikan yang baik. Tugas-tugas perempuan kian kompleks seiring dengan perkembangan dunia, maka pendidikan bagi perempuan mutlak adanya. Perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan membuat mereka tidak mampu menjalankan perannya, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Apabila perempuan terdidik dengan baik, niscaya pemerataan pendidikan telah mencapai sasaran. Oleh karena itu, ibu adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Ibu adalah sekolah bagi rakyat tanpa mengenal lelah, ekonomi, waktu, dan dilakukan dengan penuh kasih sayang. Bandingkan, jika mendidik seorang laki-laki, maka pendidikan itu hanya untuk satu orang, yaitu laki-laki itu sendiri. Akan tetapi, jika mendidik perempuan, maka sama saja dengan mendidik satu orang keluarga karena peran ibu.

Kenyataan ini dapat dilihat di masyarakat bahwa kebanyakan anggota keluarga sukses dalam pendidikan lebih disebabkan oleh ketekunan ibu dalam mendidik anaknya. Oleh karenanya ibu sebagai seorang pendidik harus mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Krisis hubungan suami-istri yang terjadi dalam keluarga, bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat yang kurang berakhlak, tetapi masyarakat bermoral pun dapat mengalami krisis yang sama, apabila tingkat pendidikan dan pengalaman antara keduanya berbeda jauh. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa semakin baik pendidikan perempuan akan semakin baik harkat dan martabatnya. Semakin baik moralitas bangsa maka dapat membantu mencerdaskan masyarakat bangsa sehingga dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan, di samping lebih memanusiakan manusia dan menghargai kepada hak-hak orang lain.

D. Metode dan Materi Pembelajaran Berwawasan Gender

Seperti diketahui metode pembelajaran yang pada umumnya dilakukan oleh sekolah adalah metode pembelajaran yang lebih menekankan transmisi keilmuan klasik, yang memungkinkan adanya penerimaan Ilmu secara bulat (*taken for granted*) yang tak terbantahkan, yang memberi ruang gerak yang sempit bagi adanya dialog dan diskusi kritis. Sementara itu, persoalan gender sarat dengan problematik-problematik kultural yang sulit diselesaikan tanpa adanya dialog dan diskusi-diskusi. Metode pembelajaran ini, jika diterapkan apa adanya, jelas tidak akan membawa hasil yang baik. Oleh sebab itu harus diupayakan kesempatan untuk terjadinya dialog dan diskusi-diskusi, agar konsep-konsep penting pendidikan gender dapat lebih mudah terserap oleh para siswa.

Karena kurikulum sekolah pada umumnya sudah mapan, dipandang sebagai "kitab kuning" (yang menurut beberapa penelitian justru mengandung problematika-problematika gender) sebagai materi pokok pembelajaran, maka harus ada terobosan-terobosan dalam penyampaiannya. Tanpa keterbukaan atau sikap yang mengakomodasi adanya penafsiran-penafsiran baru yang bersifat sosio historis kritis, niscaya pendidikan gender juga tidak mungkin terwujud dalam kondisi seperti itu. Pendidikan gender yang tumbuh dalam mazhab pemikiran posstrukturalis tidak bisa terlaksana tanpa adanya keterbukaan dan dialog dengan ilmu-ilmu lain secara interdisipliner. Perlu dicatat bahwa pendidikan gender tidak serta merta mengharuskan ketersediaan materi ajar yang mutlak tidak bias gender, karena kecuali sulit diwujudkan juga tidak mendorong tumbuh kembangnya pemikiran-pemikiran kritis yang justru akan menjadi tulang punggung kehidupan berkeadilan gender. Dari teks-teks atau contoh-contoh aktivitas yang bias gender yang ada

di sekitar sekolah, siswa akan menyadari apa arti bias gender dan selanjutnya malah justru akan bisa diajak untuk meresapi konsep gender lewat contoh-contoh yang konkret.

E. Bahasa dalam Pendidikan yang Peka Gender

Bahasa bukan persoalan sepele dalam pendidikan yang peka gender. Bahasa merupakan unsur yang sangat penting dalam pendidikan peka gender, karena ideologi mengejawantah di dalam bahasa, lewat pilihan kata, tekanan-tekanan, konstruksi kalimat atau ujaran yang digunakan dalam komunikasi baik tertulis maupun lisan. Bahasa yang dimaksud juga tidak terbatas pada bahasa verbal tetapi termasuk bahasa nonverbal, bahasa tubuh seperti cara bersalaman, memberi penghormatan, memandang atau mengerling menyiratkan makna yang mengandung muatan gender. Menyepelekan peran bahasa dalam pendidikan peka gender sama dengan mengabaikan unsur penting dalam pendidikan.

F. Usaha Mewujudkan Keadilan Gender

Bagaimana usaha yang dilakukan mewujudkan keadilan gender? Keadilan dan kesetaraan gender dapat dipenuhi jika undang-undang dan hukum menjamin. Problem sekarang adalah tidak adanya jaminan dari negara untuk memperoleh kebebasan setiap insan tumbuh secara maksimal. Relasi gender tidak semata lahir dari kesadaran individu, tetapi juga bergantung pada faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sehat dan dinamis.

Keadilan gender di era globalisasi berkaitan dengan kesadaran, tanggung jawab laki-laki, pemberdayaan perempuan, hak-hak perempuan termasuk hak reproduksi. Tanta-

ngan yang dihadapi adalah bagaimana menghubungkan semua konsep gender untuk tujuan kesehatan dan kesejahteraan bersama. Pendirian gender perlu diterjemahkan dalam aksi nyata berupa gerakan pembebasan yang bertanggung jawab. Mendorong laki-laki dan perempuan untuk mengubah tradisi pencerahan, yaitu sikap yang didasarkan pada akal, alam, manusia, agar diperoleh persamaan, kebebasan dan kemajuan bersama, tanpa membedakan jenis kelamin.

Usaha untuk menghentikan bias gender terhadap seluruh aspek kehidupan antara lain dengan cara pemenuhan kebutuhan praktis gender (*practical gender needs*). Kebutuhan ini bersifat jangka pendek dan mudah dikenali hasilnya. Namun usaha untuk melakukan pembongkaran bias gender harus dilakukan mulai dari rumah tangga dan pribadi masing-masing hingga sampai pada kebijakan pemerintah dan negara, tafsir agama bahkan epistemologi ilmu pengetahuan. Untuk itu berbagai aksi untuk menjawab tantangan strategis seperti melakukan kampanye, pendidikan kritis, advokasi untuk merubah kebijakan, tafsir ulang terhadap wacana keagamaan serta memberi ruang epistemologi perspektif feminis untuk memberikan makna terhadap realitas dunia perlu dilakukan. Menjauh dari sikap pesimisme, maka dalam bidang pendidikan, hal berikut ini dapat dilakukan:

1. Meningkatkan Partisipasi Pendidikan

Dengan meningkatkan akses dan daya tampung pendidikan, menurunkan angka putus sekolah siswa perempuan dan meningkatkan angka melanjutkan lulusan dengan memberikan perhatian khusus pada anak-anak dari lingkungan sosial ekonomi lemah dan anak-anak yang tinggal di daerah tertinggal. Upaya tersebut perlu didukung oleh pelayanan-pelayanan terintegrasi untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab serta membantu keluarga yang ku-

rang mampu dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Berbagai upaya yang akan dilakukan dalam rangka menghapus kesenjangan gender perlu disesuaikan dengan situasi dan permasalahan masing-masing daerah atau wilayah dan dikoordinasikan bersama oleh seluruh stakeholder.

2. Meningkatkan Kesadaran Umum dan Relevansi Pendidikan

Hal ini dilakukan dengan melalui antara lain penyempurnaan kurikulum dan memperbaiki materi ajar yang lebih sensitif gender, peningkatan kualitas tenaga pendidik sehingga memiliki pemahaman yang memadai mengenai masalah gender dan bersikap sensitif gender dan menerapkannya dalam proses belajar mengajar.

3. Mengembangkan Manajemen Pendidikan Sehingga Responsif gender

Hal ini dilakukan dengan melalui antara lain pelaksanaan berbagai analisis kebijakan dan peraturan perundangan yang masih bias gender; perumusan dan penetapan kebijakan dan peraturan perundang-undangan pendidikan yang berwawasan gender; peningkatan kapasitas institusi pengelola pendidikan sehingga memiliki kemampuan merencanakan, menyusun kebijakan, strategi dan program pendidikan berwawasan gender secara efektif dan efisien; serta pengembangan pusat-pusat studi gender dan penguatan pusat-pusat studi lainnya sebagai mitra pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan pendidikan berwawasan gender. Tiga hal tersebut dapat dilaksanakan melalui lima strategi utama yaitu:

- a. penyediaan akses pendidikan yang bermutu terutama pendidikan dasar secara merata bagi anak laki-laki dan perempuan baik melalui pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah;

- b. penyediaan akses pendidikan kesetaraan bagi penduduk usia dewasa yang tidak dapat mengikuti pendidikan persekolahan;
- c. peningkatan penyediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi penduduk dewasa terutama perempuan,
- d. peningkatan koordinasi, informasi dan edukasi dalam rangka mengurus utamakan pendidikan berwawasan gender; dan
- e. pengembangan kelembagaan institusi pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah mengenai pendidikan berwawasan gender.

G. Meningkatkan Partisipasi Pendidikan,

Dengan meningkatkan akses dan daya tampung pendidikan, menurunkan angka putus sekolah siswa perempuan dan meningkatkan angka melanjutkan lulusan dengan memberikan perhatian khusus pada anak-anak dari lingkungan sosial ekonomi lemah dan anak-anak yang tinggal di daerah tertinggal. Upaya tersebut perlu didukung oleh pelayanan-pelayanan terintegrasi untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab serta membantu keluarga yang kurang mampu dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Berbagai upaya yang akan dilakukan dalam rangka menghapus kesenjangan gender perlu disesuaikan dengan situasi dan permasalahan masing-masing daerah atau wilayah dan dikoordinasikan bersama oleh seluruh stakeholder.

H. Meningkatkan Kesadaran Umum dan Relevansi Pendidikan

Hal ini dilakukan dengan melalui antara lain penyempurnaan kurikulum dan memperbaiki materi ajar yang lebih

sensitif gender, peningkatan kualitas tenaga pendidik sehingga memiliki pemahaman yang memadai mengenai masalah gender dan bersikap sensitif gender dan menerapkannya dalam proses belajar mengajar.

I. Mengembangkan Manajemen Pendidikan sehingga Responsif Gender

Hal ini dilakukan dengan melalui antara lain pelaksanaan berbagai analisis kebijakan dan peraturan perundangan yang masih bias gender; perumusan dan penetapan kebijakan dan peraturan perundang-undangan pendidikan yang berwawasan gender; peningkatan kapasitas institusi pengelola pendidikan sehingga memiliki kemampuan merencanakan, menyusun kebijakan, strategi dan program pendidikan berwawasan gender secara efektif dan efisien; serta pengembangan pusat-pusat studi gender dan penguatan pusat-pusat studi lainnya sebagai mitra pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan pendidikan berwawasan gender. Tiga hal tersebut dapat dilaksanakan melalui lima strategi utama yaitu:

1. penyediaan akses pendidikan yang bermutu terutama pendidikan dasar secara merata bagi anak laki-laki dan perempuan baik melalui pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah;
2. penyediaan akses pendidikan kesetaraan bagi penduduk usia dewasa yang tidak dapat mengikuti pendidikan persekolahan;
3. peningkatan penyediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi penduduk dewasa terutama perempuan,
4. peningkatan koordinasi, informasi dan edukasi dalam rangka mengurus utamakan pendidikan berwawasan gender; dan

5. pengembangan kelembagaan institusi pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah mengenai pendidikan berwawasan gender.

J. Konsep Dasar Pendidikan Adil Gender

Pendidikan yang didasari Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), adalah Pendidikan yang bermakna luas, universal dan tegas. Secara konseptual pendidikan adil gender adalah subset dari pendidikan untuk semua (*education for all*). Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan gender adalah (1) faktor sosial budaya dan norma masyarakat, (2) Faktor ekonomi yang berhubungan dengan tingkat kemiskinan masyarakat, (3) Faktor keterbatasan anggaran pendidikan Kabupaten/Kota, (4) Faktor kebijakan pendidikan yang belum responsif gender, (5) faktor keterbatasan sarana/prasarana pendidikan, dan (6) Faktor geografis.

Pengasuhan anak dalam keluarga berwawasan gender, Anak belum dapat mandiri baik dari segi fisik maupun psikososial dan masih membutuhkan pendidikan, perlindungan, pembinaan dan pengarahan dari orang tuanya. Anak belum dapat dipisahkan dari orang tuanya, kecuali hal itu adalah keputusan yang terbaik untuk anak. Anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan alternatif.

Aplikasi Berwawasan Gender, Mendidik anak berdasarkan asas keadilan gender dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi dan kontrol terhadap sumber daya keluarga. Anak laki-laki dan perempuan berbeda tetapi jangan dibedakan. Setiap anggota keluarga terbuka untuk berkomunikasi. Meluangkan waktu bersama dengan seluruh anggota keluarga. Pembagian peran yang jelas dan adil antaranggota keluarga. Menjunjung tinggi prinsip harmonis dalam keluarga.

K. Pendidikan Adil untuk Anak

Pendidikan merupakan bagian integral yang berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya. Pendidikan juga akan membawa perubahan dalam diri peserta didik untuk berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif serta sehat jasmani dan rohani. Hal ini sesuai dengan Visi Departemen Pendidikan Nasional sampai dengan tahun 2025, yaitu menciptakan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

Pendidikan terjadi dengan dimulai dari lingkungan keluarga. Keluarga diartikan sebagai suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah, dan adopsi serta interaksi berkomunikasi antara satu dengan lainnya, sehingga menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suamiistri, ayah-ibu, putra-putri, saudara laki-laki dan perempuan yang merupakan pemelihara kebudayaan bersama. Dengan demikian, pembentukan keluarga mau tidak mau harus melalui ikatan perkawinan yang merupakan kontrak sosial dan ibadah yang mengubah status masing-masing individu yang independen menjadi hubungan inter-independen.

Keluarga adalah unit terkecil dari kelompok masyarakat dan keluarga merupakan sel dasar pembentuk kehidupan manusia. Keluargalah yang paling dekat dengan keseharian hidup anak. Oleh karena itu, untuk anak harus diawali oleh fondasi kehidupan demokrasi di tengah keluarganya, lalu di tengah lingkungannya, yaitu masyarakat, kemudian kelak

meningkat ke lingkup yang lebih luas, yaitu lingkup nasional dan internasional sesuai perkembangan kehidupannya.

L. Harapan dalam Realisasi Pendidikan Anak

Yang memegang peranan terpenting dalam mendidik anak adalah orang tua. Buatlah semboyan “Janganlah kita lengah dalam pendidikan anak kita, karena kalau kita lengah, maka lingkunganlah yang akan mengambil alih pendidikan anak-anak kita. Kalau bukan kita siapa lagi?” “Kalau bukan sekarang kapan lagi?” Mari kita berjuang, Mari kita bersatu mendidik anak dengan efektif dan kreatif mulai dari rumah. Kita saling berbagi dan saling mengingatkan untuk menjadikan generasi anak-anak kita menjadi generasi yang berbudi luhur, berdaya juang, serta berbudi pekerti. Tentunya kita berharapan besar bahwa anak-anak kita akan menjadi generasi pengubah dunia. Nah, seiring dengan tantangan peradaban global yang makin rumit dan kompleks, pendidikan anak agaknya tak hanya cukup diserahkan kepada institusi pendidikan formal semacam sekolah an-sich, tetapi juga perlu ada sinergi dan komunikasi efektif dengan orang tua sebagai pendidik utama di rumah.

Kesadaran perlu ditanamkan bahwa kaum perempuan-lah sebagai “pusat peradaban” sang anak, kaum perempuan-lah yang berkompeten memberikan pendampingan, agaknya hal ini juga perlu menemukan pola pengasuhan dan pendidikan yang lebih efektif dan kreatif sehingga anak-anak tidak kehilangan perhatian dan kasih sayang, meskipun sang ibu sibuk berkarir di luar pagar domestik. Dalam hal ini diperlukan kiat mengakrabi dunia anak-anak, sehingga anak-anak masa depan negeri ini bisa tumbuh dan berkembang secara wajar; bukan melalui caracara indoktrinatif dan dipaksakan.

Model-model semacam inilah yang selama ini hilang dalam dunia pendidikan, baik dalam ranah formal maupun nonformal. Ketika nilai-nilai modern dan global demikian deras menggerus sendi-sendi peradaban bangsa, maka perlu diingat bahwa nilai-nilai humanis itu belum mati. Kita masih memiliki cara untuk bisa berkiprah menyelamatkan masa depan anak-anak bangsa dengan membangun fondasi pendidikan karakter yang kokoh.

BAB XIX

KURIKULUM BERWAWASAN GENDER

A. Pengertian Kurikulum Berwawasan Gender

Kurikulum merupakan program untuk melaksanakan perspektif gender dalam pendidikan. Kurikulum sesungguhnya menggambarkan dan mencerminkan sikap dan pandangan yang ada di kelas, lembaga pendidikan, masyarakat, dan negara mengenai isu-isu tertentu. Oleh karena itu, kurikulum menggambarkan tujuan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan kehendak manusia yang membuat kurikulum. Kehendak manusia siapa pun dan dimana pun pada dasarnya menghendaki terwujudnya masyarakat yang adil, tanpa diskriminasi dan subordinasi terhadap salah satu jenis kelamin.

Pengembangan visi dan misi yang dimiliki oleh lembaga pendidikan diaktualisasikan dalam kurikulum. Dengan kata lain, kurikulum menggambarkan dan menerjemahkan visi dan misi yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut. Pendidikan merupakan salah satu implementasi dari tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Corak penerima tugas itu berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Dalam hal inilah maka dalam pendidikan sistem dan tujuan pendidikan masing-masing masyarakat berbeda, bukan hasil ekspor atau impor, tetapi ia harus timbul dari dalam masyarakat pendidikan itu sendiri.

Kurikulum akan dijabarkan dalam komponen-komponennya yang terdiri dari tujuan pembelajaran, materi, dan topik perkuliahan bahan bacaan atau referensi yang dipakai, strategi pembelajaran, media atau sarana dan prasarana yang digunakan dan dievaluasi. Lembaga pendidikan yang

memperhatikan kesetaraan gender akan mencantumkan upaya kesetaraan gender ini sebagai bagian dari visi dan misinya, yang kemudian akan terimplementasikan melalui kurikulum beserta komponen-komponennya. Pada umumnya isi kurikulum adalah nama-nama mata pelajaran beserta silabinya atau pokok bahasan, tetapi kurikulum sebenarnya tidak harus berupa nama mata pelajaran, ia dapat saja berupa nama kegiatan. Inilah pengertian kurikulum yang paling luas dan yang sering dipakai dalam pendidikan.

B. Indikator Kurikulum Berwawasan Gender

Meskipun pembangunan pemberdayaan perempuan telah mulai dilaksanakan secara terencana sejak tahun 1978, namun data yang ada menunjukkan masih tertinggalnya perempuan dibandingkan dengan laki-laki, tidak terkecuali dalam pendidikan. Dalam hal ini, indikator-indikator yang digunakan adalah angka partisipasi sekolah, angka *melek huruf*, akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan, dan muatan buku bahan-bahan ajar. Dalam kenyataan tersebut perumusan kurikulum yang responsif gender menjadi tuntutan. Hal ini disebabkan oleh:

1. Adanya diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat sehingga menimbulkan dominasi terhadap jenis kelamin tertentu dalam bentuk stereotipe, beban ganda, dan kekerasan. Hal ini disebabkan, salah satunya, oleh bangunan kurikulum yang bias gender.
2. Masih terjadinya kesenjangan gender dalam tingkat pendidikan pada laki-laki. Data statistik dan berbagai hasil studi menunjukkan adanya kesenjangan gender di bidang pendidikan. Semakin tinggi jenjang, representasi perempuan semakin kecil dibanding dengan laki-laki.
3. Persentase penduduk perempuan yang buta huruf lebih tinggi dari persentase buta huruf penduduk laki-laki.

Berdasarkan data BPS tahun 2000, penduduk perempuan yang buta huruf adalah 23,1%, sedangkan penduduk laki-laki adalah 10,7.%.

Muatan referensi masih bias gender. Di dalam bahan ajar atau buku-buku yang dipergunakan banyak yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Sebagai contoh dalam materi keagamaan selalu mencantumkan maskulinitas atau laki-laki sebagai sosok yang lebih sempurna dan kuat dibanding perempuan sehingga tugas yang strategis lebih diidentikkan hanya cocok bagi laki-laki, seperti seorang pemimpin harus laki-laki.

Untuk mengatasi ketertinggalan perempuan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan, pemerintah mencanangkan program kesetaraan gender yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa setiap institusi pemerintah wajib memasukkan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program/kebijakan, dan kegiatannya. Hal ini secara tegas juga dituangkan dalam GBHN 1999-2004, UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas dan Kesepakatan Forum Pendidikan Dunia di Dakkar pada bulan April 2000 tentang pendidikan untuk semua, yang salah satu komponennya adalah kesetaraan gender, termasuk di dalamnya bagaimana merumuskan kurikulum yang berbasis pada kesetaraan gender.

C. Kurikulum Berwawasan Gender di Indonesia

Dalam al-Qur'an maupun Hadis telah ditunjukkan tentang kedudukan laki-laki dan perempuan, dimana perempuan dan laki-laki adalah setara. Sebagai contoh dalam surat al-Baqarah (2: 187), *"Istrimu adalah pakaianmu, dan engkau adalah pakaian mereka"*. Pakaian dapat berfungsi sebagai pengganti untuk seseorang, dengan pakaian baru seorang menda-

patkan kepribadian baru. Lebih jauh, pakaian menyembunyikan tubuh, menutupi pandangan terhadap bagian-bagian yang bersifat pribadi dan melindungi pemakainya. Dalam interpretasi ini suami-istri berbicara satu sama lain, dan setiap diri melindungi pasangannya. Hal ini memperlihatkan hubungan kesetaraan dalam kebersamaan dan betapa baiknya prinsip yang berlaku dalam perkawinan.

Dalam hal kecerdasan, tidak ada satu penelitian pun yang mengatakan bahwa laki-laki secara biologis lebih cerdas dari perempuan, tetapi kecerdasan itu lebih dikarenakan faktor pendidikan. Jika dalam realitasnya laki-laki mengungguli perempuan dalam berbagai kehidupan termasuk masalah kecerdasan, hal itu juga disebabkan oleh sistem pendidikan yang memihak laki-laki. Laki-laki mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan sementara perempuan tidak.

D. Kesetaraan dalam Menuntut Pendidikan

Perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mencari ilmu dan berpendidikan. Ini merupakan sebuah konsekuensi untuk mewujudkan nilai kemanusiaan dengan adanya pemerataan yang tidak bias gender. Anak perempuan sebagaimana anak laki-laki harus mempunyai kesempatan untuk bersekolah lebih tinggi. Bukan menjadi alternatif kedua jika kekurangan biaya untuk sekolah, maka diserukan adanya kemerdekaan, persamaan, dan kesempatan yang sama antara yang kaya dan miskin dalam bidang pendidikan di samping penghapusan sistem-sistem kelas dan mewajibkan setiap laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu, serta memberikan kepada setiap orang segala jalan untuk belajar, bila mereka memperhatikan adanya minat dan bakat.

E. Potensi Pendidikan untuk Perempuan

Nabi Muhammad memerintahkan supaya memperhatikan pendidikan perempuan sehingga dengan mendidiknya itu orangtuanya dapat terhindar dari api neraka, *“Ibu bagai sekolah, bila anda mempersiapkannya secara baik, berarti anda telah mempersiapkan generasi bangsa dengan integritas kepribadian yang baik”*. Dengan demikian, Islam menginginkan kedua jenis kelamin yang berbeda itu memperoleh pendidikan yang layak agar mereka memiliki pengetahuan yang seimbang sehingga mereka dapat berjalan seiring dalam berbagai aspek kehidupan dan beribadah untuk mencapai kehidupan di dunia dan akhirat. Membiarkan perempuan dalam kebohdohan merupakan kezaliman karena membiarkan mereka tidak mengembangkan potensinya. Perlakuan tersebut di samping akan merugikan potensi negara juga bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.

F. Peran Perempuan dalam Pendidikan

Pendidikan bagi perempuan semakin penting artinya bila dilihat dari tugas dan fungsinya, baik dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga. Tugas-tugas tersebut mustahil dapat terlaksana dengan baik tanpa pendidikan yang baik. Tugas-tugas perempuan kian kompleks seiring dengan perkembangan dunia, maka pendidikan bagi perempuan mutlak adanya. Perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan membuat mereka tidak mampu menjalankan perannya, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Apabila perempuan terdidik dengan baik, niscaya pemerataan pendidikan telah mencapai sasaran. Oleh karena itu, ibu adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Ibu adalah sekolah bagi rakyat tanpa mengenal lelah, ekonomi, waktu, dan dilakukan dengan penuh kasih sayang.

Bandingkan, jika mendidik seorang laki-laki, maka pendidikan itu hanya untuk satu orang, yaitu laki-laki itu sendiri. Akan tetapi, jika mendidik perempuan, maka sama saja dengan mendidik satu keluarga karena peran ibu. Kenyataan ini dapat dilihat di masyarakat bahwa kebanyakan anggota keluarga sukses dalam pendidikan lebih disebabkan oleh ketekunan ibu dalam mendidik anaknya. Oleh karenanya ibu sebagai seorang pendidik harus mempunyai kemampuan ilmu

G. Kesetaraan Pendidikan Bagi Gender

Krisis hubungan suami-istri yang terjadi dalam keluarga, bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat yang kurang berakhhlak, tetapi masyarakat bermoral pun dapat mengalami krisis yang sama, apabila tingkat pendidikan dan pengalaman antara keduanya berbeda jauh. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa semakin baik pendidikan perempuan akan semakin baik harkat dan martabatnya. Semakin baik moralitas bangsa maka dapat membantu mencerdaskan masyarakat bangsa sehingga dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan, di samping lebih memanusiakan manusia dan menghargai hak-hak orang lain.

H. Kerangka Kerja Kurikulum Berwawasan Gender

Strategi dan kerangka kerja yang diusulkan oleh Banks (Susilaningsih dkk. 2004), untuk memasukkan materi-materi gender dalam sebuah kurikulum, terbagi dalam empat level yang saling berhubungan antara lain sebagai berikut.

1. *Contributions approach*

Kurikulum Berwawasan gender – Pendekatan ini dilakukan oleh sistem dan kebijakan yang ada pada lembaga pendidikan melalui kurikulum. Masalah-masalah gender telah dimasukkan secara eksplisit dalam kurikulum yang ada. Pendekatan model ini sudah diberlakukan antara lain di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah, dan UI (Susilaningsih, 2004:182). Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Sarif Hidayatullah perumusan kurikulum berperspektif gender tercermin dalam berbagai mata kuliah yang memunculkan materi gender secara eksplisit. Hasil dari rumusan kurikulum berperspektif gender tersebut merupakan sebuah capaian yang baik dari kebijakan pimpinan dalam rangka membangun kesetaraan gender. Sementara di Universitas Indonesia untuk program Pascasarjana, perumusan kurikulum tersebut lebih diperkuat lagi, karena ditunjukkan dalam program studi Kajian Wanita. Dalam program tersebut terdapat mata kuliah yang jumlahnya 40-46 sks, semua mata kuliah tersebut menggunakan perspektif gender.

(Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2 Agustus 2008,
<http://www.pps.ui.ac.id/ui/kwkurikulum.htm>)

2. *Additive Approach*

Dalam pendekatan ini variasi dan perspektif lain ditambahkan pada kurikulum tanpa merubah struktur kurikulum yang ada secara umum. Pemikiran dan ide-ide baru mengenai gender dapat dimasukkan dan dikaitkan dengan kurikulum yang ada. Pemakaian jenis kurikulum ini secara umum yang masih dipergunakan di lembaga pendidikan yang belum memberlakukan kebijakan kurikulum berperspektif gender secara eksplisit. Hal ini tergantung pada kepekaan para pendidik tentang gender.

Bagi pendidik yang sudah mengetahui tentang gender, baik secara kognisi, afeksi, dan psikomotor serta sering me-

ngikuti kegiatan pelatihan gender akan memasukkan kurikulum gender tersebut dalam materi ajarnya, dengan tidak mengubah kurikulum secara umum.

3. Transformational Approach

Pada pendekatan ini tujuan, struktur, dan perspektif yang ada dalam kurikulum semuanya dirombak dan diganti dengan tujuan dan perspektif yang sensitif gender. Pengajaran dalam kurikulum ini dengan melihat mata kuliah yang ada kemudian silabinya diubah, baik dalam struktur, tujuan, dan perspektifnya yang berkaitan dengan isu-isu gender. Sebagai contoh pada mata kuliah akhlak tasawuf yang termasuk dalam mata kuliah pendukung, yang harus dipelajari oleh seluruh mahasiswa. Sebagai mata kuliah yang termasuk dalam KBK, mata kuliah akhlak tasawuf tidak hanya berisi tentang ajaran normatif, tetapi diharapkan benar-benar dapat teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja karena akhlak tasawuf lebih berkaitan dengan dimensi esoteris Islam, tentu tidak memasukkan isu-isu gender di dalamnya, tetapi bagaimana memasukkan pandangan-pandangan sufistik tentang perempuan dengan penekanan yang jelas, serta meluruskan pendapat-pendapat yang bias gender (Syahrul A'dam, 2004: 94)

4. Social Action Approach

Pada pendekatan ini siswa diarahkan untuk membuat keputusan dan tindakan yang sensitif gender dalam aktivitas kehidupan mereka. Hal ini dilakukan dengan cara mendiskusikan dalam kelas mengenai konsep, peran dan relasi gender dalam masyarakat, seperti mengapa terjadi diskriminasi terhadap perempuan, apa yang menyebabkan adanya diskriminasi itu dan bagaimana keadaan dalam kelas apakah ada diskriminasi, dan bagaimana diskriminasi itu harus disikapi. Dengan pendekatan ini dimaksudkan supaya siswa dapat

melakukan kritik sosial bahkan dapat melakukan perubahan sosial (Susilaningsih, 2004: 33)

Kurikulum yang digunakan oleh pendidik terbagi menjadi dua. *Pertama*, bersifat *overt curriculum*, dimana dalam kurikulum ini semua unsur yang ada bersifat terbuka, dapat tergambar mulai dari tujuan pembelajaran, materi, dan topik-topik perkuliahan, bahan bacaan strategi pembelajaran dan evaluasi. *Kedua*, bersifat *hidden curriculum*, di mana kurikulum yang disampaikan oleh pengajar di kelas dengan menggunakan strategi pembelajaran dan media yang dipakai termasuk bahasa komunikasi yang digunakan. Kurikulum sesungguhnya tidak hanya menggambarkan dan men-cerminkan sikap dan pandangan yang ada di kelas dan lembaga pendidikan, tetapi juga menggambarkan masyarakat dan bahkan negara mengenai isu-isu tertentu, termasuk isu gender.

5. *Overt Curriculum dan Hidden Curriculum*

Adanya bangunan kurikulum yang tidak berbasis gender disebabkan oleh disparitas fungsi antara *hidden curriculum* dengan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku pendidikan. Hal ini terjadi karena banyak pelaku pendidikan, termasuk guru dan dosen tidak memahami muatan tersembunyi dari kurikulum yang mereka pergunakan sehingga hal tersebut mempengaruhi aspek perilaku yang mereka lakukan sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum yang sensitif gender seharusnya bersifat eksplisit (*overt curriculum*) sehingga permasalahan-permasalahan gender dapat diungkap secara jelas.

I. Prinsip Pembelajaran dalam Kurikulum Berwawasan Gender

Penerapan pembelajaran dalam lembaga pendidikan seharusnya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berakhlak baik, dan memanusiakan manusia tanpa melihat kepada jenis kelamin tertentu. Untuk mencapai maksud tersebut, maka uraian tentang prinsip-prinsip pembelajaran dengan kurikulum gender dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kesiapan Pendidik dalam Kemampuan Berwacana Gender

Memiliki kesiapan untuk melaksanakan pembelajaran yang berperspektif gender bagi mata kuliah yang diampunya merupakan modal yang utama. Oleh karena itu, para pendidik seyogyanya sudah mengikuti Pelatihan Sensitivitas Gender yang dilaksanakan oleh PSG/PSW di perguruan tinggi. Salah satu tujuan Pelatihan Sensitivitas Gender adalah agar para peserta mampu mengidentifikasi permasalahan ketidakadilan gender pada materi kuliah. Di samping itu, wawasan gender yang dimiliki para pendidik merupakan kerangka dasar dalam membuat silabi mata kuliah dan proses pembelajaran di kelas yang berperspektif gender. Selain itu, bagi para pendidik, untuk meningkatkan pembelajaran yang berwawasan gender sebaiknya diberi pelatihan tentang kurikulum dan desain pembelajaran yang berperspektif gender.

2. Sikap Pendidik Harus Adil dan Setara dalam Memberlakukan Peserta Didik

Artinya laki-laki maupun perempuan perlu mendapat tugas dan kesempatan yang sama untuk berkembang. *Affirmative action* penting dilakukan jika ada salah satu pihak yang belum optimal dalam menggunakan kesempatan belajar. Misalkan bagi siswa perempuan diberi kesempatan

untuk aktif dalam pembelajaran dengan cara memberikan kesempatan pertama bagi siswa perempuan untuk merespon dan mengeluarkan pendapatnya dalam pembelajaran sebelum laki-laki. Perlakuan pendidik di kelas juga merupakan cerminan dalam mempraktikkan kesetaraan gender. Para pendidik hendaknya tidak melakukan pelecehan secara gender terhadap siswa laki-laki maupun perempuan, baik secara tersirat maupun nyata. Secara tersirat bisa dalam bentuk kata-kata yang tidak etis, yang secara tidak langsung dapat merendahkan martabat jenis kelamin tertentu.

3. Tidak Mengajari atau Menggurui

Dalam proses pembelajaran seorang pendidik seharusnya tidak menggurui kepada peserta didik, apalagi untuk hal-hal yang sudah umum diketahui dan dialami oleh peserta didik. Yang harus dilakukan adalah mendialogkan apa yang diketahui dan dialami oleh peserta didik dengan pendidik. Proses belajar mengajar akan lebih efektif apabila peserta didik secara aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik akan mengalami, menghayati, dan menarik pelajaran dari pengalaman itu, dan pada gilirannya hasil belajar merupakan bagian dari diri, perasaan, dan tentu saja dalam proses seperti itu peserta didik didorong dan dikondisikan untuk lebih kreatif (Hisyam Zaini, 2002:98)

4. Terbuka

Pendidik hendaknya terbuka secara akademik, tidak menyembunyikan sumber belajar yang berperspektif gender. Jika terdapat sumber rujukan yang tidak berperspektif gender, hendaknya diganti dengan buku-buku rujukan yang berperspektif gender. Jika dalam materi tertentu tidak ada buku rujukan yang berperspektif gender, maka pendidik harus memberi muatan gender tersendiri dalam menganalisis buku tersebut.

5. Penggunaan Pendekatan Holistik Kurikulum Berwawasan Gender

Pada mata kuliah atau materi ajar yang bernuansa keagamaan atau mengandung pesan-pesan moral tertentu, sangat dianjurkan kepada pendidik untuk menggunakan pendekatan yang holistik ketika membangun pemahaman atas materi tersebut. Dengan demikian, peserta didik akan menjadi orang yang terbuka dan tidak berwawasan picik. Peserta didik merupakan subjek yang unik, perlu diberi stimulus untuk mengembangkan seluruh kemampuannya, pengetahuan, kreatifitas nalar, perasaan, penghayatan, kemauan, dan kecakapannya perlu mendapat kesempatan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran. Dalam hal inilah pendidik perlu mengembangkan teknik-teknik bervariasi dalam pembelajaran.

6. Dialog

Karena mendasarkan pembelajaran pada azas kesetaraan, maka proses yang berlangsung bukan pengajaran yang bersifat satu arah, melainkan proses komunikasi dalam berbagai bentuk kegiatan belajar seperti berbagi pengalaman, diskusi, menelaah wacana, memberi komentar kasus, menerapkan hukum dan sebagainya. Untuk membantu visualisasi beragam persoalan yang didiskusikan dibutuhkan berbagai media, seperti wacana, *hand out*, gambar, film, kertas dan alat tulis lainnya. Adanya media ini memungkinkan terjadinya dialog kritis antara semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran.

BAB XX

GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA

MENUJU KESETARAAN GENDER

DALAM SEJARAH REPUBLIK INDONESIA

A. Pendahuluan

Kaum perempuan mempunyai peranan penting dalam sejarah pendirian Republik Indonesia. Mereka berkumpul, membentuk organisasi, dan melakukan gerakan nyata yang memperjuangkan hak-haknya dan kaum tertindas. Sejarah menyatakan bahwa dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia peranan perempuan Indonesia tidak bisa dilupakan, mereka turut serta dalam perjuangan fisik melawan kolonialisme. Pejuang-pejuang perempuan itu di antaranya Tjut Nyak Din dari Aceh, Raden Dewi Sartika dari Jawa Barat, Kartini dari Jawa Tengah, Maria Walanda Maramis dari Sulawesi Utara, Nyai Ahmad Dahlan, pejuang perempuan dari organisasi perempuan Muhammadiyah, yaitu Aisyiyah, dan We Tenriolle dari Sulawesi Selatan. Mereka pejuang perempuan yang turut memikirkan nasib perempuan untuk berjuang bersama laki-laki, mereka bukan lagi menjadi *the second sex* yang hanya memikirkan urusan dapur, sumur, dan kasur. Mereka kaum perempuan Indonesia banyak mendirikan gerakan perempuan untuk ikut membeli negara dengan mengacu pada wawasan kesetaraan gendernya. Berikut ini gerakan perempuan Indonesia dari masa ke masa:

1. Poetri Mardika (Tahun 1912)

Di tahun 1912, ada sebuah organisasi perempuan, yaitu Putri Mardika di Jakarta. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu membimbing para gadis Bumiputera saat menuntut ilmu dan menyatakan pendapat di depan umum. Selain itu, organisasi ini juga bertujuan untuk memperbaiki hidup para perempuan yang dikatakan sebagai manusia yang mulia. Banyak kegiatan yang dilakukan organisasi itu, seperti memberikan beasiswa untuk belajar dan menerbitkan sebuah majalah bernama Putri Mardika.

2. AISYIYAH (Tahun 1917)

Organisasi perempuan Aisyiyah didirikan pada tahun 1917, gerakan perempuan ini merupakan gerakan pembaharuan dalam organisasi Islam Muhammadiyah, dan pada saat bersamaan pula, didirikan organisasi-organisasi perempuan Katolik dan Protestan, demikian pula di luar Jawa bermunculan organisasi-organisasi serupa.

3. Persatoean Perempoean Indonesia (PPI) (Tahun 1928)

Kongres Perempuan Indonesia nasional pertama diselenggarakan di Yogyakarta pada Desember 1928. Dalam kongres ini dibentuk pula Persatoean Perempoean Indonesia (PPI), yang merupakan federasi organisasi-organisasi perempuan Indonesia. Pada tahun berikutnya nama federasi ini diubah menjadi Perikatan Perhimpoenan Istri Indonesia (PPII).

4. Kongres Perempuan Indonesia (KPI) (Tahun 1935)

Kongres Perempuan kedua diadakan di Jakarta. Dalam kongres 1935 terbentuklah Kongres Perempuan Indonesia (KPI), dan dengan demikian PPII dibubarkan.

5. Pada tahun 1938 Kongres Perempuan ketiga digelar di Bandung
6. Pada tahun 1941 Kongres Perempuan keempat digelar di Semarang
7. Pada tahun 1942 Jepang melarang semua organisasi perempuan. Hanya ada satu yang diizinkan yakni Fujinkai.
8. Pada tahun 1942 Kongres Perempuan Nasional pertama digelar pada Desember 1945 di Klaten dan kongres berikutnya di Solo tahun 1946.
9. Pada tahun 1955 Berbagai partai politik membentuk sayap perempuan masing-masing. Dua organisasi yang menonjol GERWANI dan Wanita Marhaen.
10. Pada tahun 1967 (orde baru) Hanya terdapat tiga organisasi resmi yakni Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan PKK

Sumber: Koran Sindo Jum'at, 20 April 2018 - 09:00 WIB

Salah satu gerakan perempuan yang maju sampai saat ini di Indonesia adalah gerakan perempuan Aisyiyah yang merupakan komponen perempuan di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah yang telah memberikan corak tersendiri dalam ranah sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan yang selama ini menjadi titik tolak gerakannya. Saat ini pula Aisyiyah sudah mempunyai perguruan tinggi yang berdiri sendiri di luar Persyarikatan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, Aisyiyah menjadi salah satu pelopor berdirinya badan federasi organisasi wanita Indonesia yang sekarang dikenal dengan nama Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) Beberapa lembaga baik pemerintah maupun

nonpemerintah pernah menjadi mitra kerja Aisyiyah dalam rangka kepentingan sosial bersama, antara lain: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Peningkatan Peranan Wanita untuk Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Yayasan Sayap Ibu, Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selain itu, Aisyiyah juga melakukan kerjasama dengan lembaga dari luar negeri dalam rangka kesejahteraan sosial, program kemanusiaan, sosialisasi, kampanye, seminar, workshop, melengkapi prasarana amal usaha, dan lain-lain. Di antara lembaga dari luar negeri yang pernah bekerjasama dengan Aisyiyah adalah: Oversea Education Fund (OEF), Mobil Oil, The Pathfinder Fund, UNICEF, UNESCO, WHO, John Hopkins University, USAID, AUSAID, NOVIB, The New Century Foundation, The Asia Foundation, Regional Islamic of South East Asia Pasific, World Conference of Religion and Peace, UNFPA, UNDP, World Bank, Partnership for Governance Reform in Indonesia, beberapa kedutaan besar negara sahabat, dan lain-lain.

Gerakan 'Aisyiyah dari waktu ke waktu terus berkembang dan memberikan manfaat bagi peningkatan dan kemanjangan harkat dan martabat perempuan Indonesia. Hasil yang sangat nyata adalah wujud amal usaha yang terdiri atas ribuan taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi.

XXI PEREMPUAN DAN POLITIK

A. Pendahuluan

Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Platform Aksi Beijing dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW) merekomendasikan agar semua pemerintahan di dunia agar memberlakukan kuota sebagai langkah khusus yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan di dalam jabatan-jabatan appointive (berdasarkan penunjukan/pengangkatan) maupun elektif (berdasarkan hasil pemilihan) pada tingkat pemerintahan lokal dan Nasional.

Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, dan semua sektor pembangunan di seluruh negara. Ini adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri, meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara berkembang bahwa perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik dan pengambilan keputusan terjadi di mana-mana. Perempuan baru pada tataran sebagai objek pembangunan belum sampai sebagai pelaku pembangunan. Inilah

salah satu faktor yang menyebabkan lingkaran ketidakadilan gender ini berada pada tataran kebijakan yang masih bias gender.

B. Isu Kesetaraan Gender

Beberapa waktu terakhir, isu kesetaraan gender telah menjadi hal menonjol dalam platform pembangunan, tidak saja di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Kita tentu memahami bahwa selama ini perempuan secara sosial terpinggirkan. Budaya patriarkis yang tidak ramah pada perempuan. Ada konstruksi sosial budaya yang menempatkan perempuan seolah-olah hanya boleh mengurus soal-soal domestik saja. Tak ada hak untuk merambah area publik yang lain. Kenyataan ini menunjukkan bahwa keyakinan itu masih tertanam kuat. Persoalan perwakilan perempuan menjadi penting manakala kita sadar bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita melihat perempuan tidak secara proporsional terlibat dalam kehidupan di ranah publik. Hal ini sangat menyedihkan apabila dilihat dari komposisi penduduk antara laki-laki dan perempuan yang hampir berimbang. Sebagai bentuk representasi perempuan di legislatif masih sangat minim. Tentu saja hal ini masih menjadi pemikiran kita bersama

C. Pendidikan Politik

Representasi perempuan dalam bidang politik boleh dikatakan masih jauh dari apa yang kita harapkan. Pendidikan politik merupakan salah satu aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada setiap individu maupun kelompok. Proses pendidikan politik dilakukan agar masyarakat luas dapat men-

jadi warga negara yang sadar dan menjunjung tinggi akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Hal ini ditekankan karena pada realitasnya, masih dirasakan adanya kesenjangan antara peranan yang dilakukan oleh kaum pria dan perempuan pada berbagai peran, utamanya pada peran-peran publik. Oleh karena itu, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, mempunyai arti yang penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan perempuan agar dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan khususnya bidang politik.

Perempuan mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat, adil dan realistik. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan politik perempuan, perlu ditingkatkan baik dari segi organisasional maupun pemantapan pilar-pilar demokrasi melalui lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang aspiratif dan pro terhadap kepentingan perempuan. Kondisi semacam ini perlu mendapat perhatian khusus, untuk itulah salah satu hal yang perlu ditangani adalah masalah pendidikan politik bagi kaum perempuan, sehingga dengan tumbuh berkembangnya kesadaran politik dikalangan perempuan, mereka diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada sesuai potensi yang dimiliki dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan khusus afirmasi (*Affirmative Action*) harus segera diubah dengan strategi Pengrusutamaan Gender (PUG) di semua bidang kehidupan, khususnya di semua lini dan strata untuk mempercepat persamaan akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang sama antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2000, eksekutif

hanya mengikat untuk melaksanakan PUG. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan jumlah kebijakan pelaksanaan PUG yang akan mengikat seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, penyelenggara pemilu, dan partai politik sebagai pilar demokrasi untuk mendorong pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan di bidang politik melalui peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambil kebijakan (PKWG UI, 2004). Gerakan perempuan dan pemerhati masalah perempuan, melakukan upaya yang sangat keras memperjuangkan masuknya kuota sebesar 30% keterwakilan perempuan sebagai jumlah minimal dalam paket UU politik dari hulu ke hilir.

D. Politik dan Perempuan

Hiruk pikuk pesta demokrasi lima tahunan, utamanya dalam menyambut pemilu legislatif setidaknya disesaki oleh maraknya wacana keterwakilan perempuan dalam politik elektoral Indonesia. Praktis, selama lebih dari tiga dasawarsa, publik politik nasional terus menyimak gugatan intens kaum perempuan terhadap kontruksi budaya dan relasi sosial-politik pasca-reformasi yang masih bias gender, dan terindikasi menyimpan potensi untuk tetap mem marginalisasi dan mendominasi perempuan (Jurnal Perempuan, 2003). Gugatan kaum perempuan ini sejalan dengan kian menguatnya isu keadilan dan kesetaraan jender yang makin mendapat tempat dalam wacana politik masyarakat dan ruang-ruang kebijakan negara. Meski negara kini relatif akomodatif terhadap wacana dan tuntutan keterwakilan politik perempuan (seperti tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum), namun harus disadari bahwa ruang ekspresi politik perempuan yang diberikan negara (dan para elite partai) masih jauh dari

spirit keadilan dan kesetaraan. Kendati penetapan kuota 30 persen melalui akomodasi negara sudah diuji-coba sejak pemilu 2004 lalu, namun ditilik dari aspek sejarah pertumbuhan representasi politik perempuan di parlemen, secara faktual masih berlangsung fluktuatif. Catatan representasi politik perempuan menunjukkan angka naik turun dari waktu ke waktu terkait keterlibatan perempuan dalam arena politik praktis, khususnya di lembaga legislatif. Anggota DPR Sementara 1950-1955 misalnya, berhasil mengakomodasi 9 kursi (3,8%) dari 236 kursi anggota legislatif terpilih saat itu. Jumlah keterwakilan perempuan hasil Pemilu 1955-1960 naik menjadi 17 kursi (6,3%) dari 272 anggota parlemen terpilih. Representasi perempuan di parlemen secara kuantitatif kembali naik turun. Di era Konstituante (1956-1959) perolehan kursi legislatif perempuan turun menjadi 25 kursi (5,1%) dari 488 kursi anggota Konstituante. Begitu pun di era Orde Baru, keterwakilan politik perempuan di parlemen juga mengalami pasang-surut. Pemilu pertama Orde Baru (1971-1977) berhasil menempatkan perempuan pada 36 kursi parlemen (7,8%), Pemilu 1977 29 kursi (6,3%), dan Pemilu 1982 39 kursi (8,5%) dari 460 anggota DPR terpilih pada tiga periode Pemilu tersebut. Selanjutnya, Pemilu 1987 berhasil menempatkan perempuan pada 65 kursi (13%) dari 500 kursi DPR, dan terus mengalami penurunan pada Pemilu 1992-1997, 1997-1999, dan 1999-2004 menjadi 62 kursi (12,5%), 54 kursi (10,8%), dan 46 kursi (9%) dari masing-masing 500 kursi yang berhasil diraih anggota DPR dari masing-masing periode pemilu tersebut. Berikutnya, Pemilu 2004 kembali menaikkan jumlah anggota legislatif perempuan menjadi 63 orang (11,45%) dari 550 anggota DPR terpilih, dan Pemilu 2009 berhasil menempatkan 99 anggota legislatif perempuan (17,68%) dari 560 calon anggota DPR terpilih hasil Pemilu 2009. Pada pemilu 2014 yang baru lalu terjadi penurunan capaian kursi perempuan di legislatif, kendati

berbagai upaya seperti *affirmative action* dan strategi lainnya sudah diterapkan (Kemen PPPA, 2013).

E. Representasi Perempuan dalam Politik.

Representasi politik perempuan merupakan satu elemen penting jika kita ingin menempatkan konteks demokratisasi Indonesia dalam perspektif demokrasi yang ramah gender (*gender democracy*). Berbeda dengan para politisi laki-laki yang lebih asyik dengan "narasi-narasi politik besar", kalangan aktivis perempuan tampaknya lebih fokus dan konsisten untuk memperjuangkan kuota 30 persen representasi politik perempuan sebagai agenda perjuangan bersama (Najwa dan Husnul 2003). Setidaknya, dalam satu dekade ini, kita menyaksikan sebuah geliat kuat dari hampir seluruh organ dan elemen perjuangan perempuan, baik dari kalangan politisi, aktivis LSM, ormas, akademisi, jurnalis perempuan, bahkan para artis dan selebritis yang mengarahkan hampir seluruh energi politiknya ke satu titik: mengupayakan representasi politik perempuan yang lebih proporsional, adil, dan setara. Tak berlebihan, jika banyak pengamat dan aktivis mengatakan, wacana representasi politik perempuan kian nyaring dan menggema sejalan dengan bergulirnya era liberalisasi politik hasil reformasi politik 1998. Sebab, semasa Orde Baru, wacana representasi politik perempuan dalam narasi besar demokratisasi, implementasi hak asasi manusia, hak sipil dan politik, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya perempuan hampir tak mendapat tempat untuk bersemai. Wacana representasi politik perempuan dalam kerangka demokratisasi, praktis tenggelam dalam gerusan narasi besar developmentalisme, sebuah program pembangunan yang pragmatis dan represif yang bersumber dari ideologi pertumbuhan dan pengendalian stabilitas politik ketat, yang demikian intens digenjot oleh rezim Soeharto ketika itu.

Padahal, jika kita menyimak dengan seksama catatan sejarah perjalanan politik perempuan negeri ini, secara kualitatif, nilai dan semangat perjuangan perempuan Indonesia di masa awal revolusi terlihat lebih substantif dan membumi tidak artifisial seperti terekam dalam wacana politik Indonesia kontemporer.. Kini, seiring dengan perjalanan waktu, peran, posisi, dan aktualisasi perempuan dalam kancah kehidupan sosial-politik kian menyusut. Di era Demokrasi Terpimpin, peran sosial-politik perempuan cenderung terfragmentasi sebagai konsekuensi dinamika politik saat itu yang cenderung konfliktual. Kendati posisi politik perempuan saat itu relatif kuat, dalam praktiknya mereka tetap berada pada posisi subordinat dan kerap digunakan sebagai instrumen politik negara. Di era Orde Baru, kendati pemerintah Soeharto memiliki *political will* membentuk kementerian yang khusus menangani masalah perempuan, akan tetapi orientasi politik negara korporatik yang menyuburkan pola politik *patron-client* dan kultur hegemoni “politik lelaki” tetap saja menjadi struktur atas dari bangunan budaya politik rezim ini. Perempuan diperbolehkan melakukan peran sosial-politiknya, akan tetapi sebatas fungsi normatifnya, di bawah kendali ketat negara korporatik. Memasuki era reformasi, para Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (terutama di era kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa), secara gigih terus mengangkat isu kesetaraan jender sebagai *mainstream*. Namun, kerja keras para menteri perempuan, para aktivis, dan berbagai organisasi perempuan di Tanah Air untuk mewujudkan persamaan hak terus saja terbentur oleh kultur patriarki dan praktik politik anti partisipasi. Salah satu penyebab penting yang mendasari, dalam struktur masyarakat patriarkis, konstruksi sosial-budaya perempuan kerap digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Legitimasi (dan dominasi) ini terlihat dari sikap masyarakat yang kian menempatkan seksualitas perempuan sebagai komoditas; alat pemuas hasrat seksual laki-laki. Dalam kekuasaan

berstruktur patriarkis, politik bukan cuma refleksi dari interest kekuasaan dan uang, tapi juga seks (Mulia dan Farida, 2005).

F. Tantangan Perempuan

Kaum feminis yang menganut paham pluralisme demokratis meyakini bahwa perempuan tidak bisa dirugikan hanya karena jenis kelaminnya. Sebagai Manusia, perempuan juga butuh pengakuan atas eksistensi keperempuanannya. Gerakan feminis menentang pandangan stereotipe yang berpotensi mem marginalisasi peran perempuan sebatas fungsi domestiknya, bukan dalam konteks kehidupan publik yang lebih luas. Kendati sistem dan arah kebijakan politik pemerintah terhadap isu perempuan kian responsif jender, namun posisi perempuan dalam konteks kekuasaan politik tetap saja rentan dari berbagai bentuk manipulasi politik dan tak jarang dipakai sebagai alat legitimasi politik. Asumsinya sederhana: perempuan adalah unit dasar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian, kontrol atas peran perempuan merupakan instrumen efektif dalam mengendalikan seluruh operasi kekuasaan negara. Berbagai regulasi negara menyangkut isu perempuan membuktikan bahwa konstruksi budaya politik patriarki sepanjang sejarah amat menentukan kehidupan perempuan. Sejak dekade 1960-an, gerakan feminisme yang menggeliat di berbagai belahan dunia (termasuk di Indonesia pada dekade 1990-an), terus menggugat dasar kebijakan negara yang bias gender, mendorong peran, fungsi, dan posisi perempuan secara lebih progresif, serta memprotes berbagai kebijakan konservatif negara dan stigma masyarakat yang mem marginalisasi aspirasi, hak, dan kepentingan perempuan.

Kaum feminis yang peduli pada pentingnya kesetaraan jender dalam membangun watak bangsa, menuntut perubahan yang progresif atas posisi perempuan, seperti tercermin dalam polemik isu poligami, isu kekerasan dalam rumah tangga, isu hak-hak reproduksi perempuan, atau isu peraturan daerah tentang pelacuran. Menurut Gadis Arivia (2005), hampir seluruh regulasi negara yang terkait dengan soal perempuan mengandung materi bias jender. Sebab, dalam struktur masyarakat patriarkis, konstruksi sosial-budaya perempuan kerap digunakan sebagai alat legitimasi politik. Dalam konteks demikian, tantangan fundamental gerakan perempuan ke depan, setidaknya dapat dipetakan ke dalam tujuh isu berikut:

Pertama, globalisasi-neoliberal telah melahirkan kekuatan ekonomi dunia yang berpusat di negara-negara maju yang diikuti restrukturisasi ekonomi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Situasi ini telah menciptakan kemiskinan yang makin akut dan kompleks. Ekonomi global telah menyeret perempuan sebagai obyek dan komoditas ekonomi (menjadi PRT, PSK, buruh migran, atau pekerja upahan pabrik dan sektor informal bergaji murah).

Kedua, otoriterisme politik negara. Kontrol negara atas warga negara yang berlebihan – terutama kaum perempuan – telah berakibat pada hadirnya berbagai kebijakan negara yang bias hak asasi manusia, bias gender, dan mereduksi hakekat demokrasi. Munculnya berbagai kebijakan bias gender (seperti RUU Anti Pornografi dan Anti Pornoaksi dan perda-perda di berbagai daerah yang berbasis pada penafsiran sempit atas agama tertentu), adalah sekelumit bukti bahwa implementasi atas hak-hak sipil dan politik perempuan belum sepenuhnya mendapat ruang gerak dari negara.

Ketiga, kebijakan negara yang tidak pro-rakyat. Seperti kita ketahui, manajemen anggaran negara (APBN/APBD), prioritas pembangunan, dan manajemen pengelolaan sum-

ber daya alam di negara ini masih sepenuhnya disandarkan pada pemenuhan kebutuhan para politisi, elite-elite ekonomi, para investor, dan kepentingan modal global. Kebijakan yang tidak *pro-poor* ini telah mereduksi akses masyarakat, khususnya perempuan di sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sumber-sumber kehidupan publik yang mendasar (pangan, energi, air, tanah, dan hutan).

Keempat, fundamentalisme agama. Berbagai gerakan agama yang disinyalir berupaya melakukan perlawanan terhadap hegemoni Barat dan dominasi kekuatan kapitalisme yang berpijakan pada sikap dan aksi yang radikal, sempit, dan sepihak, telah menimbulkan ekses baru hadirnya rantai kekerasan dan penindasan bagi perempuan. Munculnya organisasi-organisasi massa yang mengatasnamakan agama tertentu serta mewujudkan sikap dan aksinya dengan paham radikal seringkali menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan. Organisasi ini kerap membatasi ruang gerak dan ekspresi perempuan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Kelima, liberalisasi politik yang terjadi sejak era reformasi tidak otomatis diikuti kesiapan lembaga pendidikan dan rekrutmen politik, terutama partai politik, untuk secara serius dan berkelanjutan untuk membuka kesempatan partisipasi perempuan dalam politik, terutama untuk menempatkan perempuan dalam posisi dan tanggung jawab organisatoris yang signifikan, selain mempersiapkan dan menempatkan perempuan sebagai caleg yang andal dengan kesempatan yang sama dan setara dengan caleg laki-laki.

Keenam, gerakan perempuan dengan demikian ditantang untuk mampu mendobrak lobi-lobi politisi laki-laki yang elitis dan budaya politik partai yang cenderung sentralistik dan patriarkat serta merubah budaya politik dan pola pikir jajaran elite partai agar memberi ruang dan peluang yang lebih besar pada kader politik perempuan untuk mendapat pelatihan dan edukasi politik, termasuk memberi

kesempatan bagi perempuan untuk duduk dalam berbagai jabatan/posisi strategis serta dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan.

Ketujuh, meskipun kuota 30 persen sangat strategis, namun regulasi tersebut hanya salah satu elemen utama dalam upaya memperkuat representasi politik perempuan. Adalah saatnya, pasca pemilu 2014 kalangan perempuan wajib memperluas makna representasi politik tersebut. Keterlibatan perempuan dalam sistem politik untuk tujuan representasi memang diperlukan (*necessary*), tapi sudah pasti tidak memadai (*sufficient*). Ini artinya, upaya *go politics* dari kalangan perempuan tidak hanya sebagai kegiatan untuk memasuki proses, mekanisme, lembaga, dan sistem politik (*crafting democracy*) tapi juga bagaimana representasi politik perempuan mampu memperluas basis konstituen (*broadening base*).

Setidaknya terdapat dimensi utama dalam konteks di atas, yakni menyangkut upaya untuk mempengaruhi proses-proses pengambilan keputusan publik; dan usaha untuk membangun basis sosial representasi politik perempuan, baik melalui lembaga-lembaga representasi politik formal maupun informal, termasuk partisipasi langsung (*direct democracy*). Terdapat rekoneksi antara gerakan perempuan (sebagai bagian integral dari gerakan sosial), dengan aksi-aksi politik perempuan (yang merupakan bagian dari demokrasi representasi). Seperti dikemukakan Lovenduski (*World Bank Publication*, 2000), representasi politik yang diusung kalangan aktivis dan politisi perempuan setidaknya merepresentasikan tiga elemen penting, yakni mewakili pemilihnya (*functional*), partai politiknya (*ideology*) serta konstituen perempuan sebagai identitas (*social*). Bagaimana mensinergikan ketiganya dalam rekoneksitas tindakan-tindakan politik dengan gerakan sosial perempuan, merupakan tantangan yang harus dijawab kalangan perempuan di

tengah-tengah kritik, keraguan, dan bahkan cibiran masyarakat atas kemampuan dan keberdayaan mereka.

Gerakan perempuan harus terus melakukan advokasi dan edukasi kritis pada semua level komunitas perempuan. Beragam perspektif analisis untuk melihat penindasan sistemik yang dialami perempuan harus diperkenalkan, seperti analisis feminis Marxian (untuk membedah penindasan yang dialami oleh buruh perempuan); analisis gerakan feminis Dunia Ketiga (untuk membedah penindasan perempuan dalam konteks kultur, religi, dan bentuk-bentuk kekerasan negara); atau analisis ekofeminis (untuk mengkaji ketertindasannya perempuan dari aspek lingkungan dan sumber-sumber penghidupan alamiah). Beragam perspektif dan strategi perjuangan perempuan yang ada sesungguhnya tak hanya efektif digunakan sebagai alat pencerdasan dan penyadaran, tapi lebih dari itu sebagai instrumen dalam membangun koalisi besar gerakan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan, keadilan, toleransi, dan demokrasi. Beragamnya organisasi perempuan yang tumbuh di tanah air harus dilihat secara positif dan diletakkan pada konteksnya, yakni saling mengisi dan melengkapi. Penyatuan banyak kekuatan dalam sebuah koalisi besar gerakan perempuan akan kian mempertinggi posisi tawar kaum perempuan. Nyata, perjuangan untuk mencapai keadilan gender dan mewujudkan keterwakilan politik perempuan di negeri ini sepertinya masih teramat panjang untuk dibuktikan, karena ia menyangkut kapabilitas untuk bersaing dan berkontribusi dalam politik praktis secara signifikan, dukungan basis massa yang jelas, pengalaman yang relevan, serta visi misi yang tak hanya sejalan dengan partai politik yang diwakilinya, namun juga harus sebangun dengan harapan dan keprihatinan rakyat.

Jika kita meyakini "politik tak bermula dari kebencian, tetapi dari rasa sayang dan nalar untuk membangun bangsa", maka aspirasi politik perempuan untuk berpartisipasi

dalam kehidupan politik bangsa bisa dimaknai sebagai bentuk penguatan demokrasi kita yang selama ini kental beraroma maskulin dengan cirinya yang cenderung arogan, culas, dan agresif.

G. Perjuangan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Politik

Sejatinya, perjuangan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam politik dan mewujudkan representasi politik perempuan (yang bukan sekedar warna, tapi turut mewarnai) di negeri ini sepertinya masih butuh waktu panjang dan perjuangan yang kuat untuk dibuktikan, karena ini menyangkut kapabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan untuk bersaing dan mampu berkontribusi dalam politik praktis secara signifikan.

Dalam masyarakat yang terlanjur meyakini kodrat perempuan sebagai makhluk lemah dan agak sensitif, jelas dibutuhkan upaya ekstra keras guna mengonstruksi isu representasi politik perempuan dalam bingkai demokrasi yang setara dan partisipatif dan wacana gender dalam frame pluralisme demokratis (non-patriarkis) sebagai prioritas kebijakan ke depan agar tatanan masyarakat demokratis yang berkeadilan gender bisa sungguh-sungguh terwujud di negeri ini. Maka dari itu sebaiknya dalam mengupayakan kesetaraan gender, khususnya dalam dunia politik dan pengambilan keputusan, perlu adanya upaya yang sinergis dan berkesinambungan, dengan melibatkan pemangku kepentingan semua pihak yang menjadi pelaku politik khususnya partai politik, organisasi kemasyarakatan dan pemerintah melalui instansi terkait dalam penyelenggaraan pendidikan politik yang lebih meluas dan terencana bagi perempuan.

BAB XXII

PENDIDIKAN POLITIK

BAGI PEREMPUAN INDONESIA

UNTUK MENINGKATKAN KETERLIBATANNYA

DALAM PEMILU

A. Pendahuluan

Pendidikan politik untuk perempuan merupakan hal yang sangat penting dalam proses demokrasi suatu bangsa. Menurut data statistik 2004, jumlah penduduk Indonesia mayoritas perempuan, yaitu lebih dari 100 juta. Walaupun penduduk perempuan lebih dari 100 juta, tetapi hingga saat ini kaum perempuan Indonesia belum mendapatkan tempat yang sejajar dengan kaum laki-laki, terutama dalam pendidikan politik. Hal ini terjadi karena budaya patriarki yang menjadi dasar kehidupan manusia umumnya di dunia, tentu saja termasuk di Indonesia.

Budaya patriarki adalah budaya yang mengutamakan peran laki-laki dalam mengatur kehidupan, hal ini merupakan salah satu faktor dasar yang meminggirkan perempuan, di antaranya dalam hal memperoleh kesempatan pendidikan, khususnya pendidikan politik. Secara ekstrim wacana yang berkembang menyatakan bahwa wilayah politik perempuan adalah menjadi ibu (melahirkan dan mengasuh anak), lebih ekstrim lagi wacana yang menyatakan bahwa wilayah politik perempuan adalah di dapur. Jadi, sebenarnya apa politik itu? Soekanto Soerjono (1993) menyatakan bahwa politik adalah *perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan*, sedangkan *kekuasaan* merupakan salah satu konsep dalam sistem politik yang pada umumnya dipegang oleh kaum laki-laki.

Dunia politik saat ini dinilai oleh banyak kalangan sebagai dunia yang kotor, pasalnya dunia politik berorientasi pada penguasaan dan penindasan. Hal ini yang menimbulkan kemiskinan, kerusakan sumber daya alam, perang, dan ketimpangan sosial. Stigma politik yang selama ini didominasi laki-laki banyak menimbulkan perseteruan tidak sehat antar politikus baik di tingkat lokal (desa), maupun di tingkat yang lebih tinggi. Hal inilah yang menyurutkan banyak pihak terutama kaum perempuan untuk masuk ke gelanggang politik. Selama ini pemahaman tentang politik identik dengan kekerasan, intrik, penindasan, dan hal-hal negatif lainnya. Hal ini pulalah yang menambah ketakutan kaum perempuan untuk berkiprah di dunia politik.

Kehidupan perempuan sehari-hari sebetulnya tidak terlepas dari dunia politik praktis, misalnya melakukan dalam menentukan siapa pemimpin desanya, partai apa yang dipilihnya untuk mewakilinya di DPRD, DPR, DPD. Yang paling penting sebenarnya kaum perempuan sangat besar andilnya dalam mendidik anak dan keluarganya agar menjadi manusia yang paham budi pekerti untuk berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Budi pekerti yang baik akan dapat membangun landasan politik yang cerdas, aman, sehat, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk menyadarkan pemahaman akan pendidikan berpolitik, maka diperlukan pembekalan yang sifatnya mendasar, yaitu apa saja yang perlu diketahui kaum perempuan dalam menyikapi hak-hak politiknya sebagai warga negara. Dalam hal ini pemerintah juga sebagai penyelenggara negara berkewajiban memberikan pendidikan politik kepada warga negaranya. Perlu disadari oleh semua pihak bahwa berpolitik tidak harus duduk di kursi kekuasaan.

Perlu dijelaskan kepada kaum perempuan bahwa berbeda pendapat, berbeda pandangan, dan berbeda dalam mengambil keputusan dengan suami adalah merupakan proses demokrasi dalam berpolitik di rumah tangga. Kaum perem-

puan dianjurkan ikut berpartisipasi dalam pencalonan kepala desa, karena hal ini merupakan bagian dari pendidikan politik, begitu juga kaum perempuan yang berpartisipasi dalam partai politik adalah merupakan keberanian perempuan dalam berpolitik praktis.

Proses pendidikan untuk perempuan harus dimulai dari hubungan internal dalam keluarga, lalu di lingkungan sosial masyarakat, kemudian di lingkungan yang lebih luas, yaitu masuk partai politik. Pendidikan politik juga bisa dilakukan di lingkungan Pokja Perempuan, misalnya di kelompok pengajian. Di tempat ini bisa diperoleh pendidikan politik yang paling mendasar, misalnya tentang nilai-nilai kehidupan, bagaimana menjadi manusia yang mempunyai kecerdasan sosial, kepekaan sosial, toleransi, dan sebagainya. Secara umum pendidikan politik yang berlandaskan etika, moral, dan nilai-nilai kehidupan adalah merupakan kerangka bagi pendidikan perempuan untuk berpolitik, sehingga kelak dapat menciptakan ruang politik bagi perempuan yang dapat mengoreksi praktik-praktik berpolitik yang tidak baik menjadi lebih baik.

B. Perempuan Cerdas dan Berpolitik Sepanjang Sejarah Indonesia

Cerita-cerita lama Indonesia, seperti legenda dan mitos banyak menceritakan perempuan terjun ke ranah politik, cerdas, hebat, gagah, dan kuat. Ada legenda yang menceritakan bahwa perempuan merupakan sumber daya kehidupan manusia, misalnya cerita Sari Pohaci (Sunda) dan Dewi Sri (Jawa). Dari badan perempuan ini tumbuh jenis makanan yang menjadi sumber kehidupan manusia. Legenda lain ada yang menceritakan perempuan-perempuan gagah yang bisa bertindak dan mengambil keputusan pada saat keadaan kritis diperlukan ketegasannya, seperti "Nyi Dayang Sumbi"

dalam cerita “Sangkuriang” atau cerita “Nyai Roro Kidul” yang sampai sekarang menjadi mitos di daerah Pantai Selatan.

Sejarah Indonesia juga mencatat tentang adanya raja perempuan yang memerintah pada abad ke-16, yaitu “Ratu Sima” sebagai Ratu Kerajaan Kalingga dan pahlawan-pahlawan perempuan yang bangkit untuk melawan penjajah sejak tahun 1917, seperti Martha Christina Tiahahu, Yolanda Maramis, Nyi Ageng Serang, Cut Nyak Dien, Kartini, Dewi Sartika, dan Rasuna Said.

C. Pengertian tentang Teori-Teori Politik

Pengertian merupakan kerangka teori yang menjadi landasan pijak bagi semua pihak dalam menggali, memahami, dan mengupas tentang suatu persoalan. Oleh karena itu, pengertian menjadi langkah penting dalam seluruh proses pembahasan suatu pokok permasalahan.

Menurut Miriam Budihardjo (2006) ada lima unsur yang membentuk konsep dalam sistem politik.

1. Negara (*state*), yaitu suatu organisasi dalam satu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati rakyatnya.
2. Kekuasaan (*power*), yaitu kemampuan seseorang atau satu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku.
3. Pengambilan keputusan (*decisionmaking*), yaitu proses membuat pilihan di antara beberapa alternatif menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat.
4. Kebijakan umum (*public policy*), yaitu suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh pelaku atau kelompok

- politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu.
5. Pembagian (*distribution/allocation*), yaitu pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat secara mengikat.

Dalam ilmu sosial nilai adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar, begitu juga nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai ini bisa bersifat abstrak seperti jajmen (*judgement*) atau penilaian suatu azas seperti kejujuran, kebebasan berpendapat, kebebasan mimbar, dan sebagainya, selain itu dapat bersifat material seperti rumah, dana anggaran, kekayaan, dll.

D. Gerakan *New Age* Perempuan

Gerakan ini merupakan sebuah aliran yang menekankan bahwa politik bertumpu pada kekuatan hati, sehingga kepemimpinan perempuan lebih mengutamakan kepemimpinan hati. Posisi tawar mereka adalah pemahaman politik yang santun, sarat cinta kasih, penuh kejujuran, penuh koordinasi, dan bertanggung jawab sebagai warga Negara. Cara pandang aliran ini adalah membangun kedamaian dunia dan negara demokratis yang bermuara dari kesadaran diri, hati, dan jiwa. Paradigma perubahannya, yaitu *the insight out*, dalam arti "dari dalam (perubahan diri, hati, dan jiwa) menuju ke luar" (Negara demokrasi dan kedamaian dunia). Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa untuk mengubah dunia damai dan negara demokratis harus dimulai dengan menata harmoni hati dan jiwa serta harmoni diri dan harmoni keluarga.

Sudah dijelaskan di atas bahwa politik adalah sesuatu yang berkenaan dengan kekuasaan, dalam arti kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi, berpolitik adalah perjuangan untuk mencapai kekuasaan agar da-

pat berbuat sesuatu bagi kepentingan orang banyak, yaitu bangsa dan umat manusia.

Negara Indonesia, dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diberi kekuasaan oleh rakyat untuk mengatur, menguasai, dan menegakkan hukum/aturan main dalam menjalankan kekuasaan. Mekanisme pemberian kuasa, yaitu melalui pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakilnya, pemilihan dewan perwakilan daerah (DPD), pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa.

E. Keterlibatan Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu

Ketertinggalan kaum perempuan ternyata menjadi permasalahan yang tidak saja merugikan perempuan itu sendiri, akan tetapi juga merugikan pembangunan nasional/daerah secara keseluruhan. Jumlah penduduk perempuan adalah hampir sama dengan penduduk laki-laki, karena itu peran perempuan sangat berarti. Lambatnya pembangunan Indonesia selama 70 tahun merdeka ini disebabkan karena kaum perempuan kurang berperan atau tidak diberi kesempatan untuk berperan dalam pembangunan, baik nasional maupun daerah. Dalam melaksanakan program pembangunan, bila perempuan mempunyai kualitas hidup yang optimal, maka perempuan akan dapat bekerjasama dengan baik sebagai mitra sejajar laki-laki dalam pembangunan nasional/daerah. Sebaliknya, bila perempuan dibiarkan tidak berdaya atau kualitas hidupnya dibiarkan rendah, maka perempuan akan menjadi beban pembangunan, sehingga pembangunan akan terhambat.

Perempuan Indonesia harus menjadi manusia Indonesia yang bermartabat dan maju, tidak kalah dengan perempuan lain, juga harus mampu berperan aktif dalam pergaulan nasional maupun internasional. Diperlukan motivator untuk

mendorong kaum perempuan untuk lebih berprestasi. Visi pembangunan pemberdayaan perempuan adalah tercapainya keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dalam pencapaiannya perlu dilaksanakan berbagai ragam kegiatan. Salah satu upaya yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan. Secara nyata dan kita sadari bersama bahwa seiring dengan perkembangan globalisasi, maka reformasi dan kehidupan yang demokratis dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan di masa-masa mendatang akan menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Secara obyektif, hingga saat ini kendala dan tantangan di lapangan nampak semakin jelas dan menunjukkan betapa kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan nampak begitu kentara. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya kebijakan-kebijakan publik yang masih sering mengabaikan perempuan sebagai titik perhatiannya, yang disebabkan oleh konsep gender yang belum banyak dipahami oleh berbagai pihak.

Kita semua memahami bahwa apa yang kita upayakan selama ini untuk memberikan yang terbaik bagi peningkatan kualitas kaum perempuan, bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Perlu disadari bahwa pemahaman akan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) masih sangat bervariasi tingkatannya. Pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan di seluruh sektor pembangunan memerlukan suatu mekanisme kerja yang kuat, yang didukung dengan kualitas sumber daya manusianya.

Kaum perempuan Indonesia, bila diberi kesempatan akan mampu meningkatkan kualitasnya. Mereka adalah aset dan potensi pembangunan, dan kita harus terus melakukan strategi kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam

pembangunan nasional agar mereka tidak menjadi beban pembangunan. Bila perempuan dihambat untuk diberdayakan, maka dengan sendirinya juga akan menghambat upaya optimal untuk memajukan Pembangunan Nasional kita.

F. Meningkatkan Keterlibatan Perempuan dalam Pemilu

Keterlibatan Perempuan yang minim dalam penyelenggara pemilu. Pada April 2007, DPR mengesahkan UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. UU tersebut mengatur keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu diatur dalam pasal sebagai berikut: Pada 20 September 2011, DPR mengesahkan UU No.15 Tahun 2011 sebagai revisi dari UU No. 22 Tahun 2007. UU No. 15 Tahun 2011 tetap menyertakan keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu, yang diatur dalam pasal:

Pasal 6 ayat 5: "Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPUKab/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)".

Pasal 73 ayat 8: "Komposisi keanggotaan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)." .

Pasal 6 ayat 5: "Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)." .

Pasal 72 ayat 8: "Komposisi keanggotaan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)." .

Data PUSKAPOL UI menunjukkan keterlibatan perempuan yang minim dalam penyelenggaraan pemilu Keterwakilan perempuan secara jelas diatur dalam undang-undang penyelenggara pemilu sebelum maupun setelah direvisi. Tetapi fakta setelah penetapan UU No. 15 Tahun 2011 menunjukkan jumlah perempuan yang terlibat dalam keanggotaan KPU dan Bawaslu belum mencapai 30%. Sebagaimana data enam provinsi daerah penelitian Puskapol FISIP UI (Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Maluku, Papua, dan Papua Barat) berikut ini:

1. Persentase keanggotaan Bawaslu-RI 2012-2017, 20%, 1 dari 5 anggota Bawaslu Pusat adalah perempuan.
2. Persentase keanggotaan Bawaslu 6 Provinsi 2013-2018, 29,41% 5 dari 17* anggota Bawaslu 6 provinsi adalah perempuan.
3. Persentase Anggota KPU-RI 2012-2017, 14,29% 1 dari 7 anggota KPU Pusat adalah perempuan.
4. Persentase Anggota KPU 6 Provinsi 2013-2018, 15,62% 5 dari 32 anggota KPU 6 provinsi adalah perempuan.

Keanggotaan Bawaslu untuk 6 provinsi berkurang 1 karena di Papua Barat anggota Bawaslu hanya 2 orang. Artinya, meskipun tidak ada penghalang formal untuk keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu, namun peluang keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu masih mengalami hambatan.

Posisi yang bisa diduduki oleh perempuan dalam Lembaga penyelenggara pemilu, diantaranya: KPU, KPU Provinsi & Kab. /Kota, PPK, PPS, KPPS, BAWASLU, BAWASLU Provinsi & Kab. /Kota, PANWASCAM & PPL.

G. Rekomendasi Puskapol FISIP UI

1. Perkuat peraturan pelaksana, khususnya dalam proses rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu dan me-

- mastikan hasil prosesnya memenuhi keterwakilan 30% perempuan.
2. Adakan kapasitas perempuan dalam kepemiluan.
 3. Susun database perempuan yang ikut dalam penyelenggaraan pemilu hingga tingkat desa (kelurahan) untuk melihat rekam jejak/ pengalaman perempuan yang terlibat dalam kepemiluan

H. Hak Perempuan dalam Pemilu

Pemilihan Umum sebagai sistem penyelenggaraan Negara yang demokrasi menjadi urusan setiap warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan. Demokrasi mempersyaratkan diperkuatnya dukungan terhadap nilai-nilai persamaan, kebebasan dan persaingan yang *fair* dalam praktek penyelenggaraan Negara. Ketentuan konstitusi yang menjamin persamaan, kebebasan dan persaingan demokratis untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan harus diwujudkan secara nyata. UU No, 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 secara lebih konkret menentukan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak merupakan perintah UU yang harus dipatuhi. Artinya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu wajib hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak sipil dan politik. Hambatan bagi partisipasi perempuan dalam kehidupan politik tidak boleh ditolerir, karena dapat menghambat pertumbuhan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dan mempersulit perkembangan

potensi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sementara itu kaum perempuan perlu mengkonsolidasikan potensinya, menggalang dukungan untuk meraih simpati dan secara sistematis menempa diri agar memiliki kapasitas, kapabilitas serta akseptabilitas untuk memainkan peranan lebih besar dalam kancah politik demi kesejahteraan seluruh rakyat. Urusan politik dalam Negara demokratis adalah urusan laki-laki, tetapi dalam Negara demokratis adalah urusan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama untuk membangun bangsanya.

Salah satu upaya untuk peningkatan keterwakilan perempuan adalah adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan terhadap proses politik yang memastikan peningkatan keterwakilan perempuan pada tingkat yang diharapkan. Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu adalah salah satu indikator yang sangat penting untuk menjamin peningkatan keterwakilan perempuan yang duduk di DPR. Undang-Undang (UU) Partai Politik dan Pemilu menjadi ukuran untuk melihat bagaimana respon negara terhadap indikator kesetaraan gender. Undang-Undang Pemilu dapat memberikan jaminan bagi perempuan untuk dapat mengikuti proses pencalonan sampai terpilihnya dalam pemilu.

Di Indonesia, sejak diberlakukannya pasal 65 Undang-Undang Pemilu No.12 Tahun 2003 tentang kuota perempuan 30% pada pemilu 2004 secara terus-menerus dibutuhkan penguatan terhadap UU tersebut dan evaluasi di setiap Pemilihan Umum (pemilu). UU Pemilu ini telah diubah menjadi UU No.8 Tahun 2008, dengan mencantumkan nomor urut 1 sampai 3 harus ada calon perempuan. Sementara UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik belum mencantumkan masalah kuota secara tegas telah diperbaiki dengan UU No.2 Tahun 2008.

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut maka dalam pemilu 2004 dan 2009 terlihat peningkatan yang signifikan pada jumlah calon legislatif (caleg) perempuan, namun belum secara otomatis memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terpilih dalam pemilu. Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan menjadi sangat penting baik dalam kerangka peningkatan *the politics of presence* maupun dalam kerangka *the politic of ideas* (kebijakan kesejahteraan Ibu dan Anak serta keluarga) dari kepentingan perempuan sebagai mayoritas penduduk suatu negara.

I. Hak Politik Perempuan dalam Pemilu

Keterwakilan perempuan dalam caleg merupakan salah satu syarat utama. Sesuai dengan konstitusi keterwakilan perempuan menjadi salah satu amanat konstitusi yang harus dilaksanakan. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 mengatur setiap parpol menyertakan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dari bakal calon legislatif.

Ketentuan ini membuat parpol tergopoh-gopoh mencari kader perempuan untuk dijadikan caleg di masing-masing daerah pemilihan apalagi dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, kesempatan bagi parpol untuk mengajukan caleg peserta pemilu 2014, terkait keterwakilan perempuan setidaknya 30 persen.

Tahun 2004 diatur supaya parpol mengakomodasi 30 persen perempuan dalam kepengurusan tingkat propinsi dan kabupaten kota serta mencantumkannya dalam AD/ART. Kenyataannya dalam pelaksanaan belum tercapai. Kurangnya keterwakilan perempuan merupakan ketidakmampuan parpol menjadi pilar demokrasi. Daftar bakal caleg mesti memuat sedikitnya 30 persen keterwakilan perempuan.

Perekrutan calon bukanlah hal gampang, mengingat banyaknya tugas yang harus dipikul apabila menjadi wakil rakyat. Oleh karena itu, masing-masing parpol berlomba-lomba untuk memenuhi kriteria tersebut dengan merekrut caleg yang akan dijagokan pada pesta demokrasi 2014. Apalagi memenuhi kuota 30% perempuan untuk dicalonkan parpol bukan pekerjaan mudah. Perekrutan tersebut tidak bisa dipandang sepele. Terbukti pesta rakyat tahun 2009 tidak berhasil merangkul kaum perempuan untuk memperjuangkan haknya di Senayan. Maka, pesta rakyat tahun 2014 merupakan momen penting untuk memenuhi kuota tersebut dengan merekrut perempuan. Sebenarnya kehadiran UU No.8 Tahun 2008 memiliki segi positif bagi perempuan karena adanya paksaan bagi parpol memenuhi kuota 30% caleg perempuan. Dalam perspektif gender, kaum perempuan saat ini bisa bersenang hati lantaran diberi kesempatan untuk masuk parlemen. Namun demikian, dalam praktiknya di daerah tertentu, parpol tidak gampang merekrut perempuan yang bisa dijadikan caleg.

J. Pemenuhan Kuota Caleg Perempuan

Nilai positif bagi proses demokrasi, yaitu apabila parpol yang tidak memenuhi 30 % perempuan dalam pencalonan tidak diperbolehkan ikut pemilihan di daerah pemilihan (dapil) bersangkutan. Sanksi ini lebih ringan dibandingkan dengan tidak diperbolehkan ikut pencalonan. Terpenuhinya kuota 30% perempuan sebagai bukti kemajuan berdemokrasi. Sanksi secara moral tentu lebih kuat. Adanya sanksi bagi parpol yang tidak memenuhi kuota 30% perempuan dalam kepengurusan parpol atau pencalonan akan menguatkan pilar demokrasi. Pemenuhan kuota 30% perempuan selain bukti demokratisnya pemilu juga bentuk penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan prinsip kesetaraan gender

antara laki-laki dan perempuan dalam politik. Persoalannya, partisipasi perempuan dalam parpol masih rendah. Hal ini dikarenakan belum adanya platform partai yang secara konkret membela kepentingan perempuan. Banyak parpol mencoba mengusung perspektif gender hanya untuk mempertahankan eksistensi partainya di tengah derasnya tuntutan aktivis perempuan yang didukung media massa. (Kompas, 29 November 2012).

Parpol diminta serius memberi dukungan untuk merekrut caleg perempuan. Selama ini pemenuhan 30% caleg perempuan masih sebatas ritualitas UU kalau benar dilaksanakan. Pemenuhan kuota tersebut belum didasari secara sadar bahwa hak-hak perempuan harus diperjuangkan. Tidak asing ketika caleg perempuan ditempatkan pada posisi nomor urut yang tidak memberikan harapan. Artinya, perempuan dijadikan sebatas slogan untuk meraup suara bagi parpol. Akhirnya, caleg perempuan tidak lebih sebagai pajangan. Kerja keras parpol belum terlihat untuk merangkul kaum perempuan dalam memperjuangkan nasibnya.

K. Menghadirkan Caleg Perempuan yang berkualitas

Penting diketahui dibalik peraturan tersebut, kehadiran perempuan di legislatif tidak hanya memenuhi konstitusi tetapi caleg perempuan harus benar-benar berkualitas dan berintegritas untuk memberikan masukan ketika bicara soal perempuan dalam perumusan undang-undang. Lemahnya penjaringan perempuan dalam pencadangan juga dipengaruhi oleh lemahnya KPU sebagai salah satu lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan UU. Buktinya, KPU terkadang tidak bisa menilai kualitas caleg perempuan. Masuknya caleg perempuan tanpa seleksi akan berakibat fatal bagi demokrasi. Artinya, demokrasi yang menjamin adanya kebebasan sesuai dengan konstitusi.

Jika caleg perempuan tidak berkualitas sudah pasti perannya di gedung Senayan tidak akan menghasilkan perubahan bagi perempuan. Guna mencapai kuota 30% perempuan, acapkali parpol disibukkan dengan berbagai kebijakan yang lebih longgar tanpa kritis untuk merangkul perempuan sebagai caleg yang dijagokan. Terkadang segala cara dihalalkan tanpa pertimbangan yang matang. Parpol masih menomorsatukan kader partai juga mendatangkan caleg dari berbagai elemen masyarakat. Termasuk dari dunia olahraga, kampus, seniman, artis dan lembaga lain yang dapat mendobrak suara pemilihan legislatif mendatang. Untuk memenuhi keterwakilan perempuan dalam pemilu 2019 dibutuhkan gebrakan. Melaksanakan pendidikan politik merupakan pendekatan yang paling efektif. Pendidikan politik dan pengembangan kapasitas kader perempuan. Jika keterwakilan perempuan dalam pemilu 2019 terpenuhi tentu akan berdampak positif bagi dunia perpolitikan di negeri ini.

Sebaiknya sebelum mengumumkan daftar caleg dari parpol, seharusnya KPU melakukan berbagai verifikasi terhadap calon yang akan diajukan sebagai peserta caleg. Artinya, KPU perlu melakukan penjaringan terhadap calon. Setiap calon harus benar-benar bersih dan tidak pernah bermasalah dengan hukum. Dibutuhkan pemahaman bersama bahwa pemilihan caleg bukan sekedar rutinitas negara melainkan untuk pelaksanaan demokrasi. Bagaimanapun juga, kehadiran perempuan tidak monoton demi kekuasaan tapi semata-mata untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di parlemen. Perekutan perempuan sebagai caleg meski taat asas (prosedur demokrasi). Artinya, caleg perempuan yang direkrut parpol harus diseleksi. Apabila caleg yang direkrut memiliki *track record* yang buruk tentu akan menciderai demokrasi. Jangan sampai caleg yang diusulkan partai untuk menjadi wakil rakyat tidak berpihak kepada rakyat. Harapannya, caleg yang dipromosikan dan dijagokan untuk publik bukan orang yang pernah bermasalah dengan hu-

kum, tetapi memiliki karakter dan berjiwa negarawan. Apapun tantangannya, tidak ada alasan bagi parpol untuk tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam pencalonan. Publik berharap demokrasi yang dikenal dunia tidak hanya sekedar demokrasi prosedural, tetapi demokrasi yang benar-benar menghayati nilai-nilai Pancasila. Alangkah meriahnya apabila setiap pesta demokrasi diwarnai dengan adanya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam parpol (parlemen). Dengan demikian, benarlah bahwa demokrasi yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia merupakan demokrasi substansial sebagai perwujudan kesetaraan gender.

L. Mengapa Keterlibatan Perempuan Minim dalam Bidang Politik?

Secara formal, peningkatan keterlibatan perempuan sudah diatur dengan baik dalam undang-undang. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik didorong melalui tindakan afirmatif sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di partai politik, lembaga legislatif maupun di lembaga penyelenggara pemilu. Tetapi dalam praktiknya, perempuan terbentur **“langit-langit kaca”** dalam peningkatan keterlibatannya secara politik. Perempuan mengalami halangan-halangan yang seringkali kasat mata, tetapi sangat nyata dirasakan dan menghambat perempuan untuk terlibat secara politik.

Berdasarkan hasil riset Puskapol FISIP UI, ada beberapa hambatan yang secara nyata dialami perempuan dan menghalanginya dalam berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu, yaitu:

1. Masalah Budaya

“Jadi laki-laki sebagai tokoh adat, identik dengan pemimpin, dan itu terbawa dari adat ke sistem pemerintahan.

Perempuan pada dasarnya menerima peran seperti itu. Karena faktor budaya tadi. Hambatan dari perempuan untuk masuk ke badan penyelenggara Pemilu, yang paling khusus, "izin dari suami dan izin dari orang tua".

2. Pengetahuan Kepemiluan

"Dari 121 pendaftar, yang lolos tes tertulis ada 50 orang, 10 di antaranya perempuan. Lalu untuk tahap 10 besar hanya ada 1 perempuan yang lolos. Masalah pengetahuan masih sulit bagi perempuan."

3. Geografis

"Untuk beberapa wilayah di Indonesia, masalah geografis menjadi isu penting dalam mencakup keterlibatan perempuan dalam politik."

4. Regulasi

"Walaupun punya pengalaman *seabrek-abrek* tetap tidak lolos karena dianggap tidak punya pengalaman dalam penyelenggara pemilu. Itu jadi sepertinya ada diskriminasi tentunya karena belum diuji."

Sekarang PPS itu syaratnya tinggi. Minimal harus tamat SLTA, kemudian usianya juga 30 tahun. Pendidikan ini yang payah sekali, orang di desa kadang-kadang kebanyakan kalau sudah tamat SMA langsung pergi merantau, atau sudah punya pekerjaan. Akhirnya selalu yang itu -itu saja dipilih jadi anggota PPK, PPS dan KPPS."

M. Peran Perempuan dalam Legislatif

Upaya nyata untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik terus disuarakan, seperti pada pelaksanaan pemilu 2014, peraturan perundang-undangan telah mengatur kuota 30% perempuan bagi partai politik (parpol) dalam

menempatkan calon anggota legislatifnya. Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota DPR, DPD,, dan DPRD (Pemilu Legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Di sinilah peran KPU untuk memberikan informasi dan sosialisasi mengenai hak dan peran serta perempuan dalam pemilu. Dengan adanya sosialisasi ini maka diharapkan adanya peningkatan peran serta aktif perempuan dalam pemilu. KPU aktif mengadakan kegiatan sosialisasi bertujuan untuk diadakan kegiatan Sosialisasi Peran Serta Perempuan dalam Pemilu adalah:

1. Memberikan informasi yang benar mengenai hak perempuan dalam politik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.
2. Diharapkan sosialisasi ini dapat meningkatkan peran serta perempuan dalam politik khususnya pemilu sehingga di masa yang akan datang keterwakilan perempuan dalam pemilu dapat mencapai kuota 30 % seperti yang diharapkan.

Informasi diharapkan bagaimana sebetulnya peranan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Perempuan sebetulnya dapat berperan lebih aktif dalam segala hal apalagi di bidang politik. Peran perempuan di bidang politik masih belum terlalu terlihat menonjol. Untuk itulah kita harus memberikan dorongan dan semangat untuk para perempuan agar lebih aktif lagi dalam berpolitik.

KPU memberikan sosialisasi adalah sebuah proses penyampaian informasi mengenai hak-hak kaum perempuan dalam Pemilu. Oleh karena itulah informasi yang disampaikan harus mampu memberikan pengetahuan bagi perempuan. Sosialisasi ini kemudian menjadi penting ketika keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2014 masih jauh dari yang diharapkan. Hanya ada sedikit sekali

wakil perempuan yang duduk sebagai wakil rakyat padahal diharapkan dengan lebih banyak wakil perempuan yang duduk di Legislatif pada akhirnya diharapkan mampu menyumbangkan pemikirannya bagi kemajuan kaum perempuan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan pemberdayaan politik perempuan karena ada kecenderungan, bahwa politik pasar menjadi lebih determinan. Negara dan perempuan bisa dipisah tapi politik dan perempuan tidak bisa dipisah, bahkan yang kerap terjadi adalah politisasi perempuan.

Untuk itu di mana pun tempat berkiprah, di situ pula perlu disadari bahwa dalam memandang setiap masalah harus dipandang secara integral, secara sistem. Selain itu tidak perlu terjebak pada budaya politik yang ada, dalam arti tidak perlu terpaku pada perjuangan untuk menduduki posisi tertentu (penentu kebijakan) dalam menyuarakan aspirasi perempuan. Dengan catatan para perempuan harus punya visi tertentu yang melatarbelakangi terlibatnya mereka dalam aktifitas politik.

DAFTAR PUSTAKA

- A'dam Syahrul, "Isu-isu Gender dalam Mata Kuliah Tasawuf" dalam Membangun Kultur Akademik Berperspektif Gender. Adian, Husaini. 2004. *Tinjauan Historis Konflik Yahudi. Kristen, Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anderson, J.R. 1995. *Learning and Memory, An Integrated Approach*. New York: John Wiley and Sons Inc.
- Aisyah, Nenden Lilis. 2003. "Pemilihan Bahan dan Perancangan Model Apresiasi Sastra sebagai Wahana Penyadaran Gender." Tesis tidak dipublikasikan pada SPs UPI, Bandung.
- Akhir, D. J. 2015. *Sustainable Development Goals*. Jakarta: Oke-zone.Com.
- Alisjahbana, St. Takdir. 1999. *Layar Terkembang*. Jakarta: Balai Pustaka
- Angulo, Natalia (March 12, 2015). "JPM's NYC, LA ATMs Going HeForShe in March". Fox Business. Retrieved 26 March 2015.
- Antara, 2012. [http://id.berita.yahoo.com/linda-gumelar akui-kesenjangan-gender-masih-ada-014611827.html](http://id.berita.yahoo.com/linda-gumelar-akui-kesenjangan-gender-masih-ada-014611827.html)
- Ardiansa, Dirga. 2016. Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia Pusat Kajian Politik, FISIP Universitas Indonesia
- Arivia, Gadis. 2002. *Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat berperspektif Feminis*, Disertasi, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Depok.
- Baidan, Nashruddin. 2017. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Jakarta: Pustaka Pelajar

- Beasley, Chris, 1999, *What is Feminism? An Introduction to Feminist Theory*, NSW: Sage Publications.
- Beijing Declaration and Platform for Action*. (1995) *Fourth World Conference on Women. Beijing, 15 September 1995. A/Conf.177/20 (1995) & A/Conf.177/Add.1 (19-75)*.
- Berger, Kathleen Stassen. 2008. *The Developing Person Through Life Span*. New York: Worth Publishers
- Bowman, Henry A. 1954. *Marriage for Moderns*. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc.
- Bowman, Henry A. 2003. *The Literacy Lexicon*. (second edition). Sidney: Pearson.
- Budiman, Arief. 1985. *Pembagian Kerja secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia
- Budiardjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Caplan, P. 1987. *Cultural Construction of Sexuality*. London: Tavistock Publication.
- Connell, R.W. 1993. *Gender Relations*. Cambridge: Polity Press.
- Cooper, J.D. 1993 *Literacy: Helping Children Construct Meaning*. Boston Toronto: Houghton Mifflin Company.
- Chrisler, Joan C, et all, (ed), 2000. *Lectures on the Psychology of Women*, Second Edition. Boston: Mc Grawhill.
- Cudd, Ann E. and Robin O. Andreasen (ed), 2005. *Feminist Theory; A Philosophical Anthology*. Cornwall: Blackwell Publishing Ltd.
- Culler, Jonathan. 1983. *On Deconstruction; Theory and Criticism after Structuralism*. London and Henley: Routledge and Kegan Paul
- Darma, Yoce Aliah. 2013. *Analisis Wacana Kritis*. Cetakan II, Bandung: Yrama Widia.

- Danim, Sudarwan 2010. Pengantar Pendidikan. Bandung: CV Alfabeta
- Di Yanni, Robert dan Pat C. Hoy 1995. *The Scriber Handbook for Writing*. Boston: Allya & Bacon.
- Djajanegara, Soenardjati. 2003. *Kritik Sastra Feminis, Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Echols and Shadily. 1987. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: PT Gramedia.
- Elliott, Stuart (March 7, 2014). "U.N. Women's Rights Group Seeks Men's Support". *The New York Times*. Retrieved 26 March 2015
- "Emma Watson opens up about that amazing UN speech". *Woman's Day*. *Woman's Day*. Retrieved 5 November 2014.
- Emma Watson launches 10-by-10-by-10' at unwomen.org
- Emma, Herman (October 3, 2014). "Emma Watson's UN gender equality campaign is an invitation to men, too". *The Guardian*. Retrieved 26 March 2015.
- Eriyanto. 2011. Analisi Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS.
- Fakih, Mansour. 1997. *Penyadaran gender: Buku panduan untuk para pekerja*. Jakarta: ILO Indonesia.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fakih, Mansour. 2004. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faruk, H.T. 1997. "Selayang Pandang Reproduksi Gender Indonesia," dalam Humaniora No. VI (Oktober-November). Yogyakarta
- Feminism-is-shouting-but-the-movement-is-a-whisper' at inquire-live.co.uk*
- Fairchild, Caroline (December 18, 2014). "Meet the woman behind Emma Watson's viral feminism campaign". *Fortune*. Retrieved 26 March 2015.

- Freire, Paulo. 1999. *Kehidupan, Karya, dan Pemikirannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Freire, Paulo. 2009. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*. (Agung Prihantoro & Fuad Arif Fudiyartanto, Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fransiska, Eka Putry. (<http://citicope.org/story/2014/comparing-mdgs-and-sdgs>)
- Freebody, P & Luke, A. 1990. Literacies Programs: Debates and Demand in Cultural Context. *Prospect Australian Journal of TESOL*, 5(3), 7-16.
- Guest, Katy. "Chivalry is dead, long live common courtesy". *The Independent*. Retrieved 26 March 2015.
- Gipayana, Muhanah. 2000. *Pengajaran Literasi: Focus Menulis di SD/MI*. Malang: Asih Asah Asuh.
- Gipayana, Muhanah. 2010. *Pengajaran Literasi*. Malang: Penerbit A3
- Grant, Rebecca dan Kathleen Newland (eds). 1991. *Gender and International Relations*, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
- Guothro, Patricia A. 2007. Active and Inclusive Citizenship for Women: Democratic considerations for Fostering Lifelong Education. *International Journal of Lifelong Education*, vol. 26, No. 2, (Maret-April 2007), hal. 143-154
- Hafidz, Wardah (1995). *Daftar istilah jender*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.
- Heddy, Shr dan Ahimsha, Putra. 2000. *Ketika Orang Jawa Nyeni, Seni dalam Beberapa Perspektif. Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Galang Press.
- HeForShe, EmmaWatson. (<https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=he+for+she+emma+watson>)
- HeForShe.org.:<http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/emma-watson-gender-equality-is-yourissuetoo#sthash.9I6-Jpk-NU.dpuf>

- 'HeForShe should work to stop discrimination against both sexes' at dailyorange.com
- 'HeForShe - Take Action' at heforshe.org
- HeForShe website (2 October 2014). "Action Kit"(PDF). Retrieved 2 October 2014.
- Hisyam, Zaini. 2002. *Strategi Pembelajaran Aktif di PT. Yogyakarta*: CTDS
- Hornby, AS. 1995. *Oxford Anvanced Learner's Dictionary of Current English* (Ed. 5). Oxford: Oxford University Press.
- Hope, Anne and Timmel, Sally. 1996. *Training for Transformation: A Handbook for Community Workers*. Zimbabwe: Mambo Press.
- Humm, Maggie. 2002. *Ensiklopedia Feminisme*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru
- Hurlock. 1990. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga
- Husaini, dkk. 2004. *Potret Wanita Solehah*. Jakarta: Paramadina
- Ihromi, 1995. *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Ichromi, T.O. 1999. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Illich, Ivan. 1998. *Matinya Gender (Omi Intan Naomi, (Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iriantara, Y. 2009. *Literasi Media: Apa, Mengapa, Bagaimana*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Irwan Masduqi, dkk, 2009. *Kontekstualisasi Turats, Telaah Regresif dan Progresif*, Jogjakarta: Pustaka De-Aly,
- Ismail, Nurjanah. 2003. *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS.
- Ismail, dkk. 2001. *Paradigma Pendidikan Islam*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang
- Jamal, Ahmad Muhamad. 1991. *Jejak Sukses 30 Wanita Beriman*, Surabaya: Pustakan Progressi

- Jurnal Perempuan No.34, Politik dan Keterwakilan Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2004
- Kabeer, N. 2005. Conflicts over Credit: re-evaluating Potential of the Empowerment od Loans to Women in Rural Bangladesh. *World Development* 29 (1): 63-84
- Kirsch. And Jungeblut, 1993. Literasy profile of American's young Adult. Washington DC. National Center for Education Statistics, Educational Testing Service.
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. 2000. Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan 2000-2004. Jakarta: Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 2001. Panduan pelaksanaan Inpres No. 9 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan. (Draft 26 April 2001). Jakarta: Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
- Kartini.1979. *Surat-surat Kartini* (Terj.) Sulastin Sutrisno dari *Door Duisternis tot Licht*. Cet.IV. Jakarta: Penerbit Djambatan
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013. Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013. Jakarta: Lintas Khatulistiwa.
- Lips, Hilary M, 2003. *A New Psychology of Women; Gender, Culture, and Ethnicity*, Second Edition, New York: McGrawHill.
- Lucas, J. Henry. 1953. *A Short History of Civilization*. (2n.ed). New York: McGraw-Hill Book Company, Inc.
- McKay. John P, dkk, 1983, *A History of Western Society*, Second Edition, Boston: Houghton Mifflin Company.
- McDonald, Soraya Nadia (22 September 2014)."Emma Watson: Feminism too often is seen as 'man-hating'". Washington Post. Retrieved 22 September2014.

- McKenzie, Sheena (March 9, 2015). "Emma Watson: Don't let anyone tell you what you can or cannot achieve". CNN. Retrieved 26 March 2015.
- Marshall, Rosalind K. 1983. *Virgin and Viragos. A History of Women in Scotland from 1080 to 1980*. London: William Collins Son & Co. Ltd.
- Marianne W. J. & Louise J. P. (2007). Analisis Wacana: Teori dan Metode. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maududi, Abul A'la, 1995. *Al-Hijab*. Cetakan Kedelapan, Bandung: Gema Risalah Press.
- Megawangi, Ratna, 1999. Sekapur Sirih, *The Tao of Islam, Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kוסmologi dan Teologi Islam*, Terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1999.
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membarkan Berbeda. Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*.
- Melliana, S. A. 2006. *Menjelajah Tubuh Perempuan dan Mitos Kecantikan*. Yogyakarta: LKiS.
- Membangun Kurikulum Berbasis Gender: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 02/08/2008, (<http://www.sunanampel.ac.id/berita/detail.phd/id=98>.
- Muawanah, Elfi. 2009. *Pendidikan Gender dan Hak Azasi Manusia*. Yogyakarta: Teras
- Montagu Ashley. 1971. *The Natural Superiority of Women*. New York: Outer Bridge and Dienstrey
- Monde, Chiderah (22 September 2014). "Emma Watson embraces feminism, introduces 'HeForShe' campaign in speech at UN meeting". New York Daily News. Retrieved 22 September 2014.
- Morgenthau, Hans. 1948. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knopf
- Mosse, J.C. 1996. *Gender dan Pembangunan*. (Terjemahan Silawati dan Rifka Annisa.). Women Crisis Centre. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Muawanah, S. 2009. Hubungan antara Kepuasan *Body Image* dengan *Self-esteem* pada Mahasiswa Usia Remaja Akhir di Fakultas Psikologi UNPAD. Skripsi Fakultas Psikologi UNPAD. Bandung: Tidak diterbitkan.
- Mulia, Siti Musdah dan Farida, Anik, 2005. *Perempuan dan Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama:
- Murniati, Nunuk P. 2004. *Getar Gender*. Cet. Kedua. Magedang: Yayasan Indonesia Tera
- Mustari, B. dkk. 2000. Konsep dasar jender: Materi pelatihan. Makassar: TPP2W Sulawesi Selatan dan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Sulawesi Selatan.
- Najwa Sa'idah dan Husnul Khatimah. 2003. *Revisi Politik Perempuan*. Bogor: CV. Idea Pustaka Utama.
- Nugroho, Adi. 2010. *Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Objek dengan Metode USDP*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Oakley, Ann. 1972. *Gender, Sex, and Society*. London: Temple Smith.
- Ogbomo. 2005. Women Power and Sosity in Pre-colonial Afrika. *Lagos Historical Review*, vol. 5, p. 49-74
- O'Sullivan, Tom. 1994. *Key Conzept in Communication and Cultural Studies*. London: Routledge
- Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia. 2004. *Hak Azasi Perempuan: Instrumen untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Palmer, Ewan (January 23, 2015). "Davos: Emma Watson launches new HeForShe gender equality campaign at World Economic Forum". *International Business Times*. Retrieved 26 March 2015.
- Parawansa, Khofifah Indar. 2006. *Mengukur Paradigma, Menembus Tradisi*, Jakarta: Pustaka LP3ES,
- Prabasmoro, A. P. 2006. *Kajian Budaya Feminis: Tubuh, Sastra, dan Budaya Pop*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Program Pascasarjana UI. 2 Agustus (<http://www.pps.ui.ac.id/ui/kw.kurikulum.htm>)

- Randall Collins. 1995. *Sociology of Marriage and Family: Gender, Love and Property*. Fourt Ed. Chicago: Nelson-Hall
- Reiter, Rayna R. 1975. *Toward an Anthropology of Women*. New York and London: Monthly ReviewPress.
- Rebecca Grant dan Kathleen Newland. 1991. *Gender and international Relations*. Buckingham: Open University Press.
- Saptari, R. & Holzner, B. (1995) *Perempuan kerja dan perubahan sosial: Sebuah pengantar studi perempuan*. Jakarta: Grafiti.
- Savitri, I. (2014 Agustus 30). Agar Setampan Super Junior, *Tempo*, h. 11.
- Selden, Raman. 1985. *A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory*. Sussex: The Harvester Press Limited.
- Sheila, Rowbotham. 1992. *Women in Movement: Feminism and Social*, New York: Rountledge.
- Silawati, Hartian. 2000. *Gender dan Pembangunan*. Terjemahan dari *Gender and Development* (Mosse, 1996). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Simbisey, Yohana Suzana. 6 Juli 2015. Transformasi Millennium Development Goals (Mdgs) Menjadi Post 2015 Guna Menjawab Tantangan Pembangunan Global Baru.
- Sinaga, Betty D. 2003. *Fokal Poin Gender*. Jakarta: Depdikbud.
- Siregar, Siti Ruhana. 2014. <http://edukasi.kompasiana.com/2013/08/13/apa-itu-mdgs-583450.html> (Diakses, Sabtu 4 Oktober 2014)
- Siswanto. Bias Gender dalam Pendidikan. <http://paksisgen-dut.wordpress.com/2009/2/gender-danpendidikan.pdf>
- Slavian, R.E. (1994) *Educational psychology: Theory and practice* (Fourth edition). Boston: Allyn and Bacon.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Stean's, Jill, 2013. *Gender & International Relations*, Third Edetion. Cambridge: Polity Press
- Sugihastuti, 2003. *Feminisme dan Sastra. Menguak Citra Perempuan dalam Layar Terkembang*. Bandung: Katarsis
- Sugihastuti & Suharto. 2010. *Kritik Sastra Feminis, Teori dan Aplikasinya*. (Cetakan III). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Suki Ali, et all (ed). 2000. *Global Feminist Politics; Identities in Changing World*, New York: Routledge,
- Sukidi. 2001. Spiritualitas Feminis dalam Gerakan New Age. *Jurnal Perempuan* No. 20. Th. 2001. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Suryadi, Ace. 2009. *Mewujudkan Masyarakat Pembelajar konsep, kebijakan dan Implementasi*. Bandung: Widya Aksara Press
- Susilaningsih dan Agus M. Najib (ed), 2004. *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga dan McGill.
- Susilo, Suko dkk. 2003. *Sosiologi Politik*. Surabaya: Yayasan Kampusina.
- The New London Group. 1996. A Pedagogy of Multiliteracies Designing Social Future. Accesed 17/03. <http://www.newliteracies.com.au/what-are-new-literacies/?138/>
- Tickner, J. Ann. 1992. *Gender in International Relations*. Washington DC: Columbia University Press
- Titscher, S. et. al. 2007. Metode Analisis Teks dan Wacana (Terjemahan Gazali, dkk). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Toha, D. A. 2014. Diakses pada 26 Agustus 2014, dari <http://www.dudung.net/quran-online/indonesia/33>
- Umar, Nasaruddin. 2010. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al'Quran*. Jakarta: Dian Rakyat.

- Umar, Nasaruddin, 2012. Perspektif Gender Dalam Islam", dalam Jurnal Pemikiran Islam Paramadina. Vol. 1 no. 2, edisi Juli-Desember,
- UNESCO, 2005. *Education for All: Literacy for Life*. Paris: Graphoprint
- UN Women (dalam http://wikipedia.org/wiki/UN_Women, diakses pada 9 Maret 2016).
- UN Women (22 September 2014). "Press release: UN Women Goodwill Ambassador Emma Watson calls out to men and boys to join HeForShe campaign". UN Women. Retrieved 22 September 2014.
- "U.N. Women's Rights Group Seeks Men's Support" NY Times. NY Times. Retrieved 7 March 2015. http://www.nytimes.com/2014/03/07/business/media/un-campaign-asks-men-to-support-womens-rights.html?_r=0 <ref>
- Watson, Emma (22 September 2014). "Emma Watson: Gender equality is your issue too". Retrieved 22 September 2014.
- Woman's Support Project II (2001). *Lokakarya Analisis Gender (Rangkuman 4 lokakarya)*. Laporan kegiatan oleh TPP2W Sulawesi Selatan bekerja sama Woman's Support Project II.
- Wagner, Linda. 2000. *Three Lives*. Macmillan: Palgrave
- Westcott, Lucy. Ambassador". Newsweek. Newsweek. Retrieved 26 March 2015.
- World Bank Publication. 2000. *Engendering Development: Through Gender Equality in Rights, Resources and Voices*. (Terj).
- Wulan. 2009. Perkembangan Psikologi Anak (<http://www.psikologizone.com>)
- Young, Cathy (26 September 2014). "Contributing Editor". Time. Retrieved 26 March 2015
- Yulianeta. 2002. "Pengoperasian Ideologi Gender dalam Novel Saman." Tesis tidak dipublikasikan pada PPs UNM.

Yurni Satria, *Mengenali dan Memahami Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan*, Makalah: tidak diterbitkan

Zaitunah Subhan. 1999. *Tafsir Kebencian (Studi Bias Gender dalam Tafsir Quran)*. Yogyakarta: LKiS

Zayd, N. H. A. dkk. 2003. *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam* <http://www.berberita.com/2015/11/pengertian-tujuan-target-sdgs-mengantikan-mdgs.html>

<http://www.mitrakesmas.com/2016/03/17-goals-sdgs-tujuan-sdgs-pengganti-mdgs.html>

<https://beritagar.id/artikel/berita/tujuh-alasan-sdgs-lebih-baik-dari-mdgs>.

<https://heforshe.pwc.com/news>

<http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/emma-watson-gender-equality-is-your-issue-too#sthash.9I6JpkNU.dpuf>

[HeForShe.org:<http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/emma-watson-gender-equality-is-your-issue-too#sthash.9I6JpkNU.dpuf>](http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/emma-watson-gender-equality-is-your-issue-too#sthash.9I6JpkNU.dpuf)

<http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/emma-watson-gender-equality-is-your-issue-too#sthash.9I6JpkNU.dpuf>

INDEKS

A

- Acceptance*, 61
Accession, 61
Achieve universal primary education, 65
Achieved Status, 108
Additive Approach, 195
A'dam Syahrul, 196
Adian, Husaini
Affirmative action, 69, 197, 201
Agenda Pembangunan Gender, 140
Aisyah, Nenden Lilis, 90
Akhir, D. J, 151.
Akses, 23, 27, 37, 170
Akses pendidikan, 128
Alice Walker, 40
Alisyahbana, 83
All men and women are created equal, 80
Alur Kerja PUG
Analisis gender, 64, 65, 73
Anderson, 68
Andreasen, 37
Angela Y Davis, 40
Angulo, Natalia
Ann Koedt, 38
Antara
Anti Pornografi, 206
Anti Pornoaksi, 206
Appointif, 200
Approval, 61
Equality in diversity, 109

Aristoteles, 46, 78
Arivia, Gadis., 35, 36, 38, 39, 40, 205
Asean and Pasific Council (ASPAC), 112
Ascribed Status., 108
Assigned Status, 108
Audre Lorde, 40
A World Free of Violence Against, 144

B

Bacaan berjenjang, 26, 29, 30
Baidan Nashruddin, 182
Beasley, Chris
Beban ganda, 95, 98, 101
Beban kerja, 99, 115
Beijing Declaration and Platform for Action, 63, 140
Berwawasan gender, 106, 107
Betty Friedan, 38, 82
Beyond Power, 38
Bias Gender, 30, 38, 55, 103, 104, 105, 106, 169, 171, 172, 181, 186, 192, 193, 200
Borjuis, 69
Bowman, Henry A, 48, 49
Broadening base, 207
Budaya, 30, 223
Budaya Etnis, 86, 87
Budaya literasi, 3, 4, 14
Budaya mencerdaskan bangsa, 6, 14
Budaya patriarki, 200, 210
Budaya politik, 225
Budiman, Arief., 78
Buta aksara, 23

C

Caleg perempuan, 221
Caleg Perempuan yang berkualitas, 221

Capacity building, 129, 135
Caplan, 94
Contributions approach, 195
CEDAW, 43, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 136, 142, 200
Charlotte Bunch, 40, 41
Chivalry, 167
Chrisler, 41
Civil Society Organization (CSO)., 151
Connell, 54
Cooper, J.D.
Culler, Jonathan, 82
crafting democracy, 207
Cudd, 37

D

Danim,Sudarwan, 131
Darma, Yoce Aliah, 32, 85, 104, 108
Dasar Filosofi *UN Women*, 138
Data Pembuka Wawasan, 125
David Lockwood, 69
Division for the Advancement of Women (DAW), 137
DAW UN WOMAN, 137
Daya literasi, 29
Deklarasi HAM, 24, 170
Deklarasi MDGs, 148, 149
Demokrasi, 200, 222
Demokrasi Terpimpin, 204
Declaration on the Elimination of Women (DEVAW), 142
Develop a global partnership for development, 65
Dialog, 199
direct democracy, 207
Dimensi literasi, 6
Di Yanni, Robert
Diskriminasi, 58, 59, 60, 61, 95, 96, 97, 110, 113, 114, 131, 141, 181, 191, 192

Diskriminasi gender, 95, 96, 97, 99, 102, 112, 113, 141, 170
Diskriminatif, 57, 88
disparsitas fungsi, 197
Djajanegara, Soenardjati, 79, 80, 82
Doktrin gereja, 33, 34
domestic sphere, 71
domination rape, 44
Double burden, 99, 115
dulang tinande, 14
Dominasi, 181, 204
Dunia politik, 210
Dunia politik praktis, 210

E

Echols and Shadily, 66
Education for All, 131, 188
Egalitarian, 69
Egosentrisme, 39
Ekofeminisme
Eksploitasi, 141
Elektif, 200
Elizabeth Cady Stanton, 37
Elias, 49
Elliott, Stuart, 180
'Emma Watson, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166
Emma, Herman, 161
Emansipasi, 86, 110, 111
Ensure environmental sustainability, 65
Environmental Development, 160
Equal rights movement, 79
Era global, 94
Era reformasi, 204, 206
Eradicate extreme poverty and hunger, 65
Eriyanto
Etika, 93

Eurocentrik, 146

F

Fakih, Mansour, 52, 74, 95, 174
Falsafah liberal, 46
Familia, 46, 79
Faruk, H.T, 81
Fairchild, Caroline
Farida, Anik, 205
Feminin, 78
Feminis, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 76, 78, 80, 81, 82, 86, 164, 166
Feminis radikal, 41, 51
Feminisme, 32, 36, 37, 40, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 162
Feminisme Eksistensialisme, 39
Feminisme Gelombang Pertama, 37
Feminisme Gelombang Kedua, 38, 39
Feminisme Gelombang Ketiga, 39
Feminisme Global, 40
Feminisme Liberal, 37, 51, 143
Feminisme Marxis-Sosialis
feminisme moderat, 82
Feminisme Multikultural, 40
Feminisme Postmodern, 39, 146
Feminisme Psikoanalisis, 39
Feminisme Radikal, 38
Feminitas, 67, 68, 101
frame pluralisme demokratis, 208
Francis Bacon, 34
Fransiska, Eka Putry
Freebody, P, 28
Freire, Paulo, 104, 174
Friederich Engels, 38
Freud, 39, 47, 69, 70
fundamentalisme agama, 206

G

- Gender, 14, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 36, 37, 43, 52, 53, 57, 64, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 94
95, 108, 114, 117, 169, 170
Gender Bender, 75
Gender Dysphora, 75
Gender-related Development Index (GDI), 113
Gender Empowerment Measurement (GEM), 113
Gender equality, 36
Gender inequality, 53
Gender Mainstraining, 119
Gender Reas'signment, 76
gender segregation, 171
Gerakan emansipasi, 51
Gerakan feminis, 32, 43, 205
Gerakan feminism, 47, 51, 81
Gerakan gender, 43,
Gerakan *New Age Perempuan*, 213
Gerakan Perempuan, 35, 36, 43, 51, 206, 207, 208
globalisasi-neoliberal, 205
Guest, Katy
Gipayana, Muhana
Grant, Rebecca, 55

H

- Hafidz, Wardah, 87
Hak Azasi manusia (HAM), 141, 142, 163, 170, 174, 202,
Hak Asasi Manusia dan Perempuan, 141
Hak Perempuan Dalam Pemilu, 217
Hak Politik Perempuan Dalam Pemilu, 2191216
Hari Perempuan Internasional, 142, 160, 165
Harriet Taylor, 38
Heddy Shri dan Ahimsha Putra, 74
He For She , 157, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167
HeForShe IMPACT 10x10x10, 159, 160

Helene Cixious, 39
Hidden curriculum, 196, 197
Hilary Clinton, 163
Hisyam Zaini, 198
Hornby, 12
Homoseksual, 41
Human Development, 160
Human Developement Index, 113,
Human Development Report, 113
Human Trafficking, 100
Humm, Maggie, 69, 80
Hurlock, 11
Husaini,
Husnul, Hkotimah

I

IAEA, 8
Ideologi Gender, 84, 86, 87, 88, 89
Identitas Gender, 84, 85
Ichromi
Ihromi
Illich, Ivan
imperatively coordinate association, 72
Implementasi PUG, 128
Improve maternal health, 65
Indonesian Peoples Alliance (IPA), 149
Inferior, 79, 87
inferior complex, 70
inferiorisme perempuan, 87,
Inisiatif DAMPAK *HeForShe*, 159
*International Research and Training Institute for the
Advancement of Women (INSTRAW)*, 137
Integrasi, 179, 188
Ismail, Nurjanah, 13
Iriantara, 12

- Isu gender, 94
Isu kesetaraan gender, 200

J

- Jamal, Ahmad Muhamad, 42
Jean Paul Satre, 39
John Stuart Mill, 38
Julia Kristeva, 40

K

- Karl Marx, 69
Kate Millet, 38
Kaum esensialis, 146
KDRT, 14
KNAKP, 14
Kamil, 133
Kampanye *HeForShe*, 158, 161, 162, 165, 166
kanca wingking, 14, 87
Kartini, 14, 51, 88, 110, 111, 112
Kathleen Newland, 55
Keadilan gender, 63, 64, 90, 91, 108, 109, 110, 125, 126, 129, 169, 179, 181, 185, 192
Keadilan gender dalam pendidikan, 179
Kearifan local, 5
Keberaksaraan, 3, 8
Kegiatan *reading aloud*, 1
Kegiatan mendongeng, 1
Kekerasan (Represi), 114, 179
Kekerasan gender, 14, 63, 98, 145
kekerasan berbasis gender, 144, 145,
keluarga berwawasan gender, 188
Kemampuan Berwacana Gender, 197
Kerangka kerja kurikulum berwawasan gender, 195
kesadaran gender, 145
Kesenjangan gender, 118, 125, 192, 200

- Kesetaraan gender, 15, 27, 36, 43, 64, 65, 90, 91, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 116, 123, 125, 136, 139, 141, 148, 152, 157, 159, 162, 181, 185, 192
- Kesetaraan dan keadilan gender (KKG), 126, 188, 215
- kesetaraan dalam menuntut pendidikan, 193
- Kesetaraan pendidikan bagi gender, 194
- Keterlibatan perempuan dalam pemilu, 214
- keterwakilan perempuan dalam politik, 223
- Ketidaksetaraan gender, 53, 64, 100, 141, 160
- Ketidaksetaraan dan kemiskinan, 156
- Ketidakadilan gender, 15, 53, 64, 95, 96, 99, 100, 102, 110, 112, 200
- Ketimpangan gender, 88, 95, 100, 117, 135
- Kinlaw, 90
- Kirsch and Jungeblut, 1
- Komite CEDAW:
- kompleksitas kastrasi, 39
- komponen kurikulum, 180
- Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), 64, 135, 188
- Konfrensi, 63
- Konsep gender, 51, 54, 66, 73, 75, 77, 95, 98, 215
- Konsep PUG, 122
- Konsep SDGs, 151
- konstitusi keterwakilan perempuan, 219
- Konvensi, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 80
- Konvensi ILO, 112
- Konvensi Perempuan, 57, 58, 59, 60
- Kesenjangan gender, 181
- Keterlibatan perempuan dalam politik, 222
- Kualitas pendidikan, 170
- Kultur Jawa, 14
- Kultur Sunda, 14
- Kuota perempuan 30% pada pemilu, 218, 224
- Kurikulum, 123, 180, 184, 191
- Kurikulum berbasis gender, 192

Kurikulum berwawasan gender, 133, 191, 192, 197
Kurikulum yang Berkeadilan Gender, 182

L

Legitimasi, 204
Legitimasi politik, 205
Lesbian, 41,
Liberalisasi politik, 203, 206
Liberty, equality, dan fraternity, 35
Linda Nicholson, 40
Lips, Hilary M, 36, 37, 74, 76
Literasi, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Literasi bahasa, 7
Literacy for life, 25, 28
Literasi gender, 6, 10, 12
Literasi kontemporer, 1
Literasi perempuan, 11
Literat, 2, 25
London group, 2
Louise J. P
Lucas, 44, 45, 48
Luce Irigaray, 40
Luke, A, 28

M

madrasatul ula lil aulad, 15
Machiavelli, 69
male backlash, 69
manajemen pendidikan, 187
manfaat, 23
Mararosa Dalla Costa, 38
Margareth Benston, 38
Marginalisasi , 95, 96, 97, 112
Maria Mies, 40
Marianne W. J.

- Marilyn French, 38
Marshall, Rosalind K, 47, 50
Mary Daly, 38
Mary Wollstonecraft, 37
Maskulinitas, 67, 68, 192
Masyarakat, literasi, 8
Masyarakat praliterasi, 8
Masyarakat posliterasi, 8
Maududi, 33, 34
McDonald, Soraya Nadia
McKay, John P, 33
Millenium Development Goals (MDGs), 65, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Megawangi, Ratna
Melek aksara, 8
Melliana, S. A
Mill, 46
Miriam Budihardjo, 212
Montagu Ashley, 46, 47
Morgenthau, Hans, 55
Mosse, J.C, 67
Muawanah, S, 23
Mulia, Siti Musdah, 205
Multiliterasi, 9
Murniati, Nunuk P, 86

N

- Najwa Sa'idah, 203
Nugroho, 130
Nyamayaro, 165

O

- Oakley, Ann, 94
Orde Baru, 203, 204

Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI), 136
O'Sullivan, Tom, 2
otoriterisme politik Negara, 206
Overt curriculum, 196, 197

P

Paham pluralisme demokratis, 205
Paham relativisme, 40, 41
Palmer, Ewan
pandemi global, 141
paradigma gender, 146
Paradigma konservatif, 173
Paradigma Kritis, 173, 174
Paradigma Liberal, 173
Paradigma literasi, 30
paradigma pendidikan, 173
Parawansa, Khofifah Indar
Partisipasi, 4, 23, 50, 170, 187
Partisipasi pendidikan, 185, 186
partisipasi politik praktis, 211
Patriarki, 40, 58, 85, 101, 116, 204
Peka gender, 107
Pelabelan negatif, 98
Pelatihan Sensitivitas Gender, 197
Pemahaman literasi, 27, 31
Pembelajaran yang berperspektif gender, 197.
Pemberdayaan, 90, 91, 92
Pemberdayaan Perempuan, 65, 90, 91, 125, 126, 127, 136, 139,
140, 148, 159, 180
Pemberdayaan gender, 125
Pemenuhan Kuota Caleg Perempuan, 220
Pemilu, 210
pendekatan andragogi, 92
Pendekatan audio lingual, 7

Pendekatan holistic, 198
Pendekatan incremental, 92
Pendekatan kognitif, 8
Pendekatan kompetensi komunikasi, 8
Pendekatan komprehensif rasional, 92
Pendekatan kultural, 4, 7
Pendekatan literasi, 8,
Pendekatan struktural, 7
Pendidikan. 22, 23, 24, 27, 28, 37, 107, 123, 128, 131, 170, 173, 179
Pendidikan adil gender, 188
pendidikan adil untuk anak, 188
Pendidikan Berwawasan Gender, 25, 129, 179, 186, 187, 188
Pendidikan formal, 169
Pendidikan gender, 184
Pendidikan literasi, 25, 26, 27
Pendidikan peka gender, 27, 184
Pendidikan politik, 201, 210
Pendidikan untuk semua, 131
Pengarusutamaan gender (PUG), 64, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 125, 126, 128, 132, 133, 134, 135, 145, 180, 181, 201, 202, 215
Pengajaran, 24
Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 141
penis envy, 69
Peran Gender, 72, 85, 86, 95, 98. 101
Peran ganda, 99
Peran perempuan, 113, 205
Peran Perempuan Dalam Legislatif, 223
Peran perempuan dalam pendidikan, 194
Perbedaan gender, 94, 95
Perempuan, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 65, 69

- 71, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 93, 95, 98, 99, 100, 101, 103, 110, 111, 112, 115, 117, 122, 124, 127, 143, 144, 163, 169, 183, 184, 201, 202, 223
- Perempuan Barat, 43
- Pergerakan nasional, 52
- Perjuangan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Politik, 208
- Perspektif gender, 54, 55, 56, 191, 220
- PISA, 9
- Phallocentric*, 47
- Phallogosentris*, 40
- Pluralistic*, 57, 58
- Politik, 202
- Political will*, 204
- Politik gender, 89
- Polusi, 65
- Posmoderenisme, 40
- potensi pendidikan untuk perempuan, 193
- Prabasmoro, 11,
- practical gender needs*, 185
- Prinsip literasi, 9
- Prinsip berbasis literasi
- Prinsip Pembelajaran, 197
- Prinsip SDG's, 153
- Problematika gender, 170
- Problematika pendidikan, 169
- Profil Gender, 84, 85
- Proletar, 69
- Promote gender equality and empower women*, 65
- Proses demokrasi, 210, 220
- Proses pendidikan, 170
- Proses pendidikan politik, 201
- Psikoseksual Oedipus, 39
- PUG dalam pemberdayaan perempuan, 126
- PUSKAPOL UI, 216

R

- crafting democracy*, 207
Ranah politik, 212
Randall Collins, 69
Randi & Rian, 91, 92
Ratifikasi, 58, 59, 60, 61, 62
ratification), 61
Ratu Victoria, 48
Rebecca Grant, 55
Reduce child mortality, 65
Reformasi politik, 203
Regulasi, 223
Reiter, 44, 45
Rekayasa literasi, 10
Relasi gender, 54, 73, 85, 86, 95, 144, 146
Relevansi pendidikan, 187
Rosenell, 143,
Representasi politik perempuan, 203, 207, 208
Responsif gender, 185, 187
Revolusi Perancis, 35
Revolusi puritan, 35
Ruang domestik, 86
Ruang publik, 86

S

- Saiful, 132
Santrock, 21
Saptari, R. & Holzner, B, 87
Sastra Feminisme, 81
Savitri, I1
Sustainable Development Goals (SDGs), 140, 141, 147, 148, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Sector domestic, 170
Sector public, 170
Sejourner Truth, 37

- Selden, 32, 78, 79
Selma James, 38
Sheila, 35, 36, 37
Shulamith Firestone, 38
Silaturahmi, 5
Silawati, Hartian
Simbisey, Yohana Suzana
Simone de Beauvoir, 38, 39, 40
Sinaga, Betty D
Siregar, Siti Ruhana
Siswanto, 27
Sosialisasi, 4
Social Action Approach, 196
Sosialisasi ideologi nilai peran gender, 100.
Social Economic Development, 160
Slavian, R.E
Status social, 108
Stereotipe, 44, 84, 95, 98, 114
Stereotipe gender, 140, 164, 170
Subadio, 50
Sugihastuti, 79, 81, 82
Suki Ali, et all, 43
Status social
Steans, Jill, 54
Subordinasi, 70, 81, 95, 97, 113, 191
Sufficient, 207
Sugihastuti, 80, 81, 82
Soekanto Soerjono, 210
Suryadi, Ace, 133, 134, 135
Susan Bordo, 40
Susan Brownmiller, 40
Susilaningsih, 180, 195, 196
swarga nunut neraka katut, 87

T

- Taken for granted*, 86, 183
Tantangan perempuan, 205
Target MDGs dan SDGs di Indonesia, 156
TBM, 5
Teori Adaptasi Awal, 70
Teori equilibrium, 66, 70
Teori feminis, 143
Teori Fungsionalis Struktural, 68, 71
Teori gender, 66
Teori natur, 66, 68
Teori Nurtur, 66, 68
Teori politik, 212
Teori Psikoanalisis, 68, 69
Teori teknik lingkungan, 71
Teori Sistem Sosial, 71
Teori Konflik Sosial, 68, 72
The New London Group, 2
the glory of suffering, 101
Thomas Aquinas, 33
Tickner, J. Ann, 55
Titscher, S
Toha, D. A
Trafiking, 94, 99, 100, 141
Transformational Approach, 196
Transvestite, 37
Tujuan SDGs, 152

U

- Umar, Nasaruddin, 70, 72, 76, 85
UNESCO, 25, 28, 30, 66
United Nations Children's Fund (UNICEF), 136, 138
United Nations Development Programme (UNDP), 136, 138
United Nations Population Fund (UNFPA), 136, 138

- United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)*, 136, 137
United Nation Women (UN Women), 136, 137, 138, 139, 140, 157, 158, 159
Universal Declaration of Human Rights, 142

V

- Violence*
voluntarily discrimination, 171

W

- Wagner, Linda, 1
Watson galvanis, 165
Westcott, Lucy
Women's Great Rebellion, 80
women liberation movement, 79
Woman Movement
Woman's Support Project
World Bank Publication, 207
Wulan
Wilson, H.T., 66

Y

- Yohanna Suzana Simbisey, 151
Young, Cathy
Yulianeta, 70, 71, 87
Yurni Satria

Z

- Zaitunah Subhan, 124
Zaman Neolitikum, 45
zaman Renaissance, 49
Zayd, N. H. A, 13

GLOSARIUM

Additive Approach: dalam pendekatan ini variasi dan perspektif lain ditambahkan pada kurikulum tanpa merubah struktur kurikulum yang ada secara umum. Pemikiran dan ide-ide baru mengenai gender dapat dimasukkan dan dikaitkan dengan kurikulum yang ada.

Alur Kerja PUG: Analisis Gender, dalam perencanaan yang responsif gender, terdapat tiga tahap utama, yaitu (1) melakukan analisis kebijakan gender, (2) memformulasikan kebijakan yang responsif gender, dan (3) menyusun rencana aksi kebijakan/program/proyek/kegiatan yang responsif gender

Ascribed Status: adalah tipe status yang didapat sejak lahir seperti jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, usia, dan lain sebagainya.

Achieved Status: adalah status sosial yang didapat seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya. Contoh achieved status yaitu seperti harta kekayaan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dll.

Assigned Status: adalah status sosial yang diperoleh seseorang di dalam lingkungan masyarakat yang bukan didapat sejak lahir tetapi diberikan karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Contohnya seperti seseorang yang dijadikan kepala suku, ketua adat, sesepuh, dan sebagainya.

Beban Kerja yang Panjang dan Lebih Banyak (*double burden*); adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kalamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan laki-laki, dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Berbagai observasi, menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Bias Gender: pelabelan atau stereotype pada perempuan dan laki-laki menunjukkan adanya ketimpangan atau bias gender yang sesungguhnya merugikan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Membicarakan gender tidak berarti membicarakan hal yang menyangkut perempuan saja. Gender dimaksudkan sebagai pembagian sifat, peran, kedudukan, dan tugas laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan norma, adat kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat.

Budaya: adalah sebuah proses berpikir, yang dipengaruhi oleh agama (keyakinan hati), politik (aturan), bahasa (komunikasi), pakaian (perlindungan diri), bangunan (karya), seni (rasa). Budaya itu juga merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang dimiliki manusia.

Budaya literasi: adalah melakukan kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca, menulis yang pada akhirnya apa yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.

Contributions approach kurikulum berwawasan gender: adalah pendekatan yang dilakukan oleh sistem dan

kebijakan yang ada pada lembaga pendidikan melalui kurikulum. Masalah-masalah gender telah dimasukkan secara eksplisit dalam kurikulum yang ada.

CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*): Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah disahkan/diratifikasi Indonesia dengan UU Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29)

Diskriminasi: yaitu suatu tindakan, prilaku atau anggapan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang individu maupun kelompok terhadap individu atau kelompok lain. Diskriminasi merupakan suatu tindakan yang dapat merampas hak orang lain termasuk hak seorang perempuan maupun laki-laki.

Ekofeminisme: Ekofeminisme adalah teori yang timbul karena ketidakpuasan akan arah perkembangan ekologi yang semakin buruk. Ekofeminisme menganalisis hubungan antara penindasan patriarkat terhadap perempuan dan dominasi manusia pada *non-human nature* (sifat non-manusiawi). Ekofeminisme ingin mengembalikan identitas perempuan dengan alam, yang merupakan usaha untuk membebaskan perempuan dari perangkap sistem maskulin dan membuat perempuan menjadi bimbang akan perannya.

Emansipasi artinya memberikan hak yang sepatutnya diberikan kepada orang atau sekumpulan orang di mana hak tersebut sebelumnya dirampas atau diabaikan dari mereka. Refleksi emansipasi yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini adalah untuk membawa perubahan besar perempuan Indonesia, yaitu perjuangan menuntut hak pendidikan bagi perempuan.

Feminisme: adalah faham perempuan yang berupaya memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sebagai kelas sosial.

Feminisme Liberal: Feminisme liberal adalah salah satu aliran atau bentuk feminism yang mengusung adanya persamaan hak untuk perempuan, merupakan jenis gerakan yang mencoba memperkuat kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat, yang berusaha memasukkan ide bahwa perempuan merupakan makhluk yang sama dengan pria, dan mempunyai hak yang sama pula dengan pria. Asumsi dasar feminism liberal berdasarkan pada pandangan tentang kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*).

Feminisme Marxis-Sosialis: Feminisme Marxis-Sosialis adalah merupakan dua kelompok pemikiran yang bertujuan mengadakan restrukturisasi masyarakat, terkait dengan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh sistem kapitalisme yang menimbulkan kelas-kelas dan *division of labour*, termasuk di dalam keluarga. Feminis Marxis-Sosialis percaya bahwa opresi terhadap perempuan bukanlah hasil tindakan sengaja dari satu individu, melainkan produk dari struktur politik, sosial, dan ekonomi tempat individu tersebut hidup.

Feminisme Radikal: Feminisme radikal lahir di Barat dan dikategorikan sebagai gerakan femiris gelombang kedua, yang bermula pada sekitar akhir tahun 1960 dan tumbuh menjadi kuat pada tahun 1970. Teori feminism radikal, muncul karena adanya peran seksisme atau dominasi sosial berdasarkan jenis kelamin di Barat yang terjadi pada tahun 60-an, dengan menda-

sarkan pahamnya pada strukturalisme politik dan dibangun berdasarkan asumsi bahwa hubungan antar manusia maupun antar kelompok pada dasarnya merupakan hubungan saling menguasai dan mengendalikan. Adapun konsep yang menjadi dasar pemikiran feminis radikal adalah patriarkat, keluarga dan perempuan sebagai subordinasi.

Feminisme Psikoanalisa: Penjelasan mendasar penindasan perempuan terletak pada psyche perempuan, cara perempuan berpikir

Feminisme Eksistensialisme: Analisis ketertindasan perempuan karena dianggap sebagai "other"

Feminisme Postmodern: Aliran feminism ini, berkaitan dengan pemikiran postmodernisme, yang pada awalnya berkembang di Negara Perancis, karena pendukungnya kebanyakan adalah warga negara Perancis atau perempuan yang tinggal di perancis, terutama Paris. Pemikiran postmodernisme, secara garis besar menekankan pada konsep yang beranggapan bahwa perempuan bisa mengekspresikan dirinya sebagai perempuan, tanpa terjerat ke dalam konsep sentral-marginal ataupun superior-inferior, karena memang pada dasarnya perempuan berbeda dengan laki-laki.

Feminisme Multikultural: Penindasan terhadap perempuan tidak dapat hanya dijelaskan lewat patriarki tetapi ada keterhubungan masalah dengan ras, etnisitas, dsb, (interlocking system).

Gender Bender: adalah seseorang yang melakukan sesuatu seperti perbuatan lawan jenis. Tindakan laki-laki yang

menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan yang melakukan tindakan seperti tindakan laki-laki.

Gender Dysphora (dalam dunia kedokteran): adalah seseorang yang merasa bahwa ketika lahir dia memiliki organ kemaluan yang salah. Jadi seseorang merasa bahwa dia harusnya laki-laki tetapi memiliki kemaluan perempuan.

Gender Reas'signment.: adalah tindakan merubah anggota tubuh dengan cara operasi sehingga memiliki anggota tubuh lawan jenis dan nampak seperti lawan jenis.

Gerakan emansipasi: adalah gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan Indonesia yang diartikan sebagai gerakan pembebasan kaum perempuan dari ketergantungan pada orang lain, terutama pada kaum laki-laki. Tujuan gerakan itu agar dapat hidup mandiri, menggunakan hak-haknya seperti halnya yang berlaku pada kaum laki-laki, sehingga mereka tidak lagi menyangdang sebutan "warga negara kelas dua". Dalam perjuangan menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan,

He For She yang penulisannya menjadi *HeForShe* adalah kampanye solidaritas untuk pemberdayaan perempuan yang diprakarsai oleh *United Nation Women* (Perempuan PBB). Tujuannya adalah untuk melibatkan laki-laki dan anak laki-laki sebagai agen perubahan dalam pencapaian kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, dengan mendorong mereka untuk mengambil tindakan terhadap ketidaksetaraan yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan.

Hidden curriculum: adalah bangunan kurikulum yang tidak berbasis gender disebabkan oleh dispareitas fungsi antara *hidden curriculum* dengan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku pendidikan. Hal ini terjadi karena banyak pelaku pendidikan, termasuk guru dan dosen tidak memahami muatan tersembunyi dari kurikulum yang mereka pergunakan sehingga hal tersebut mempengaruhi aspek perilaku yang mereka lakukan sehari-hari.

Isu-isu gender: isu gender di era global adalah masalah penindasan dan eksploitasi, kekerasan, dan persamaan hak dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Masalah yang sering muncul adalah perdagangan perempuan (trafik), yang umumnya timbul dari berbagai faktor yang saling terkait, antara lain dampak negatif dari proses urbanisasi, relatif tingginya angka kemiskinan, dan pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan.

Ideologi Gender dan Budaya Etnis: Budaya etnis merupakan salah satu faktor pelestari ideologi gender. Dalam masyarakat Jawa, yang budayanya terkenal dengan sistem patriarki yang melahirkan ungkapan-ungkapan yang dianggap menyiratkan inferiorisme perempuan, seperti *kanca wingking, swarga nunut neraka katut* (perempuan hanya mengurus dapur, perempuan hanya bergantung pada suami) menegaskan bahwa perempuan tampak menduduki struktur bawah (inferior).

Implementasi PUG: merupakan suatu pendekatan pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan pengalaman kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam rancangan, rencana, pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi kebijakan program, proyek, peraturan dan anggaran dalam bidang politik ekonomi, sosial, budaya, dan peraturan hukum dan kemasayarakatan.

Keadilan gender: adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Keadilan gender dalam pendidikan

- (1) memberlakukan keadilan gender dalam pendidikan dan menghilangkan perbedaan pada peserta didik,
- (2) mengupayakan keadilan gender di kalangan staf dan pimpinan, dan
- (3) meredam sebab-sebab terjadinya kekerasan dan diskriminasi melalui materi pengetahuan yang diajarkan, proses pembelajaran yang dilakukan, dan menentang segala ide dan pemikiran yang mengandung stereotipe negatif.

Kekerasan (Represi): Berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan merupakan terjemahan dari *violence* artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan tetapi juga bersifat nonfisik seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik.

Kesetaraan gender: berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta

hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Komite CEDAW: adalah suatu Komite PBB yang bertugas untuk melakukan kajian dan penilaian tentang implementasi Konvensi di Negara-negara Peserta Konvensi (Pasal 17 Konvensi)

Konsep gender: adalah konsep hubungan sosial yang membedakan fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan. Dengan demikian gender sebagai suatu konsep merupakan hasil pemikiran manusia atau rekayasa manusia, dibentuk oleh masyarakat sehingga bersifat dinamis dapat berbeda karena perbedaan adat istiadat, budaya, agama, sistem nilai dari bangsa, masyarakat, dan suku bangsa tertentu. Selain itu gender dapat berubah karena perjalanan sejarah, perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya, atau karena kemajuan pembangunan. Dengan demikian gender tidak bersifat universal dan tidak berlaku secara umum, akan tetapi bersifat situasional masyarakatnya.

Kampanye *HeForShe*: Sebuah acara khusus diadakan untuk memulai kampanye *HeForShe* pada 20 September 2014

di Markas Besar PBB di New York. Hal ini diselenggarakan oleh *UN Women Goodwill Ambassador* Emma Watson. Emma Watson berbicara mengenai feminism dan ajakan untuk melibatkan laki-laki dan anak laki-laki dalam mempromosikan kesetaraan gender. Kampanye ini santer beredar melalui media social

Kerangka Kerja Kurikulum Berwawasan Gender: adalah strategi dan kerangka kerja yang diusulkan untuk memasukkan materi-materi gender dalam sebuah kurikulum,

Kurikulum berwawasan gender: adalah kurikulum yang merupakan program untuk melaksanakan perspektif gender dalam pendidikan.

Literasi: adalah kemampuan baca tulis atau keberaksaraan, yaitu kemampuan menulis dan membaca. Tapi seiring dengan perkembangan zaman makna dari sebuah literasi pun berubah dan berkembang. Jadi, literasi adalah kemampuan membaca dan menulis serta berbicara. Bahasa juga membantu menyelesaikan masalah pada level pemahaman dan kecakapan yang kelak dibutuhkan untuk pekerjaan dan kegiatan social

Literasi gender: adalah melek gender, dalam arti memahami seluk beluk mengenai kegenderan. Literasi gender membahas tentang status perempuan dari justifikasi negatif yang diproduksi oleh kultur sosial, merekonstruksi realitas perspektif gender dan melakukan dekonstruksi terhadap diskursus mapan tentang perempuan.

Marginalisasi: adalah bentuk diskriminasi gender berupa peminggiran atau proses penyisihan terhadap perem-

puan, yang terjadi di negara berkembang pada umumnya. Pemunggiran terjadi di rumah, tempat kerja, masyarakat, bahkan negara. Pemiskinan atas perempuan maupun laki-laki yang disebabkan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender. Perempuan dipinggirkan dari berbagai jenis kegiatan pertanian dan industri yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki laki-laki. Selain itu perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang umumnya dikerjakan oleh tenaga laki-laki.

Masyarakat praliterasi: masyarakat yang hidup dalam tradisi lisan dan sulit mengakses media seperti buku, TV, internet dan lain-lain. Kalaupun mereka dapat mengakses tetapi tidak bisa mencernanya dengan mudah.

Masyarakat posliterasi: masyarakat yang memiliki akses buku dan teknologi informasi dan audio visual.

MDGs: Millenium Development Goals (MDGs) adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintahan. Target yang tercakup dalam MDGs sangat beragam, mulai dari mengurangi kemiskinan dan kelaparan, menurunkan tingkat pendidikan dasar, mempromosikan kesamaan gender, mengurangi kematian ibu dan anak, mengatasi HIV/AIDS dan berbagai penyakit lainnya, serta memastikan kelestarian lingkungan hidup dan membentuk kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan. Pencapaian tujuan dalam MDGs memiliki target waktu hingga 2015. Agenda ke depan

untuk melanjutkan MDGs, dikembangkan suatu konsepsi dalam konteks kerangka/agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs).

Multiliterasi: multiliterasi merupakan cara untuk fokus dalam realitas tentang keterpahaman ragam lokal dan keterhubungan global. Di sini literasi berfungsi sebagai penghubung dengan negara-negara lain dalam berkomunikasi, berbahasa dsb.

Overt curriculum: adalah kurikulum yang sensitif gender yang bersifat eksplisit sehingga permasalahan-permasalahan gender dapat diungkap secara jelas.

Peran gender: merupakan hasil pelabelan yang akhirnya menjadi ekspektasi (harapan) sosial, dan sangat sulit untuk diadakan perubahan konsep karena sudah menjadi stereotype

Pemberdayaan Perempuan: Perempuan Indonesia masa kini tidak lagi diragukan untuk menjadi salah satu agen pemberdayaan dan sekaligus menjadi agen penegak HAM. Kajian pemberdayaan masyarakat saat ini sangat relevan dengan terjadinya transformasi sosial yang tidak hanya bersifat lokal dan regional, tetapi juga yang bersifat global. Pemberdayaan adalah suatu istilah yang luar biasa populernya saat ini. Istilah ini muncul dalam wacana perbincangan hampir di semua aspek kehidupan orang-orang modern, misalnya dalam perbincangan masalah ekonomi, sosial, politik, bahkan keagamaan, semua menggunakan jargon pemberdayaan.

Pendidikan dan gender: pendidikan bukan hanya dianggap dan dinyatakan sebagai sebuah unsur utama dalam upaya pencerdasan bangsa melainkan juga sebagai produk atau konstruksi sosial, maka dengan demikian pendidikan juga memiliki andil bagi terbentuknya relasi gender di masyarakat.

Pendidikan Berperspektif Gender: pendidikan harus bersikap kritis dan mengajak masyarakat sekolah dan masyarakat di sekitarnya untuk mentransformasikan praktik-praktik yang lebih berpihak kepada keadilan sesama, terutama keadilan bagi kaum perempuan.

Pendidikan literasi: literasi adalah hak dasar manusia sebagai bagian esensial dari hak pendidikan. Terpenuhinya hak literasi memungkinkan kita mengakses sains, pengetahuan teknologi, dan aturan hukum, serta mampu memanfaatkan kekayaan budaya dan daya guna media. Singkatnya, literasi menjadi poros upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Karena itu, ia merupakan sumbu pusaran pendidikan.

Pendidikan politik: merupakan salah satu aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada setiap individu maupun kelompok.

Pengarusutamaan gender (PUG) atau dalam istilah Inggeris *Gender Mainstreaming*: merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebi-

jakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Pengarusutamaan gender di bidang pendidikan: di antaranya: kurikulum, evaluasi, pengajar dan kelas, serta peran pimpinan.

Peran Gender dan Relasi Gender: peran gender bisa terungkap tentang bagaimana hubungan atau relasi gender terjadi, dan dialami oleh kaum perempuan dalam kehidupannya di masyarakat dan sudah menjadi keadaan yang wajar-wajar saja (*taken for granted*). Relasi gender terasa timpang, karena perempuan harus menghadapi tantangan-tantangan yang berasal dari luar diri perempuan itu sendiri. Ketimpangan-ketimpangan relasi gender terjadi karena adanya sikap-sikap dominasi laki-laki (patriarki). Keadaan ini terasa begitu saja berlaku di masyarakat yang harus ditaati. Hal ini membuat perempuan berada dalam kedudukan inferior dan laki-laki pada superior.

Prinsip berbasis literasi

1. Literasi adalah kecakapan hidup yang memungkinkan manusia berfungsi maksimal sebagai anggota masyarakat.
2. Literasi mencakup kemampuan reseptif dan produktif dalam upaya berwacana secara tulis maupun lisan.
3. Literasi adalah kemampuan memecahkan masalah. Mengajarkan siswa berpikir kritis dalam memecahkan masalah.
4. Literasi adalah refleksi penguasaan dan apresiasi budaya. Pendidikan mengajarkan pengetahuan yang dilandasi budaya.

5. Literasi adalah kegiatan refleksi. Pendidikan harus menyadari perbedaan aspek pengetahuan, merefleksikan pengetahuan ke dalam pengalamannya
6. Literasi adalah hasil kolaborasi antara penulis dan pembaca
7. Literasi adalah kegiatan melakukan interpretasi (mencari, menebak, dan membangun makna)

Prinsip Pembelajaran Dalam Kurikulum Berwawasan Gender:

- 1) Kesiapan Pendidik Dalam Kemampuan Berwacana Gender.
- 2) Sikap Pendidik Harus Adil Dan Setara dalam Memberlakukan Peserta Didik.
- 3) Tidak Mengajari atau Menggurui.
- 4) Terbuka.
- 5) Penggunaan Pendekatan Holistik Kurikulum Berwawasan Gender.
- 6) Dialog.

Profil Gender dan Identitas Gender: perempuan sebagai "empu" (yang dihormati) mempunyai kewajiban untuk berbuat sesuatu demi kesejahteraan kehidupan kaumnya. Karena itu profil perempuan harus bisa menumbuhkan transformasi sosial secara berbudaya dan manusiawi, apalagi profil perempuan itu dituntut untuk bisa mengkaji permasalahan yang sangat mendasar, berat, dan mengangkat kaum perempuan itu sendiri. Dalam pengalaman sejarah perempuan, kehidupannya sudah dijalankan sejak dini oleh ideologi gender masyarakat. Dalam hal ini perempuan harus berusaha menantang semua kelemahan yang telah dipolakan secara kultural dari awal kehidupannya.

SDGs: *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah kelanjutan dari global goals, yaitu *Melenium Development Goals (MDGs)* yang akan berakhir tahun 2015. Secara formal, SDGs didiskusikan pertama kali di *United Nations Conference on Sustainable Development* yang diadakan di Rio de Janeiro bulan Juni 2012.

Social Action Approach: pada pendekatan ini siswa diarahkan untuk membuat keputusan dan tindakan yang sensitif gender dalam aktivitas kehidupan mereka. Hal ini dilakukan dengan cara mendiskusikan dalam kelas mengenai konsep, peran dan relasi gender dalam masyarakat, seperti mengapa terjadi diskriminasi terhadap perempuan, apa yang menyebabkan adanya diskriminasi itu dan bagaimana keadaan dalam kelas apakah ada diskriminasi, dan bagaimana diskriminasi itu harus disikapi. Dengan pendekatan ini dimaksudkan supaya siswa dapat melakukan kritik sosial bahkan dapat melakukan perubahan social.

Stereotipe: Adalah penandaan atau cap yang sering bermakna negatif. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu stereotipe yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis kelamin perempuan, misalnya:

- a. Pekerjaan di rumah seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah diidentikkan dengan pekerjaan perempuan atau ibu rumah tangga.
- b. Laki laki sebagai pencari nafkah yang utama, harus diperlakukan dengan istimewa di dalam rumah tangga, misalnya yang berkaitan dengan makan.

Status sosial: adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakatnya. Orang yang

memiliki status sosial yang tinggi akan ditempatkan lebih tinggi dalam struktur masyarakat dibandingkan dengan orang yang status sosialnya rendah. Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis atau macam-macam status sosial serta jenis/macam stratifikasi yang ada dalam masyarakat luas:

Subordinasi: pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki.

Teori natur (Kodrat): mengemukakan bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang bias dipertukarkan, tetapi ada yang tak bisa dipertukarkan karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.

Teori Nurtur (Kebudayaan): Teori ini merupakan teori bantahan terhadap teori natur. Teori ini tidak menyetujui bahwa pemindahan posisi dan peran laki-laki dan perempuan merupakan kodrat alam, faktor biologis tidak menunjukkan keunggulan laki-laki terhadap perempuan, pemilahan sekaligus pengunggulan terhadap laki-laki disebabkan karena elaborasi kebudayaan terhadap biologis masing-masing (Sanderson, 1995: 409). Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat lebih bersifat politis. Dengan demikian apa yang disebut maskulinitas dan feminitas merupakan hasil konstruksi sosiobudaya.

Teori Psikoanalisis (Identifikasi): Teori ini diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Melalui konsep *penis envy*, Freud mengatakan bahwa seumur hidupnya perempuan akan dihinggapi *histeris* dan *neurosis* karena mereka memendam rasa iri terhadap laki-laki. Teori feminis membantah bahwa perempuan iri akan status sosial laki-laki dan kebebasan bukanlah ciri biologis laki-laki. Misalnya *de Beauvoir* (Humm, 2002: 337) mendeskripsikan kecemburuhan akan penis ini sebagai menggambarkan kekecewaan perempuan akan hak istimewa laki-laki. Ketiadaan alat kelamin tersebut membuat perempuan mengalami *inferior complex*

Teori equilibrium (keseimbangan): menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Teori adaptasi awal: pada prinsipnya menyatakan bahwa adaptasi awal manusia merupakan dasar pembagian kerja secara seksual, sekaligus dasar subordinasi perempuan. Teori ini dibangun berdasarkan asumsi sebagai berikut:

1. Berburu sangat penting bagi kelangsungan nenek moyang kita.
2. Laki-lakilah yang hampir selalu melakukan kegiatan berburu.
3. Perempuan bergantung pada laki-laki untuk memperoleh daging.
4. Laki-laki berbagi daging buruannya terutama dengan istri-istri dan anak-anaknya.

5. Sekali pola pembagian berdasarkan jenis kelamin ini terbentuk, dia tidak berubah sampai sekarang.

Teori teknik lingkungan: teori ini didasarkan pada apa yang dianggap sebagai hukum alam, yaitu kelangkaan sumberdaya alam dan tekanan penduduk. Teori ini menjelaskan bahwa upaya untuk mengontrol pertumbuhan penduduk sudah terjadi sejak jaman dahulu. Dalam konteks ini pandangan mengenai perempuan berakar pada peran reproduktif mereka.

Teori Fungsionalis Struktural atau Teori Sistem Sosial: Teori ini dipelopori oleh Talcott Parson yang berangkat dari asumsi bahwa masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang relatif saling mempengaruhi. Teori ini menitikberatkan pada kestabilan bagi keseluruhan, yakni setiap bagian dalam masyarakat harus menguatkan posisi masing-masing. Penyimpangan yang melanggar norma akan melahirkan gejolak. Oleh karena itu, harmoni dan integrasi dipandang sebagai sesuatu yang fungsional, bernilai tinggi, dan harus dijalankan. Sedangkan konflik harus ditinggalkan.

Teori Konflik Sosial: Teori ini berangkat dari asumsi bahwa di dalam susunan suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Oleh karena itu, perbedaan posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan penindasan dari kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan suami dan istri tidak ubahnya dengan hubungan borjuis dan proletar, tuan dan hamba, pemeras yang diperas.

Teknik implementasi PUG menempuh strategi sebagai berikut: Penyediaan akses pendidikan yang bermutu, Penyediaan akses pendidikan, Peningkatan penyedia pelayanan pendidikan, Peningkatan koordinasi, informasi dan edukasi, *capacity building* pendidikan berwawasan gender. Dari beberapa teknik implementasi tersebut diharapkan mampu membawa perubahan pada tingkat keadilan dan kesetaraan gender yang nantinya akan berimbang pada peningkatan kualitas pendidikan.

Transformational Approach pada pendekatan ini tujuan, struktur, dan perspektif yang ada dalam kurikulum semuanya dirombak dan diganti dengan tujuan dan perspektif yang sensitif gender. Pengajaran dalam kurikulum ini dengan melihat mata kuliah yang ada kemudian silabinya diubah, baik dalam struktur, tujuan, dan perspektifnya yang berkaitan dengan isu-isu gender.

Trafiking: secara sederhana, trafiking adalah sebuah bentuk perbudakan modern. Kebanyakan korban trafiking adalah perempuan dan anak-anak. Mereka kebanyakan dari desa yang dirayu untuk ikut pergi ke kota besar atau ke luar negeri dengan janji diberi pekerjaan menarik seperti pelayan, penjaga toko, dan pekerja rumah tangga, tapi malah ditipu dan dipaksa ke dalam pekerjaan yang menyiksa atau bahkan prostitusi. Pada dasarnya siapa pun bisa menjadi korban trafiking.

United Nation Women yang disingkat *UN Women* adalah Entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan atau entitas PBB yang bekerja untuk memberdayakan perempuan dan anak-anak perempuan. *UN Women* menggantikan entitas sebelumnya, yaitu UNIFEM (Dana Pembangu-

nan PBB untuk Perempuan atau *United Nations Development Fund for Women*) dan juga merupakan anggota kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa.

Violence (Kekerasan): Berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan merupakan terjemahan dari *violence* artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan tetapi bersifat nonfisik seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik.

Woman Movement: Latar belakang perempuan Barat yang kelam, yang akhirnya memunculkan gerakan-gerakan perempuan yang menuntut hak dan kesetaraan dengan kaum laki-laki.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Prof. Dr. Hj. Yoce Aliah Darma, M.Pd. dilahirkan di Pandeglang (Banten) 74 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Mei 1943. Pengalaman pendidikan yang ditempuhnya, yaitu SR Cianjur lulus tahun 1955. SMPN Cianjur lulus tahun 1958, lalu melanjutkan ke SGA Bogor lulus tahun 1961.

Sarjana Muda IKIP Bandung lulus tahun 1964. Lulus S1 IKIP Bandung tahun 1971. Lulus S2 IKIP Bandung lulus tahun 1986. Lulus S3 IKIP Bandung tahun 2006. Pendidikan nonformal yang pernah diikuti, yaitu (1) kursus bahasa Inggris untuk peningkatan dosen IKIP Bandung tahun 1973 dan 1975; (2) kursus bahasa Inggris (terjemahan) di ITB tahun 1985; (3) kursus bahasa Inggris *Advance di Pow Colledge* tahun 1983.

Pengalaman bekerja dimulai tahun 1965 sebagai asisten dosen di Lembaga Penelitian IKIP Bandung dan langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil sampai pensiun dengan mengajar di S1 Prodi Bahasa & Sastra Indonesia, FPBS, UPI. Mata kuliah yang diampu adalah MKDU bahasa Indonesia, Prinsip-Prinsip Terjemahan, Terjemahan dan Interpretasi, Tata Wacana, Sejarah Kajian Linguistik Indonesia, Dialektologi, Ilmu Perbandingan Bahasa. Setelah lulus S3 mengajar di S2 dan S3 di Prodi Bahasa Indonesia Pascasarjana UPI. Mata kuliah yang diampu di S2 adalah Penelitian Studi Kasus, Penelitian Pendidikan, dan Problematik Pengajaran Bahasa & Sastra Indonesia, selanjutnya di S3 mengajar Analisis Wacana Kritis dan Etnografi Komunikasi. Selain mengajar di UPI 1965 - sekarang, mengajar juga di Sekolah

Guru Perawat tahun 1980-1982, di Fakultas Pertanian UNWIM tahun 1986-1994, dan di FKIP UNLA tahun 2001 sampai sekarang, di UNIBA tahun 2010 sampai sekarang, dan sesudah pensiun dari UPI diangkat sebagai Guru Besar tetap di UHAMKA, Jakarta, dari tahun 2009 sampai sekarang. Tahun 2010-sekarang diangkat sebagai Ketua Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak (PSGPA) UHAMKA. Jakarta.

Pengalaman penelitian: Ketua Pelaksana Pemberdayaan Perempuan *“Special Inisiatif Women Unemployment (SIWU)”*, tahun 2000; Hambatan Partisipasi Perempuan dalam Program Pembangunan, PSPW LEMLIT UPI, tahun 2001; Peluang Wanita Berperan Ganda dalam Keluarga sebagai Upaya Mendukung Kemitrasejajaran Pria dan Wanita di Kabupaten Bandung, DIKTI, tahun 2002; Persepsi Aparat Pemerintah Kota Bandung Mengenai Konsep Kesetaraan Gender dan Kebijakan Pengarusutamaan Gender, PSPW LEMLIT UPI, tahun 2002; Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender Di Propinsi Jawa Barat PSPW LEMLIT UPI, tahun 2003; Peranan Perempuan dalam Berorganisasi untuk Menunjang Keberhasilan Pembangunan Nasional PSPW LEMLIT UPI, tahun 2005; Kedudukan dan Peran Perempuan Di Sektor Formal PSPW LEMLIT UPI, tahun 2005; Bahan Ajar Mata Kuliah Masyarakat dan Kesenian Indonesia. Jurdiksastrasia FPBS UPI, tahun 2005; Model Pendidikan Pascabencana Di Daerah Longsoran Sampah TPA Leuwi Gajah Kec. Cilimus, LPM UPI, tahun 2005; Ketua dalam Penelitian Hibah Pasca DIKTI: “Pembelajaran Menulis Cerpen melalui Internet”, tahun 2007 dan 2008; Ketua dalam Penelitian Hibah Fundamental: Ideologi Gender dalam Karya Sastra Indonesia, tahun 2013; Ketua dalam Penelitian Pengabdian Masyarakat: “Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSGPA UHAMKA dalam Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan,” Ditjen Dikmas, tahun 2013.

Pengalaman menulis buku di antaranya menulis buku "Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Anak SD," tahun 2006; menulis buku " Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SMK," tahun 2007; menulis buku "Analisis Wacana Kritis," tahun 2009; menulis buku "Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif", tahun 2013; menulis buku "Menulis Karya Tulis Ilmiah," tahun 2015. Menulis buku Landasan Ilmu Pendidikan, tahun 2016.

Pengalaman menulis karya ilmiah di antaranya Gender, Kesetaraan Gender, dan Pengarusutamaan Gender, Artikulasi, Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia FPBS UPI, tahun 2003; Proses Pemahaman dalam Pembelajaran Penerjemahan, Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, FPBS UPI tahun 2003; Persepsi Aparat Pemerintah Kota Bandung Mengenai Konsep Kesetaraan Gender dan Kebijakan Pengarusutamaan Gender, Jurnal Penelitian Pendidikan Lembaga Penelitian UPI, tahun 2003; Perkembangan sejarah Feminisme di Indonesia, Jurnal Historia, FPIPS UPI, tahun 2007; Metode pembelajaran Penerjemahan, Jurnal Balitbang Diknas, tahun 2008; Hamka Merupakan Tokoh Bahasa Melayu sebagai bahasa Nusantara, tahun 2015, Jurnal Ilmu Pendidikan UPI Bandung.

Pengalaman sebagai panitia kegiatan ilmiah dan pembicara dalam seminar nasional dan internasional: Instruktur dan ketua pelaksana Program Khusus untuk Penganggur Wanita (*Special Initiative for Women Unemployment*) Propinsi Jawa Barat, 2000; Seminar Hasil Penelitian Tingkat Lembaga Penelitian UPI, 2000; Seminar Hasil Penelitian Tingkat UPI, 2000; Seminar Internasional Pendidikan Anak Dini Usia Balita sebagai Panitia Persidangan, 2001; Diskusi Panel Perempuan dan Media Massa, 2001; Orientasi Pengarusutamaan Gender bagi Pusat Studi Wanita Se-DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten di Bogor, 2001; Lokakarya Analisis Gender dengan menggunakan *Gender Analysis Pathway* dan *Policy Outlook and Plan of Action* di Solo, 2003; Lokakarya Penelitian

kekerasan terhadap Perempuan di Bali, 2003; Pembicara mengenai Gender, Kesetaraan Gender, dan Pengarusutamaan Gender pada Lokakarya PUS (Pendidikan untuk Semua) Se-Jawa Barat, Bandung, 2003; Lokakarya Internasional : ICA ROAP ILO COOPNET Trainers Training Programme for Leadership Development of Women in Cooperatives, Lapankop Nasional, Bandung, 2004; Lokakarya Nasional: *Menata Langkah Kebersamaan untuk meningkatkan Kualitas Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak di Provinsi Jawa Barat, Health Services Program (HSP)* bersama USAID, Bandung, 2006; Lokakarya Usulan Penelitian Dikti, Bandung, 2006; Pembicara dalam seminar internasional Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Serantau Di USM Pulau Penang, Malaysia, tahun 2006; Sebagai pembicara dalam seminar internasional Dialek Bahasa-bahasa Daerah Banten di Universitas Brunei Darussalam, Brunei, tahun 2007. Pembicara dalam Seminar internasional Femina Femiesta di UM Kuala Lumpur, Malaysia, tahun 2008; Pembicara dalam Seminar Nasional Pascasarjana Prodi Bahasa Indonesia UHAMKA dengan judul "Tokoh Hamka Dalam Kajian Sejarah Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Nusantara," tahun 2011. Pembicara dalam Seminar Nasional Prodi Bahasa Indonesia FKIP UHAMKA, dengan judul Peranan Pembelajaran Bahasa Dalam Pendidikan Karakter, tahun 2012. Pembicara dalam Seminar dalam rangka Ultah Buya Hamka dengan Judul Tokoh Hamka Dalam Kajian Sejarah Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Nusantara di UKM, Bangi, Malaysia, tahun 2012. Ketua Panitia Lokakarya Penelitian Berwawasan Gender, tahun 2011; Ketua Panitia Simposium Peranan Perempuan dalam "Pendidikan dan Pembentukan Karakter Bangsa", tahun 2013. Pembicara dalam Seminar Internasional Bahasa Melayu Serantau di Pulau Penang dengan judul "Ideologi Gender dalam Sastra Indonesia, tahun 2014; Ketua Seminar Internasional "Multiliterasi Yang Berwawasan Gender", tahun 2016



Sri Astuti, M.Pd., Dr., Lulus S1 di Program Studi Pendidikan Dunia Usaha Tata Perkantoran IKIP Muhammadiyah Jakarta tahun 1992, Lulus S2 tahun 2000 dan S3 tahun 2009 di Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Saat ini adalah dosen tetap Program Studi Manajemen Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Mengampu mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan, Metodologi Penelitian pada S.Ps. Uhamka, dan Literasi Gender, Administrasi Supervisi Pendidikan di beberapa Program Studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Uhamka. Saat ini mengemban amanah sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP UHAMKA, Direktur Kurikulum Lab School Uhamka dan Sekretaris Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak (PSGPA) UHAMKA. Aktif menjadi Narasumber Nasional di beberapa Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi untuk Percepatan Pengarusutamaan Gender dan Implementasi Perguruan Tinggi Responsif Gender serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender di Perguruan Tinggi. Selain itu, sebagai ketua tim penyusun beberapa buku Panduan terkait Pengarusutamaan Gender, Keadilan dan Kesetaraan Gender.

Dengan bimbingan dan petunjuk Allah swt. kami berusaha membuat buku tentang Literasi Gender, yang isinya diusahakan berisi pemahaman, kupasan, dan pengembangan, tentang gender ditinjau dari sudut pandang ilmiah. Kami kupas secara sederhana dan dengan bahasa yang mudah dipahami tentang apa itu Literasi gender. Literasi gender dalam buku ini ingin memberikan tambahan wawasan kepada semua pembaca untuk mencerahkan pemahaman tentang gender dalam arti memahami seluk-beluk apa itu gender, apa yang disebut kesetaraan gender, keadilan gender, bias gender, pengarusutamaan gender dan lain-lain. Kami ingin buku ini menjadi pegangan para dosen yang mengampu mata kuliah tentang wawasan gender dan maha-siswa yang mengikuti perkuliahan ini .

Penerbit

Langgam Pustaka

naskah@langgampustaka.com
www.langgampustaka.com
Tasikmalaya, Jawa Barat.



Langgam Pustaka



@langgampustaka



0821-2742-4881

Kajian Penelitian

ISBN 978-623-7461-87-6



9 786237 464976